BANK INDONESIA

SINERGI MENUJU INDONESIA YANG LEBIH KUAT DAN BERDAYA TAHAN



PERTEMUAN TAHUNAN
BANK INDONESIA 2026



DAFTAR ISI

I. Kinerja dan Prospek Ekonomi dan Keuangan Global: Ketidakpastian Global Meningkat 6

- Ketidakpastian Global Meningkat 7
- Tantangan Perekonomian Global 12

II. Kinerja dan Prospek Ekonomi Nasional: Ekonomi Berdaya Tahan, Stabilitas Terjaga 16

- Momentum Penguatan Ekonomi Berlanjut 18
- Sinergi Kebijakan Menopang Ketahanan Ekonomi 29

III. Bauran Kebijakan Bank Indonesia 2026: Memperkuat Stabilitas, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 30

- Konsepsi Bauran Kebijakan Bank Indonesia 31
- Kebijakan Moneter 35
- Kebijakan Makroprudensial 42
- Kebijakan Sistem Pembayaran 48
- Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing 55
- Inklusi Ekonomi, Inklusi Keuangan, dan Keuangan Berkelanjutan serta Ekonomi Keuangan Syariah 62
- Kebijakan Internasional 67
- Kebijakan Kelembagaan Bank Indonesia 70

IV. Sinergi Kebijakan Ekonomi: Transformasi untuk Lebih Kuat dan Berdaya Tahan 74

- Sinergi Kebijakan untuk Ekonomi Lebih Kuat 74
  - **Sinergi Menjaga Stabilitas Makroekonomi dan Sistem Keuangan** 75
  - **Sinergi Memperkuat Ketahanan Eksternal** 77
  - **Sinergi Mendorong Pembiayaan Perekonomian** 79
  - **Sinergi Meningkatkan Kapasitas dan Produktivitas Perekonomian** 80
  - **Sinergi Mengembangkan Ekonomi Daerah yang Inklusif** 81
- Strategi untuk Mendorong Pertumbuhan Lebih Tinggi 84
  - **Strategi Penguatan Regulasi** 84
  - **Strategi Penajaman Kebijakan Sektoral** 85
  - **Strategi Perluasan Pembiayaan** 86
- Penguatan Kebijakan Hilirisasi SDA 87
- Perekonomian Jangka Menengah Menguat 91

V. Arah Bauran Kebijakan Bank Indonesia Tahun 2027: Menjaga Stabilitas, Mendukung Pertumbuhan 91

- Arah Kebijakan Moneter 92
- Arah Kebijakan Makroprudensial 95
- Arah Kebijakan Sistem Pembayaran 100
- Kebijakan Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing 105
- Kebijakan Inklusi Ekonomi, Inklusi Keuangan, dan Keuangan Berkelanjutan serta Kebijakan Ekonomi Keuangan Syariah 110
- Kebijakan Internasional 112
- Kebijakan Kelembagaan Bank Indonesia 113

VI. Melangkah ke Depan dengan Optimisme dan Kewaspadaan: Sinergi Menuju Indonesia yang Lebih Kuat dan Berdaya Tahan 116



SINERGI MENUJU INDONESIA YANG LEBIH KUAT DAN BERDAYA TAHAN

Pidato Gubernur Bank Indonesia
PERTEMUAN TAHUNAN BANK INDONESIA

Jakarta, 27 November 2026

Yang terhormat,
Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto,

- Pimpinan dan Anggota MPR, DPR, dan DPD RI,
- Pimpinan Lembaga Negara,
- Para Duta Besar dan Perwakilan Negara Sahabat,
- Para Menteri Kabinet Merah Putih,
- Dewan Komisioner OJK dan LPS,
- Pendahulu kami dan rekan Dewan Gubernur Bank Indonesia,
- Para Gubernur Kepala Daerah,
- Pimpinan Perbankan, Korporasi, Media Nasional,
- Undangan yang berbahagia.

> **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,**
> **Salam Sejahtera untuk kita semua, Syalom,**
> **Om Swastyastu, Namo Buddhaya,**
> **Salam Kebajikan.**

Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan rida-Nya, kita bisa bersilaturahmi dalam kondisi sehat wal'afiat. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang berkenan hadir, beserta para undangan. Sekaligus memberikan arahan kepada kami.

Sebelumnya, perkenankan kami menyampaikan pemikiran tentang prospek ekonomi dan arah kebijakan Bank Indonesia tahun 2027, yang bertajuk **"Sinergi Menuju Indonesia yang Lebih Kuat dan Berdaya Tahan".** Sebelumnya, kami akan menyampaikan kondisi perekonomian Indonesia tahun 2026 yang patut kita syukuri tetap berdaya tahan dengan stabilitas terjaga, di tengah tingginya ketidakpastian global. Capaian positif ekonomi domestik diperoleh atas sinergi kebijakan yang erat antara Pemerintah dan Bank Indonesia. Bank Indonesia konsisten dari waktu ke waktu mengawal perjalanan dan kemajuan bangsa sesuai dengan mandat yang diberikan Undang-Undang dalam menjaga stabilitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Boks: Bank Indonesia Melintasi Masa). Konsistensi kebijakan ditempuh dengan memperkuat bauran kebijakan Bank Indonesia agar tetap responsif dan adaptif terhadap dinamika perekonomian, termasuk dengan memperkuat peran 46 Kantor Perwakilan Bank Indonesia di berbagai daerah.

Pemaparan kami mencakup 5 (lima) bagian. *Pertama*, evaluasi kinerja dan prospek ekonomi global. *Kedua*, evaluasi kinerja dan prospek ekonomi nasional. *Ketiga*, laporan dan evaluasi bauran kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia sepanjang 2026 untuk memperkuat stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi. *Keempat*, sinergi kebijakan ekonomi yang perlu ditempuh Pemerintah dan Bank Indonesia untuk tumbuh lebih kuat dan berdaya tahan. *Kelima*, arah bauran kebijakan Bank Indonesia pada 2027 untuk menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan. **Penjelasan ini sekaligus sebagai pemenuhan akuntabilitas dan transparansi Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Bank Indonesia.**

BANK INDONESIA MELINTASI MASA

Bank Indonesia terus berevolusi untuk selalu ada di setiap makna Indonesia. Sejak resmi berdiri pada 1 Juli 1953, mandat dan peran Bank Indonesia terus disesuaikan agar selaras dengan dinamika dan tantangan perekonomian. Pada masa ekonomi terpimpin di tahun 1965, Bank Indonesia diintegrasikan sebagai BNI Unit I. Kelembagaan Bank Indonesia sebagai bank sentral kemudian diperkuat melalui UU No. 13 Tahun 1968, sebagai respons atas tantangan terhadap stabilitas ekonomi pada tahun 1966. Perubahan ini mempertegas tugas Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas moneter dan mendukung pembangunan nasional.

Berbagai kebijakan ditempuh Bank Indonesia untuk memperkuat efektivitas pencapaian tujuan yang diamanatkan UU No. 13 Tahun 1968. Bank Indonesia mengembangkan instrumen pengendalian moneter dan mendorong modernisasi sistem perbankan dan keuangan. Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) pada 1984 menjadi tonggak pengembangan instrumen operasi moneter berbasis pasar. Deregulasi perbankan pada 1983 dan 1988 juga ditempuh untuk mengakselerasi dan memperkuat peran perbankan dalam mendukung perekonomian.

Pada tahun 1999, Bank Indonesia melalui UU No. 23 Tahun 1999 mendapat mandat untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Dalam mandat ini, inflasi menjadi sasaran akhir kebijakan sebagaimana kerangka kebijakan *Inflation Targeting Framework*, yang menjadi prasyarat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Masa ini juga ditandai dengan pengalihan fungsi pengawasan mikroprudensial perbankan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada akhir 2013. Bank Indonesia kemudian berfokus pada kebijakan makroprudensial untuk turut serta dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

Pengabdian Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas berlanjut dengan penguatan UU Bank Indonesia melalui UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) serta perubahannya melalui UU No. 4 Tahun 2026. Perubahan ini semakin menegaskan pentingnya menjaga stabilitas nilai Rupiah, sistem pembayaran, dan sistem keuangan sebagai fondasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, termasuk menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif bagi sektor riil dan penciptaan lapangan kerja. Pencapaian tujuan ditempuh melalui penguatan bauran kebijakan moneter, kebijakan sistem pembayaran, dan kebijakan makroprudensial serta ditopang berbagai kebijakan pendukung. Sinergi kebijakan dengan Pemerintah dan otoritas terkait menjadi bagian tidak terpisahkan dalam bauran kebijakan ini. Bank Indonesia terus memperkuat pengabdiannya, termasuk selalu hadir di berbagai penjuru Nusantara melalui 46 Kantor Perwakilan.

Ke depan, Bank Indonesia akan terus mengiringi perjalanan dan kemajuan ekonomi bangsa dengan menjaga stabilitas sebagai prasyarat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia senantiasa memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran agar tetap responsif dan adaptif terhadap kebutuhan perekonomian nasional. Bank Indonesia akan terus bertransformasi menjadi bank sentral yang kredibel dalam menjaga stabilitas, yang berkontribusi nyata dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

I. Kinerja dan Prospek Ekonomi dan Keuangan Global: Ketidakpastian Global Meningkat

Ketidakpastian yang meningkat akibat meluasnya konflik geopolitik menekan perekonomian global. Kondisi geopolitik dunia yang kian memanas seiring perang antara Amerika Serikat (AS)–Israel dan Iran sejak akhir Februari 2026, di tengah masih berlanjutnya perang Rusia dan Ukraina, terus meningkatkan ketidakpastian global (Grafik 1). Ketidakpastian yang tinggi menurunkan pertumbuhan ekonomi dunia, meningkatkan tekanan inflasi dan menaikkan ketidakpastian pasar keuangan global serta menekan mata uang negara berkembang. Kompleksitas perekonomian global semakin tinggi karena pada saat bersamaan mengalami fragmentasi rantai pasok yang dipicu ketidakpastian kebijakan perdagangan, terutama yang bersumber dari kebijakan tarif AS.

Tekanan terhadap ekonomi global dapat sedikit tertahan sejalan perkembangan positif di bidang *Artificial Intelligence* (AI), meskipun belum meluas ke banyak negara. Akselerasi AI mendorong investasi tinggi pada pusat data, semikonduktor, perangkat lunak dan peralatan teknologi di berbagai negara produsen teknologi dan negara dalam rantai nilai ekosistem digital. Sebagai gambaran, Taiwan dan Korea Selatan menguasai sekitar 62% dari ekspor neto global perangkat komputasi terkait AI, sementara Tiongkok dan AS menyumbang lebih dari 75% impor neto global (Grafik 2). Perkembangan ini berdampak positif pada negara-negara penghasil komoditas, komponen, dan jasa pendukung AI, meskipun beberapa aspek dalam jangka pendek dan menengah juga perlu menjadi perhatian. Hal ini karena kenaikan investasi AI dapat meningkatkan harga energi sejalan naiknya permintaan energi dan meluasnya persaingan geopolitik ke penguasaan semikonduktor, mineral kritis, data, dan teknologi strategis.

Dengan berbagai dinamika tersebut, perekonomian dunia dalam tren melambat dengan tekanan harga yang meningkat. Pertumbuhan ekonomi dunia pada 2026 diprakirakan mencapai 3,1%, melambat dibandingkan dengan pertumbuhan 2025 sebesar 3,5%, sebagai dampak dari meningkatnya ketidakpastian global tersebut. Inflasi 2026 juga meningkat menjadi 4,6%, dari sebelumnya 3,5% pada 2025. Ketidakpastian pasar keuangan global juga meningkat yang berdampak pada berkurangnya aliran modal ke negara berkembang dan melemahnya mata uang negara berkembang, termasuk Indonesia. Pada 2027, pertumbuhan ekonomi dunia diprakirakan meningkat menjadi

Grafik 1. Indeks Ketidakpastian Pasar Keuangan Global

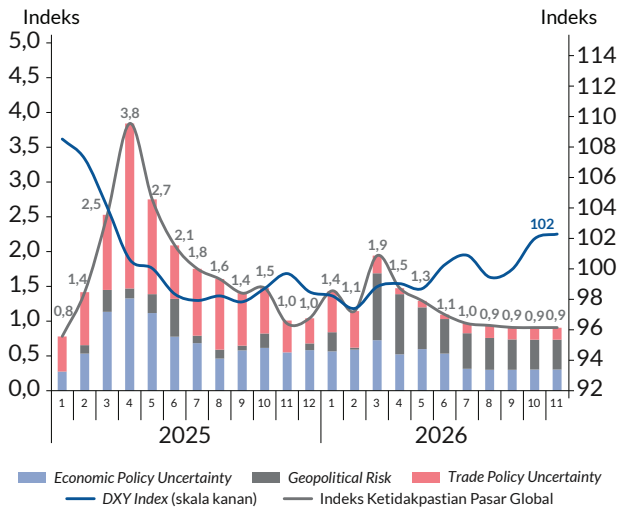

Keterangan: Indeks ketidakpastian dibentuk menggunakan PCA
Sumber: Perhitungan Bank Indonesia

Grafik 2. Konsentrasi Rantai Pasok Terkait AI

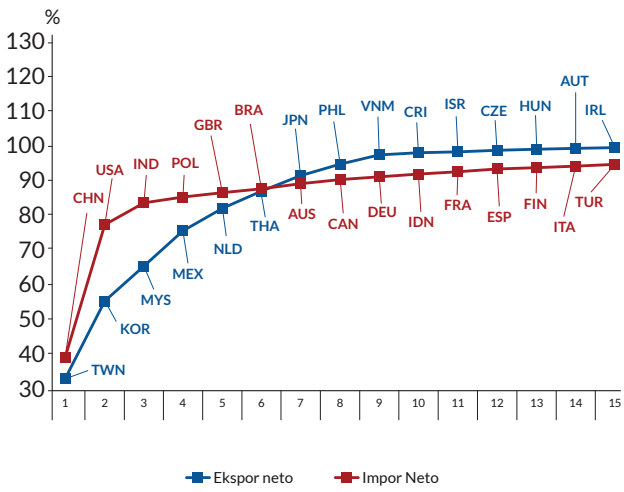

Sumber: IMF, World Economic Outlook (WEO) Oktober 2026

3,4% dipengaruhi dampak kuat dari perkembangan positif di bidang AI dan prakiraan berkurangnya intensitas konflik geopolitik. Sementara itu, inflasi 2027 diprakirakan masih tinggi 3,9%, meskipun sedikit melambat dibandingkan kondisi 2026.

Ke depan, perkembangan konflik geopolitik yang tidak menentu serta tantangan ekonomi lain perlu menjadi perhatian karena tetap dapat mendorong ketidakpastian dan menekan ekonomi dunia. Lima tantangan perlu menjadi perhatian ke depan, yakni berkaitan dengan risiko geopolitik yang terus memanas, kebijakan proteksionisme yang berlebihan, beban utang publik yang membesar, suku bunga global yang berlanjut tinggi dan risiko yang bersumber dari AI. Kelima tantangan yang saling berkaitan dan berinteraksi tersebut dapat meningkatkan kembali ketidakpastian ekonomi global. Ketidakpastian yang perlu terus dicermati dan direspons dengan tepat karena dapat kembali menekan prospek ekonomi global dan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi negara berkembang, termasuk Indonesia.

Ketidakpastian Global Meningkat

Peningkatan ketidakpastian global dipicu oleh konflik di Timur Tengah. Konflik yang pecah pada awal tahun 2026 terus berlanjut dan berlangsung meluas dengan dampak yang melebar. Gencatan senjata yang terjadi pada April 2026 dan kesepakatan sementara pada Juni 2026 sempat meredakan ketegangan. Tetapi, eskalasi ketegangan konflik kembali meningkat sejak Juli 2026, yang bahkan terus berlanjut hingga Oktober 2026 dengan perkembangan perundingan yang belum menghasilkan kesepakatan permanen. Akibatnya, perang terus berlanjut, yang tidak hanya menargetkan serangan terhadap sarana militer, tetapi juga terarah pada fasilitas infrastruktur energi dan transportasi di kawasan. Serangan terhadap kapal dan fasilitas energi terus berlangsung dan meluas yang menimbulkan gangguan pelayaran di Selat Hormuz yang strategis sebagai jalur bagi distribusi pasokan minyak dunia (Grafik 3).

Grafik 3. Perkembangan Jumlah Kapal Tanker di Hormuz

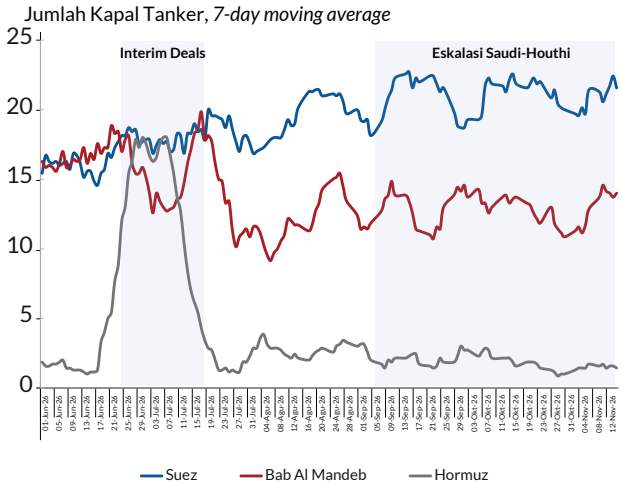

Keterangan: Data s.d. 16 November 2026
Sumber: Bloomberg

Konflik di Timur Tengah berdampak pada memburuknya kinerja perekonomian global melalui 3 (tiga) jalur utama. *Pertama*, melalui jalur komoditas karena konflik telah mendorong kenaikan harga komoditas akibat terganggunya pasokan, distribusi dan logistik komoditas. Kondisi ini meningkatkan harga minyak, gas, pupuk, dan pangan, yang kemudian merambat ke berbagai komoditas nonenergi lain. *Kedua*, melalui jalur perdagangan karena konflik telah menurunkan aktivitas perdagangan barang dan jasa dunia seiring terganggunya rantai pasok barang dan penerbangan, yang tidak hanya menurunkan pasokan barang tetapi juga meningkatkan biaya angkutan dan asuransi. *Ketiga*, melalui jalur finansial karena konflik meningkatkan volatilitas pasar keuangan global dipicu meningkatnya preferensi investor terhadap aset aman serta ekspektasi terhadap arah kebijakan moneter global, yang berdampak kepada berkurangnya aliran modal ke negara berkembang.

Perang di Timur Tengah menimbulkan gangguan produksi dan distribusi minyak, yang kemudian memicu kenaikan harga minyak sangat tinggi. Harga minyak Brent meningkat signifikan sejak dimulainya konflik, dengan level tertinggi mencapai 144,46 dolar AS per barel (7 April 2026) (Grafik 4). Kesepakatan sementara antara Amerika Serikat (AS) dan Iran pada Juni 2026 sempat menurunkan harga minyak hingga 68,1 dolar AS per barel (2 Juli 2026). Namun, eskalasi

Grafik 4. Indeks Harga Minyak dan Komoditas Lainnya

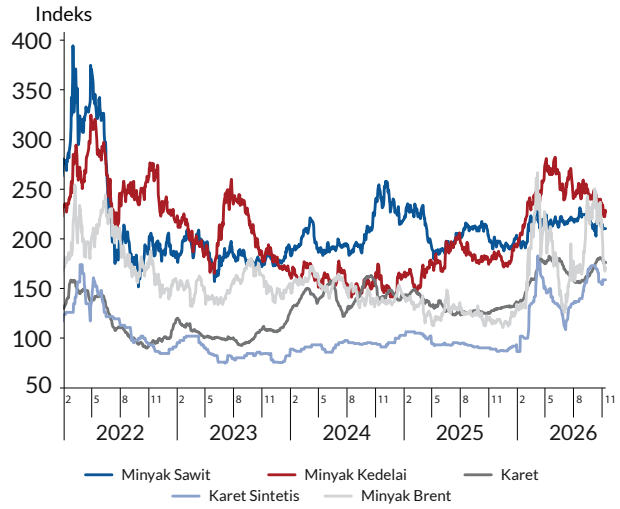

Sumber: Bloomberg, diolah

ketegangan yang kembali naik kembali mendorong tingginya harga minyak Brent, yang pada Oktober 2026 menembus 135 dolar AS per barel, dan diikuti biaya pengapalan dan premi asuransi energi yang bertahan tinggi.

Kenaikan harga minyak merambat juga pada kenaikan harga komoditas substitusi minyak dan harga nonenergi lain. Harga komoditas gas alam cair dan batu bara sebagai sumber energi substitusi meningkat tinggi hingga masing-masing mencapai 33,0 dolar AS per MMBtu dan 79,6 dolar AS per ton metrik. Harga komoditas nonenergi seperti pupuk, sulfur, minyak sawit, dan karet juga meningkat sejalan dengan kenaikan biaya input (Grafik 5). Perkembangan yang sama terjadi di berbagai harga pangan dunia yang juga meningkat sejalan dampak konflik geopolitik serta pengaruh kekeringan di berbagai negara akibat fenomena El Niño.

Grafik 5. Perkembangan Risiko Geopolitik dan Harga Pangan

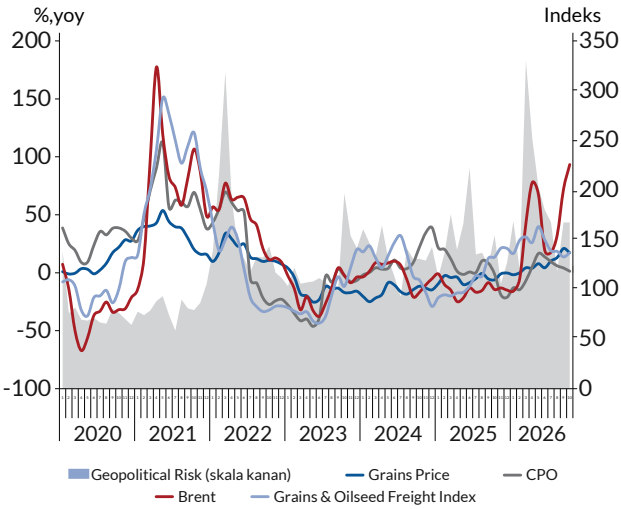

Sumber: Caldara & Iacoviello (2022), IGC, Bloomberg, diolah

Sejumlah negara menempuh berbagai langkah untuk menahan dampak tekanan harga energi. Respons ditempuh antara lain dengan mengalihkan rute pasokan, menggunakan stok yang tersedia, meningkatkan ekspor melalui jaringan pipa alternatif, melakukan transfer antarkapal, dan mempercepat substitusi ke sumber energi lain. Namun, pasokan bahan bakar untuk transportasi dan industri tetap ketat, khususnya di Asia dan Eropa. Keketatan pasokan dipengaruhi berkurangnya kemampuan diversifikasi pasokan dan ketersediaan cadangan energi serta sempitnya ruang fiskal. Negara pengimpor energi dengan ruang fiskal terbatas menghadapi tekanan paling besar karena harus menyeimbangkan kebutuhan menjaga daya beli, mempertahankan kesinambungan fiskal, dan memastikan ketersediaan energi bagi kegiatan produksi.

Gangguan pasokan serta peningkatan ketidakpastian mengakibatkan pertumbuhan ekonomi dunia 2026 diprakirakan melambat menjadi 3,1% dari 3,5% pada 2025. Perlambatan ekonomi terjadi baik di kelompok negara maju maupun negara berkembang. Perbedaan pertumbuhan ekonomi antarnegara akan dipengaruhi oleh ruang fiskal dan moneter yang masih dimiliki, keterkaitan dengan pemanfaatan dan mata rantai AI, dan karakteristik negara sebagai eksportir atau importir komoditas. Perbedaan karakteristik dan kerentanan antarnegara tersebut menyebabkan prospek pertumbuhan ekonomi global yang terfragmentasi. Divergensi pola pertumbuhan antarnegara berlanjut, dengan ekonomi negara maju tumbuh melambat dari 2,0% pada 2025 menjadi 1,7% pada 2026 dan pertumbuhan negara berkembang diprakirakan turun dari 4,5% menjadi 3,9% pada 2026 (Tabel 1).

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi Dunia: Negara Maju dan Negara Berkembang (%, yoy)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026*	2027*
Dunia	**3,6**	**3**	**-2,7**	**6,7**	**3,8**	**3,3**	**3,5**	**3,5**	**3,1**	**3,4**
Negara Maju	**2,3**	**1,9**	**-3,9**	**6,2**	**3**	**1,7**	**2**	**2**	**1,7**	**1,9**
Amerika Serikat	3	2,6	-2,1	6,3	2,4	2,9	3	2,3	2,3	2,3
Kawasan Eropa	1,8	1,7	-6	6,4	3,7	0,4	1,2	1,2	1	1,3
Jepang	0,8	-0,3	-4,3	3,6	1,2	0,9	0,1	1,2	0,7	0,8
Negara Berkembang	**4,6**	**3,8**	**-1,8**	**7**	**4,1**	**4,4**	**4,5**	**4,5**	**3,9**	**4,3**
Tiongkok	6,8	6,1	2,3	8,6	3,1	5,4	5	5	4,6	4,1
India	7,3	4,8	-6,6	8,3	6,8	7,7	6,5	7,5	7,5	6,9
ASEAN-5	4,9	4,2	-4,4	4,1	5,5	4,1	4,8	4,5	4,1	4,5
Amerika Latin	1,1	0,2	-6,9	7,5	4,4	2,4	2,4	2,5	2,4	2,8
Negara Berkembang Eropa	3,7	2,6	-1,7	7,2	0,5	3,6	3,9	2	1,9	2,2
Timur Tengah & Asia Tengah	2,5	2,1	-2,2	4,7	6,4	2,6	3	3,7	1,8	5,5

Sumber: WEO-IMF, Bank Indonesia

Keterangan: *Proyeksi Bank Indonesia

Pertumbuhan ekonomi dunia diprakirakan meningkat menjadi 3,4% pada 2027 seiring dengan meredanya ketidakpastian global dan berlanjutnya peran kuat AI dalam menopang pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini diharapkan dapat meningkatkan keyakinan rumah tangga dan pelaku usaha yang pada gilirannya dapat meningkatkan konsumsi dan investasi. Perdagangan dunia juga akan meningkat yang mendukung peran ekspor dalam mendorong pertumbuhan. Selain itu, divergensi pola pertumbuhan antarnegara maju diprakirakan membaik menjadi 1,9% pada 2027 ditopang oleh ekonomi Kawasan Eropa dan Jepang. Sementara itu, pertumbuhan negara berkembang diprakirakan membaik pada 2027 menjadi 4,3% didorong pertumbuhan Timur Tengah & Asia Tengah, ASEAN-5 dan Amerika Latin (Tabel 1).

Pertumbuhan ekonomi negara maju secara umum melambat pada 2026. Perbedaan pola pertumbuhan antarnegara maju dipengaruhi oleh perilaku dampak positif AI dan tekanan kenaikan harga energi. Pertumbuhan ekonomi Uni Eropa diprakirakan turun akibat berlanjutnya ketegangan geopolitik dan kebijakan tarif, dari 1,2% pada 2025 menjadi 1,0% pada 2026 dan kemudian membaik menjadi 1,3% pada 2027. Pertumbuhan ekonomi Jepang diprakirakan juga melambat pada 2026 dan 2027 masing-masing menjadi 0,7% dan 0,8% akibat tingginya harga energi dan kekhawatiran terhadap kesinambungan fiskal Pemerintah Jepang. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi AS tetap solid ditopang oleh investasi terkait AI dan konsumsi, yang diprakirakan tetap dari 2,3% pada 2025 dan bertahan 2,3% pada 2026 dan 2027 (Grafik 6).

Grafik 6. Permintaan AI di AS

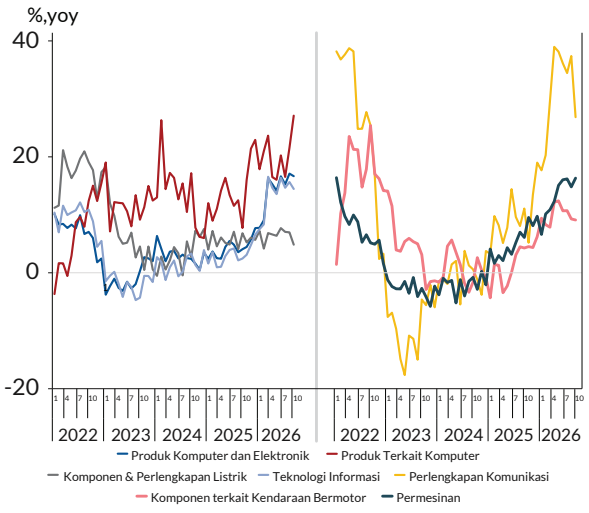

Sumber: CEIC, diolah

Perekonomian negara berkembang juga melambat dengan divergensi yang melebar. Perlambatan pertumbuhan ekonomi terutama terjadi di Tiongkok dan India, sedangkan ekonomi ASEAN-5 (Indonesia, Filipina, Malaysia, Tailan, dan Singapura) lebih berdaya tahan. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok menurun dari 5,0% pada 2025 menjadi 4,6% pada 2026 dan diprakirakan terus menurun ke 4,1% pada 2027. Tekanan pelemahan di Tiongkok utamanya disebabkan pelemahan konsumsi domestik sedangkan kinerja terkait barang modal dan manufaktur berteknologi tinggi menunjukkan resiliensi (Grafik 7). Pertumbuhan ekonomi India diprakirakan tetap 7,5% pada 2025 dan 2026, sebelum menurun ke 6,9% pada 2027. Penurunan pertumbuhan ekonomi India tidak hanya dipengaruhi oleh *shock* harga energi, namun juga akibat gangguan cuaca karena fenomena El Niño. Berbeda dengan Tiongkok dan India, kinerja ekonomi ASEAN-5 (Indonesia, Filipina, Malaysia, Tailan, dan Singapura) tumbuh sebesar 4,1% pada 2026 dan terus meningkat ke 4,5% pada 2027, ditopang aktivitas di bidang *data center* dan siklus teknologi global serta kenaikan harga komoditas.

Berbagai negara merespons tekanan perlambatan pertumbuhan ekonomi dengan memperkuat stimulus fiskal. Kebijakan fiskal di negara maju diarahkan untuk meredam dampak kenaikan harga energi dan mendorong aktivitas ekonomi domestik. Negara berkembang juga memperkuat kebijakan fiskal guna meredam dampak kenaikan harga pangan dan energi terhadap perekonomian domestik. Namun demikian, ruang fiskal tersebut makin terbatas sejalan kebutuhan belanja yang terus meningkat serta utang publik dan biaya pembiayaan yang tinggi. Sementara negara berkembang yang tidak dapat memanfaatkan kenaikan harga komoditas dan menjadi bagian dari rantai nilai teknologi serta merupakan pengimpor energi, akan lebih kesulitan menghadapi tantangan global. Dukungan fiskal pada negara berkembang juga semakin terbatas akibat kenaikan beban utang yang lebih tinggi.

Inflasi global meningkat sejalan konflik di Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga komoditas dunia dan fragmentasi perdagangan global yang membatasi fleksibilitas pasokan. Kenaikan tekanan inflasi pada 2026 tidak hanya berasal dari dampak langsung kenaikan harga bahan bakar dan listrik, tetapi juga dari kenaikan biaya angkutan, pupuk, bahan baku industri, dan komoditas pangan (Grafik 8). Inflasi global diprakirakan naik menjadi sekitar 4,6% pada 2026 dan kembali menurun pada 2027 menjadi 3,9%. Di negara maju, inflasi diprakirakan mencapai 3,4% pada 2026 dan menurun menjadi 2,4% pada 2027. Kenaikan inflasi 2026 di negara maju juga dipengaruhi dampak tingginya kebutuhan energi dan bahan baku untuk mendukung investasi di

Grafik 7. Perkembangan Ekspor Tiongkok

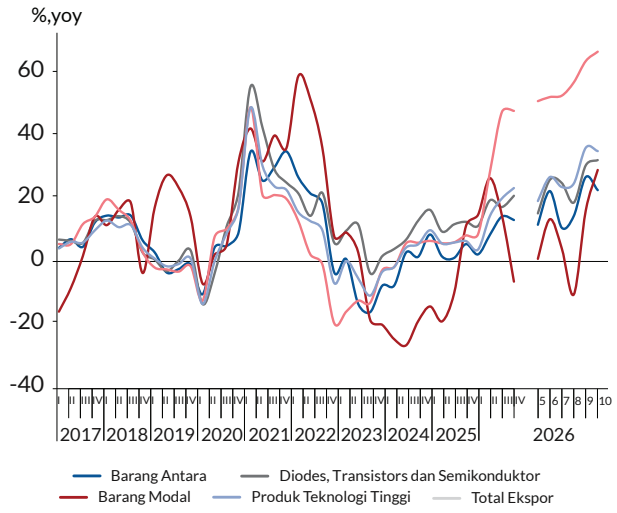

Sumber: Bank Indonesia, diolah dari berbagai sumber

Grafik 8. Perkembangan Inflasi Global

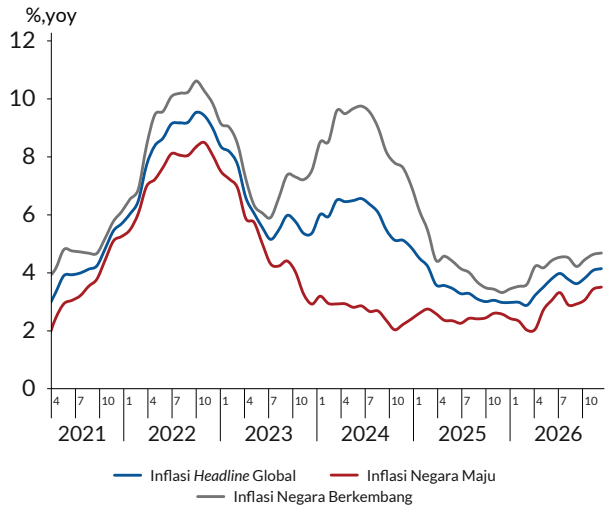

Keterangan: Data per akhir Oktober 2026
Sumber: Bloomberg dan IMF, diolah

sektor AI. Sementara itu, inflasi negara berkembang diprakirakan lebih tinggi, yaitu 5,3% pada 2026 dan 4,9% pada 2027. Dampak kenaikan harga komoditas global terhadap inflasi di negara berkembang cenderung lebih cepat sejalan dengan besarnya pangsa pangan dan energi dalam keranjang konsumsi serta besarnya dampak pelemahan nilai tukar terhadap inflasi.

Inflasi yang meningkat berdampak pada respons berbagai bank sentral untuk kembali menempuh kebijakan moneter ketat. Pada 2026, berbagai bank sentral di negara maju dan berkembang telah meningkatkan suku bunga kebijakannya seperti di AS, Eropa, Jepang, Korea Selatan, India, dan Filipina (Tabel 2). Kebijakan moneter ketat ini diprakirakan berlanjut hingga 2027 (*higher for longer*) sejalan tetap tingginya tekanan inflasi. Bank sentral AS menaikkan Fed Funds Rate (FFR) sebesar 25 basis poin pada September 2026 dengan ruang peningkatan kembali yang masih terbuka. European Central Bank (ECB) diprakirakan menaikkan suku bunga pada Desember 2026 dan pada triwulan I 2027. Bank of Japan juga diprakirakan menaikkan suku bunga pada Desember 2026 dan Maret 2027. Reserve Bank of India turut diprakirakan melanjutkan kenaikan suku bunga. Sementara itu, arah kebijakan People's Bank of China lebih akomodatif sejalan dengan lemahnya permintaan domestik. Ruang pelonggaran moneter global diprakirakan mulai terbuka pada 2028 ketika tekanan inflasi mulai mendekati sasaran.

FFR yang bertahan tinggi serta defisit fiskal AS yang terus meningkat berdampak pada naiknya *yield* US Treasury, yang sempat mencapai level tertinggi 5,35% di Oktober 2026. Kenaikan ini terutama didorong oleh meningkatnya premi risiko akibat ketegangan geopolitik dan ketidakpastian fiskal AS. Tekanan terhadap *yield* obligasi pemerintah juga meningkat akibat persaingan penyerapan dana dengan penerbitan obligasi korporasi untuk membiayai ekspansi AI. Pangsa perusahaan *hyperscaler* dalam penerbitan obligasi korporasi global berperingkat investasi meningkat dari di bawah 1% pada akhir 2024 menjadi sekitar 10% hingga Juli 2026 (Grafik 9). Kombinasi suku bunga kebijakan yang tinggi, pasokan surat utang pemerintah yang besar, dan risiko inflasi yang persisten menyebabkan biaya dana global menjadi tetap mahal.

Ketidakpastian global yang tinggi serta kenaikan suku bunga dan *yield* di negara maju, menahan aliran modal ke negara berkembang dan meningkatkan volatilitas pasar keuangan global. Investor cenderung mempertahankan penempatan pada aset negara maju *(safe haven asset)*, baik obligasi

Tabel 2. Suku Bunga Kebijakan Moneter: Negara Maju dan Negara Berkembang (%)

	2025	2026		
		Tw. I	Tw. II	Tw. III
Negara Maju				
Federal Reserve (FED)	3,75	3,75	3,75	4,00
European Central Bank (ECB)	2,00	2,00	2,25	2,50
Bank of England (BOE)	3,75	3,75	3,75	3,75
Bank of Japan (BOJ)	0,75	0,75	1,00	1,25
Negara Berkembang				
People's Bank of China (PBoC)	1,40	1,40	1,40	1,40
Bank of Korea (BOK)	2,50	2,50	2,50	3,00
Reserve Bank of India (RBI)	5,25	5,25	5,25	5,25
Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP)	4,50	4,25	4,75	5,00

Sumber: Bank Indonesia, diolah dari berbagai sumber

Grafik 9. Eksposur Saham dan Utang Terkait AI

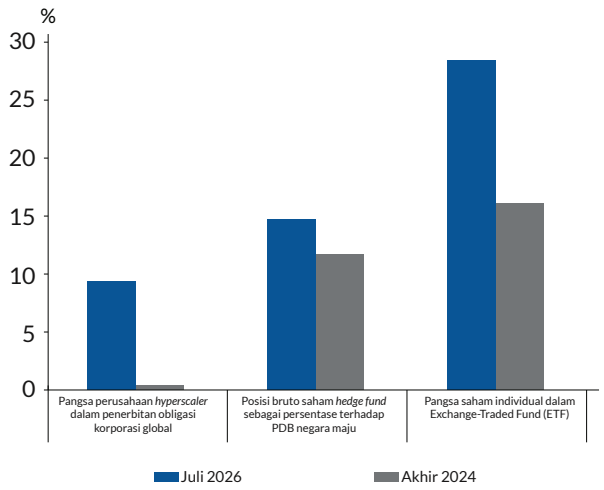

Sumber: IMF Global Financial Stability Report (GFSR) 2026

maupun saham sektor teknologi. Sebaliknya, aliran modal ke saham dan obligasi negara berkembang tertahan, bahkan mencatat arus keluar, utamanya pada aset saham dan pasar uang (Grafik 10). Negara berkembang dengan fundamental kuat masih dapat menarik modal, tetapi alirannya semakin selektif dan sensitif terhadap perbedaan imbal hasil, kredibilitas kebijakan, kecukupan cadangan devisa, serta kedalaman pasar keuangan domestik. Secara keseluruhan, kondisi aliran modal ini mendorong indeks dolar AS tetap kuat dan premi risiko negara berkembang kembali meningkat (Grafik 11).

Tantangan Perekonomian Global

Ke depan, setidaknya terdapat lima tantangan yang perlu menjadi perhatian karena dapat memengaruhi prospek ekonomi global dan akhirnya juga ekonomi domestik. Tantangan berkaitan dengan risiko geopolitik yang terus memanas, kebijakan proteksionisme yang berlebihan, beban utang publik yang membesar, suku bunga global yang berlanjut tinggi, dan risiko yang bersumber dari AI. Kelima tantangan yang saling berkaitan dan berinteraksi, membuat ketidakpastian ekonomi dunia masih tinggi. Eskalasi perang serta kebijakan proteksionisme dapat menaikkan inflasi, memperlebar fragmentasi ekonomi dunia, memicu pengetatan moneter, meningkatkan beban fiskal dan mendorong ketidakpastian di pasar keuangan dunia, termasuk akibat risiko AI yang tidak sesuai harapan.

Pertama, risiko dari ketegangan geopolitik yang berlanjut lebih lama dari prakiraan. Konflik di Timur Tengah yang belum mencapai penyelesaian permanen dan perang Rusia-Ukraina yang belum menemui tanda penyelesaian, masih menjadi risiko. Ketegangan geopolitik yang terus berlangsung dapat mengganggu jalur produksi dan pasokan serta distribusi komoditas strategis. Risiko gangguan pasokan terutama bersumber dari terbatasnya produksi energi dan komoditas lainnya, terhambatnya jalur perdagangan,

Grafik 10. Aliran Modal Negara Berkembang (kecuali Tiongkok)

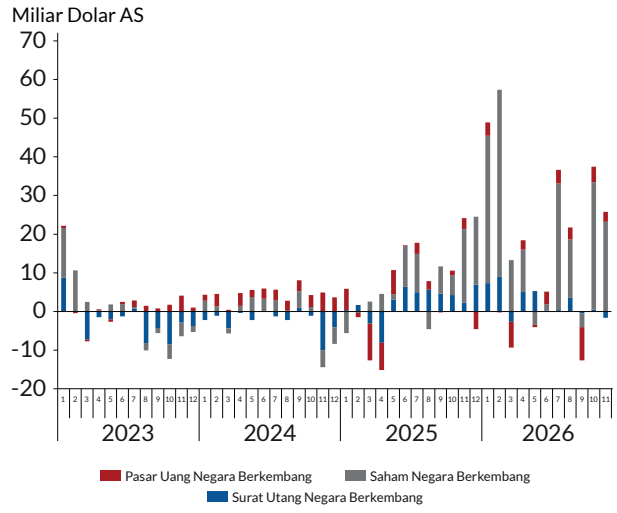

Sumber: EPFR

Grafik 11. Indikator Risiko Global

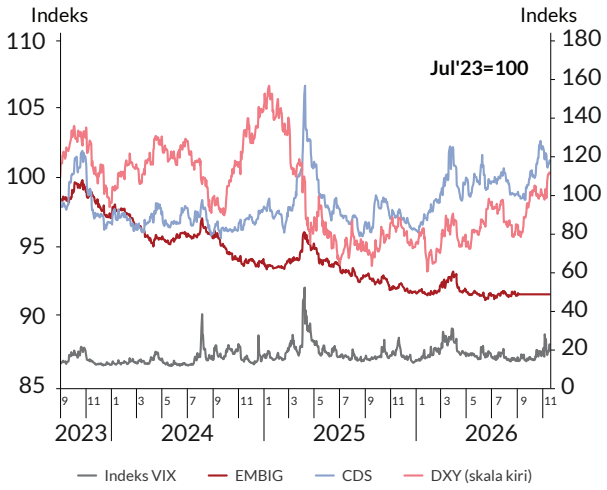

Keterangan: Data per 18 November 2026
Sumber: Bloomberg

Grafik 12. Aktivitas Perdagangan Global per Kawasan

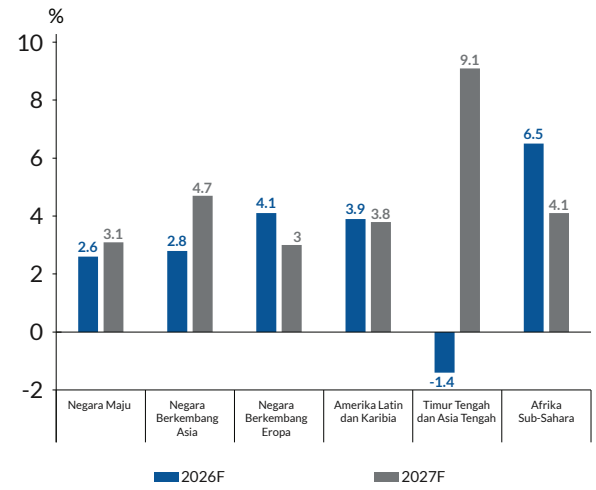

Sumber: IMF WEO Database, diolah

Grafik 13. Biaya Pengapalan Melalui Transportasi Kapal

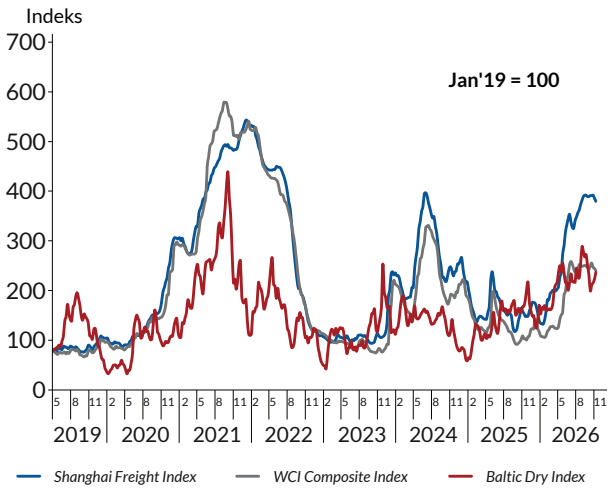

Sumber: Bloomberg, diolah

serta meningkatnya biaya logistik (Grafik 12). Di Timur Tengah, belum tercapainya kesepakatan permanen antara AS dan Iran serta berlanjutnya ancaman terhadap infrastruktur energi dan jalur pelayaran strategis, terutama Selat Hormuz dan Bab Al Mandeb, menyebabkan pemulihan pasokan masih rapuh. Pasokan akan makin terhambat jika diikuti gangguan jalur distribusi yang dapat menahan arus pasokan minyak, gas, dan produk olahan. Kondisi ini dapat makin meningkatkan biaya angkutan, premi asuransi, dan waktu pengiriman ke berbagai produk, yang mendorong kenaikan harga pupuk, pangan, dan bahan baku industri karena produksi berbagai komoditas bergantung pada pasokan energi dan kelancaran logistik global. Risiko yang sama juga mengemuka dari dampak perang Rusia-Ukraina yang belum selesai sehingga dapat meningkatkan risiko pasokan energi, biji-bijian, dan pupuk melalui gangguan produksi dan jalur perdagangan Laut Hitam.

Berbagai upaya yang telah ditempuh untuk meminimalkan risiko terhadap pasokan dan distribusi komoditas, secara umum belum menunjukkan dampak positif yang signifikan. Upaya mitigasi melalui pengalihan rute, penggunaan persediaan, peningkatan aliran melalui jaringan pipa alternatif, dan substitusi energi hanya mampu menahan sebagian tekanan karena kapasitas alternatif yang masih terbatas dengan biaya yang masih tinggi (Grafik 13). Berbagai kondisi tersebut menyebabkan harga energi dan komoditas belum dapat turun dan disertai dengan peningkatan fluktuasi sehingga ketidakpastian pasokan bagi kegiatan produksi dan perdagangan global masih terus meningkat. Dampaknya akan lebih besar pada negara pengimpor energi dan pangan karena akan meningkatkan inflasi, beban subsidi dan tekanan eksternal.

Kedua, kebijakan proteksionisme guna menjaga kepentingan domestik di tengah ketegangan geopolitik. Kebijakan proteksionisme merupakan persaingan antarnegara untuk meminimalkan dampak dari ketegangan geopolitik serta pertimbangan keamanan ekonomi dan kepentingan strategis domestik. Kebijakan ditempuh baik melalui kebijakan perdagangan maupun kebijakan industri. Kebijakan ini perlu menjadi perhatian karena dapat mendorong fragmentasi perdagangan dan investasi global, menurunkan efisiensi alokasi sumber daya, dan melemahkan kerja sama multilateral. Polarisasi ekonomi dapat mendorong negara-negara untuk semakin mengutamakan kerja sama bilateral dan regional berdasarkan kepentingan ekonomi dan strategis masing-masing. Akibatnya, fragmentasi global berpotensi semakin luas, tidak hanya pada perdagangan barang, tetapi juga pada investasi, teknologi, energi, dan rantai pasok komoditas utama. Tekanan inflasi akan makin tinggi, yang sebelumnya

Grafik 14. Survei Prospek Inflasi Global

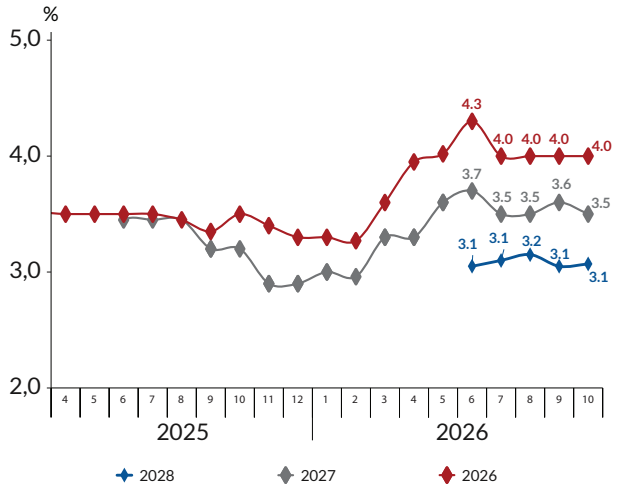

Sumber: Bloomberg

telah dibebani dampak meningkatnya harga komoditas, khususnya energi, akibat ketegangan geopolitik (Grafik 14).

Ketiga, beban utang publik yang meningkat yang memicu risiko kesinambungan fiskal. Risiko ini terlihat sejak periode COVID-19 yang meningkatkan utang publik, baik di negara maju maupun negara berkembang. Peningkatan stimulus fiskal dalam beberapa tahun terakhir untuk belanja sosial dan pertahanan di banyak negara serta pengeluaran untuk transformasi energi dan teknologi, telah mendorong posisi utang pemerintah di banyak negara tetap tinggi. Di negara berkembang, rasio utang pemerintah secara agregat meningkat dari di bawah 40% PDB pada 2010 menjadi sekitar 70% PDB pada 2025 dan 2026 (Grafik 15). Perkembangan ini kemudian diikuti beban pembayaran bunga yang meningkat dari sekitar 7% penerimaan pemerintah pada 2010 menjadi sekitar 11% pada 2025. Secara keseluruhan kondisi ini meningkatkan kerentanan utang di berbagai negara berkembang. Pangsa negara berpendapatan rendah dan menengah yang berada dalam risiko tinggi mengalami *debt distress*, meningkat dari sekitar 26% pada 2015 menjadi sekitar 50% pada 2026.

Beban utang yang meningkat menjadi semakin kompleks karena akan dibarengi kenaikan beban bunga. Di tengah suku bunga global yang bertahan tinggi, utang yang jatuh tempo harus dibiayai kembali pada tingkat bunga yang lebih mahal dibandingkan dengan bunga sebelumnya sejalan kenaikan premi risiko yang mendorong kenaikan imbal hasil obligasi jangka panjang. Di negara berkembang, khususnya negara dengan tingkat utang yang tinggi dan ruang fiskal yang terbatas, naiknya utang pemerintah dapat meningkatkan persepsi risiko, memperlebar *sovereign yield spread*, serta mendorong kenaikan biaya pembiayaan (Grafik 16). Risiko dapat semakin menguat dipicu tingginya *yield* obligasi negara maju yang menjadi salah satu acuan bagi pembentukan

Grafik 15. Utang Publik Negara Maju dan Negara Berkembang

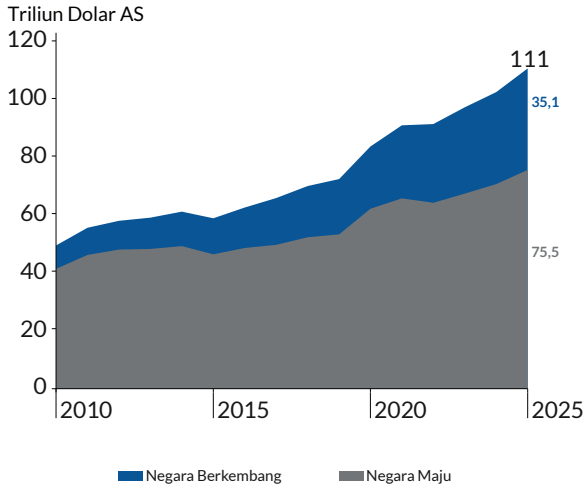

Sumber: UNCTAD

Grafik 16. Suku Bunga Utang Publik Negara Maju dan Negara Berkembang

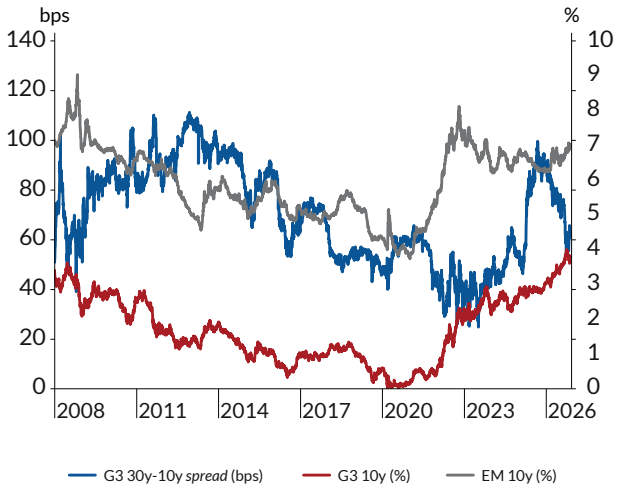

Sumber: Bloomberg, diolah

biaya pembiayaan global. Secara keseluruhan, perkembangan ini berpotensi mengurangi ruang fiskal untuk membiayai belanja produktif serta meningkatkan risiko rambatan terhadap stabilitas pasar keuangan dan pertumbuhan ekonomi global.

Keempat, suku bunga global yang tetap tinggi (*higher for longer*), yang mendorong tetap kuatnya dolar AS. Risiko ini sejalan dengan inflasi yang belum kembali ke sasaran seiring kenaikan harga energi dan komoditas serta gangguan pasokan akibat eskalasi konflik geopolitik. Hal ini menyebabkan ruang pelonggaran kebijakan moneter bagi bank sentral menjadi lebih terbatas. Pada saat yang sama, fragmentasi perdagangan, kebijakan tarif dan kenaikan biaya logistik turut meningkatkan biaya produksi dan memperlambat proses disinflasi global. Kondisi ini berisiko pada tetap tingginya suku bunga kebijakan negara maju termasuk FFR. Risiko suku bunga menjadi semakin besar karena saat bersamaan, utang publik terus meningkat yang mendorong imbal hasil obligasi pemerintah di negara maju tetap pada level tinggi.

Suku bunga global yang tinggi, terutama FFR, dapat memicu berlanjutnya penguatan dolar AS. Hal ini karena ketidakpastian pasar keuangan yang tinggi akan meningkatkan premi risiko negara berkembang dan mendorong investor mengalokasikan dananya secara lebih selektif kepada negara dengan fundamental eksternal, kredibilitas kebijakan, dan imbal hasil yang lebih kuat. Bagi negara berkembang dengan kebutuhan pembiayaan eksternal yang besar, tingginya suku bunga dan kuatnya dolar AS akan meningkatkan biaya pembiayaan dan risiko pembiayaan kembali, menekan nilai tukar, serta memperbesar tekanan inflasi dari barang impor. Tekanan dari arus modal juga dapat meningkat apabila kenaikan suku bunga dan *yield* di negara maju mempersempit *yield differential* dengan negara berkembang sehingga mengurangi daya tarik strategi *carry trade* (Grafik 17). Secara keseluruhan, risiko era suku bunga tinggi tidak hanya menahan pemulihan ekonomi global, tetapi juga meningkatkan kerentanan pasar keuangan akibat risiko pembalikan arus

Grafik 17. Indeks Dolar AS vs Perbedaan Suku Bunga Negara EM-AS

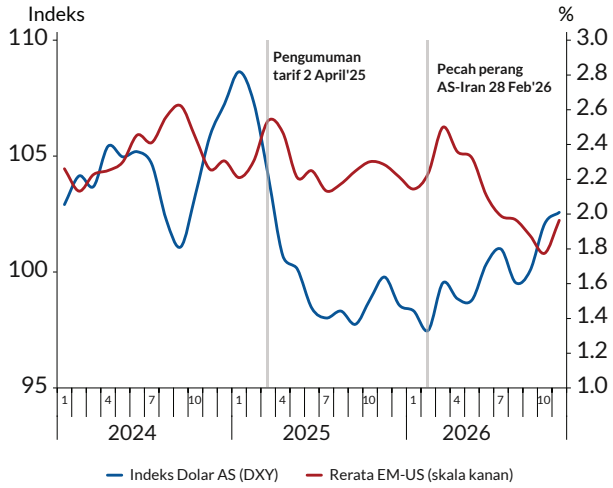

Sumber: Bloomberg, diolah

modal dan dapat meningkatkan biaya pembiayaan eksternal yang pada akhirnya menahan investasi dan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang.

Kelima, risiko yang bersumber dari perkembangan AI karena dapat membuat fragmentasi pertumbuhan antarnegara melebar, tekanan inflasi global yang lebih tinggi, dan volatilitas pasar keuangan global yang meningkat. Asesmen menunjukkan manfaat investasi dan adopsi AI cenderung terkonsentrasi pada negara maju dan negara yang memiliki kapasitas komputasi, infrastruktur pusat data, pasokan energi, industri semikonduktor, dan keterhubungan yang kuat dengan rantai nilai teknologi global. Kondisi ini berisiko memperlebar kesenjangan pertumbuhan dengan negara yang tertinggal dalam penguasaan teknologi. Selain itu, perkembangan AI juga berisiko meningkatkan inflasi. Hal ini karena, satu sisi, lonjakan investasi AI akan meningkatkan permintaan energi, infrastruktur listrik, konstruksi, sistem pendingin, semikonduktor, *memory chips*, *server*, dan berbagai input teknologi lainnya. Namun sisi lain, peningkatan permintaan tersebut berisiko mendorong kenaikan harga energi dan biaya produksi, karena kapasitas pasokan yang masih terkonsentrasi dan membutuhkan waktu untuk ditingkatkan.

Risiko bersumber dari pesatnya perkembangan AI juga berkaitan dengan pertumbuhan perdagangan perangkat keras AI yang lebih banyak didorong oleh kenaikan harga dibandingkan dengan peningkatan volume. Dalam skenario *Capacity Constraints* WEO Oktober 2026, harga ekspor barang teknologi Asia di luar Tiongkok dapat meningkat sekitar 10% dari *baseline*, bahkan mencapai 40% pada eksportir teknologi kelas atas. Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena dapat meningkatkan tekanan inflasi dan berimplikasi pada kembali mengetatnya kebijakan moneter global, khususnya di negara pengimpor (Grafik 18). Sementara itu, profitabilitas perusahaan AI yang lebih rendah dari perkiraan dan jenis investasi AI yang tidak bertahan lama, dapat memicu koreksi di harga aset terkait AI di tengah peningkatan *leverage*, konsentrasi eksposur termasuk di dalamnya konsentrasi pembiayaan. Risiko ini menjadi perlu dicermati karena dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan saat terjadi koreksi berlebihan di aset terkait AI.

Kelima tantangan global tersebut perlu menjadi perhatian karena dapat menurunkan prospek negara berkembang, termasuk Indonesia. Tantangan dapat kembali meningkatkan ketidakpastian global yang telah mengemuka pada 2026. Ketidakpastian yang tetap tinggi, harga energi dan biaya input yang mahal, suku bunga global yang bertahan tinggi, serta aliran modal yang tertahan, dapat menyebabkan pembiayaan eksternal menjadi lebih mahal dan bergejolak. Kenaikan biaya impor energi dan bahan baku dapat menekan neraca perdagangan, meningkatkan biaya produksi, dan memperbesar risiko inflasi. Pada saat yang sama, pertumbuhan dunia yang tidak merata menurunkan kepastian permintaan ekspor karena perbaikan terutama terkonsentrasi pada negara dan sektor yang terkait dengan teknologi. Kelima tantangan tersebut juga dapat kembali meningkatkan ketidakpastian di pasar keuangan global. Tingginya *yield* global dan kuatnya dolar AS dapat memicu risiko arus keluar portofolio dari negara berkembang yang meningkatkan tekanan nilai tukar dan mendorong kenaikan biaya pembiayaan pemerintah dan korporasi.

Grafik 18. Dampak AI terhadap Inflasi dengan Berbagai Skenario

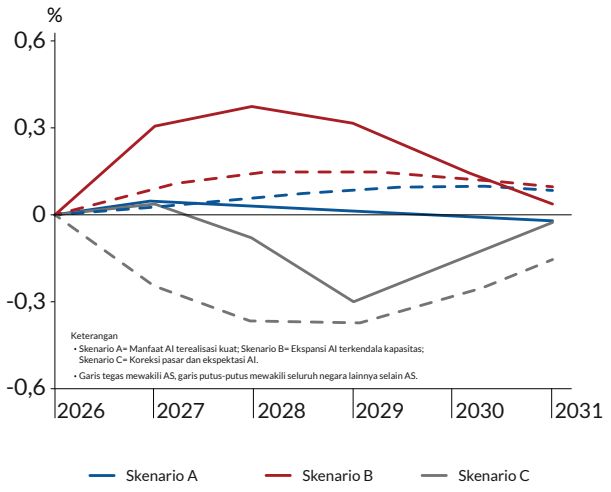

Sumber: IMF WEO

Dinamika, prospek, dan risiko global perlu direspons dengan sinergi bauran kebijakan dan terus mendorong transformasi ekonomi untuk mendorong ekonomi tumbuh lebih kuat dan berdaya tahan. Transformasi ekonomi diarahkan untuk mempercepat Indonesia mencapai negara maju dan memperkuat kemandirian ekonomi karena lingkungan global yang semakin terfragmentasi dan rentan terhadap berbagai gejolak, termasuk dampak lanjutan konflik geopolitik. Strategi transformasi ekonomi setidaknya perlu diarahkan untuk memperkuat ketahanan eksternal sebagai prasyarat ekonomi dapat tumbuh tinggi dan berkelanjutan. Transformasi juga untuk mendorong investasi pada sektor produktif terutama industri dan hilirisasi guna meningkatkan kapasitas perekonomian jangka menengah panjang yang terintegrasi dengan rantai pasok global, serta memperkuat fondasi faktor produksi melalui akumulasi kapital, peningkatan kualitas tenaga kerja serta produktivitas perekonomian.

II. Kinerja dan Prospek Ekonomi Nasional: Ekonomi Berdaya Tahan, Stabilitas Terjaga

Ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan dengan stabilitas terjaga di tengah tingginya ketidakpastian global. Dinamika ekonomi 2026 menunjukkan momentum pertumbuhan ekonomi terus berlanjut, ditopang oleh stabilitas ekonomi yang terjaga. Pertumbuhan ekonomi sampai dengan triwulan III

2026 mencapai 5,45% (ctc), meningkat dibandingkan dengan capaian 2025 sebesar 5,01% (ctc), ditopang stimulus fiskal yang memitigasi perlambatan ekonomi global. Inflasi terkendali dalam sasaran 2,5±1% dengan inflasi IHK pada Oktober 2026 mencapai 3,23% (yoy), ditopang inflasi inti yang tetap terjaga di bawah 3,00% (yoy), yakni 2,56% (yoy) pada Oktober 2026. Sektor eksternal tetap terjaga baik di tengah tekanan global, dengan defisit transaksi berjalan pada level yang sehat dalam kisaran defisit 2,1-1,3% PDB dan ditopang kecukupan cadangan devisa. Nilai tukar Rupiah yang bergerak pada level fundamental didukung komitmen Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah sehingga konsisten mendukung pencapaian sasaran inflasi. Selain itu, stabilitas sistem keuangan tetap kuat dan intermediasi perbankan meningkat sehingga kredit 2026 diprakirakan bergerak dalam kisaran 8,0-12,0% (yoy), didukung pembiayaan kepada sektor produktif dan program Pemerintah.

Kinerja perekonomian Indonesia selama lima tahun terakhir menunjukkan ketahanan dan termasuk salah satu yang terbaik di antara negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pascapandemi COVID-19 tercatat solid dan konsisten tumbuh di atas 5% (Tabel 3). Rerata pertumbuhan ekonomi Indonesia pascapandemi bahkan termasuk yang paling tinggi di antara negara EMEs. Stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan juga terjaga dengan baik, dengan inflasi tetap terkendali dalam kisaran sasaran dan nilai tukar Rupiah terjaga sesuai fundamental. Kinerja sektor eksternal juga terjaga baik, dengan defisit transaksi berjalan yang rendah, didukung surplus neraca perdagangan nonmigas, dan cadangan devisa yang terjaga di atas standar kecukupan internasional. Demikian pula, stabilitas sistem keuangan terjaga dengan kecukupan permodalan (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) perbankan yang tinggi di atas 20%, mendukung pertumbuhan kredit. Kinerja positif ekonomi Indonesia juga diiringi ekosistem pembayaran digital yang berkembang pesat dan menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Capaian positif kinerja ekonomi domestik di tengah kondisi global yang menurun diperoleh atas sinergi kebijakan yang erat antara kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan sektor riil. Kebijakan menjaga stabilitas sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi dilakukan secara terukur, tanpa mengorbankan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi yang masih berada di bawah kapasitas potensialnya. Permintaan domestik diperkuat melalui kebijakan peningkatan belanja Pemerintah dalam bentuk belanja investasi publik, program prioritas, serta berbagai paket stimulus, yang tetap menjaga kredibilitas dan kesinambungan fiskal sehingga defisit APBN dijaga di bawah 3% dari PDB dan rasio utang

Tabel 3. Kinerja Perekonomian Indonesia

Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
Pertumbuhan Ekonomi	%yoy	3,70	5,31	5,05	5,03*	5,11**
Transaksi Berjalan	%PDB	0,30	1,00	-0,15	-0,62	-0,09*
Defisit Fiskal	%PDB	-4,57	-2,35	-1,61	-2,29	-2,81
Inflasi IHK	%yoy	1,87	5,51	2,61	1,57	2,92
Nilai Tukar Rupiah	IDR/USD (rerata)	14.296	14.873	15.247	15.841	16.475
Suku Bunga BI-Rate	%	3,50	5,50	6,00	6,00	4,75
Kredit Perbankan	%yoy	5,24	11,35	10,38	10,39	9,69
Modal Perbankan (CAR)	%	25,67	25,63	27,66	26,65	25,89

Sumber: BPS, Bank Indonesia

Keterangan: *Angka Sementara; **Angka Sangat Sementara

Pemerintah di kisaran 40% dari PDB. Penguatan sektor ekonomi strategis juga dilakukan untuk mendorong sisi penawaran melalui hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) yang diakselerasi bersama Danantara. Investasi penguatan infrastruktur dan konektivitas dilakukan melalui sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN). Pertumbuhan ekonomi juga dirasakan masyarakat luas lewat berbagai program pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kualitas SDM.

Prospek perekonomian Indonesia pada 2027 diprakirakan akan terus menguat. Momentum pertumbuhan ekonomi diprakirakan berlanjut dan meningkat dalam kisaran 5,2-6,0%. Peningkatan ditopang berlanjutnya penguatan domestik serta membaiknya ekspor sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dunia. Inflasi juga tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1% didukung konsistensi kebijakan Bank Indonesia menjaga stabilitas. Defisit neraca transaksi berjalan juga tetap dalam kisaran yang sehat dalam menjaga ketahanan eksternal dan mendorong pertumbuhan ekonomi, yakni defisit 1,9-1,1% PDB. Kredit/ pembiayaan perbankan juga akan meningkat dalam kisaran 9,0-13,0% dengan tetap ditopang stabilitas sistem keuangan yang tetap terjaga. Sejalan dengan itu, aktivitas ekonomi keuangan digital juga meningkat yang dapat makin memperkuat produktivitas dan efisiensi perekonomian.

Momentum Penguatan Ekonomi Berlanjut

Peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia berlanjut pada 2026. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai dengan triwulan III 2026 mencapai 5,45% (ctc), dengan dinamika pertumbuhan triwulanan yang dalam tren meningkat. Pada triwulan I dan II 2026, pertumbuhan ekonomi masing-masing tercatat 5,61% (yoy) dan 5,29% (yoy) dan meningkat kembali pada triwulan III 2026 menjadi 5,47% (yoy). Di tengah kondisi global yang menurun, perkembangan ini banyak ditopang oleh permintaan domestik terutama melalui dorongan stimulus fiskal Pemerintah. Konsumsi Pemerintah pada triwulan I, II, dan III 2026 tumbuh tinggi masing-masing sebesar 21,81% (yoy), 15,97% (yoy), dan 8,95% (yoy), didukung oleh belanja antara lain bantuan pangan, subsidi upah, dan stimulus lainnya untuk mendorong peningkatan mobilitas masyarakat. Berbagai stimulus tersebut turut mendukung daya beli dan konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga tetap menjadi penyumbang terbesar, didukung stimulus fiskal dan keyakinan rumah tangga yang membaik. Investasi meningkat terutama ditopang investasi Pemerintah, termasuk melalui Danantara, dan investasi swasta melalui PMA dan PMDN yang tumbuh lebih dari 12% secara kumulatif hingga triwulan III 2026. Sementara itu, kontribusi kinerja ekspor menurun sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat. Secara keseluruhan, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi 2026 berada dalam kisaran 4,9–5,7% (Tabel 4).

Tabel 4. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia - Sisi Pengeluaran (%, yoy)

Komponen	2024*	2025**	2026***			2026^{P}	2027^{P}
			I	II	III		
Pertumbuhan Ekonomi	**5,03**	**5,11**	**5,61**	**5,29**	**5,47**	**4,9-5,7**	**5,2-6,0**
- Konsumsi Swasta	4,94	4,98	5,52	5,06	5,04	4,7-5,5	5,2-6,0
- Konsumsi Pemerintah	6,76	2,50	21,81	15,97	8,95	11,2-12,0	4,7-5,5
- Investasi	4,61	5,09	5,96	6,87	6,06	5,9-6,7	7,1-7,9
- Ekspor	6,85	7,03	0,88	4,07	4,59	3,8-4,6	7,7-8,5
- Impor	8,15	4,77	6,25	9,34	7,31	7,5-8,3	8,9-9,7

Sumber: BPS, Bank Indonesia

Keterangan: *Angka Sementara; **Angka Sangat Sementara; ***Angka Sangat Sangat Sementara; ^{P}Proyeksi Bank Indonesia

Ketahanan permintaan domestik dan peran stimulus fiskal menopang pertumbuhan sebagian besar sektor ekonomi. Lapangan Usaha (LU) Perdagangan, Konstruksi, serta berbagai sektor jasa tumbuh kuat, sementara Industri Pengolahan tetap menjadi penopang utama (Tabel 5). Pertumbuhan LU Perdagangan yang tinggi mengonfirmasi konsumsi swasta, belanja Pemerintah, dan pembelian barang investasi tetap kuat. Dorongan belanja Pemerintah dan konsumsi swasta terkait mobilitas menopang kinerja LU Akomodasi dan Makan Minum. Kinerja sektor jasa modern seperti LU Informasi dan Komunikasi, serta LU Jasa Keuangan menguat sejalan dengan akselerasi digitalisasi. Kinerja positif sektor jasa perlu terus didorong untuk mendukung peningkatan produktivitas.

Tabel 5. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia - Sisi Lapangan Usaha (%, yoy)

Sektor	2024*	2025**	2026***			2026^{P}	2027^{P}
			I	II	III		
Pertumbuhan Ekonomi	**5,03**	**5,11**	**5,61**	**5,29**	**5,47**	**4,9 – 5,7**	**5,2 - 6,0**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,67	5,33	4,97	3,80	0,46	2,5 – 3,3	7,0 - 7,8
Pertambangan dan Penggalian	4,90	-0,66	-2,14	-1,64	0,91	-0,7 – 0,1	4,3 - 5,1
Industri Pengolahan	4,43	5,30	5,04	4,52	5,87	4,8 – 5,6	5,5 - 6,3
Pengadaan Listrik dan Gas	4,77	3,10	-0,99	10,81	8,00	5,8 – 6,6	3,9 - 4,7
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,56	0,94	0,42	0,03	0,28	0,5 – 1,3	6,1 - 6,9
Konstruksi	7,02	3,81	5,49	6,68	6,42	5,8 – 6,6	7,5 - 8,3
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,86	5,49	6,26	6,39	7,14	6,1 – 6,9	5,5 - 6,3
Transportasi dan Pergudangan	8,69	8,78	8,04	5,65	8,03	7,2 – 8,0	12,8 - 13,6
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,56	7,41	13,14	10,60	11,22	11,0 – 11,8	6,6 - 7,4
Informasi dan Komunikasi	7,57	8,35	7,14	6,97	7,13	7,0 – 7,8	10,3 - 11,1
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,74	3,96	4,68	3,11	8,47	5,5 – 6,3	9,2 - 10,0
Real Estat	2,50	3,58	3,54	3,64	4,10	3,4 – 4,2	3,1 - 3,9
Jasa Perusahaan	8,38	9,10	4,91	5,08	6,77	5,8 – 6,6	6,6 - 7,4
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan	6,40	3,86	6,45	6,89	4,67	4,8 – 5,6	3,8 - 4,6
Jasa Pendidikan	3,75	4,99	5,18	5,92	4,63	4,9 – 5,7	8,0 - 8,8
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,11	5,59	7,62	6,88	6,97	6,0 – 6,8	2,0 - 2,8
Jasa Lainnya	9,80	9,93	9,91	6,36	8,32	7,9 – 8,7	7,8 - 8,6

Sumber: BPS, Bank Indonesia

Keterangan: *Angka Sementara; **Angka Sangat Sementara; ***Angka Sangat Sangat Sementara; ^{P}Proyeksi Bank Indonesia

Kinerja LU Industri Pengolahan tetap kuat karena mendapat dukungan permintaan ekspor (antara lain CPO, logam dasar, produk kimia), kelanjutan hilirisasi, maupun program swasembada energi B50. Hilirisasi SDA perlu terus diperkuat untuk mendorong industrialisasi yang lebih merata, dengan membangun rantai pasok domestik, termasuk memperluas keterlibatan UMKM. Pada saat yang bersamaan produktivitas dan keterampilan tenaga kerja pada sektor-sektor padat karya seperti LU Pertanian, LU Perdagangan, dan LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, perlu terus ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, meningkatkan akses pembiayaan, serta menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan berkualitas. Sinergi pengembangan sektor utama perlu terus diperkuat untuk memastikan keseimbangan antara peningkatan kapasitas produksi dan penciptaan lapangan kerja, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia didukung kuatnya kinerja perekonomian di hampir seluruh wilayah. Pada triwulan III 2026, pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat di wilayah Bali dan Nusa Tenggara (Balinusra) sebesar 6,08% (yoy), diikuti Jawa sebesar 5,84% (yoy), Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) sebesar 5,33% (yoy), Sumatera sebesar 4,95% (yoy), dan Kalimantan sebesar 3,96% (yoy) (Gambar 1). Dari sisi LU, pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat didukung oleh peningkatan kinerja sektor-sektor utama, terutama LU Industri Pengolahan, LU Pertambangan, dan LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Akmamin). Kinerja LU Industri Pengolahan meningkat, khususnya di Balinusra, Kalimantan, dan Sulampua, sejalan dengan penguatan aktivitas hilirisasi mineral, terutama tembaga dan nikel. Perbaikan LU Pertambangan didukung peningkatan produksi migas di Sumatera, pemulihan produksi tembaga dan emas, serta peningkatan produksi bijih nikel di Sulampua.

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Spasial Triwulan III 2026 (%, yoy)

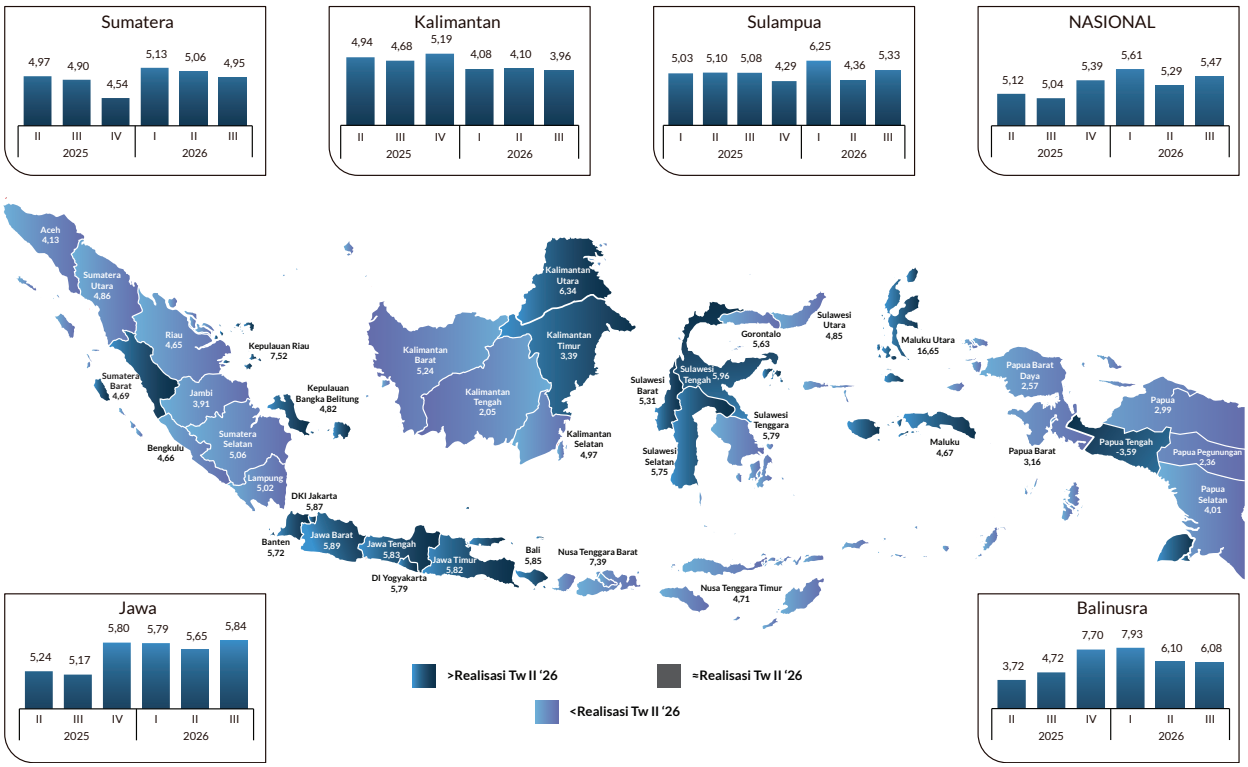

Sumber: BPS, diolah

Kinerja LU Akmamin meningkat, khususnya di Balinusra, ditopang kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik. Dari sisi pengeluaran, akselerasi pertumbuhan ekonomi terutama ditopang oleh penguatan kinerja ekspor di seluruh wilayah, di tengah konsumsi rumah tangga yang tetap terjaga. Peningkatan ekspor terutama didorong produk hilirisasi nikel di Sulampua, CPO dan timah di Sumatera, serta katoda tembaga dan jasa pariwisata di Balinusra. Sementara itu, konsumsi rumah tangga tetap resilien di hampir seluruh wilayah, didukung berlanjutnya stimulus Pemerintah serta peningkatan pendapatan masyarakat seiring kenaikan harga komoditas ekspor utama, yang turut menopang daya beli dan aktivitas ekonomi domestik. Dengan perkembangan tersebut, untuk keseluruhan tahun 2026, perekonomian wilayah Sumatera, Jawa, Balinusra, Kalimantan, dan Sulampua masing-masing diprakirakan tumbuh pada kisaran 4,7-5,5%, 5,2-6,0%, 6,0-6,8%, 3,6-4,4%, dan 5,4-6,2%.

Pertumbuhan ekonomi pada 2027 diprakirakan kembali meningkat dalam kisaran 5,2–6,0%. Prospek ini dipengaruhi meningkatnya peran permintaan domestik sejalan menguatnya peran swasta yang memanfaatkan berbagai stimulus Pemerintah. Konsumsi swasta diprakirakan meningkat sejalan dengan meningkatnya pendapatan dan terus membaiknya keyakinan rumah tangga. Investasi juga terus membaik ditopang keyakinan pelaku usaha terhadap prospek ekonomi serta didukung Proyek Strategis Nasional (PSN). Ekspor juga meningkat sejalan dengan membaiknya prospek pertumbuhan ekonomi global tahun 2027 yang pada gilirannya akan meningkatkan permintaan terhadap barang ekspor Indonesia. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi di masing-masing wilayah Sumatera, Jawa, Balinusra, Kalimantan, dan Sulampua pada 2027 diprakirakan meningkat masing-masing 4,8-5,6%, 5,2-6,0%, 5,0-5,8%, 4,1-4,9%, dan 5,9-6,7%.

Ketahanan eksternal Indonesia terjaga, di tengah tingginya ketidakpastian global yang memengaruhi Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) 2026. Dari jalur perdagangan, defisit transaksi berjalan pada semester I 2026 naik, dengan peningkatan terutama terjadi pada triwulan II 2026 yang tercatat defisit 3,4% PDB (Tabel 6). Kenaikan defisit terutama dipengaruhi penurunan ekspor akibat perlambatan ekonomi global, kenaikan impor migas sejalan dengan tingginya harga minyak dunia, serta peningkatan impor nonmigas dan pembayaran pendapatan primer untuk memenuhi peningkatan kegiatan ekonomi domestik. Defisit transaksi berjalan pada triwulan III 2026 kembali menurun menjadi defisit 0,5% PDB sejalan dengan membaiknya harga komoditas dan menurunnya impor migas. Perkembangan terkini dari Januari hingga Oktober 2026, neraca perdagangan Indonesia masih mencatat surplus, terutama ditopang oleh *windfall* harga komoditas dan perdagangan nonmigas khususnya yang bersumber dari produk industri pengolahan. Dengan perkembangan ini, defisit neraca transaksi berjalan 2026 diprakirakan dalam kisaran defisit 2,1-1,3% PDB.

Pengaruh ketidakpastian global terjadi melalui jalur finansial, tecermin pada neraca finansial di berbagai komponen aliran modal masuk. Aliran modal investasi langsung secara umum tetap baik dan positif sampai triwulan III 2026. Investasi portofolio mencatat surplus pada triwulan I dan II 2026 sejalan dengan aliran modal masuk ke instrumen keuangan domestik, kendati pada triwulan III 2026 aliran modal keluar investasi portofolio cukup besar, sehingga mencatat defisit 0,2 miliar dolar AS. Secara keseluruhan, dengan berbagai perkembangan dan dinamika tersebut, NPI 2026 tetap terjaga dan mendukung ketahanan eksternal Indonesia. Posisi cadangan devisa pada akhir Oktober

Tabel 6. Neraca Pembayaran Indonesia (Miliar Dolar AS)

Komponen	2021	2022	2023	2024	2025*					2026		
					I	II	III	IV	Total	I*	II*	III**
Transaksi Berjalan	**3,5**	**13,2**	**-2,0**	**-8,6**	**-0,1**	**-2,9**	**4,1**	**-2,4**	**-1,3**	**-3,7**	**-12,6**	**-2,0**
A. Barang	43,8	62,7	46,3	39,8	13,1	10,5	16,0	10,2	49,9	8,2	1,4	10,7
- Ekspor, *fob*	232,8	292,5	257,7	263,1	65,9	68,0	73,9	72,6	280,4	66,4	73,4	80,4
- Impor, *fob*	-189,0	-229,9	-211,4	-223,3	-52,9	-57,5	-57,9	-62,4	-230,6	-58,2	-72,1	-69,7
a. Nonmigas	57,8	89,8	67,8	62,8	18,8	15,7	20,8	16,5	71,8	15,3	12,1	18,2
b. Migas	-13,0	-24,8	-19,9	-19,6	-4,7	-4,2	-4,9	-5,7	-19,5	-5,1	-10,1	-7,4
B. Jasa-jasa	-14,6	-20,0	-17,7	-18,5	-5,4	-5,3	-4,3	-5,2	-20,2	-4,4	-6,0	-5,0
C. Pendapatan Primer	-32,0	-35,3	-36,0	-35,8	-9,3	-9,8	-9,4	-9,1	-37,6	-9,2	-9,7	-9,5
D. Pendapatan Sekunder	6,3	5,8	5,4	5,9	1,6	1,7	1,7	1,8	6,7	1,8	1,8	1,8
Transaksi Modal dan Finansial	**12,5**	**-8,9**	**10,1**	**18,0**	**-0,3**	**-4,2**	**-8,7**	**9,4**	**-3,8**	**-3,9**	**11,9**	**2,1**
1. Investasi Langsung	17,3	18,1	14,4	15,9	2,8	4,0	4,5	3,6	14,9	3,7	3,1	2,3
2. Investasi Portofolio	5,1	-11,6	2,2	8,2	1,0	-8,0	-6,9	4,7	-9,2	0,3	9,9	-0,2
3. Investasi Lainnya	-10,2	-15,6	-6,9	-6,7	-4,4	-0,2	-6,2	0,9	-9,8	-8,0	-1,4	0,4
Neraca Keseluruhan	**13,5**	**4,0**	**6,3**	**7,2**	**-0,8**	**-6,7**	**-6,4**	**6,1**	**-7,8**	**-9,1**	**-0,9**	**0,1**
Memorandum:												
- Cadangan Devisa	**144,9**	**137,2**	**146,4**	**155,7**	**157,1**	**152,6**	**148,7**	**156,5**	**156,5**	**148,2**	**145,6**	**146,3**
Dalam Bulan Impor dan Pembayaran ULN Pemerintah	7,8	5,9	6,5	6,5	6,5	6,1	6,0	6,2	6,2	5,8	5,4	5,2
- Transaksi Berjalan (% PDB)	**0,3**	**1,0**	**-0,2**	**-0,6**	**0,0**	**-0,8**	**1,1**	**-0,6**	**-0,1**	**-1,0**	**-3,4**	**-0,5**

Sumber: Bank Indonesia

Keterangan: *Angka Sementara; **Angka Sangat Sementara

2026 tetap memadai sebesar 146,8 miliar dolar AS, menurun dibandingkan dengan 156,5 miliar dolar AS pada akhir 2025. Posisi tersebut setara dengan pembiayaan 5,3 bulan impor atau 5,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor (Tabel 6).

Ke depan, prospek NPI 2027 diprakirakan tetap baik dan mendukung ketahanan eksternal Indonesia. Defisit transaksi berjalan diprakirakan lebih rendah dipengaruhi oleh membaiknya ekspor sejalan dengan prospek pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada 2027, yang diprakirakan pada kisaran defisit 1,9-1,1% PDB. Transaksi modal dan finansial diprakirakan membaik ditopang oleh berlanjutnya aliran masuk modal asing seiring imbal hasil instrumen keuangan domestik yang menarik dan prospek ekonomi Indonesia yang positif. Ketidakpastian global yang diprakirakan lebih baik juga akan mendukung perbaikan aliran masuk modal asing ke Indonesia. Selain itu, sinergi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia yang juga terus diperkuat dapat mendukung perbaikan aliran masuk modal asing.

Stabilitas nilai tukar Rupiah terjaga di tengah dampak gejolak global, didukung komitmen dan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas Rupiah. Sepanjang 2026, pergerakan Rupiah dipengaruhi oleh ketidakpastian global dipicu eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah, arah kebijakan moneter AS yang makin ketat, dan

perubahan sentimen investor asing di pasar keuangan domestik. Dalam merespons perkembangan tersebut, Bank Indonesia memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah. Strategi intervensi valuta asing (valas) diperkuat baik melalui transaksi *Non-Deliverable Forward* (NDF) di pasar luar negeri maupun transaksi *spot* dan *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF) di pasar domestik. Selain itu, Bank Indonesia juga memberikan insentif untuk penggunaan instrumen lindung nilai (*hedging*), termasuk transaksi *swap* dan DNDF, yang ditujukan secara lebih terarah (*targeted*) untuk mendorong aliran masuk investasi portofolio asing, serta memberikan insentif bagi transaksi *Local Currency Transaction* (LCT) dengan negara mitra untuk diversifikasi transaksi valas sekaligus mendorong pendalaman pasar uang dan pasar valas (PUVA).

Bauran kebijakan Bank Indonesia mendukung penguatan Rupiah pada Agustus hingga pertengahan September 2026. Tekanan kembali meningkat sejak akhir September 2026 sejalan dengan memburuknya kondisi global dan keluarnya aliran modal asing dari pasar saham. Pada 20 November 2026, nilai tukar Rupiah tercatat Rp18.265 per dolar AS, atau melemah 9,54% dari posisi akhir Desember 2025, dengan rerata Rp17.540 per dolar AS selama 2026 (Grafik 19). Namun demikian, perkembangan Rupiah relatif stabil dibandingkan dengan mata uang negara berkembang dan negara maju selain dolar AS (Grafik 20). Ke depan, nilai tukar Rupiah diprakirakan tetap stabil, ditopang komitmen kebijakan Bank Indonesia, imbal hasil aset domestik yang menarik, inflasi yang terkendali dalam sasaran, dan prospek ekonomi Indonesia yang tetap baik.

Stabilitas perekonomian terjaga dengan inflasi yang berada dalam kisaran sasaran 2,5±1%. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Oktober 2026 terjaga sebesar 3,23% (yoy) (Grafik 21). Inflasi yang terjaga didukung inflasi inti yang tetap rendah sebesar 2,56% (yoy), didukung oleh konsistensi kebijakan moneter Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas eksternal dan menjangkar ekspektasi inflasi sesuai sasarannya. Inflasi kelompok *administered prices* (AP) juga tetap rendah sebesar 3,24% (yoy) didukung kebijakan Pemerintah yang tidak melakukan perubahan bahan bakar subsidi di tengah melonjaknya harga minyak global. Sementara itu, inflasi kelompok *volatile food* (VF) terjaga pada sekitar 5% (yoy), didukung oleh kecukupan pasokan komoditas pangan sejalan dengan upaya Pemerintah untuk memitigasi dampak El Niño.

Capaian inflasi yang terjaga juga didukung oleh sinergi pengendalian inflasi oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID) melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) bersama Kantor Pusat dan 46 Kantor Perwakilan di berbagai daerah. Berbagai program unggulan dilakukan untuk meningkatkan produktivitas,

Grafik 19. Perkembangan Nilai Tukar Rupiah dan Dolar AS

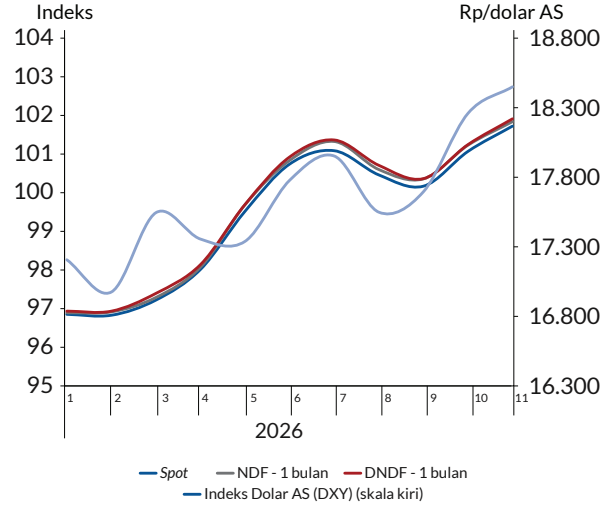

Keterangan: Data s.d. 20 November 2026
Sumber: Bloomberg, Reuters, diolah

Grafik 20. Indeks Nilai Tukar Rupiah vs Negara Berkembang dan Negara Maju Lainnya

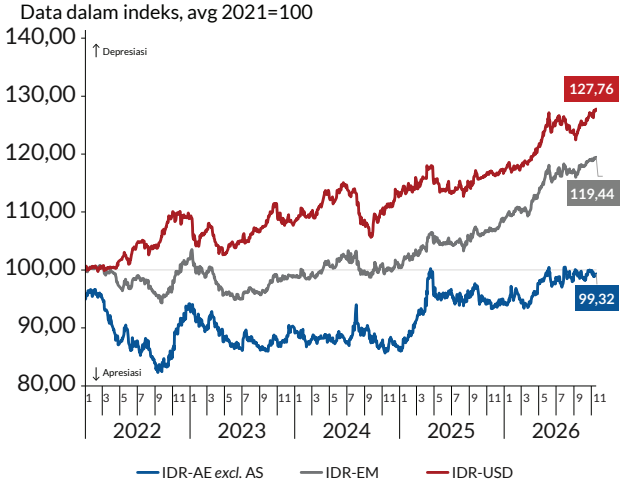

Keterangan: Data s.d. 20 November 2026
Sumber: Bloomberg, Reuters, diolah

Grafik 21. Inflasi IHK, Inti, *Volatile Food* (VF), *Administered Prices* (AP)

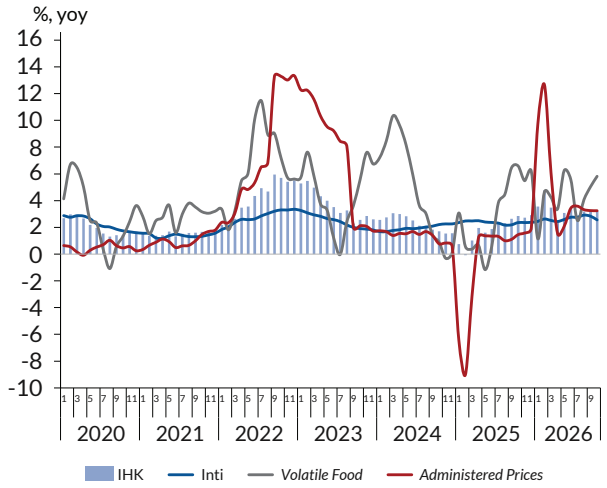

Sumber: BPS, diolah

memperkuat ketahanan pangan, mendorong Kerja sama Antardaerah (KAD), memfasilitasi distribusi pangan, pasar murah, digitalisasi data, serta memperkuat koordinasi dan komunikasi bersama Pemerintah Pusat dan Daerah. Hingga akhir 2026, inflasi IHK diprakirakan tetap rendah dalam sasaran 2,5±1%, demikian pula untuk 2027. Bank Indonesia meyakini inflasi tetap terjaga rendah dalam sasaran 2,5±1% dengan konsistensi kebijakan moneter Bank Indonesia dan eratnya koordinasi dengan Pemerintah dalam pengendalian inflasi baik di pusat maupun di daerah.

Kondisi moneter secara umum terkendali sesuai dengan arah kebijakan moneter Bank Indonesia merespons tekanan eksternal yang tinggi. Setelah menurunkan BI-Rate sebesar 125 bps sepanjang 2025 menjadi 4,75%, Bank Indonesia menaikkan BI-Rate secara kumulatif sebesar 100 bps pada Mei-Juni 2026 dan mempertahankannya sebesar 5,75% pada Oktober 2026. Bank Indonesia kembali menaikkan BI-Rate pada November 2026 sebesar 25 bps sehingga menjadi 6,00% sejalan respons antisipatif Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas perekonomian. Kebijakan tersebut ditempuh secara terukur untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan memastikan inflasi pada 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1%.

Perkembangan BI-Rate berpengaruh terhadap perkembangan suku bunga lainnya. Suku bunga pasar uang INDONIA yang sempat meningkat pada pertengahan 2026 berangsur menurun menjadi sekitar 5,17% pada Oktober 2026 seiring terjaganya kecukupan likuiditas (Grafik 22). Imbal hasil instrumen moneter Bank Indonesia dan SBN juga menurun dari level tertingginya pada pertengahan tahun, namun tetap berada pada level yang menarik di tengah ketidakpastian global. Transmisi kebijakan ke suku bunga perbankan berlangsung secara bertahap, dengan suku bunga deposito meningkat sementara suku bunga kredit relatif terjaga (Grafik 23). Ke

Grafik 22. Suku Bunga BI-Rate dan INDONIA

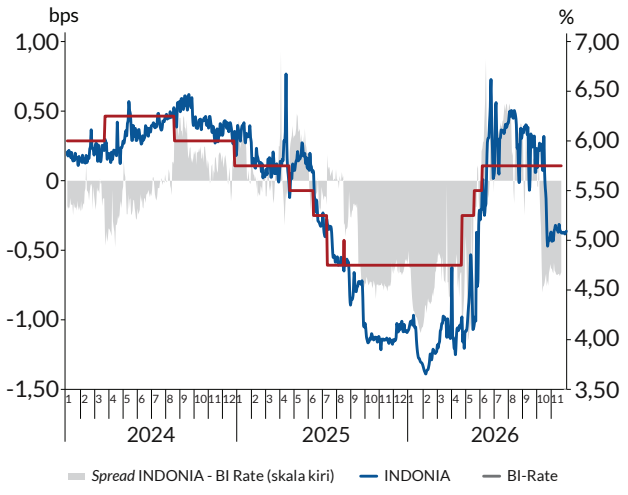

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 23. Suku Bunga Perbankan

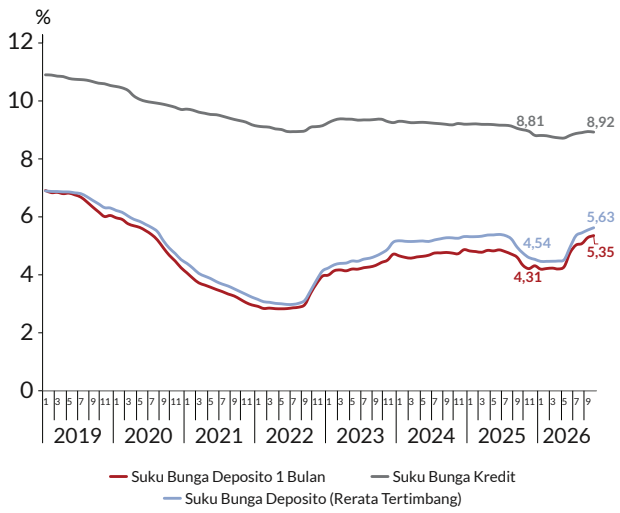

Sumber: Bank Indonesia

depan, Bank Indonesia akan terus bersinergi dengan Pemerintah dan pemangku kepentingan lain untuk memperkuat transmisi kebijakan moneter ke suku bunga guna mendukung stabilitas perekonomian.

Kondisi moneter juga didukung dengan operasi moneter Bank Indonesia untuk mendukung efektivitas transmisi kebijakan suku bunga, menjaga kecukupan likuiditas, dan mempercepat pendalaman pasar uang dan valas. Pada paruh pertama 2026, operasi moneter diarahkan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah di tengah meningkatnya tekanan eksternal. Sejak Juni 2026, pengelolaan instrumen moneter dilakukan secara lebih ekspansif sejalan dengan kebutuhan menjaga kecukupan likuiditas perekonomian. Perkembangan ini tecermin pada penurunan bertahap posisi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dari tingkat tertingginya pada pertengahan tahun, disertai penyediaan likuiditas melalui perluasan tenor transaksi repo dan transaksi *swap* valuta asing serta pembelian Surat Berharga Negara di pasar sekunder (Grafik 24). Pada saat yang sama, pendalaman pasar terus diperkuat melalui peningkatan peran Dealer Utama dan pengembangan transaksi di pasar uang dan pasar valas. Secara keseluruhan, pengelolaan operasi moneter tersebut mendukung efektivitas transmisi kebijakan, redistribusi likuiditas, dan pembentukan pasar keuangan yang makin dalam.

Grafik 24. Posisi SRBI: Bank, Nonresiden, Residen Nonbank

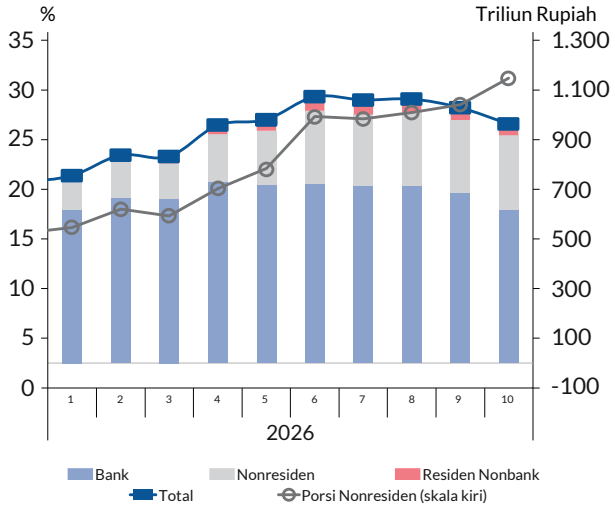

Sumber: Bank Indonesia

Intermediasi perbankan tetap kuat, dan terus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Pertumbuhan kredit pada Oktober 2026 tercatat sebesar 13,21% (yoy), lebih tinggi dibandingkan 7,36% (yoy) pada Oktober 2025, didorong pembiayaan program prioritas Pemerintah dan berlanjutnya pemulihan kinerja sektor swasta. Pertumbuhan DPK pada Oktober 2026 tercatat sebesar 8,13% (yoy), melambat dari 11,48% (yoy) pada Oktober 2025 dan masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kredit, sehingga penghimpunan dana dan diversifikasi pendanaan non-DPK perlu terus diperkuat untuk menjaga kesinambungan intermediasi. Pertumbuhan kredit 2026 diprakirakan dalam kisaran 8–12% dan tetap kuat dalam kisaran 9-13% pada 2027 ditopang oleh peningkatan permintaan kredit sejalan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Menurut jenis penggunaan, pertumbuhan kredit 2026 didorong oleh kredit investasi dan kredit modal kerja yang tumbuh tinggi. Data menunjukkan kredit investasi dan kredit modal kerja pada Oktober 2026 masing-masing tumbuh sebesar 21,32% (yoy) dan 12,99% (yoy), sedangkan kredit konsumsi tumbuh lebih terbatas sebesar 4,73% (yoy) (Grafik 25). Berdasarkan segmen, kredit korporasi tumbuh kuat sebesar 24,14% (yoy), diikuti kredit komersial sebesar 10,00% (yoy) dan kredit UMKM sebesar 3,19% (yoy) dengan perbaikan pada segmen mikro dan menengah (Grafik 26). Fasilitas pinjaman yang belum digunakan (*undisbursed loan*) tercatat sebesar Rp2.526,23 triliun atau 21,35% dari plafon kredit yang tersedia, menunjukkan masih tersedia ruang pembiayaan untuk mendukung aktivitas ekonomi. Secara sektoral, pertumbuhan kredit ditopang oleh sektor konstruksi (41,29%), listrik, gas, dan air (28,10%), jasa sosial (27,24%), industri pengolahan (16,88%), pengangkutan (16,62%), dan pertambangan (19,79%). Kredit sektor pertanian (7,85%) dan perdagangan (6,90%) turut mendorong pertumbuhan, dengan ruang potensi untuk menjadi sumber pertumbuhan ekonomi (Tabel 7).

Grafik 25. Pertumbuhan Kredit per Jenis Penggunaan: Investasi, Modal Kerja, Konsumsi

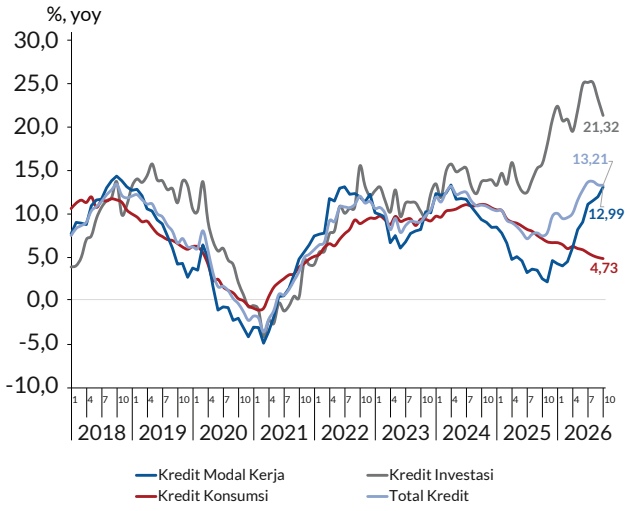

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 26. Pertumbuhan Kredit per Segmen: Konsumsi, Komersial, Korporasi, UMKM

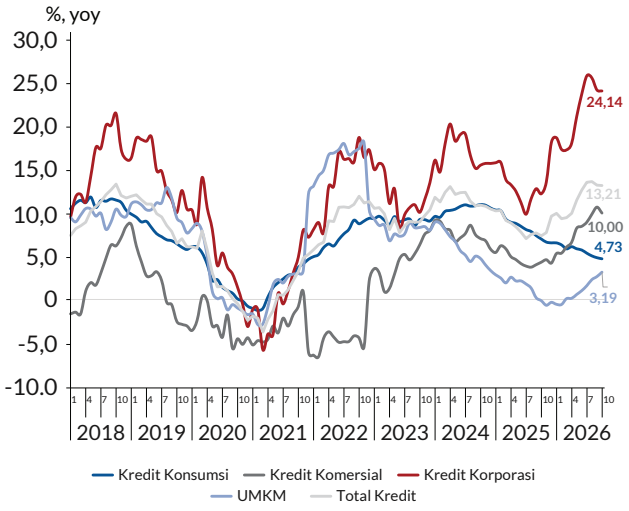

Sumber: Bank Indonesia

Tabel 7. Kredit per Sektor Ekonomi

Sektor Ekonomi	Pertumbuhan yoy (%)				Kontribusi yoy (%)				Delta Kontribusi
	Okt 2023	Okt 2024	Okt 2025	Okt 2026	Okt 2023	Okt 2024	Okt 2025	Okt 2026	Okt 2026 & Okt 2025
Labor Intensive Sectors									
Jasa Sosial	33,79	19,27	23,11	27,24	1,06	0,74	0,95	1,29	0,33
Konstruksi	(0,68)	(0,06)	0,19	41,29	(0,04)	(0,00)	0,01	1,99	1,98
Perdagangan	5,55	8,17	0,93	6,90	1,03	1,47	0,16	1,14	0,97
Pertanian	8,49	7,21	3,54	7,85	0,63	0,53	0,25	0,54	0,29
Capital Intensive Sectors									
Industri	4,16	7,53	7,53	16,88	0,70	1,20	1,17	2,62	1,45
Jasa Dunia Usaha	18,19	14,99	6,69	14,73	1,68	1,50	0,69	1,52	0,83
Pengangkutan	14,30	16,11	15,38	16,62	0,71	0,84	0,84	0,97	0,14
Pertambangan	15,23	25,69	14,49	19,79	0,59	1,04	0,67	0,97	0,30
LGA	4,36	23,77	25,16	28,10	0,11	0,58	0,68	0,89	0,21
Lainnya									
Lain-lain	9,28	11,01	7,03	4,73	2,54	3,02	1,93	1,30	(0,64)
TOTAL	**8,99**	**10,92**	**7,36**	**13,21**	**8,99**	**10,92**	**7,36**	**13,21**	5,86

Sumber: Bank Indonesia

Kinerja kredit dipengaruhi faktor permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit didukung kebutuhan pembiayaan investasi untuk program strategis Pemerintah serta meningkatnya aktivitas korporasi swasta, termasuk pada sektor industri pengolahan, konstruksi, pengangkutan, dan jasa dunia usaha. Dari sisi penawaran, minat penyaluran kredit perbankan tetap

baik, tecermin dari persyaratan pemberian kredit (*lending requirement*) yang secara umum masih longgar, terutama pada kredit investasi dan kredit modal kerja. Sikap kehati-hatian tetap diterapkan pada kredit konsumsi, pertanian, dan UMKM sejalan dengan perkembangan risiko pada segmen ini.

Stabilitas sistem keuangan terjaga didukung ketahanan permodalan yang kuat dan ketahanan likuiditas yang terjaga baik. Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*/CAR) perbankan pada September 2026 tercatat sebesar 24,30%, tetap kuat dalam menyerap risiko dan mendukung ekspansi pembiayaan (Grafik 27). Kualitas kredit membaik dibandingkan periode yang sama tahun 2025, tecermin dari penurunan rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loan*/NPL) bruto menjadi 2,07% dan rasio *Loan at Risk* (LAR) menjadi 8,44% pada September 2026. Ketahanan terhadap risiko kredit ditopang pencadangan yang memadai, dengan rasio Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) terhadap NPL sebesar 166,57%. Ketahanan likuiditas perbankan baik jangka pendek maupun jangka panjang tetap kuat, berada jauh di atas ambang minimum 100%, yaitu dengan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) sebesar 181,96% dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) sebesar 125,11%.

Risiko kredit terkendali pada level rendah dan diikuti profitabilitas perbankan yang tetap positif serta ketahanan yang tetap baik. Risiko pasar tetap terkendali, tecermin dari Posisi Devisa Neto industri yang rendah sebesar 0,87% per 30 Oktober 2026, sedangkan hasil uji ketahanan menunjukkan bantalan modal industri tetap memadai dalam menghadapi tekanan risiko kredit dan perubahan imbal hasil surat berharga. Profitabilitas perbankan tetap positif dan pada level yang solid untuk menopang ketahanan serta fungsi intermediasi, meskipun terkikis oleh kenaikan biaya dana dan penyempitan *spread* suku bunga. Pada September 2026, *Return on Assets* (ROA) tercatat sebesar 2,43% sementara *Net Interest Margin* (NIM) tercatat sebesar 4,29% (Grafik 28). Hasil *stress test* solvabilitas menunjukkan CAR industri pada akhir 2027 tetap tinggi termasuk pada skenario *tail risk*. Ke depan, stabilitas sistem keuangan diprakirakan tetap terjaga sejalan dengan prospek perekonomian nasional yang positif.

Kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia secara terukur mampu menjaga kecukupan likuiditas. Likuiditas perbankan secara agregat tetap memadai, tecermin pada rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang tetap terjaga pada level tinggi sebesar 23,22% pada

Grafik 27. CAR dan NPL Perbankan



Sumber: OJK, Bank Indonesia

Grafik 28. Profitabilitas Perbankan: ROA dan NIM

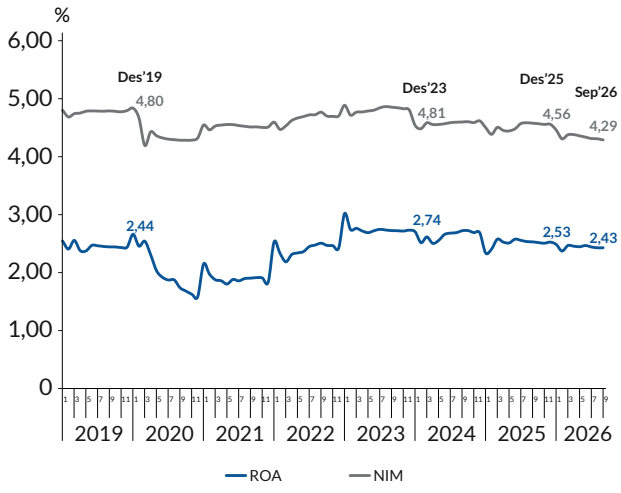

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 29. Likuiditas Perbankan

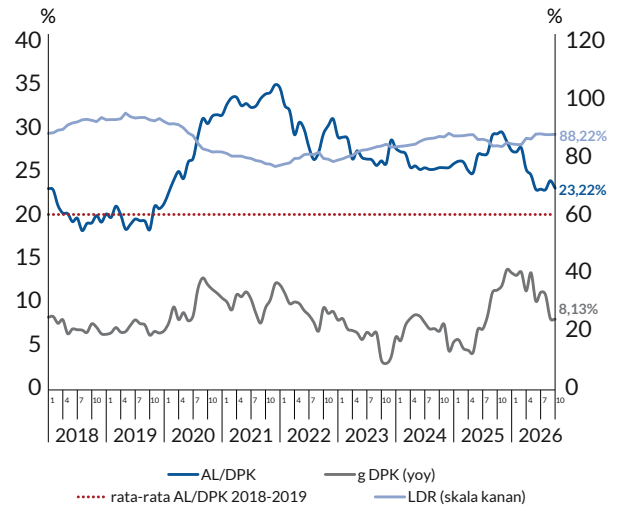

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 30. *Funding Gap*

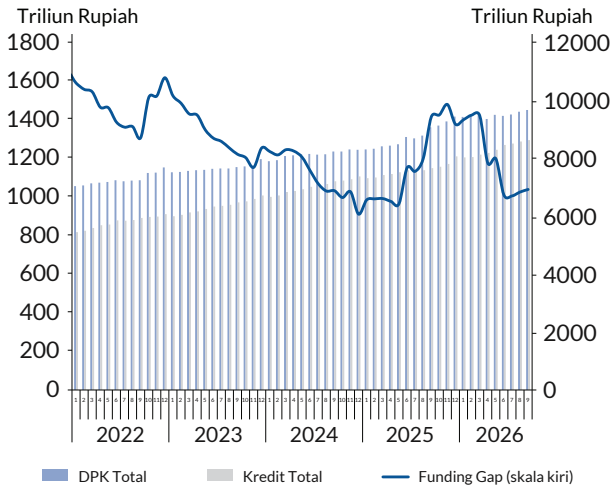

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Oktober 2026 dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) sebesar 88,22% (Grafik 29). Namun demikian, pertumbuhan kredit yang cukup tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan DPK menimbulkan pelebaran *funding gap* yang perlu direspons sehingga likuiditas perbankan tetap terjaga (Grafik 30). Perkembangan menunjukkan pertumbuhan DPK sebesar 8,13% (yoy) pada Oktober 2026, tercatat lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan kredit yang mencapai 13,21% (yoy). Sementara itu, likuiditas perekonomian tetap sesuai kebutuhan perekonomian. Pertumbuhan uang primer (M0) tercatat 5,2% (yoy) pada Oktober 2026, sedangkan M0 *Adjusted* tumbuh lebih tinggi sebesar 7,0% (yoy) setelah memperhitungkan dampak kebijakan insentif likuiditas dari kebijakan BI dan kebijakan Pemerintah. Pertumbuhan uang beredar dalam arti luas (M2) pada Oktober 2026 tumbuh 9,34% (yoy), didorong oleh pertumbuhan M1 sebesar 9,49% (yoy) dan Uang Kartal di luar Bank Umum dan BPR yang tumbuh 12,60% (yoy).

Transaksi ekonomi dan keuangan digital tetap tumbuh didukung oleh terjaganya kelancaran sistem pembayaran serta infrastruktur yang stabil. Volume transaksi pembayaran digital mencapai 6,18 miliar transaksi atau tumbuh 31,47% (yoy) pada Oktober 2026 didukung oleh perluasan akseptasi pembayaran digital. Volume transaksi melalui *internet payments* dan *mobile payments* masing-masing tumbuh 7,12% (yoy) dan 36,96% (yoy), termasuk transaksi QRIS yang terus tumbuh tinggi mencapai 70,95% (yoy), didukung peningkatan jumlah pengguna dan *merchant* masing-masing menjadi sebesar 71,91 juta dan 51,31 juta. Dari sisi infrastruktur, volume transaksi ritel melalui BI-FAST mencapai 575,46 juta transaksi atau tumbuh 28,80% (yoy) dengan nilai transaksi mencapai Rp1.390,57 triliun atau tumbuh 24,70% (yoy). Sementara itu, nilai transaksi BI-RTGS mencapai Rp17.953,93 triliun atau terkontraksi 20,29% (yoy), dengan volume sebanyak 0,95 juta transaksi atau terkontraksi sebesar 4,56% (yoy). Dari sisi pengelolaan uang Rupiah, Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) tumbuh 11,48% (yoy) menjadi Rp1.353,04 triliun (Tabel 8). Bank Indonesia terus menjaga ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk daerah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T).

Tabel 8. Prakiraan Sistem Pembayaran Indonesia 2025-2027

Transaksi		Pertumbuhan (%)				Nominal/Volume			
		2024	2025	2026*	2027*	2024	2025	2026*	2027*
I. Nontunai									
1. *Digital Payment*	Nominal (Triliun Rupiah)	19,3	15,30	15,71	18,40	70.890,40	81.727,69	94.567,45	111.967,16
	Volume (Juta)	40,7	36,00	27,98	28,24	36.659,20	49.873,84	63.826,13	81.850,73
2. QRIS	Nominal (Triliun Rupiah)	191,6	115,30	82,81	54,36	659,9	1.420,66	2.597,08	4.008,77
	Volume (Juta)	191,7	148,50	61,88	7,55	6.239,7	15.508,56	25.104,87	27.000,00
3. BI-FAST	Nominal (Triliun Rupiah)	54,7	34,20	23,62	27,24	8.913,8	11.960,90	14.785,49	18.812,84
	Volume (Juta)	62,4	39,10	24,48	28,24	3.430,0	4.773,45	5.942,17	7.620,25
4. Sistem BI-RTGS	Nominal (Triliun Rupiah)	12,8	20,30	4,88	12,98	178.920,30	215.254,90	225.757,61	255.055,88
	Volume (Juta)	3,2	1,00	4,98	1,77	10,20	10,40	10,92	11,11
II. Tunai									
	Nominal (Triliun Rupiah)	9,3	12,90	12,22	11,14	1.204,5	1.359,9	1.526,1	1.696,2

Sumber: Bank Indonesia

Keterangan: *Proyeksi Bank Indonesia

Sinergi Kebijakan Menopang Ketahanan Ekonomi

Ketahanan domestik di tengah tingginya tekanan global, ditopang oleh eratnya sinergi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas dengan tetap memperkuat momentum pertumbuhan. Kebijakan fiskal secara konsisten ditempuh untuk menjaga kredibilitas dan kesinambungan APBN, dengan tetap berperan sebagai peredam guncangan melalui perlindungan sosial, serta penguatan ketahanan pangan dan energi. Sementara itu, kebijakan moneter Bank Indonesia difokuskan pada stabilisasi nilai tukar Rupiah dan pengendalian inflasi dalam sasaran 2,5±1%, disertai pengelolaan kecukupan likuiditas perekonomian. Sinergi pengendalian inflasi melalui TPIP/TPID terus diperkuat dengan implementasi program GPIPS dalam memitigasi risiko gangguan cuaca terhadap produksi dan distribusi pangan. Pada sektor keuangan, koordinasi pada KSSK juga ditingkatkan guna menjaga ketahanan sistem keuangan.

Sinergi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ditempuh melalui berbagai kebijakan. Kebijakan fiskal ditempuh dengan memberikan stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat, termasuk melalui insentif bagi kegiatan ekonomi. Pemerintah juga terus mengakselerasi pelaksanaan program Asta Cita, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), perumahan rakyat, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM. Kebijakan untuk meningkatkan investasi juga diperkuat melalui berbagai proyek strategis nasional. Berbagai upaya juga diperkuat dengan dukungan kebijakan makroprudensial Bank Indonesia, yang diarahkan untuk mendorong kredit/pembiayaan ke sektor riil antara lain melalui penguatan Kebijakan Insentif Likuiditas

Makroprudensial (KLM). Hingga minggu pertama November 2026, insentif KLM yang diperoleh bank tercatat sebesar Rp466,2 triliun dengan alokasi pada KLM *financing channel* sebesar Rp345,2 triliun, serta alokasi pada KLM Pendalaman Pasar Uang (PPU) sebesar Rp121,0 triliun. Upaya mendorong pembiayaan sektor riil juga ditempuh melalui sinergi Program Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI) dan penguatan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM). Pemerintah dan Bank Indonesia juga memperluas akseptasi pembayaran digital dalam wadah koordinasi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) guna meningkatkan efisiensi transaksi dan memperluas inklusi keuangan.

Kebijakan struktural juga ditempuh guna memperkuat fondasi pertumbuhan dalam jangka menengah panjang. Pemerintah terus mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi melalui hilirisasi SDA, pembangunan infrastruktur, serta perbaikan iklim investasi. Penguatan kelembagaan dan regulasi sektor keuangan dilanjutkan melalui amendemen UU P2SK (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026), disertai penguatan tata kelola dan koordinasi antarotoritas. Bank Indonesia juga terus melakukan berbagai inovasi kebijakan untuk memperkuat perkembangan ekonomi dan keuangan digital serta melakukan pendalaman pasar keuangan.

Ke depan, sinergi kebijakan fiskal, kebijakan Bank Indonesia, dan reformasi struktural perlu terus diperkuat untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan memperluas penciptaan lapangan kerja. Sinergi bauran kebijakan ekonomi nasional diperkuat dengan mengoptimalkan sumber pertumbuhan domestik sekaligus meningkatkan ketahanan sektor eksternal. Dari sisi permintaan, peran investasi swasta perlu terus didorong untuk memperkuat akumulasi kapital, produktivitas, dan tenaga kerja. Belanja Pemerintah terkait program perlindungan sosial dan program prioritas perlu ditingkatkan untuk menopang daya beli dan penyerapan tenaga kerja. Dari sisi penawaran, peran industri pengolahan dalam perekonomian perlu terus ditingkatkan agar mendorong *output* domestik bernilai tambah tinggi dan berorientasi ekspor atau memperkuat rantai nilai domestik. Bank Indonesia akan terus mendukung upaya tersebut melalui stabilisasi nilai tukar dan inflasi, pemeliharaan kecukupan likuiditas, penguatan kebijakan makroprudensial yang akomodatif, pendalaman pasar uang dan pasar valas, serta percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan.

III. Bauran Kebijakan Bank Indonesia 2026: Memperkuat Stabilitas, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Bank Indonesia pada 2026 memperkuat bauran kebijakan guna tetap menjaga stabilitas dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di tengah ketidakpastian global yang meningkat. Bauran kebijakan ditempuh melalui penguatan kebijakan moneter, makroprudensial dan sistem pembayaran serta diperkuat berbagai kebijakan pendukung. Kebijakan moneter difokuskan pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah tingginya tekanan eksternal sehingga tetap menjaga pencapaian sasaran inflasi sebesar 2,5±1% pada 2026 dan 2027. Arah ini ditempuh melalui kebijakan suku bunga yang *pre-emptive* dan *forward-looking*, pengelolaan struktur suku bunga di pasar uang sejalan dengan kebijakan BI-Rate disertai penguatan strategi operasi moneter *pro-market*, penguatan kebijakan stabilisasi nilai tukar, serta kebijakan untuk memperkuat kecukupan likuiditas perekonomian. Kebijakan makroprudensial longgar diperkuat untuk mendorong kredit/pembiayaan kepada sektor riil, khususnya sektor-sektor prioritas, dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan manajemen risiko dalam layanan pembayaran, penguatan struktur industri, serta peningkatan keandalan dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran. Ketiga bauran kebijakan utama Bank Indonesia tersebut didukung oleh penguatan kebijakan pendalaman pasar uang dan pasar valas, pengembangan ekonomi keuangan inklusif, hijau, dan syariah, serta kebijakan internasional sehingga dapat makin memperkuat efektivitas kebijakan utama.

Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan bersama Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) guna memperkuat ketahanan ekonomi. Sinergi kebijakan dalam menjaga stabilitas terus diperkuat, tidak hanya menjaga stabilitas harga, tetapi juga stabilitas sistem keuangan. Sinergi kebijakan menjaga stabilitas ditempuh di tingkat pusat dan daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID) dalam implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). Sinergi menjaga stabilitas sistem keuangan ditempuh melalui penguatan koordinasi dalam wadah KSSK. Sementara itu, sinergi kebijakan mendorong pertumbuhan ekonomi ditempuh melalui keselarasan kebijakan makroprudensial longgar dengan stimulus fiskal dan kebijakan sektor riil yang ditempuh Pemerintah. Kebijakan digitalisasi sistem pembayaran juga berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, berbagai kebijakan pendukung Bank Indonesia juga turut memperkuat upaya meningkatkan kapasitas perekonomian yang pada gilirannya dapat mendukung stabilitas perekonomian dalam jangka menengah panjang.

Konsepsi Bauran Kebijakan Bank Indonesia

Bank Indonesia menempuh kebijakan mengacu pada tiga tujuan stabilitas yang diamanatkan Undang-Undang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Tujuan Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia adalah mencapai stabilitas nilai Rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ketiga tujuan stabilitas tersebut menjadi tujuan utama (*overriding objective*) Bank Indonesia dan menjadi fondasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas nilai Rupiah tecermin pada tercapainya sasaran inflasi yang ditetapkan Pemerintah dan terjaganya stabilitas nilai tukar Rupiah, didukung oleh kecukupan cadangan devisa. Stabilitas sistem pembayaran tecermin pada terselenggaranya sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal, didukung oleh struktur industri yang sehat dan efisien, infrastruktur yang berdaya tahan, serta ketersediaan uang Rupiah yang memadai untuk memenuhi kebutuhan perekonomian. Sementara itu, stabilitas sistem keuangan tecermin pada terjaganya ketahanan sistem keuangan, intermediasi yang seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan, serta terkendalinya risiko sistemik. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui kebijakan makroprudensial dengan memerhatikan keterkaitan makrofinansial, sebagai bagian dari sinergi Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS dalam KSSK.

Sejalan dengan ketiga tujuan stabilitas tersebut, UU P2SK 2026 memperkuat ketentuan mengenai tujuan Bank Indonesia melalui penambahan ayat (2) pada Pasal 7 yang berbunyi, "Bank Indonesia dalam mencapai tujuannya melaksanakan kebijakan dan bauran kebijakan Bank Indonesia yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja." Penambahan ini mempertegas sekaligus memperkuat peran Bank Indonesia dalam mendukung perekonomian melalui bauran kebijakan yang tetap konsisten dengan pencapaian stabilitas. Dalam konteks ini, lingkungan ekonomi yang kondusif mencakup kondisi yang mendukung berkembangnya iklim investasi, akselerasi digitalisasi, peningkatan daya saing ekspor dan produktivitas sektor riil, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pengembangan ekonomi yang inklusif dan hijau. Upaya tersebut ditempuh melalui sinergi Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan sektor riil Pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing, sehingga stabilitas yang terjaga dapat menjadi landasan bagi pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja secara berkelanjutan (Gambar 2).

Gambar 2. Bauran Kebijakan Bank Indonesia 2026



Sumber: Bank Indonesia

Dalam mencapai tujuannya, Bank Indonesia melaksanakan 3 (tiga) tugas utama, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial. Pelaksanaan ketiga tugas tersebut dilakukan secara terintegrasi dalam Bauran Kebijakan Bank Indonesia (BKBI) sehingga stabilitas yang terjaga dapat menjadi landasan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja. *Pertama*, melalui kebijakan moneter, Bank Indonesia menjaga stabilitas harga barang dan jasa serta nilai tukar Rupiah untuk mendukung aktivitas ekonomi dan keuangan Pemerintah, sektor keuangan, dunia usaha, investor, dan masyarakat. Inflasi yang terkendali menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat kepastian bagi dunia usaha, sementara stabilitas nilai tukar Rupiah berperan penting dalam menjaga terkendalinya inflasi, ketahanan eksternal dan stabilitas sistem keuangan, serta mendukung kepastian kegiatan usaha dan pembiayaan perekonomian. *Kedua*, melalui kebijakan sistem pembayaran, Bank Indonesia memastikan terselenggaranya transaksi pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal, didukung inovasi pembayaran digital, struktur industri yang sehat, serta infrastruktur yang terintegrasi dan berdaya tahan. Hal tersebut akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan serta memperluas inklusi ekonomi dan keuangan. Bank Indonesia juga memastikan ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup dan berkualitas di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk daerah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T). *Ketiga*, melalui kebijakan makroprudensial, Bank Indonesia mendorong intermediasi yang seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan, memperkuat ketahanan sistem keuangan, serta mendukung penyaluran kredit/pembiayaan kepada sektor-sektor produktif dan prioritas yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan produktivitas, dan penciptaan lapangan kerja, dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan bersinergi erat dengan KSSK. Pelaksanaan ketiga tugas utama tersebut didukung oleh penguatan kebijakan pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing, kebijakan ekonomi-keuangan inklusif, hijau, dan syariah, kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, serta kebijakan internasional.

Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan agar dapat memberikan dampak yang semakin nyata (*impactful*), manfaat kebijakan yang dirasakan secara luas (*inclusive*), dan terpadu serta bersinergi dengan kebijakan berbagai pihak (*integrative*), untuk menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Seluruh kebijakan dilakukan secara terukur yang bersifat *forward-looking* terhadap prospek ekonomi dan mempertimbangkan risiko yang dapat mengemuka. Dalam kerangka ini, respons kebijakan tidak hanya ditentukan oleh posisi siklus ekonomi dan keuangan domestik, tetapi juga oleh sumber tekanan dan faktor risiko yang ada dalam perekonomian. Pada kondisi ketika aktivitas ekonomi berada di bawah kapasitas potensial sebagaimana saat ini (Grafik 31) dan tekanan stabilitas terkendali, bauran kebijakan dapat diarahkan untuk mendorong pertumbuhan dengan tetap menjaga stabilitas. Sebaliknya, apabila muncul tekanan terhadap stabilitas, baik yang bersumber dari penguatan permintaan domestik maupun dampak rambatan gejolak global, respons kebijakan diperkuat secara terukur untuk menjaga stabilitas tanpa menimbulkan pengetatan yang berlebihan terhadap perekonomian.

Dinamika perekonomian sepanjang 2026 yang penuh dengan tantangan menegaskan pentingnya bauran kebijakan dalam merespons perubahan kondisi global dan domestik yang dinamis. Di dalam negeri, pertumbuhan ekonomi domestik tetap terjaga, meskipun masih perlu terus didorong karena masih berada di bawah kapasitas potensialnya. Inflasi tetap berada dalam kisaran sasaran dan stabilitas sistem keuangan juga tetap terjaga. Namun, pada saat yang sama, dinamika kondisi global terus memberikan tekanan, tecermin dari tingginya ketidakpastian global akibat peningkatan tensi geopolitik, kenaikan harga energi global, tingginya suku bunga global, serta terbatasnya aliran modal ke negara berkembang sehingga meningkatkan tekanan terhadap ketahanan eksternal dan nilai tukar Rupiah.

Grafik 31. Siklus Ekonomi dan Siklus Keuangan Indonesia

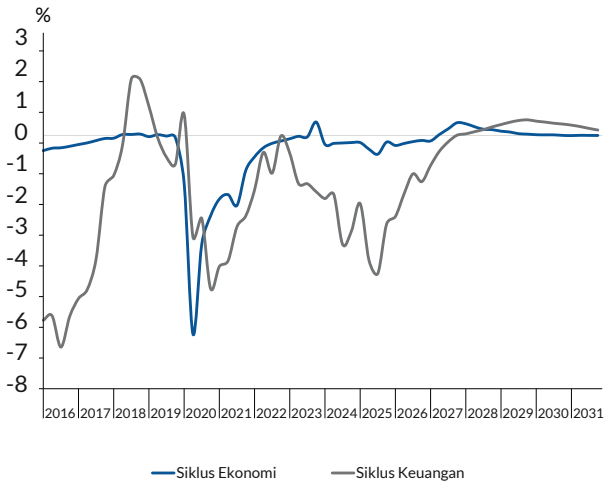

Sumber: Bank Indonesia, Consensus Indonesia

Bauran kebijakan Bank Indonesia diperkuat guna merespons tantangan tersebut. Kebijakan moneter difokuskan untuk menjaga stabilitas dan ketahanan eksternal sehingga dapat mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5±1%. Kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, melalui penguatan intermediasi dan pembiayaan sektor riil, akselerasi digitalisasi sistem pembayaran, serta peningkatan efisiensi transaksi ekonomi. Keseluruhan respons kebijakan didukung dengan kebijakan pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing serta penguatan berbagai kebijakan pendukung lainnya.

Pada kebijakan moneter, Bank Indonesia memperkuat respons kebijakan yang fokus pada stabilitas melalui penyesuaian suku bunga BI-Rate dan pengelolaan struktur suku bunga instrumen moneter, stabilisasi nilai tukar Rupiah, serta penguatan kebijakan menjaga kecukupan likuiditas Rupiah. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga inflasi tetap dalam sasaran, memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah dan ketahanan eksternal, sekaligus menjaga kecukupan likuiditas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di tengah tingginya ketidakpastian global. Konsisten dengan arah kebijakan moneter tersebut, BI-Rate dinaikkan secara kumulatif sebesar 100 bps pada Mei hingga Juni 2026 menjadi 5,75%. Kenaikan ini sebagai langkah untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak tingginya gejolak global serta sebagai langkah *pre-emptive* untuk menjaga inflasi pada 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran

sasaran 2,5±1%. Kebijakan ini juga ditujukan untuk meningkatkan imbal hasil bagi daya tarik aliran masuk investasi portofolio asing ke Indonesia. Selanjutnya, BI-Rate dipertahankan pada level 5,75% hingga Oktober 2026. Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga *Deposit Facility* sebesar 25 bps menjadi 5,00% pada Oktober 2026 untuk memperkuat transmisi kebijakan moneter melalui jalur suku bunga, sekaligus menyelaraskan struktur suku bunga kebijakan melalui penerapan koridor suku bunga yang simetris. BI-Rate kembali dinaikkan sebesar 25 bps pada November 2026 menjadi 6,00%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 25 bps menjadi 5,25%, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 25 bps menjadi 6,75%. Kenaikan ini sebagai langkah untuk semakin memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global serta sebagai langkah *pre-emptive* untuk menjaga inflasi tahun 2026-2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1%.

Kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah juga diperkuat. Hal ini ditempuh melalui intervensi di pasar luar negeri dengan transaksi *Non-Deliverable Forward* (NDF) serta di pasar domestik melalui transaksi *spot* dan *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF) didukung kecukupan cadangan devisa, serta pengendalian permintaan valas melalui penguatan kebijakan kewajiban penyediaan *underlying* untuk transaksi pembelian valas secara tunai. Strategi operasi moneter *pro-market* diperkuat melalui pengelolaan struktur suku bunga operasi moneter disertai berbagai kebijakan insentif lindung nilai untuk meningkatkan aliran masuk modal asing, memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah dan mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valas (PUVA). Pada saat yang sama, kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan tetap dijaga melalui transaksi *repurchase agreement* (repo) dan pembelian SBN di pasar sekunder secara terukur.

Pada Oktober 2026, Bank Indonesia juga menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah secara bertahap. GWM Rupiah turun masing-masing sebesar 1% pada 1 November dan 1 Desember 2026, dari 9% menjadi 7% untuk Bank Umum Konvensional dan dari 7,5% menjadi 5,5% untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, guna meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan moneter dengan memperkuat kecukupan likuiditas Rupiah. Kebijakan ini ditempuh agar penguatan stabilisasi nilai tukar Rupiah tetap sejalan dengan upaya menjaga transmisi kebijakan, stabilitas sistem keuangan, dan pembiayaan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kebijakan makroprudensial longgar terus dioptimalkan untuk mendorong intermediasi dan pembiayaan perekonomian tanpa mengurangi aspek kehati-hatian dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Arah kebijakan difokuskan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan kredit/pembiayaan yang optimal, ketahanan sistem keuangan, serta perluasan inklusi ekonomi dan keuangan. Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) terus diperkuat untuk mendorong penyaluran kredit/pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas yang sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah. Pada September 2026, total insentif KLM ditingkatkan menjadi paling tinggi sebesar 6,0% dari Dana Pihak Ketiga (DPK), yang terdiri atas KLM *financing channel* paling tinggi sebesar 4,0% dari DPK dan KLM Pendalaman Pasar Uang (KLM PPU) paling tinggi sebesar 2,0% dari DPK. Penguatan KLM PPU ditujukan untuk meningkatkan dan meredistribusi likuiditas antarbank sekaligus mempercepat pendalaman pasar uang, sehingga mendukung kapasitas perbankan dalam menyalurkan kredit/pembiayaan secara lebih optimal. Selanjutnya, untuk memperkuat kecukupan likuiditas di sistem perbankan, pada 1 Desember 2026 diberlakukan penurunan GWM sebesar 1% melalui penyesuaian Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang diturunkan dari 6% menjadi 5%.

Kebijakan makroprudensial longgar juga diperkuat melalui peningkatan Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank (RPLN). Dalam kaitan ini, RPLN ditingkatkan menjadi paling tinggi sebesar 40% dari modal bank, Kebijakan ini juga disertai perluasan cakupan dan dasar perhitungan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), serta penguatan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) untuk

mendorong pembiayaan kepada sektor inklusif dan berkelanjutan. Sementara itu, rasio *Countercyclical Capital Buffer* (CCyB), kebijakan *Loan to Value/ Financing to Value* (LTV/FTV) kredit/pembiayaan properti, ketentuan uang muka kredit/pembiayaan kendaraan bermotor, serta Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) tetap dipertahankan longgar guna mendukung intermediasi dengan tetap menjaga ketahanan perbankan. Kebijakan tersebut diperkuat dengan surveilans dan pengawasan makroprudensial yang semakin granular, *timely*, dan *forward-looking*, serta sinergi dengan Pemerintah, OJK, KSSK, dunia usaha, dan perbankan melalui Program Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI) untuk memperkuat sisi penawaran maupun permintaan pembiayaan.

Pada area kebijakan sistem pembayaran, akselerasi digitalisasi sistem pembayaran terus diperkuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, disertai dengan penguatan struktur industri dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran serta pengelolaan uang Rupiah yang berkualitas dan terpercaya. Kebijakan ditempuh melalui implementasi *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 dengan strategi 4I-RD, yakni penguatan Infrastruktur, Industri, Inovasi, konektivitas Internasional, dan pengembangan Rupiah Digital, guna memperluas Ekonomi-Keuangan Digital (EKD), meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat inklusi ekonomi dan keuangan, serta menjaga kedaulatan digital nasional. Perluasan akseptasi dan inovasi pembayaran digital terus diakselerasi, antara lain melalui perluasan penggunaan QRIS, pengembangan BI-FAST, elektronifikasi transaksi Pemerintah, serta implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) yang diluncurkan pada 17 Agustus 2026. Dukungan terhadap transaksi masyarakat juga diperkuat melalui perluasan kebijakan *Merchant Discount Rate* (MDR) QRIS 0% untuk transaksi sampai dengan Rp100.000 yang berlaku mulai 1 Oktober 2026, sehingga digitalisasi pembayaran semakin inklusif dan dapat menopang aktivitas ekonomi, termasuk UMKM. Penguatan inovasi turut ditempuh melalui Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI), sementara elektronifikasi transaksi Pemerintah terus diperluas, termasuk melalui digitalisasi bantuan sosial dan transaksi keuangan Pemerintah Daerah.

Dari sisi industri sistem pembayaran, struktur sistem pembayaran terus diperkuat. Kebijakan ini ditempuh melalui implementasi pengaturan industri sistem pembayaran, penerapan manajemen risiko, serta peningkatan keandalan infrastruktur teknologi dan kepatuhan terhadap standar nasional, termasuk Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP). Konektivitas pembayaran lintas negara juga terus diperluas, termasuk melalui implementasi QRIS Antarnegara Indonesia–Tiongkok setelah konektivitas dengan Malaysia, Singapura, Taiwan, Jepang, dan Korea Selatan, serta pengembangan koridor kerja sama dengan negara mitra lainnya. Sementara itu, Bank Indonesia terus memastikan ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah NKRI, termasuk daerah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T), melalui penguatan distribusi dan kerja sama kelembagaan, antara lain dalam kegiatan kas keliling, kas titipan, dan Ekspedisi Rupiah Berdaulat.

Kebijakan Moneter

Kebijakan suku bunga pada 2026 ditetapkan secara *forward-looking* dan *pre-emptive* untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5±1% pada 2026 dan 2027, serta memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah tingginya gejolak global. Kebijakan suku bunga ditempuh secara terukur dengan mencermati perkembangan dan prospek inflasi, serta mempertimbangkan stabilitas nilai tukar Rupiah, agar pencapaian stabilitas tetap konsisten dengan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sejak Januari hingga April 2026, Bank Indonesia mempertahankan BI-Rate pada level 4,75%. Keputusan ini konsisten dengan upaya meningkatkan efektivitas strategi penyesuaian struktur suku bunga instrumen operasi moneter dalam memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak memburuknya kondisi perekonomian global.

Seiring meningkatnya tekanan eksternal akibat berlanjutnya konflik di Timur Tengah, Bank Indonesia menaikkan BI-Rate secara kumulatif sebesar 100 bps dari 4,75% menjadi 5,75% pada Mei hingga Juni 2026. Kenaikan dilakukan sebesar 50 bps menjadi 5,25% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulanan 19–20 Mei 2026, sebesar 25 bps menjadi 5,50% pada RDG Mingguan 9 Juni 2026, dan kembali sebesar 25 bps menjadi 5,75% pada RDG Bulanan 17–18 Juni 2026. Kenaikan tersebut ditempuh sebagai langkah untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak tingginya ketidakpastian global, sekaligus sebagai langkah *pre-emptive* untuk menjaga inflasi tetap berada dalam kisaran sasaran.

Selanjutnya, BI-Rate dipertahankan sebesar 5,75% pada RDG Bulanan Juli, Agustus, dan September 2026, dengan suku bunga *Deposit Facility* (DF) dipertahankan sebesar 4,75% dan *Lending Facility* (LF) sebesar 6,50%. Pada Oktober 2026, Bank Indonesia kembali mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75% dan suku bunga LF sebesar 6,50%, serta menaikkan suku bunga DF menjadi 5,00%. Keputusan tersebut konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar Rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2026 dan 2027 serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sementara itu, kenaikan suku bunga DF sebesar 25 bps menjadi 5,00% ditujukan untuk memperkuat transmisi kebijakan moneter melalui jalur suku bunga, sekaligus menyelaraskan struktur suku bunga kebijakan melalui penerapan koridor suku bunga yang simetris. Dengan penyesuaian tersebut, suku bunga LF dan DF masing-masing ditetapkan sebesar 75 bps di atas dan di bawah BI-Rate.

BI Rate kembali dinaikkan pada November 2026. RDG Bulanan Bank Indonesia pada 17-18 November 2026 memutuskan untuk menaikkan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 6,00%, suku bunga DF sebesar 25 bps menjadi 5,25%, dan suku bunga LF sebesar 25 bps menjadi 6,75% (Grafik 32). Kenaikan ini sebagai langkah untuk semakin memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global serta sebagai langkah *pre-emptive* untuk menjaga inflasi tahun 2026-2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1% (Grafik 33).

Bank Indonesia juga terus memperkuat kebijakan untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan suku bunga sekaligus memperkuat kecukupan likuiditas Rupiah. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia mengelola struktur suku bunga di pasar uang sejalan dengan kebijakan BI-Rate dan suku bunga instrumen operasi moneter *pro-market* disertai dengan penguatan strategi operasi moneter *pro-market*. Selain itu, Bank Indonesia menurunkan GWM sebesar 2%, yakni dari 9% menjadi 7% untuk Bank Umum Konvensional

Grafik 32. BI-Rate dan INDONIA

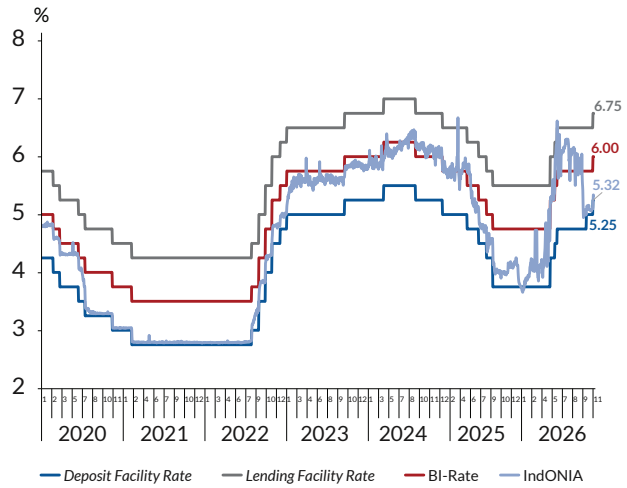

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 33. Ekspektasi Inflasi

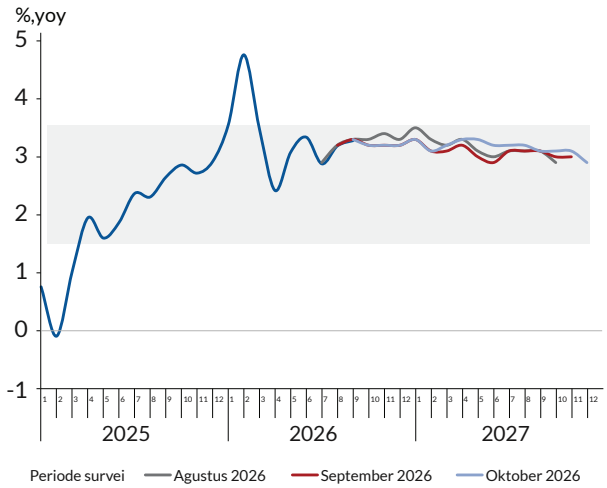

Sumber: BPS , Consensus Economics

Grafik 34. Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah Bank Indonesia

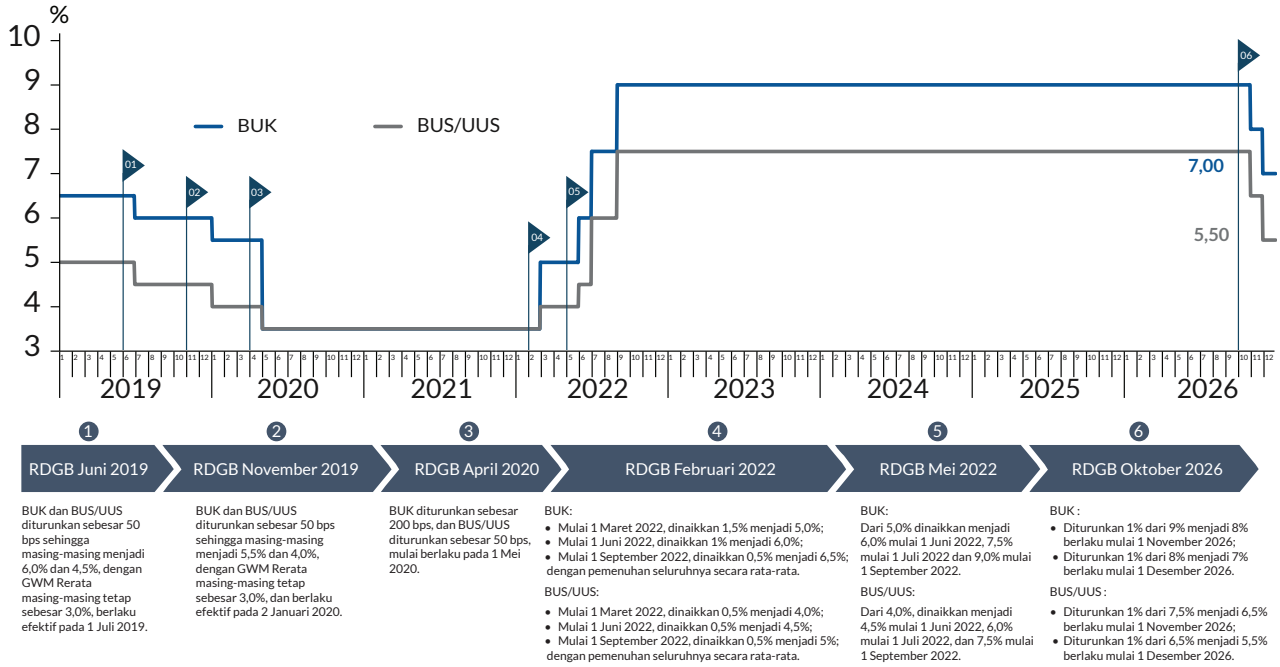

Sumber: Bank Indonesia

(BUK) dan dari 7,5% menjadi 5,5% untuk Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), yang dilakukan secara bertahap yakni pada 1 November dan 1 Desember 2026 (Grafik 34). Kebijakan menurunkan GWM tersebut dimaksudkan untuk memperkuat kecukupan likuiditas Rupiah. Penurunan GWM tersebut dilakukan melalui penyesuaian insentif KLM dari 6% menjadi 5%, yang mulai berlaku pada 1 Desember 2026, dengan insentif bagi PPU ditetapkan paling tinggi sebesar 2% dari DPK. Langkah ini ditempuh untuk semakin mendorong redistribusi likuiditas yang lebih merata serta menjaga keseimbangan antara kebutuhan stabilisasi dan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Bank Indonesia juga terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah di tengah besarnya tekanan eksternal dari ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi. Penguatan strategi stabilisasi nilai tukar Rupiah yang sesuai dengan fundamental ditempuh melalui peningkatan intensitas intervensi, baik melalui transaksi *spot* dan DNDF di pasar domestik maupun transaksi NDF di pasar luar negeri, disertai pembelian SBN di pasar sekunder untuk menjaga likuiditas dan stabilitas pasar keuangan. Dengan penguatan berbagai kebijakan tersebut, nilai tukar Rupiah yang sempat mengalami tekanan hingga mencapai Rp18.175 per dolar AS pada 8 Juni 2026, telah kembali menguat ke sekitar Rp17.985 per dolar AS pada 20 Oktober 2026 di tengah tekanan global yang tetap tinggi. Nilai tukar Rupiah kembali melemah pada November 2026 yang pada 20 November 2026 tercatat sebesar Rp18.265 per dolar AS atau melemah 0,77% (ptp) dibandingkan dengan posisi akhir Oktober 2026, dipengaruhi ketidakpastian global yang tetap tinggi dan berlanjutnya sentimen investor asing di pasar saham. Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dengan terus mengoptimalkan seluruh instrumen moneter.

Bank Indonesia juga menempuh kebijakan pemberian insentif lindung nilai untuk meningkatkan aliran masuk modal asing dan memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah, serta mempercepat pendalaman PUVA. Untuk meningkatkan daya tarik masuknya investor asing, sejak Juni 2026 Bank Indonesia memberikan insentif berupa penurunan tingkat premi *swap* lindung nilai bagi investor asing sebesar 10% pada semester I 2026 (Gambar 3). Insentif dimaksud selanjutnya diperkuat secara bertahap melalui tiga langkah. Pertama, kenaikan insentif premi, yaitu bagi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia dari 10%

Gambar 3. Perkembangan Skema Insentif Lindung Nilai Bank Indonesia



Sumber: Bank Indonesia

menjadi 12,5% pada Juli 2026, dan selanjutnya menjadi 15%, 20%, dan 25% masing-masing untuk tenor 3, 6, dan 12 bulan pada September 2026. Pada saat yang sama, insentif bagi DNDF Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebesar 15% pada Juli 2026 ditingkatkan menjadi 25% dan 30% masing-masing untuk tenor 6 dan 12 bulan pada September 2026, serta menjadi 40% dan 45% pada Oktober 2026. Khusus untuk DNDF Lindung Nilai melalui Bank Mitra, insentif ditingkatkan menjadi 45% dan 50% pada November 2026. Kedua, perluasan transaksi *underlying* pendanaan luar negeri yang dapat memperoleh insentif, dari semula hanya mencakup transaksi *portfolio inflows* menjadi mencakup pula pinjaman luar negeri oleh bank dan *foreign direct investment* (FDI), serta juga mencakup transaksi melalui bank mitra (skema VASTRA). Ketiga, Bank Indonesia juga memberikan insentif dalam rangka mendukung *Local Currency Transaction* (LCT) dengan negara mitra guna diversifikasi transaksi valas, berupa penambahan premi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional dan pengurangan premi DNDF Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dalam rangka Perdagangan Internasional masing-masing sebesar 10%.[1]

Dengan berbagai insentif tersebut, imbal hasil aset Rupiah tetap menarik. Hal ini tecermin pada meningkatnya kepemilikan nonresiden di SRBI serta nilai transaksi lindung nilai (*hedging*) di pasar domestik yang mencapai sekitar 14,41 miliar dolar AS sejak Juni 2026 hingga tanggal 20 November 2026 (Grafik 35). Untuk memperkuat kehati-hatian dalam transaksi valas, Bank Indonesia menurunkan secara

Grafik 35. Transaksi Lindung Nilai Domestik

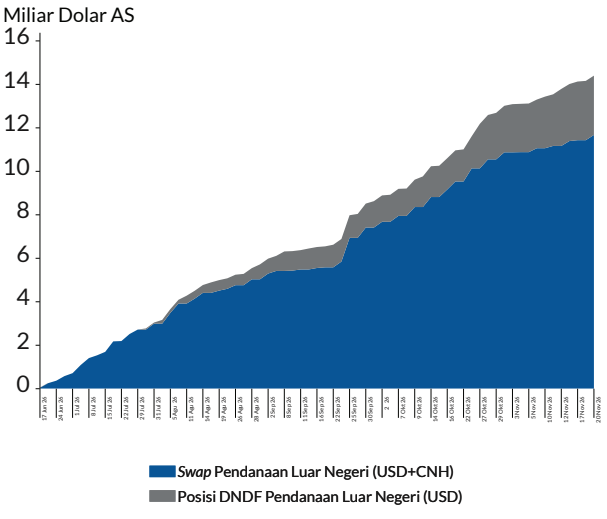

Keterangan: Data s.d. 20 November 2026
Sumber: Bank Indonesia

1 Bank Indonesia telah mengimplementasikan kerja sama LCT dengan 7 negara mitra, yakni Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, Taiwan, Tiongkok, dan Uni Emirat Arab.

bertahap batas pembelian tunai valas terhadap Rupiah tanpa *underlying* dari 100 ribu dolar AS menjadi 50 ribu dolar AS per pelaku per bulan (April 2026), 25 ribu dolar AS (Juni 2026), dan 10 ribu dolar AS (sejak 1 Juli 2026), serta menyesuaikan batas kewajiban dokumen pendukung transfer dana valas ke luar negeri dari di atas 50 ribu dolar AS menjadi di atas 25 ribu dolar AS sejak 1 Juli 2026. Bank Indonesia juga memperkuat pengawasan terhadap bank dan korporasi dengan aktivitas pembelian dolar AS yang tinggi melalui koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.

Operasi moneter *pro-market* ditempuh untuk memperkuat efektivitas implementasi kebijakan moneter untuk stabilisasi nilai tukar Rupiah dan menjaga kecukupan likuiditas, serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valas. Strategi ini ditempuh dengan tiga langkah. *Pertama*, pengelolaan struktur suku bunga instrumen moneter *pro-market* sejalan dengan kebijakan BI-Rate. Pada semester I 2026, sejalan dengan kenaikan BI-Rate sebesar 100 bps menjadi 5,75%, suku bunga SRBI tenor 12 bulan dinaikkan menjadi 7,70% per 30 Juni 2026 untuk menarik aliran masuk investasi portofolio asing (Grafik 36). Kenaikan suku bunga tersebut mendorong meningkatnya aliran masuk pada SRBI di berbagai tenor (Grafik 37). *Kedua*, penguatan ekspansi likuiditas di pasar uang dan perbankan. Bank Indonesia membuka kembali *window* lelang repo tenor 3, 6, 9, dan 12 bulan, sehingga bersama instrumen FX *swap* telah menambah likuiditas secara kumulatif sekitar Rp347,55 triliun sampai dengan 20 November 2026. Bank Indonesia juga melakukan pembelian SBN untuk menjaga kecukupan likuiditas serta memperhatikan upaya kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah. Pembelian SBN dilakukan sesuai mekanisme pasar, terukur, transparan, dan konsisten dengan program moneter serta sebagai bentuk sinergi erat antara kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal Pemerintah. Hingga 20 November 2026, Bank Indonesia telah melakukan pembelian SBN dengan nilai mencapai Rp397,65 triliun, termasuk pembelian di pasar sekunder sebesar Rp150,22 triliun. *Ketiga*, penguatan insentif dan pendalaman pasar valas. Bank Indonesia meningkatkan insentif *hedging* berupa *Swap* Beli Lindung Nilai menjadi 15% (tenor 3 bulan), 20% (6 bulan), dan 25% (12 bulan) serta DNDF Lindung Nilai menjadi 25% (6 bulan) dan 30% (12 bulan), yang kemudian ditingkatkan menjadi 40% (6 bulan) dan 45% (12 bulan) pada Oktober 2026, dan khusus DNDF Lindung Nilai Bank Mitra ditingkatkan menjadi 45% (6 bulan) dan 50% (12 bulan) pada November 2026.

Bank Indonesia juga terus memperkuat pelaksanaan kebijakan moneter melalui implementasi operasi moneter *pro-market* yang terintegrasi dengan pengembangan PUVA. Bank Indonesia memperluas jenis surat berharga yang dapat digunakan sebagai

Grafik 36. Perkembangan Suku Bunga SRBI Berdasarkan Tenor

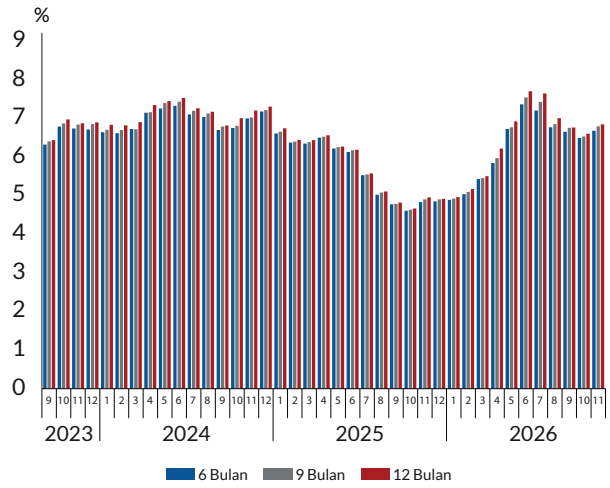

Keterangan: Data s.d. 19 November 2026
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 37. Perkembangan Posisi SRBI Berdasarkan Tenor

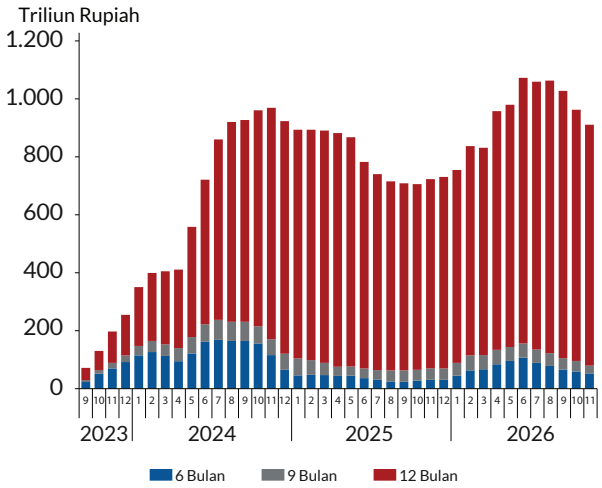

Keterangan: Data s.d. 20 November 2026
Sumber: Bank Indonesia

underlying transaksi operasi moneter, dengan menambahkan surat berharga berkualitas tinggi berupa obligasi dan sukuk korporasi. Pada 10 November 2025, Bank Indonesia mengawali perluasan surat berharga sebagai *underlying* operasi moneter dengan menggunakan obligasi/sukuk korporasi yang diterbitkan oleh PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau PT SMF. Selanjutnya, pada 28 September 2026, Bank Indonesia kembali memperluas surat berharga sebagai *underlying* operasi moneter dengan menambahkan obligasi/sukuk korporasi yang diterbitkan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI. Perluasan tersebut diharapkan dapat meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas perbankan, mendorong aktivitas transaksi surat berharga korporasi di pasar sekunder, dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. Sesuai *Blueprint* Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valas (BPPU) 2030, Bank Indonesia juga memperkuat peran Dealer Utama PUVA, termasuk dalam transaksi NDF jual valas terhadap Rupiah di luar negeri, memperluas transaksi *spot* dan *swap* valuta *offshore* Chinese Renminbi (CNH) terhadap Rupiah di pasar domestik, serta mengembangkan instrumen lindung nilai melalui Bank Mitra (VASTRA), ekosistem RMB melalui RMB *Clearing Bank*, dan pengembangan instrumen pasar uang (antara lain Surat Berharga Komersial, Efek Beragun Aset) untuk mendukung pembiayaan ekonomi nasional.

Kebijakan BI-Rate, stabilisasi nilai tukar Rupiah, dan ekspansi likuiditas moneter didukung oleh kecukupan cadangan devisa dan pengelolaan lalu lintas devisa. Bank Indonesia senantiasa memastikan kecukupan cadangan devisa sesuai standar internasional untuk mendukung pembayaran utang luar negeri Pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah. Posisi cadangan devisa pada akhir Oktober 2026 sebesar 146,8 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 5,3 bulan impor atau 5,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta tetap berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Lebih lanjut, untuk mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah, Bank Indonesia juga mendukung kebijakan Pemerintah mengenai Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), dengan Bank Indonesia mendukung dari sisi penempatan dan pemanfaatan DHE SDA dalam sistem keuangan domestik. Kerangka kebijakan DHE SDA pada 2026 diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026 sebagai perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023. Bank Indonesia menyediakan berbagai instrumen penempatan DHE SDA, antara lain *Term Deposit* valas DHE, SVBI, dan SUVBI dengan tenor sampai dengan 12 bulan, serta fasilitas pemanfaatannya melalui transaksi *swap* dan sebagai *underlying* atau agunan pembiayaan Rupiah (Grafik 38). Penguatan pengelolaan DHE SDA tersebut diharapkan meningkatkan ketersediaan devisa di pasar domestik, memperdalam pasar keuangan, serta mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah dan ketahanan eksternal.

Bank Indonesia juga memperkuat sinergi kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal Pemerintah untuk menjaga stabilitas serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan dalam rapat koordinasi pada 24 September 2026 sepakat untuk memperkuat koordinasi guna meningkatkan ketahanan ekonomi di tengah tantangan ketidakpastian global yang tetap tinggi. Dalam rapat koordinasi tersebut disepakati bahwa koordinasi

Grafik 38. Pemasukan DHE SDA ke Rekening Khusus

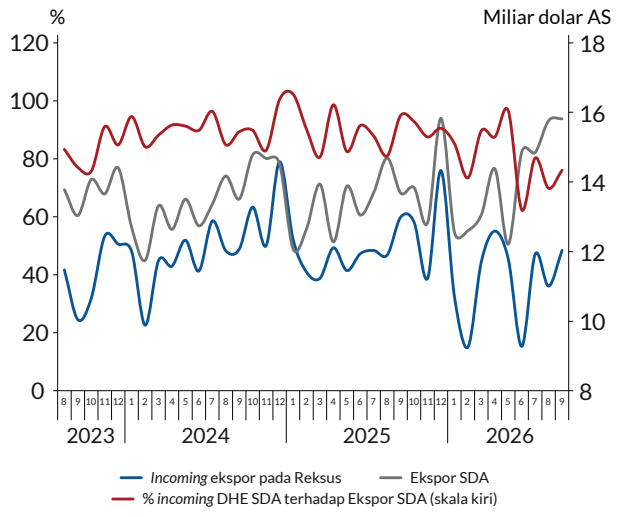

Sumber: Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Bea Cukai

kebijakan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia ditempuh melalui lima pilar sinergi kebijakan. Pertama, sinergi dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrumen kebijakan fiskal dan moneter. Kedua, sinergi dalam memperkuat ketahanan sektor eksternal di tengah gejolak global, baik dari sisi perdagangan internasional maupun aliran modal asing. Ketiga, sinergi dalam mengelola kecukupan likuiditas di pasar uang, perbankan dan perekonomian. Keempat, koordinasi kebijakan dalam pengendalian inflasi yang dilakukan melalui TPIP/TPID dalam implementasi GPIPS. Kelima, koordinasi dalam upaya pendalaman pasar keuangan untuk mendukung transmisi kebijakan dan memperluas sumber pembiayaan ekonomi.

Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam menjaga stabilitas inflasi dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam menjaga stabilitas inflasi, khususnya inflasi pangan bergejolak (*volatile food*), Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah melalui TPIP/TPID. Sinergi tersebut diwujudkan salah satunya melalui pelaksanaan GPIPS, dengan dukungan Bank Indonesia baik di Kantor Pusat maupun 46 Kantor Perwakilan di seluruh Indonesia. Pelaksanaan GPIPS mengacu pada strategi 4K, yaitu Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif. Dukungan Bank Indonesia terhadap implementasi GPIPS diwujudkan melalui implementasi tujuh program utama, meliputi optimalisasi *Good Agricultural Practices* (GAP), penguatan pascapanen, Kerja Sama Antardaerah (KAD), Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), operasi pasar murah, penguatan neraca pangan, serta intensifikasi koordinasi dan komunikasi publik (Tabel 9).

Tabel 9. Dukungan Bank Indonesia dalam GPIPS untuk Pengendalian Inflasi 2026

Program Unggulan GNPIP	Satuan	Target	Realisasi					
			Nasional	Sumatra	Jawa	Balinusra	Kalimantan	Sulampua
Optimalisasi GAP	Program	176	522	144	156	32	55	135
Penguatan Pascapanen								
a. Hilirisasi Pangan	Program	132	163	50	59	7	16	31
b. Penguatan Kapasitas dan Kelembagaan Unit Usaha sebagai *Offtaker*	Program	111	144	38	43	12	13	38
Kerja Sama Antardaerah	MoU	151	586	355	104	16	32	79
Fasilitasi Distribusi Pangan	Program	259	1,411	356	873	24	28	130
Pasar Murah	Pelaksanaan	15.872	19.884	5.412	6.914	918	2.458	4.182
Penguatan Neraca Pangan	Program	77	106	38	31	7	8	22
Koordinasi & Komunikasi								
a. Koordinasi Kelembagaan	Kegiatan	719	880	269	272	39	91	209
b. *Capacity Building* TPID	Program	156	311	130	95	15	23	48
c. Pengendalian Ekspektasi	Program	541	996	282	317	40	124	233

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Data s.d. 20 November 2026

Sinergi pengendalian inflasi pangan juga diperkuat melalui dukungan Bank Indonesia terhadap berbagai program stabilisasi harga yang dilaksanakan Pemerintah, termasuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), khususnya untuk komoditas beras. Upaya tersebut didukung dengan pemantauan harga dan pasokan pangan secara berkala melalui forum koordinasi TPIP/TPID serta peninjauan langsung ke pasar dan produsen. Berbagai upaya tersebut diarahkan tidak hanya berorientasi pada stabilisasi harga jangka pendek, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan dalam jangka panjang melalui peningkatan efisiensi distribusi, optimalisasi potensi produksi daerah, serta sinergi kebijakan antarlembaga.

Bank Indonesia juga terus mendukung upaya Pemerintah, khususnya di daerah, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah melalui penguatan *advisory* terkait kebijakan ekonomi dan keuangan daerah. Penguatan tersebut dilakukan melalui penyusunan berbagai asesmen ekonomi dan perumusan rekomendasi kebijakan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah. Asesmen tersebut mencakup perkembangan dan prospek perekonomian daerah, serta pemetaan sektor unggulan dan potensial, termasuk dalam pengembangan berbagai sektor prioritas, guna mengoptimalkan sumber pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Hasil asesmen dan rekomendasi kebijakan selanjutnya disampaikan melalui berbagai forum koordinasi strategis bersama Pemerintah Daerah, termasuk melalui Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED), untuk memperkuat sinergi kebijakan dan mendorong percepatan implementasinya di daerah.

Koordinasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah juga diperkuat melalui peningkatan investasi, perluasan promosi perdagangan, dan pemberdayaan UMKM. Untuk mendorong peningkatan investasi daerah, Bank Indonesia terus mengoptimalkan peran *Regional Investor Relations Unit* (RIRU) sebagai forum sinergi antarpemangku kepentingan di tingkat pusat, daerah, dan global guna mendukung realisasi investasi yang berkualitas dan berkelanjutan. Optimalisasi peran RIRU dilakukan melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan promosi investasi dan perdagangan secara berkesinambungan, baik di dalam maupun luar negeri, untuk memperluas peluang kerja sama, meningkatkan minat investor, dan mengakselerasi peningkatan investasi di daerah. Sementara itu, penguatan ekonomi kerakyatan terus didorong melalui berbagai program pemberdayaan dan pengembangan UMKM. Salah satu inisiatif utama ialah Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu yang berfokus pada peningkatan kapasitas dan daya saing usaha, perluasan akses ekonomi dan keuangan, serta penciptaan lapangan kerja. Program tersebut diwujudkan melalui empat program unggulan, yaitu Cangkir Barista, Citra Nusa, Air Berkah Indonesia, dan Tani Berkah, guna memperkuat kontribusi UMKM sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kebijakan Makroprudensial

Bank Indonesia memperkuat implementasi KLM guna mendorong penyaluran kredit/pembiayaan perbankan kepada sektor prioritas serta mendukung program Asta Cita Pemerintah. Inovasi pelonggaran kebijakan makroprudensial ini pertama kali diterapkan pada Maret 2022 dan terus dikembangkan sebagai bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui KLM, bank memperoleh insentif berupa pengurangan GWM berdasarkan kinerja penyaluran kredit/pembiayaan pada sektor yang ditetapkan. Insentif tersebut menambah ruang likuiditas dan memperkuat kapasitas intermediasi perbankan untuk mendukung pembiayaan kepada dunia usaha. Agar tetap relevan dan efektif, desain KLM dievaluasi secara berkala, baik dari sisi sektor prioritas, kriteria penerima, saluran transmisi, maupun batas maksimum insentif. Pada tahap inisiasi, KLM difokuskan untuk menopang pemulihan sektor yang mengalami luka memar (*scarring effect*) akibat pandemi COVID-19, kemudian diperluas ke sektor berdaya ungkit tinggi terhadap pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja.

Gambar 4. Perkembangan Penguatan Kebijakan KLM Tahun 2026



Sumber: Bank Indonesia

Pada 2026, Bank Indonesia memperkuat desain KLM secara bertahap agar insentif lebih tepat sasaran dengan transmisi yang lebih kuat ke pembiayaan perekonomian. Penguatan ini melanjutkan reformulasi yang berlaku sejak 16 Desember 2025 melalui dua kanal utama, yaitu skema *forward-looking* dan *interest rate channel*. Skema *forward-looking* memperhitungkan kinerja dan komitmen penyaluran kredit/pembiayaan ke depan, sementara *interest rate channel* mendorong penurunan suku bunga kredit baru agar selaras dengan arah kebijakan Bank Indonesia. Kanal *lending channel* kemudian diperkuat menjadi *financing channel* dengan turut memperhitungkan kepemilikan surat berharga korporasi/surat berharga korporasi syariah yang ditetapkan Bank Indonesia sebagai dasar pemberian insentif KLM, berlaku mulai 1 Agustus 2026[2]. Batas maksimum insentif KLM kemudian ditingkatkan dari 5,5% dari DPK menjadi 6% dari DPK mulai 1 September 2026. Seiring dengan perkembangan kebutuhan perekonomian, kanal transmisi KLM juga disesuaikan untuk mengatasi segmentasi likuiditas di pasar uang dan perbankan, serta mendorong pendalaman pasar uang melalui KLM PPU[3]. Sebagai bagian dari penyempurnaan tersebut, pada Oktober 2026 Bank Indonesia menetapkan penyesuaian batas maksimum KLM dari 6% menjadi 5% dari DPK berlaku mulai 1 Desember 2026 (Gambar 4). Penyesuaian tersebut diintegrasikan dengan kebijakan penurunan GWM sebesar 1% yang bertujuan untuk memperkuat kecukupan likuiditas di sistem perbankan.

Pemanfaatan KLM meningkat sejalan dengan tumbuhnya kredit/pembiayaan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Hingga minggu pertama November 2026, insentif yang diterima perbankan mencapai Rp466,2 triliun, terdiri atas Rp345,2 triliun melalui *financing channel* dan Rp121,0 triliun melalui KLM PPU (Grafik 39). Dari sisi bank penerima, KLM disalurkan kepada kelompok bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp262 triliun, Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) sebesar Rp158,8 triliun, Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebesar Rp38,3 triliun, dan Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) sebesar Rp7 triliun. Secara keseluruhan, sebanyak 123 bank telah menerima insentif likuiditas KLM, meliputi 40 bank yang menerima insentif KLM sebesar 3% sampai dengan <4%

2 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial.

3 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 26 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial.

Grafik 39. Tahapan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM)

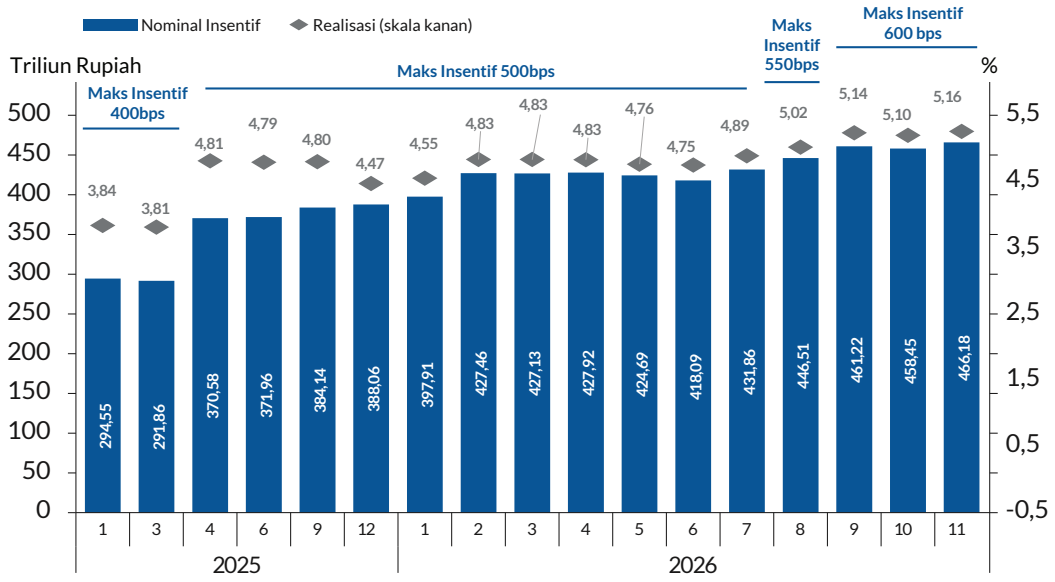

Sumber: Bank Indonesia

dan 73 bank menerima insentif KLM ≥ 4% (Tabel 10). Dari sisi sektor-sektor prioritas, insentif KLM terbesar disalurkan untuk kredit/pembiayaan pada sektor Pertanian, Industri, dan Hilirisasi (Rp130,8 triliun), disusul sektor Konstruksi, Real Estate, dan Perumahan (Rp120,3 triliun), pembiayaan UMKM, Koperasi, Inklusi dan berkelanjutan (Rp85,8 triliun), serta Sektor Jasa termasuk Ekonomi Kreatif (Rp8,3 triliun). Alokasi insentif tersebut memberi ruang untuk peningkatan kredit baru yang pada gilirannya meningkatkan kapasitas usaha debitur dan mendorong potensi peningkatan lapangan kerja, termasuk melalui pengembangan rantai nilai pertanian dan perikanan, pembangunan perumahan beserta industri pendukungnya, serta peningkatan daya saing UMKM, termasuk sektor informal. Sejalan dengan implementasi KLM, hasil estimasi awal mengindikasikan potensi tambahan penyerapan tenaga kerja (Grafik 40), serta kredit baru yang meningkat pada sektor prioritas

Tabel 10. Jumlah Bank Penerima KLM

Rentang rasio	BUMN	BUSN	BPD	KCBA	Total
1% s.d. <2%	-	2	-	-	2
2% s.d. <3%	-	7	-	1	8
3% s.d. <4%	-	25	11	4	40
4% s.d. <5%	-	9	5	1	15
5% s.d. <6%	2	23	21	-	46
6.0%	3	6	2	1	12
Total	**5**	**72**	**39**	**7**	**123**

Keterangan: hingga Minggu ke-I November 2026.
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 40. Dampak Insentif KLM terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

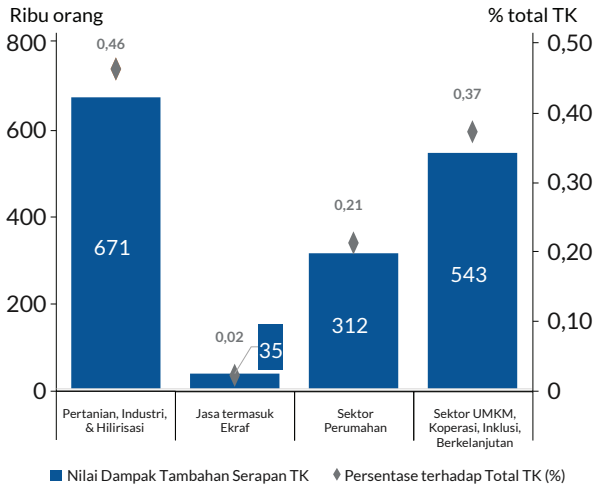

Keterangan: Estimasi berdasarkan pendekatan Bank Indonesia, dengan memanfaatkan Social Accounting Matrix 2022 dan realisasi KLM hingga September 2026.
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 41. Peningkatan Kredit Baru Sektor-Sektor Prioritas

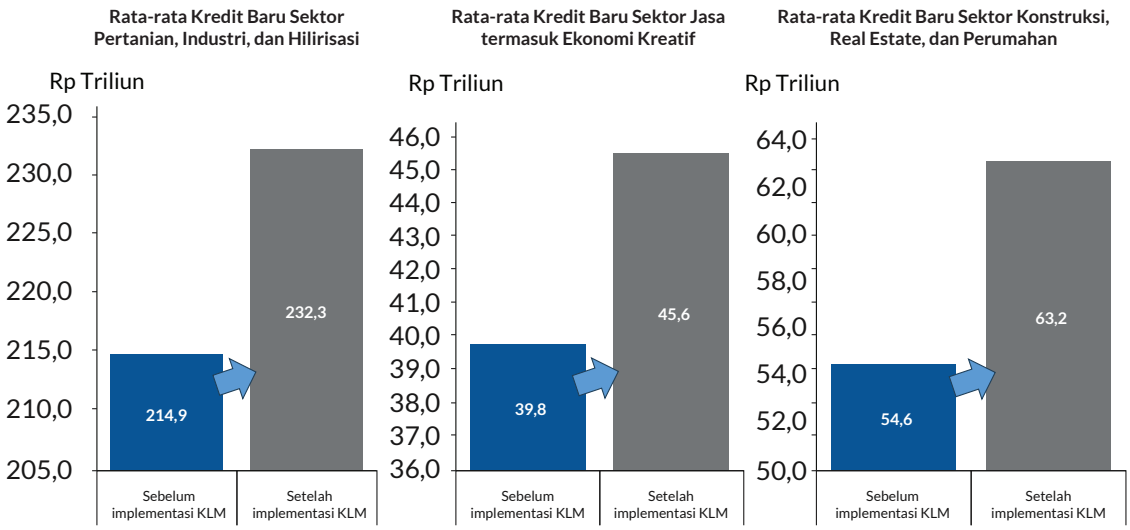

Catatan: untuk sektor pertanian, industri, dan hilirisasi, serta sektor jasa termasuk ekonomi kreatif, periode sebelum implementasi KLM mencakup Januari s.d. Desember 2024, sedangkan periode setelah implementasi mencakup Januari 2025 s.d. September 2026. Sementara itu, untuk sektor konstruksi, real estate, dan perumahan, periode sebelum implementasi KLM mencakup Januari 2024 s.d. Maret 2025, sedangkan periode setelah implementasi mencakup April 2025 s.d. September 2026.

Sumber: Bank Indonesia

(Grafik 41), terutama pada sektor Pertanian, Industri dan Hilirisasi, Perumahan, serta UMKM. Perkembangan ini memperkuat peran KLM sebagai pengungkit pembiayaan sektor riil sekaligus mendukung sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan program prioritas Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Bank Indonesia memperkuat RPLN untuk memperluas sumber pendanaan perbankan tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian. RPLN merupakan instrumen makroprudensial kontrasiklikal yang membatasi posisi kewajiban luar negeri jangka pendek bank relatif terhadap modal, dengan mempertimbangkan siklus ekonomi dan keuangan, dinamika utang luar negeri perbankan, serta risiko eksternal dan makrofinansial. Pengaturan tersebut memberikan fleksibilitas bagi perbankan dalam mengoptimalkan sumber pendanaan, sekaligus menjaga agar peningkatan pendanaan luar negeri tetap sejalan dengan kapasitas permodalan dan kemampuan bank dalam mengelola risiko. Dalam rangka memperkuat kapasitas pendanaan perbankan, Bank Indonesia meningkatkan batas maksimum RPLN dari 35% menjadi 40%[4] dari modal bank, yang berlaku efektif sejak 1 Juli 2026. Kebijakan ini diharapkan dapat memperluas ruang pendanaan perbankan selain DPK, termasuk sumber pendanaan dari luar negeri untuk mendukung penyaluran kredit/pembiayaan kepada sektor produktif. Implementasi RPLN dilakukan dengan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*), dengan memperhatikan risiko likuiditas, kredit, pasar, serta ketahanan permodalan, sehingga fleksibilitas pendanaan dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengurangi ketahanan sistem perbankan.

Bank Indonesia konsisten menjaga kecukupan likuiditas dan memperkuat fleksibilitas pengelolaan aset serta pendanaan perbankan melalui kebijakan PLM dan RIM. Bersama KLM dan RPLN, penguatan PLM dan RIM membentuk bauran kebijakan yang menyeimbangkan ketahanan likuiditas dengan kapasitas intermediasi perbankan. Pada 2026, Bank Indonesia mempertahankan rasio PLM yang longgar sebesar 4% bagi Bank Umum Konvensional (BUK) dan 2,5% bagi BUS/UUS, masing-masing dengan fleksibilitas repo sebesar 4% dan 2,5% (Grafik 42).

4 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank.

Grafik 42. Rasio PLM Perbankan

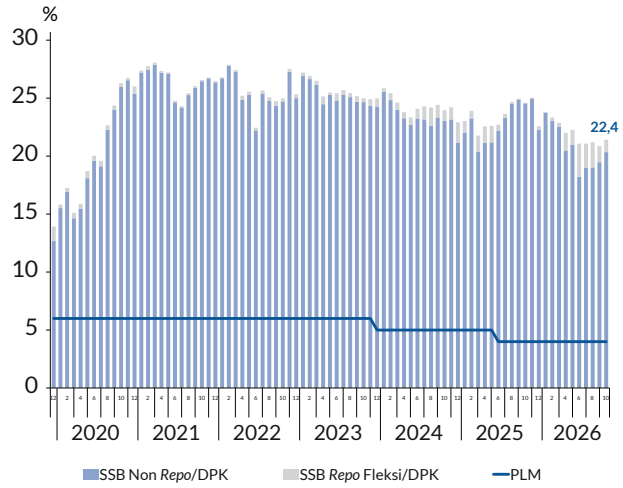

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 43. Distribusi Rasio PLM Perbankan

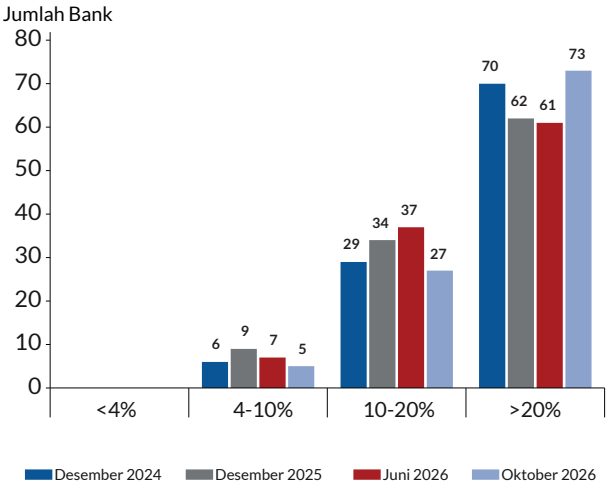

Sumber: Bank Indonesia

Bank Indonesia juga melakukan perluasan jenis surat berharga yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan PLM dan PLM Syariah[5]. Kebijakan ini memberikan ruang bagi perbankan untuk mengoptimalkan pengelolaan likuiditas melalui kepemilikan surat berharga berkualitas dan pemanfaatan transaksi repo. Pada Oktober 2026, seluruh bank memiliki rasio PLM di atas 4% dari DPK, dengan 73 bank mencatatkan rasio di atas 20% dan 27 bank pada kisaran 10–20% (Grafik 43). Kondisi ini menunjukkan tersedianya bantalan likuiditas yang memadai, sementara pemanfaatan transaksi repo turut mendukung fleksibilitas pengelolaan likuiditas perbankan. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia mempertahankan kisaran RIM sebesar 84–94%, dengan realisasi sebesar 87,99% pada akhir Oktober 2026 (Grafik 44). Sejak 1 Juli 2026, Bank Indonesia juga memperluas cakupan dan dasar perhitungan RIM terkait surat berharga korporasi dan surat berharga syariah korporasi yang dimiliki maupun diterbitkan bank, guna meningkatkan fleksibilitas pengelolaan aset dan pendanaan serta memperluas dukungan pembiayaan perekonomian. Ke depan, efektivitas bauran kebijakan tersebut akan terus dievaluasi dengan mempertimbangkan perkembangan likuiditas, pertumbuhan kredit/pembiayaan, permintaan pembiayaan dunia usaha, dan risiko terhadap stabilitas sistem keuangan.

5 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

Grafik 44. Perkembangan RIM Perbankan

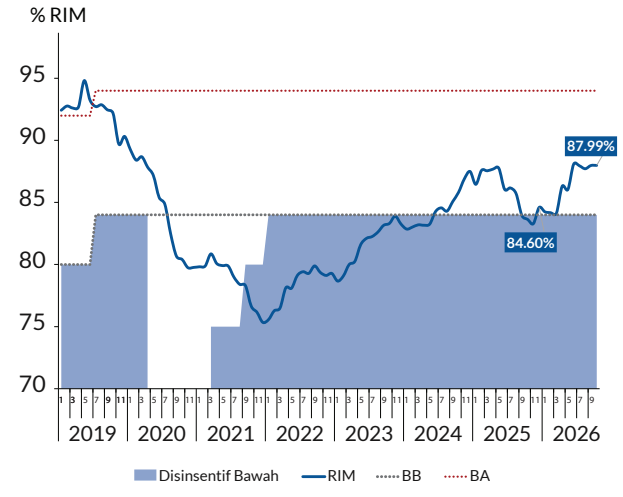

Sumber: Bank Indonesia

Bank Indonesia melanjutkan perluasan akses pembiayaan inklusif dan berkelanjutan melalui penyempurnaan RPIM yang berlaku sejak 1 Oktober 2026[6]. Penguatan kebijakan tersebut mempertimbangkan dinamika pembiayaan inklusif dalam beberapa tahun terakhir, tecermin dari pencapaian RPIM yang menurun dari 33,57% pada 2024 menjadi 32,04% pada 2025 (Grafik 45). Perkembangan tersebut sejalan dengan meningkatnya risiko kredit UMKM yang memengaruhi *appetite* perbankan dalam

6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah Peraturan Bank Indonesia Makroprudensial.

Grafik 45. Perkembangan Realisasi RPIM

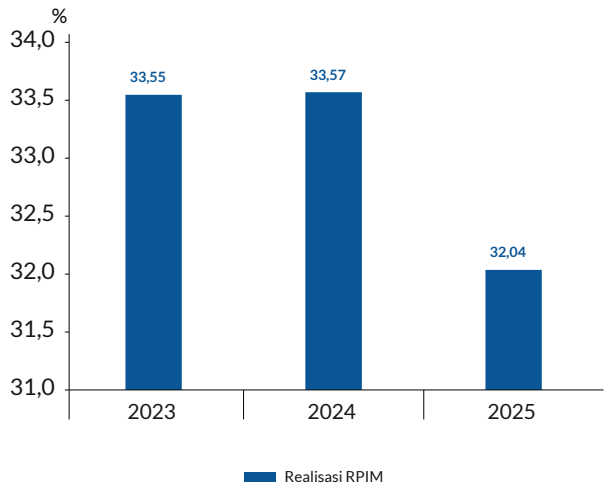

Sumber: Bank Indonesia

menyalurkan pembiayaan inklusif. Penguatan kebijakan RPIM diarahkan untuk mendorong penyaluran kredit/pembiayaan perbankan kepada sektor inklusif dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Penguatan tersebut mencakup: (i) perluasan pembiayaan kepada pemasok, distributor, dan/atau mitra badan usaha yang mendukung sektor inklusif; (ii) perluasan kerja sama penyaluran kredit UMKM antarbank umum melalui skema *channeling* dan *executing*; serta (iii) penguatan mekanisme transfer RPIM antarbank berbasis kontrak**.** Penyempurnaan ini dapat memperluas jalur pembiayaan bagi UMKM dan pelaku usaha dalam rantai pasok, memperkuat kolaborasi antarbank, serta meningkatkan efektivitas intermediasi bagi kelompok usaha yang memiliki peran penting dalam penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

Di samping penguatan pembiayaan inklusif, Bank Indonesia mempertahankan sejumlah instrumen makroprudensial yang akomodatif dengan tetap menjaga ketahanan sistem keuangan. Kebijakan tersebut meliputi rasio CCyB sebesar 0%, rasio LTV/FTV kredit/pembiayaan properti paling tinggi sebesar 100%, serta uang muka kredit kendaraan bermotor paling rendah sebesar 0% untuk bank. Asesmen transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) juga dilakukan untuk mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter dan makroprudensial Bank Indonesia. Bauran kebijakan ini ditujukan untuk menjaga ruang intermediasi perbankan, mendukung pembiayaan perumahan dan sektor produktif, serta memperluas akses pembiayaan. Implementasi tetap tunduk pada prinsip kehati-hatian serta akan dievaluasi secara berkala dan dinamis sesuai dengan siklus keuangan, perkembangan risiko, dan kebutuhan perekonomian nasional.

Bank Indonesia terus memperkuat surveilans makroprudensial untuk mengidentifikasi, mengukur, dan memitigasi risiko sistemik. Di tengah dinamika perekonomian global, volatilitas pasar keuangan, serta perubahan pola intermediasi perbankan, surveilans makroprudensial diarahkan untuk memperkuat pemahaman atas keterkaitan antara perkembangan makroekonomi dan kondisi keuangan perbankan, baik pada tingkat individual bank maupun secara sistemik. Asesmen mencakup risiko likuiditas, risiko pasar, termasuk risiko suku bunga dan nilai tukar, serta risiko kredit yang dapat timbul akibat perubahan kondisi ekonomi domestik dan global. Analisis dilakukan secara *forward-looking* dengan mempertimbangkan skenario makroekonomi, keterkaitan antarbank, konsentrasi eksposur, serta potensi rambatan risiko melalui interkoneksi di pasar uang dan pasar valuta asing. Pendekatan tersebut dilengkapi dengan uji ketahanan (*stress test*) untuk menilai kemampuan perbankan dalam menghadapi skenario tekanan dan mengidentifikasi kerentanan yang memerlukan respons kebijakan. Penguatan surveilans juga mencakup pemantauan terhadap aktivitas transaksi dan interkoneksi bank di pasar uang dan pasar valuta asing, serta penilaian atas kapabilitas manajemen risiko, sumber daya manusia, dan teknologi yang mendukung ketahanan operasional perbankan. Hasil surveilans menjadi masukan bagi perumusan kebijakan makroprudensial, penentuan fokus pengawasan sesuai kewenangan Bank Indonesia, serta penguatan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan otoritas terkait.

Bank Indonesia senantiasa menjalin sinergi kebijakan dengan Pemerintah, KSSK, dan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus meningkatkan kontribusi sektor keuangan terhadap pertumbuhan. Sinergi dilakukan melalui asesmen bersama terhadap perkembangan ekonomi dan

keuangan, pertukaran informasi, koordinasi respons kebijakan, serta penguatan kesiapan dalam menghadapi potensi tekanan sistemik. Koordinasi diarahkan agar kebijakan moneter, makroprudensial, fiskal, dan kebijakan sektor keuangan saling memperkuat. Dalam kerangka tersebut, kebijakan makroprudensial yang akomodatif diselaraskan dengan program Pemerintah untuk mendorong pembiayaan sektor prioritas, memperluas akses pembiayaan UMKM, dan menciptakan lapangan kerja.

Inisiasi PINISI menjadi salah satu manifestasi sinergi antara Bank Indonesia bersama Pemerintah, otoritas terkait, perbankan, investor, dan pelaku usaha untuk memperkuat intermediasi. *Flagship program* yang baru dicanangkan pada 2026 ini menjadi platform kolaborasi untuk membangun optimisme pelaku usaha, mempertemukan kebutuhan pembiayaan dengan proyek yang layak dibiayai, mengatasi hambatan intermediasi, dan mempercepat pembiayaan sektor riil guna mendukung Asta Cita. Hingga Oktober 2026, implementasi PINISI mencakup sekitar 35 kegiatan yang dikelompokkan dalam tiga agenda. Pertama, dialog kebijakan, seminar nasional, temu bisnis dan ekspos proyek, forum koordinasi, serta penyelesaian hambatan berusaha di tingkat pusat dan daerah, dengan melibatkan lebih dari 20 Kementerian/Lembaga (K/L) dan otoritas, pelaku industri, serta Danantara. Kedua, pendalaman proyek strategis nasional dan proyek unggulan daerah, termasuk penyelarasan dengan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dan pemutakhiran peta proyek oleh kelompok kerja terkait. Ketiga, perumusan rekomendasi untuk mengatasi kendala intermediasi, termasuk segmentasi likuiditas dan kebutuhan pendalaman pasar keuangan. Ke depan, PINISI akan berfokus pada hasil yang terukur melalui percepatan proyek yang siap dibiayai, penguatan keselarasan antarprogram, perluasan *Corporate Matching* berbasis rantai pasok, dan pemutakhiran sektor prioritas pembiayaan, peningkatan intensitas forum likuiditas, perluasan mitra kolaborasi, dan dukungan terhadap proyek strategis nasional baru.

Bank Indonesia mempererat kolaborasi internasional di bidang makroprudensial dan stabilitas sistem keuangan (SSK) sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan domestik dan berkontribusi pada stabilitas keuangan global. Komitmen tersebut tecermin melalui peran aktif Bank Indonesia dalam berbagai forum strategis internasional, seperti Financial Stability Board (FSB) dan Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), serta keterlibatan dalam mengawal inisiatif strategis di kawasan Asia Pasifik melalui EMEAP Task Force on Digital Fraud. Sepanjang 2026, Bank Indonesia juga menunjukkan *institutional leadership* di tingkat regional dan global melalui: (i) penyelesaian masa kepemimpinan sebagai Chair EMEAP Working Group on Banking Supervision (WGBS) untuk periode semester II 2024 sampai dengan semester I 2026; (ii) penyelenggaraan sebagai tuan rumah bersama OJK dalam rangkaian Basel Committee on Banking Supervision-International Conference of Banking Supervisors (BCBS-ICBS) Oktober 2026, yang mempertemukan sekitar 300 delegasi *high level* dari bank sentral, otoritas pengawas sektor keuangan, organisasi internasional, dan pelaku industri dari lebih dari 60 negara; serta (iii) berbagi pengalaman implementasi *best practice* kebijakan dan asesmen SSK di berbagai forum internasional, antara lain FSB Regional Consultative Group (RCG) Asia, SEACEN DGFSS, ASEAN WC-ABIF, serta AMRO-CEP-SEACEN *High-Level Roundtable*.

Kebijakan Sistem Pembayaran

Kebijakan sistem pembayaran pada 2026 diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui perluasan inklusi pembayaran, penguatan integrasi sistem pembayaran, serta penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan guna memberikan dampak nyata bagi perekonomian. Perluasan inklusi tecermin dari semakin luasnya akseptasi dan pemanfaatan pembayaran digital oleh masyarakat dan pelaku usaha, khususnya UMKM. Upaya ini turut diiringi dengan peningkatan efisiensi ekonomi melalui penyelenggaraan layanan pembayaran yang tersedia selama 24/7, bersifat *real-time*, dan dengan biaya yang lebih terjangkau. Di samping itu, penguatan infrastruktur sistem pembayaran serta peningkatan kapabilitas manajemen risiko industri sistem pembayaran terus dilakukan guna menjaga keamanan, keandalan, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran nasional.

Bank Indonesia terus memperluas akses masyarakat dan pelaku usaha terhadap layanan pembayaran digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sebagai satu-satunya standar nasional pembayaran berbasis QR, perluasan akseptasi QRIS terus dilakukan melalui intensifikasi edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha, termasuk UMKM. Upaya tersebut dilaksanakan secara masif dan merata, baik di tingkat nasional maupun daerah, dengan mengoptimalkan peran 46 Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Salah satu upaya yang ditempuh adalah penyelenggaraan program QRIS Jelajah Indonesia 2026 dan Pekan QRIS Nasional 2026 yang diarahkan untuk meningkatkan literasi pembayaran digital sekaligus memperluas pemanfaatan QRIS oleh masyarakat secara luas.

Perluasan akseptasi pembayaran digital didukung oleh pengembangan inovasi instrumen pembayaran yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pada 2026, Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) meluncurkan KKI sebagai inovasi industri sistem pembayaran domestik. Kehadiran instrumen ini memperkuat ekonomi keuangan digital nasional melalui peningkatan efisiensi transaksi, perluasan inklusivitas penyelenggara dan pengguna, serta penguatan daya saing pelaku usaha. KKI segmen ritel merupakan alternatif instrumen pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran (*deferred payment*) yang diproses secara domestik, dapat menjadi sumber dana transaksi dengan menggunakan QRIS, baik pindai (*scan*) maupun *tap*. Selain itu, Bank Indonesia terus memperluas implementasi QRIS Tanpa Pindai (QRIS TAP) khususnya pada sektor transportasi dan ritel guna meningkatkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi transaksi masyarakat. Cakupan akseptasi pembayaran digital juga diperluas melalui QRIS Antarnegara yang mempermudah transaksi wisatawan sekaligus membuka peluang bagi pelaku usaha, termasuk UMKM, untuk menjangkau konsumen mancanegara.

Perluasan akseptasi dan pengembangan inovasi tersebut diiringi dengan kebijakan efisiensi biaya transaksi untuk meningkatkan manfaat pembayaran digital bagi masyarakat dan pelaku usaha, khususnya UMKM. Bank Indonesia mengumumkan perluasan kebijakan MDR QRIS 0% yang berlaku efektif mulai 1 Oktober 2026. Kebijakan MDR 0% dilanjutkan bagi *merchant* Usaha Mikro (UMI) untuk transaksi sampai dengan Rp500.000. Pemberlakuan MDR 0% juga diperluas bagi seluruh kategori *merchant* untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Perluasan kebijakan ini meningkatkan efisiensi biaya transaksi bagi pelaku usaha dan mendorong semakin luasnya manfaat digitalisasi pembayaran bagi masyarakat. Selain itu, perpanjangan kebijakan Kartu Kredit (KK) dan kebijakan tarif Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) sampai dengan 31 Desember 2026 dilakukan untuk menjaga efisiensi biaya transaksi masyarakat.

Berbagai kebijakan tersebut mendukung peningkatan penggunaan QRIS yang turut mendorong aktivitas transaksi ritel, meningkatkan efisiensi pembayaran, dan pada gilirannya berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Hingga Oktober 2026, jumlah pengguna dan *merchant* QRIS masing-masing mencapai 71,9 juta dan 51,3 juta, dengan 96,9% dari total *merchant* merupakan UMKM (Grafik 46). Peningkatan akseptasi tersebut juga diikuti oleh pertumbuhan transaksi QRIS yang tetap tinggi, dengan volume transaksi pada Oktober 2026 tumbuh sebesar 71% (yoy) (Grafik 47). Akses yang lebih luas dan kemudahan pembayaran melalui QRIS mendorong terciptanya transaksi ritel baru, sementara tarif MDR yang lebih rendah mengurangi biaya bagi pelaku usaha, khususnya UMKM. Peningkatan aktivitas transaksi ritel dan efisiensi biaya pembayaran tersebut turut berkontribusi terhadap penguatan konsumsi rumah tangga, dan pada gilirannya mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif. Sebagai bukti nyata, dampak tersebut telah mendapat pengakuan internasional melalui 50-in-5 Awards 2026 kategori Kolaborasi, atas keberhasilan pengembangan QRIS Antarnegara dalam memperluas akses pembayaran lintas negara bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Grafik 46. Jumlah Pengguna dan *Merchant* QRIS

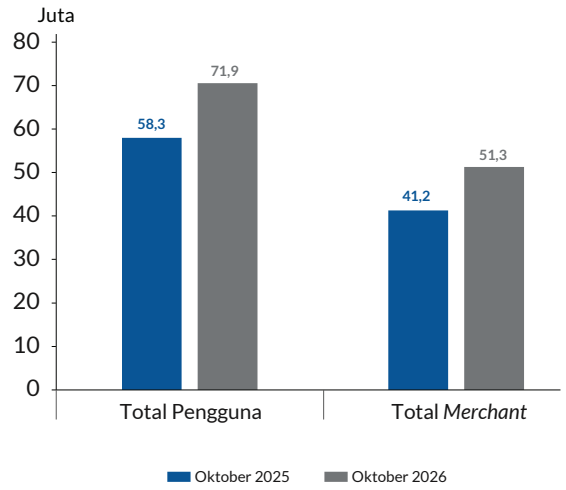

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 47. Perkembangan Transaksi QRIS

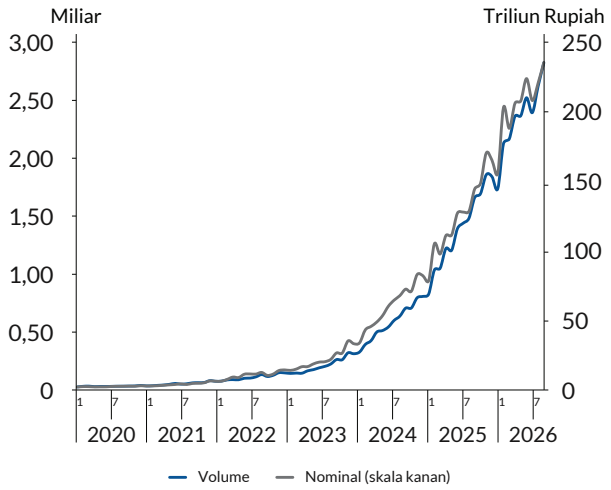

Sumber: Bank Indonesia

Sejalan dengan semakin luasnya akseptasi pembayaran digital, Bank Indonesia terus memperkuat integrasi sistem pembayaran untuk mendukung terbentuknya ekosistem ekonomi-keuangan digital nasional yang semakin konsolidatif. Penguatan integrasi ditempuh melalui penerapan QRIS sebagai standar nasional pembayaran berbasis kode QR dan pengembangan BI-FAST sebagai infrastruktur pembayaran ritel nasional. Inisiatif-inisiatif tersebut memperkuat interkoneksi dan interoperabilitas antarpenyelenggara sehingga fragmentasi layanan pembayaran berkurang, sebagaimana tecermin dari transaksi lintas penyelenggara (*off-us*) yang terus meningkat, dari 15,5 miliar pada 2025 menjadi 26,7 miliar hingga Oktober 2026 atau tumbuh 72,1% (yoy) (Grafik 48), dengan pangsa transaksi *off-us* yang terus meningkat dari 38,6% pada 2025 menjadi 48,4% pada 2026 (Grafik 49). Selain itu, penguatan interkoneksi layanan pembayaran dilakukan melalui implementasi Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) dengan tetap mengedepankan aspek keamanan data dan integritas transaksi. Pada Oktober 2026, volume transaksi melalui SNAP mencapai 2,7 miliar transaksi atau tumbuh 56,9% (yoy) (Grafik 50). Standardisasi juga menjadi landasan bagi

Grafik 48. Volume Transaksi *Off-Us*

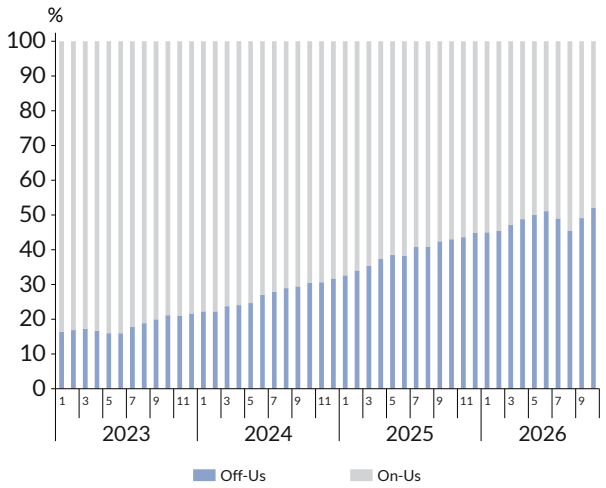

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 49. Pangsa Transaksi *Off-Us* dan *On-Us*

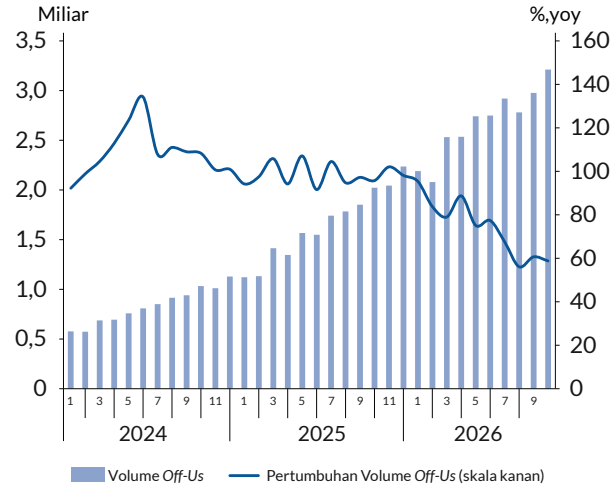

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 50. Perkembangan Transaksi SNAP dan API Proprietary

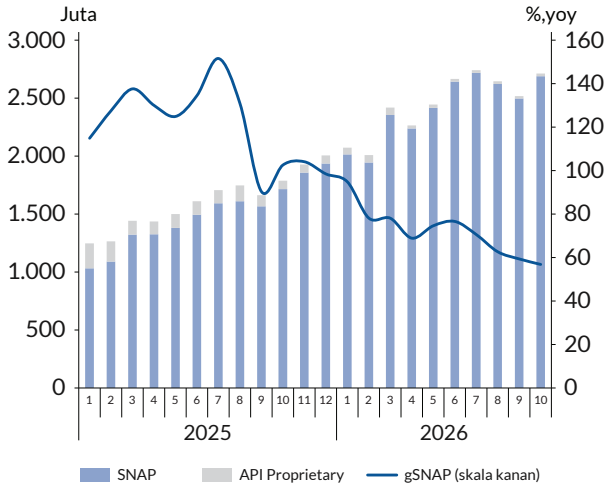

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 51. Perkembangan Transaksi BI-FAST dan Infrastruktur SP Ritel Lainnya

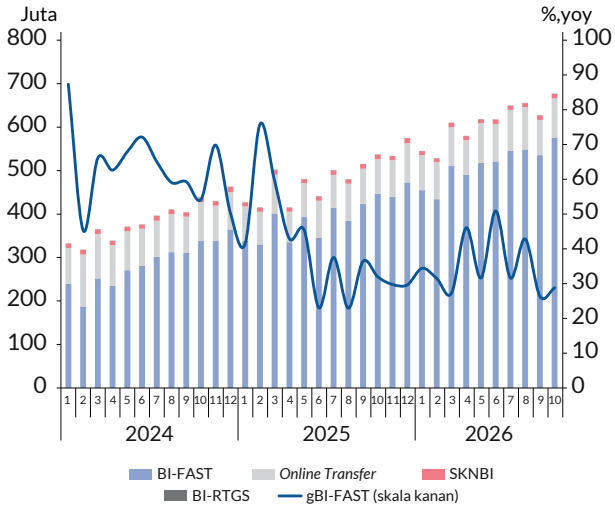

Sumber: Bank Indonesia

pengembangan inovasi pembayaran, antara lain melalui pemanfaatan jaringan akseptasi QRIS untuk transaksi KKI Segmen Ritel. Pada lingkup internasional, perluasan konektivitas melalui QRIS Antarnegara memungkinkan penyelenggara di negara mitra terhubung dengan basis pengguna dan jaringan *merchant* QRIS yang telah terbentuk secara luas. Konektivitas tersebut membuka ruang bagi peningkatan skala transaksi lintas negara, terutama transaksi *inbound* di jaringan *merchant* QRIS domestik.

Sebagai infrastruktur pembayaran ritel nasional yang beroperasi secara *real-time* selama 24/7, BI-FAST terus diperkuat untuk menyediakan layanan transaksi yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal. Penguatan tersebut diiringi dengan kinerja transaksi yang terus tumbuh. Pada Oktober 2026, volume transaksi BI-FAST mencapai 575,5 juta transaksi, meningkat 29% (yoy), dengan nilai transaksi sebesar Rp1.390,6 triliun atau tumbuh 24,7% (yoy), dan masih mendominasi transaksi ritel di bawah Rp250 juta (Grafik 51). Sejalan dengan perkembangan tersebut, optimalisasi layanan BI-FAST Fase I Tahap 2 terus dilakukan melalui fitur transfer secara kolektif (*bulk transfer*), pembayaran atas dasar permintaan (*request for payment*), dan transfer debit secara langsung (*direct debit*). Selain itu, optimalisasi layanan BI-FAST juga dilakukan melalui fitur *Financial Institution Credit Transfer* (FICT) guna memfasilitasi penyelesaian akhir transaksi antarpeserta yang diproses melalui Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP).

Peningkatan kinerja dan perluasan layanan juga didukung oleh penguatan stabilitas operasional dan keamanan BI-FAST secara *end-to-end*, baik di sisi peserta maupun penyelenggara. Penguatan dilakukan melalui peningkatan standar keamanan sistem informasi dan ketahanan siber, penerapan *Fraud Detection System* (FDS) untuk mendeteksi anomali transaksi, penguatan pemantauan operasional dan sistem peringatan dini, serta peningkatan kapasitas penanganan insiden dan pemulihan layanan. Peserta BI-FAST wajib memenuhi persyaratan teknis minimum proteksi infrastruktur teknologi informasi serta sistem pengelolaan *fraud* yang beroperasi secara *real-time* atau *near real-time* sebagai benteng pertahanan utama. Di sisi Penyelenggara, infrastruktur BI-FAST dilengkapi fitur FDS sebagai *third line of defense* untuk mendeteksi anomali dan memitigasi risiko transaksi mencurigakan berdasarkan kriteria tertentu seperti informasi rekening maupun pola transaksi. Bank Indonesia juga menyempurnakan ketentuan penyelenggaraan BI-FAST pada 2026 melalui penerbitan PADG Nomor 3 Tahun 2026, antara lain terkait kepesertaan, kerja sama dengan penyelenggara penunjang, operasional layanan, dan penguatan keamanan. Kebijakan tersebut ditempuh

sehingga peningkatan efisiensi dan kecepatan transaksi tetap disertai dengan terjaganya stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran nasional.

Penguatan struktur industri dan tata kelola Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PSP) juga dilakukan untuk memastikan akselerasi digitalisasi diimbangi dengan manajemen risiko yang semakin kuat. Bank Indonesia mengimplementasikan reformasi pengaturan industri sistem pembayaran melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengaturan Industri Sistem Pembayaran yang mulai berlaku pada 31 Maret 2026, beserta ketentuan pelaksanaannya. Reformasi tersebut mengedepankan pendekatan berbasis risiko melalui kerangka TIKMI (Transaksi, Interkoneksi, Kompetensi, Manajemen Risiko, dan Infrastruktur Teknologi Informasi) sebagai dasar penguatan penilaian kapasitas dan kapabilitas penyelenggara sistem pembayaran. Penguatan ini mencakup penataan struktur industri, kepesertaan dan perizinan, tata kelola, kompetensi sumber daya manusia, manajemen risiko, serta keandalan infrastruktur teknologi informasi. Bank Indonesia juga terus memperkuat pengawasan berbasis risiko terhadap PSP, termasuk terhadap risiko *fraud*, ancaman siber, dan risiko yang timbul dari peningkatan interkoneksi serta kompleksitas layanan pembayaran digital.

Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah Pusat dan Daerah, otoritas terkait, asosiasi, dan industri dalam mengakselerasi transformasi ekonomi dan keuangan digital nasional. Sinergi tersebut diarahkan untuk memperluas elektronifikasi transaksi Pemerintah, meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial, serta memperkuat ekosistem pembayaran digital nasional. Kelancaran penyaluran Bantuan Sosial Nontunai (BSNT) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terus dijaga melalui penguatan koordinasi, fasilitasi, sosialisasi, edukasi, dan monitoring dengan melibatkan seluruh Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Dalam mendukung digitalisasi transaksi Pemerintah Pusat dan Daerah, Bank Indonesia terus mendorong perluasan implementasi dan akseptasi KKI segmen Pemerintah, termasuk pemanfaatan QRIS untuk meningkatkan efisiensi transaksi keuangan Pemerintah. Sinergi dengan Pemerintah Daerah juga terus diperkuat bersama Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), antara lain melalui penyelenggaraan program Peningkatan Kapasitas dan Literasi Sinergi (KATALIS) P2DD 2026 untuk mempercepat elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan meningkatkan kualitas layanan publik.

Sinergi dengan otoritas, K/L, asosiasi, industri, dan akademisi juga semakin diperkuat dalam pengembangan inovasi dan talenta digital nasional. Pada 2026, Bank Indonesia bersama mitra strategis meluncurkan Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI) sebagai wadah kolaborasi untuk mempercepat pengembangan inovasi digital yang berorientasi pada kebutuhan industri dan masyarakat. Implementasi PIDI dilakukan melalui tiga pilar utama, yaitu *market intelligence* melalui Strategic Intelligent Market Analysis (SIGMA), *innovation experimentation* melalui Hackathon, serta *digital talent development* melalui program Digital Talenta Berdaya dan Berkarya (DIGDAYA). Hackathon diarahkan untuk mendorong pengembangan solusi inovatif atas berbagai tantangan ekonomi dan keuangan digital. Sementara itu, DIGDAYA difokuskan pada penguatan kapasitas dan kompetensi talenta digital melalui pelatihan, sertifikasi, pendampingan, serta fasilitasi kemitraan dengan industri. Capaian PIDI pada 2026 mendapat respons positif, tecermin dari keterlibatan peserta sebanyak 5.235 orang dan submisi 2.094 proposal, yang diseleksi secara berjenjang menjadi 80 tim *Capstone Project*, 20 finalis, hingga 10 inovasi terbaik (kategori profesional dan mahasiswa). Inovasi terbaik mencakup tema pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI), penguatan keamanan transaksi keuangan digital, perluasan pembiayaan UMKM, serta digitalisasi layanan publik dan penerimaan daerah yang diumumkan pada rangkaian Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit & Expo (FEKDI x IFSE) pada September 2026, yang sekaligus menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi kebijakan, mendorong pengembangan inovasi, serta meningkatkan kapasitas

talenta digital nasional. PIDI juga diintegrasikan dengan program KATALIS P2DD untuk memperluas pemanfaatan inovasi sistem pembayaran dalam meningkatkan efisiensi transaksi Pemerintah Daerah.

Bank Indonesia terus memperkuat dan memperluas kerja sama internasional di bidang sistem pembayaran melalui pengembangan konektivitas pembayaran lintas negara dan peningkatan penggunaan mata uang lokal. Dalam kerangka *Regional Payment Connectivity* (RPC), Bank Indonesia bersama bank sentral dan otoritas negara mitra terus memperluas kerja sama QRIS Antarnegara guna mewujudkan transaksi lintas batas yang lebih cepat, murah, transparan, dan inklusif. Setelah terhubung dengan Tailan, Malaysia, Singapura, dan Jepang (*outbound*), konektivitas QRIS Antarnegara pada 2026 diperluas melalui peluncuran kerja sama dengan Korea Selatan pada 1 April 2026 dan Tiongkok pada 30 April 2026. Pada Oktober 2026, total transaksi *inbound* QRIS Antarnegara mencapai 3,75 juta transaksi atau tumbuh 452% (yoy) (Grafik 52), dan total transaksi *outbound* mencapai 396,27 ribu transaksi atau tumbuh 121% (yoy) (Grafik 53). Perluasan kerja sama internasional juga terus dijajaki dengan negara mitra potensial lainnya, termasuk melalui penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dan Banco Central de Timor-Leste pada September 2026 yang mencakup pengembangan sistem pembayaran, inovasi keuangan digital, dan penjajakan implementasi QRIS Antarnegara. Untuk mengoptimalkan manfaat konektivitas pembayaran khususnya bagi sektor pariwisata, Bank Indonesia bersama K/L dan asosiasi terkait juga menginisiasi Indonesia Travel Pack pada FEKDI x IFSE 2026. Penguatan konektivitas pembayaran lintas negara tersebut turut disinergikan dengan perluasan kerangka LCT untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan dan investasi bilateral, sekaligus mendukung diversifikasi mata uang dan pengurangan ketergantungan terhadap mata uang utama dunia.

Upaya-upaya tersebut juga diimbangi dengan penguatan sinergi bersama otoritas, asosiasi, dan pelaku industri untuk menjaga integritas transaksi serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran nasional. Pada 2026, Bank Indonesia memperkuat kerangka kerja sama dengan penyelenggara jasa sistem pembayaran melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Data Sistem Pembayaran, yang menjadi payung hukum pertukaran data dalam rangka identifikasi transaksi terindikasi *fraud*. Koordinasi lintas otoritas dan industri melalui Indonesia *Anti-Scam Centre* (IASC) OJK turut mendukung percepatan pertukaran *database fraudster*, serta penanganan laporan penipuan dan pemblokiran rekening yang terindikasi digunakan dalam penipuan.

Grafik 52. Perkembangan Transaksi *Inbound* QRIS Antarnegara

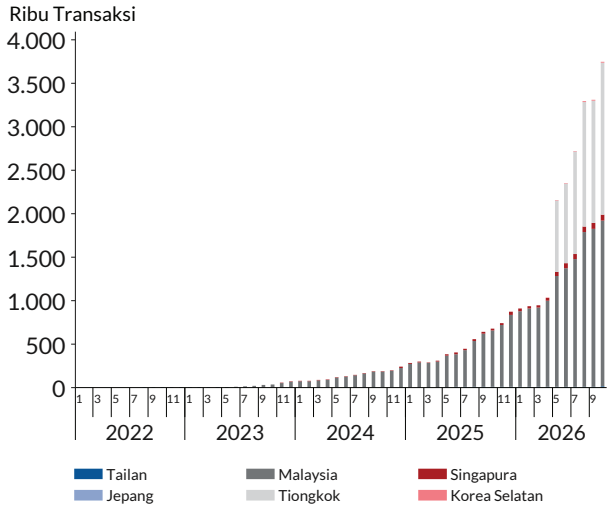

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 53. Perkembangan Transaksi *Outbound* QRIS Antarnegara

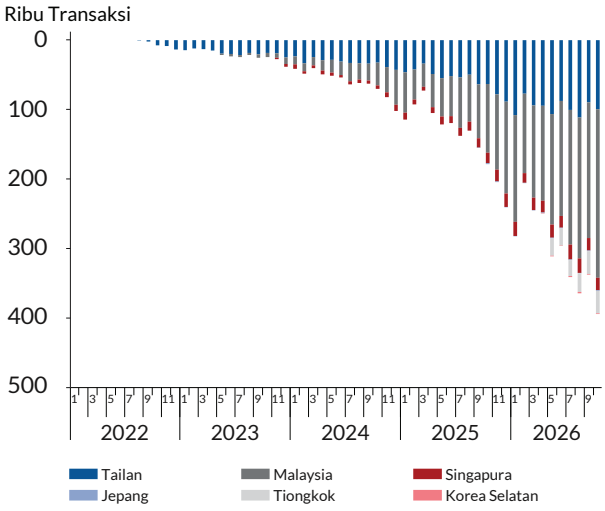

Sumber: Bank Indonesia

Berbagai capaian kebijakan sistem pembayaran sepanjang 2026 menunjukkan bahwa transformasi digital telah berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi transaksi ekonomi, memperluas inklusi keuangan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan sistem pembayaran. Implementasi BSPI 2030 melalui inisiatif Infrastruktur, Industri, Inovasi, Internasional, dan Rupiah Digital (4I-RD) telah berhasil memperluas akseptasi pembayaran digital dan memperkuat interoperabilitas. Capaian tersebut didukung oleh kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, telah menjadi fondasi penting bagi pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional. Namun demikian, besarnya potensi digitalisasi yang belum dimanfaatkan secara optimal, disertai peningkatan kompleksitas risiko, menuntut keberlanjutan transformasi sistem pembayaran yang tidak hanya berorientasi pada akselerasi pertumbuhan, tetapi juga penguatan keamanan dan ketahanan ekosistem. Oleh karena itu, arah kebijakan sistem pembayaran ke depan akan terus difokuskan pada akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk mendukung integrasi Ekonomi-Keuangan Digital (EKD) konsolidatif dan berdaya tahan, yang akan diimbangi dengan penguatan stabilitas dan manajemen risiko.

Di bidang pengelolaan uang Rupiah, Bank Indonesia terus mengakselerasi transformasi berlandaskan *Blueprint* Pengelolaan Uang Rupiah (BPPUR) 2024–2030 untuk mewujudkan pengelolaan uang yang modern, kolaboratif, dan berkelanjutan. Transformasi tersebut semakin relevan di tengah fenomena *cash paradox*, ketika kebutuhan uang kartal tetap tumbuh seiring pesatnya digitalisasi sistem pembayaran. Pada Oktober 2026, jumlah uang kartal di masyarakat (*Currency Outside Banks*/COB) mencapai Rp1.253 triliun atau tumbuh 12,6% (yoy), sementara volume transaksi pembayaran digital meningkat 31,47% (yoy) menjadi 6,18 miliar transaksi. Merespons dinamika tersebut, Bank Indonesia terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyediaan uang Rupiah melalui penguatan akurasi perencanaan kebutuhan uang, optimalisasi persediaan, serta penyempurnaan proses bisnis berbasis otomasi dan digitalisasi. Upaya tersebut didukung pengembangan Sentra Pengelolaan Uang (SPU) dan Depo Kas Utama (DKU) sebagai infrastruktur pengelolaan uang Rupiah yang semakin modern, terintegrasi, dan andal. Di sisi pasokan, ketahanan dan kemandirian bahan baku uang menjadi prioritas strategis, mengingat kebutuhan kertas uang Indonesia mencapai sekitar 6,5 miliar bilyet per tahun atau terbesar keempat di dunia, sementara jumlah pemasok kertas uang global yang teridentifikasi relatif sangat terbatas, yakni hanya sebanyak 19 pemasok. Kondisi tersebut, di tengah ketidakpastian geopolitik dan risiko gangguan rantai pasok global, menegaskan pentingnya penguatan kapasitas industri domestik melalui kemitraan strategis. Upaya ini telah membuahkan capaian signifikan, dengan meningkatnya porsi pemenuhan kebutuhan kertas uang dari pemasok dalam negeri, dari hanya 7% pada periode 2016–2017 hingga saat ini telah mencapai 57%. Capaian tersebut menandai kemajuan penting menuju kemandirian pasokan nasional, dengan kapasitas industri domestik yang telah mampu memenuhi lebih dari separuh kebutuhan kertas uang Indonesia. Keseluruhan langkah tersebut memperkuat keandalan dan ketahanan pengelolaan uang Rupiah dalam mendukung kelancaran sistem pembayaran serta menjaga kedaulatan Rupiah.

Bank Indonesia terus memperkuat pengedaran dan memperluas jangkauan layanan untuk memastikan ketersediaan uang Rupiah yang berkualitas, merata, dan mudah diakses masyarakat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi jaringan distribusi, peningkatan efisiensi layanan kas, serta perluasan sinergi dengan perbankan dan mitra strategis. Salah satu capaian penting adalah konversi seluruh 87 lokasi Kas Titipan menjadi Sentra Kas Mitra (SKM) atau mencapai 100%, disertai penguatan model bisnis melalui SKM Utama yang menyediakan layanan penyetoran, penarikan, pengolahan, penukaran uang Rupiah, serta edukasi Cinta, Bangga, Paham Rupiah, dan SKM Rintis yang berfokus pada perluasan akses layanan penukaran uang Rupiah. Untuk menjangkau wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), Bank Indonesia juga terus menyelenggarakan Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) bersinergi dengan TNI Angkatan Laut. Selain itu, melalui program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri (SERAMBI) 2026, Bank Indonesia bersama perbankan menyiapkan uang Rupiah layak edar sebesar Rp185,6

triliun, dengan realisasi mencapai 1,28 juta penukar (meningkat 49%) dan 10.757 titik layanan (meningkat 56%) dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian tersebut didukung optimalisasi aplikasi PINTAR guna meningkatkan kemudahan, kepastian, dan pemerataan akses layanan penukaran. Keseluruhan upaya tersebut menegaskan komitmen Bank Indonesia dalam memastikan ketersediaan uang Rupiah yang cukup, sesuai pecahan, layak edar, dan terdistribusi merata untuk mendukung kelancaran aktivitas perekonomian masyarakat.

Bank Indonesia terus memperkuat ekosistem pengelolaan uang Rupiah melalui penyempurnaan kerangka regulasi, penguatan tata kelola industri, serta perluasan sinergi dan kolaborasi di tingkat nasional dan internasional. Penguatan regulasi diwujudkan melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Uang Rupiah Kertas dan Logam serta Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 23 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengedaran Uang Rupiah Kertas dan Logam, sebagai landasan penguatan efektivitas pengedaran, tata kelola dan pengawasan industri Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR), serta sinergi dengan perbankan dan mitra strategis. Penguatan ekosistem juga dilakukan melalui peningkatan literasi dan kepercayaan masyarakat terhadap Rupiah melalui kampanye Cinta, Bangga, Paham Rupiah, termasuk penyelenggaraan Festival Rupiah Berdaulat Indonesia (FERBI) 2026 bertema *Rupiah Berdaulat, Indonesia Bermartabat*. Keseluruhan inisiatif tersebut diarahkan untuk membangun ekosistem pengelolaan uang Rupiah yang semakin modern, kolaboratif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kontribusi Bank Indonesia dalam pengembangan praktik pengelolaan uang di tingkat internasional.

Bank Indonesia terus memperkuat komitmen pengelolaan uang Rupiah yang berkelanjutan melalui penerapan prinsip ekonomi sirkular dan inovasi ramah lingkungan yang memperoleh pengakuan internasional. Sejalan dengan BPPUR 2024–2030, penguatan Pengelolaan Uang Rupiah (PUR) berkelanjutan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pencetakan, pengedaran, hingga pemusnahan uang Rupiah. Pada aspek pencetakan, Bank Indonesia mendorong pengembangan bahan uang yang lebih tahan lama (*durable paper*) untuk memperpanjang usia edar dan meningkatkan efisiensi sumber daya. Pada aspek pengedaran, optimalisasi distribusi dan pengembangan sarana distribusi ramah lingkungan terus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi emisi. Sementara itu, pada aspek pemusnahan, Bank Indonesia mengembangkan pemanfaatan Limbah Racik Uang Kertas (LRUK) menjadi sumber energi alternatif (*waste to energy*) maupun produk bernilai ekonomi (*waste to product*) melalui kolaborasi dengan industri energi dan UMKM. Hingga Oktober 2026, sebanyak 72% LRUK telah dimanfaatkan secara berkelanjutan, dengan target pemanfaatan sirkular mencapai 100% pada 2027. Inovasi tersebut memperoleh pengakuan internasional melalui penghargaan *International Association of Currency Affairs* (IACA) *Excellence in Currency Awards* 2026 kategori *Best New Environmental Sustainability Project* atas program Rupiah *Waste to Worth Collaboration*. Capaian ini menegaskan komitmen Bank Indonesia dalam membangun pengelolaan uang Rupiah yang semakin efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan, sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi dan mendukung kedaulatan Rupiah.

Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing

Bank Indonesia terus memperkuat akselerasi pendalaman PUVA yang modern dan maju melalui implementasi BPPU 2030. Memasuki tahap lanjutan implementasi BPPU 2030 di tahun 2026, kebijakan pendalaman PUVA difokuskan pada penguatan ekosistem pasar keuangan melalui pengembangan produk (*product*) yang variatif dan likuid, pembentukan harga (*pricing*) yang efisien, kredibel, dan transparan, peningkatan peran pelaku pasar (*participants*) yang aktif, kompeten, dan berintegritas, serta penguatan infrastruktur pasar keuangan (*infrastructure*) yang memenuhi prinsip interkoneksi, interoperabilitas, dan integrasi (3i). Penguatan keempat aspek tersebut ditempuh secara terintegrasi dengan optimalisasi strategi OM *pro-market*, perluasan digitalisasi data, serta penguatan kerangka pengaturan dan pengawasan

PUVA sesuai dengan mandat UU P2SK, yang disertai dengan sinergi kebijakan bersama otoritas terkait dan pelaku pasar. Melalui berbagai upaya tersebut, Bank Indonesia berkomitmen untuk memperkuat peran PUVA sebagai fondasi pasar keuangan yang tangguh dan berdaya saing, sekaligus meningkatkan kontribusinya dalam mendukung stabilitas nilai Rupiah, efektivitas transmisi kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan pembiayaan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Di pasar uang, kebijakan pengembangan pasar ditempuh melalui berbagai inisiatif untuk meningkatkan likuiditas transaksi, utamanya transaksi repo dan *Overnight Index Swap* (OIS). Pada pasar repo, penguatan aktivitas transaksi didukung oleh peningkatan peran Dealer Utama (DU) PUVA dalam memperluas jaringan *counterparty* dan penandatanganan *Global Master Repurchase Agreement* (GMRA), yang mendorong penguatan interkoneksi antarpelaku serta perluasan basis transaksi. Pengembangan pasar repo juga diperkuat melalui perluasan jenis surat berharga yang dapat digunakan sebagai *underlying* transaksi repo dalam operasi moneter, yaitu dengan menambahkan obligasi/sukuk korporasi yang diterbitkan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Hingga 20 November 2026, rerata harian nilai transaksi pasar uang mencapai Rp60,25 triliun, tumbuh 15,41% dari rerata harian pada tahun 2025. Lebih lanjut, rerata harian transaksi repo per 20 November 2026 mencapai Rp22,2 triliun, meningkat 21,25% dibandingkan dengan 2025 sebesar Rp18,3 triliun (Grafik 54). Sementara itu, peningkatan aktivitas transaksi OIS didukung oleh penerbitan BI-*Floating Rate Note* (BI-FRN) yang meningkatkan kebutuhan lindung nilai suku bunga serta pelaksanaan *matchmaking* transaksi yang memfasilitasi interaksi antarpelaku pasar dan proses pembentukan harga (*price discovery*). Transaksi OIS mencatatkan rerata harian nilai transaksi sebesar Rp101,6 miliar, atau tumbuh 84,37% dibandingkan dengan 2025 yang sebesar Rp55,1 miliar. Perkembangan positif dimaksud mencerminkan semakin kuatnya peran instrumen pasar uang dalam mendukung efisiensi pengelolaan likuiditas, penguatan mekanisme pembentukan harga, serta pengelolaan risiko suku bunga. Khususnya pada

Grafik 54. Perkembangan Transaksi Pasar Uang (PUAB, Repo, SRBI)

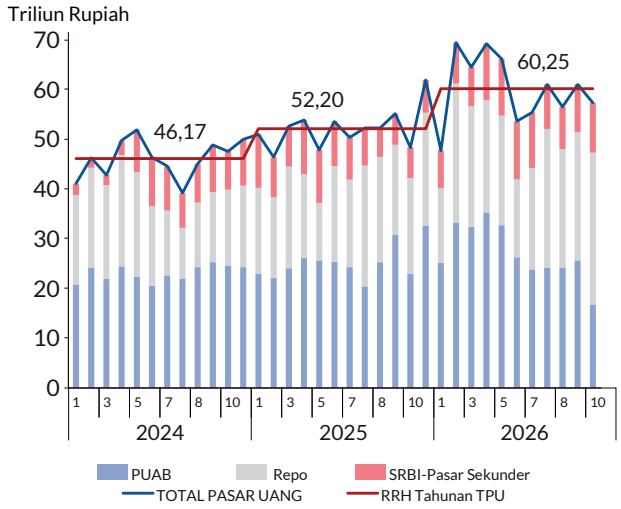

Sumber: Bank Indonesia

pasar repo, peningkatan pemanfaatan surat berharga sebagai *underlying* repo, termasuk SBN, juga berpotensi memperkuat likuiditas pasar sekunder SBN dan mendukung efisiensi pembiayaan fiskal Pemerintah.

Pendalaman pasar uang juga diperkuat dengan strategi operasi moneter *pro-market* yang diterapkan Bank Indonesia. Strategi operasi moneter (OM) *pro-market* di antaranya dilakukan melalui optimalisasi instrumen pasar uang yaitu SRBI, SUKBI, SVBI, SUVBI, dan BI-FRN guna mendorong peningkatan transaksi instrumen pasar uang tersebut di pasar sekunder sehingga memperkuat fungsi pasar sebagai sumber pembentukan harga (*price discovery*). Pada semester I 2026, Bank Indonesia juga menambahkan SVBI dan SUVBI sebagai surat berharga yang dapat digunakan dalam Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia terus mengoptimalkan peran Dealer Utama PUVA untuk peningkatan transaksi dan interkoneksi antarpelaku transaksi. Strategi dimaksud berdampak positif bagi transaksi pasar sekunder instrumen pasar uang terlihat dari peningkatan transaksi sekunder SRBI pada tahun 2026. Pascaimplementasi Dealer Utama PUVA pada Mei 2024, rerata harian transaksi *outright* SRBI di pasar sekunder terus mengalami peningkatan hingga mencapai Rp9,68 triliun pada semester II 2026 (hingga 20 November 2026), atau tumbuh 42,19% dibandingkan rerata semester II 2025 sebesar Rp6,81 triliun (Grafik 55). Lebih lanjut, rerata harian volume

Grafik 55. Perkembangan Transaksi SRBI secara *Outright* (RRH)

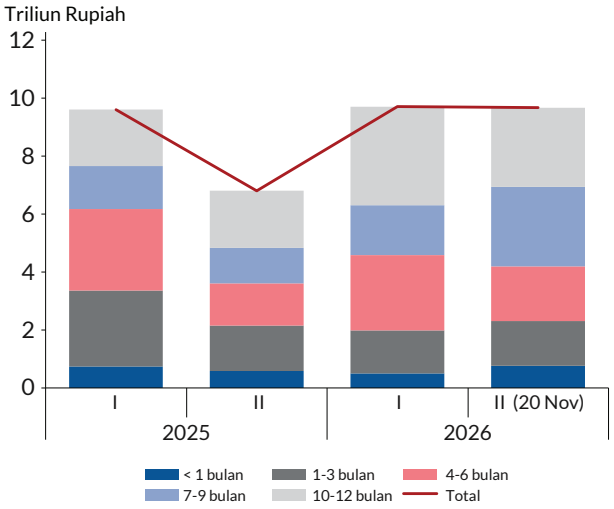

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 56. Perkembangan Transaksi SRBI secara *Outright* oleh Dealer Utama PUVA

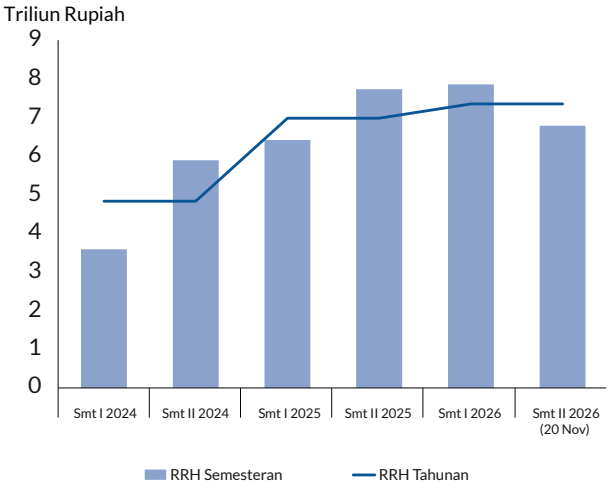

Sumber: Bank Indonesia

transaksi SRBI secara *outright* oleh Dealer Utama PUVA juga terus meningkat, yang hingga semester II 2026 tercatat mencapai Rp6,79 triliun (Grafik 56).

Penguatan kebijakan pendalaman pasar valas terus ditempuh untuk meningkatkan aktivitas transaksi dan memperluas pemanfaatan instrumen derivatif dalam mendukung pengelolaan risiko nilai tukar. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia terus memperkuat ekosistem transaksi derivatif valas melalui peningkatan peran Dealer Utama PUVA, penguatan standardisasi kontrak dan mekanisme pengelolaan margin, serta pengembangan kerangka hukum pengelolaan agunan melalui pengaturan *transfer of title* kolateral pada amendemen UU P2SK 2026. Penguatan ekosistem tersebut dapat mendukung penerapan persyaratan margin atas transaksi derivatif yang tidak dikliringkan (*Non-Centrally Cleared Derivatives*) yang berlaku sejak 1 September 2025 dan meningkatkan pemanfaatan *Central Counterparty* (CCP) PUVA dalam mendukung mitigasi risiko pihak lawan (*counterparty risk*).

Berbagai kebijakan tersebut turut mendukung perkembangan positif aktivitas transaksi valas sepanjang 2026. Hingga 20 November 2026, nilai rerata harian transaksi valas tercatat sebesar 12,35 miliar dolar AS, meningkat 21,67% dari 10,15 miliar dolar AS pada 2025 (Grafik 57). Meskipun masih didominasi transaksi *spot*, porsi transaksi derivatif valas terus menunjukkan peningkatan yang konsisten, dari 43% pada 2025 menjadi 46% pada 2026. Peningkatan dimaksud terutama ditopang oleh transaksi *swap* yang tumbuh sebesar 28%, dengan pangsa terhadap keseluruhan transaksi valas meningkat dari 31% menjadi 32%. Selain itu, meskipun tidak sebesar porsi transaksi *swap*, transaksi *forward* dan *option* juga turut mencatatkan pertumbuhan signifikan, masing-masing sebesar 30% dan 95%, dengan kontribusi terhadap keseluruhan transaksi valas sebesar 7% dan 1%. Di sisi lain, transaksi DNDF mulai menunjukkan pemulihan setelah Bank melakukan penyesuaian atas ketentuan margin NCCD, yang dicerminkan dari nilai rerata harian transaksi DNDF yang sempat turun ke angka

Grafik 57. Perkembangan Transaksi Pasar Valas

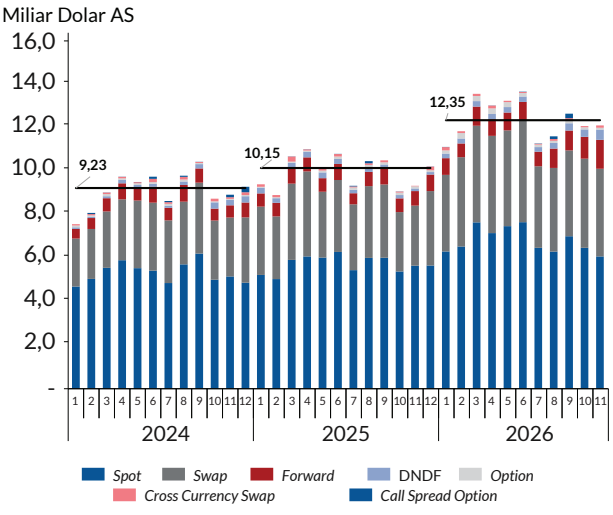

Sumber: Bank Indonesia

346 juta dolar AS pada triwulan IV 2025 meningkat menjadi 630 juta dolar AS sepanjang 2026 (hingga 20 November 2026).

Bank Indonesia juga mengembangkan skema Transaksi Pasar Valuta Asing untuk Lindung Nilai melalui Bank Mitra (VASTRA) guna memperluas akses lindung nilai valuta asing terhadap Rupiah bagi investor global. Dalam skema ini, *Registered Global Investor* (RGI) dapat melakukan transaksi melalui *Overseas Partner of DPB* (OPB) yang diteruskan secara *back-to-back* kepada *Domestic Partner Bank* (DPB) tanpa kewajiban menyampaikan dokumen *underlying*. Lebih lanjut, VASTRA juga dapat didukung insentif lindung nilai valuta asing oleh Bank Indonesia.

Skema VASTRA memberikan beberapa kemudahan bagi investor asing untuk melakukan lindung nilai (Gambar 5). Manfaat tersebut antara lain (i) efisiensi administrasi transaksi yang dapat dilakukan tanpa dokumen *underlying*; (ii) kemudahan akses lindung nilai dengan bertransaksi melalui OPB; (iii) fleksibilitas waktu, tidak terbatas dengan waktu perbankan domestik Indonesia; serta (iv) harga lindung nilai yang terhubung langsung dengan harga di pasar domestik dan dapat lebih kompetitif, terutama dengan tersedianya insentif lindung nilai dari Bank Indonesia. Manfaat ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investasi portofolio asing di Indonesia yang mendorong aliran masuk modal asing, sekaligus memperkuat keterhubungan pasar valas domestik dengan pasar keuangan global yang pada akhirnya mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah. Sejak diimplementasikan per tanggal 23 Juli 2026 melalui PADG No. 20 Tahun 2026 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing untuk Lindung Nilai melalui Bank Mitra, Bank Indonesia telah menetapkan 18 (delapan belas) DPB yang ditindaklanjuti dengan pendaftaran 22 (dua puluh dua) OPB dan 51 (lima puluh satu) RGI.

Bank Indonesia juga terus memperkuat kebijakan dalam menjaga stabilitas nilai Rupiah melalui pengembangan pasar valas non-USD guna mendukung peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan negara mitra (LCT). Merespons meningkatnya permintaan RMB dalam skema transaksi LCT Tiongkok, yang terindikasi dari rerata bulanan transaksi yang tumbuh sebesar 302%, dari 1,1 miliar dolar AS pada tahun 2025 menjadi 4,6 miliar dolar AS pada 2026 (hingga Oktober 2026), Bank

Gambar 5. Skema VASTRA

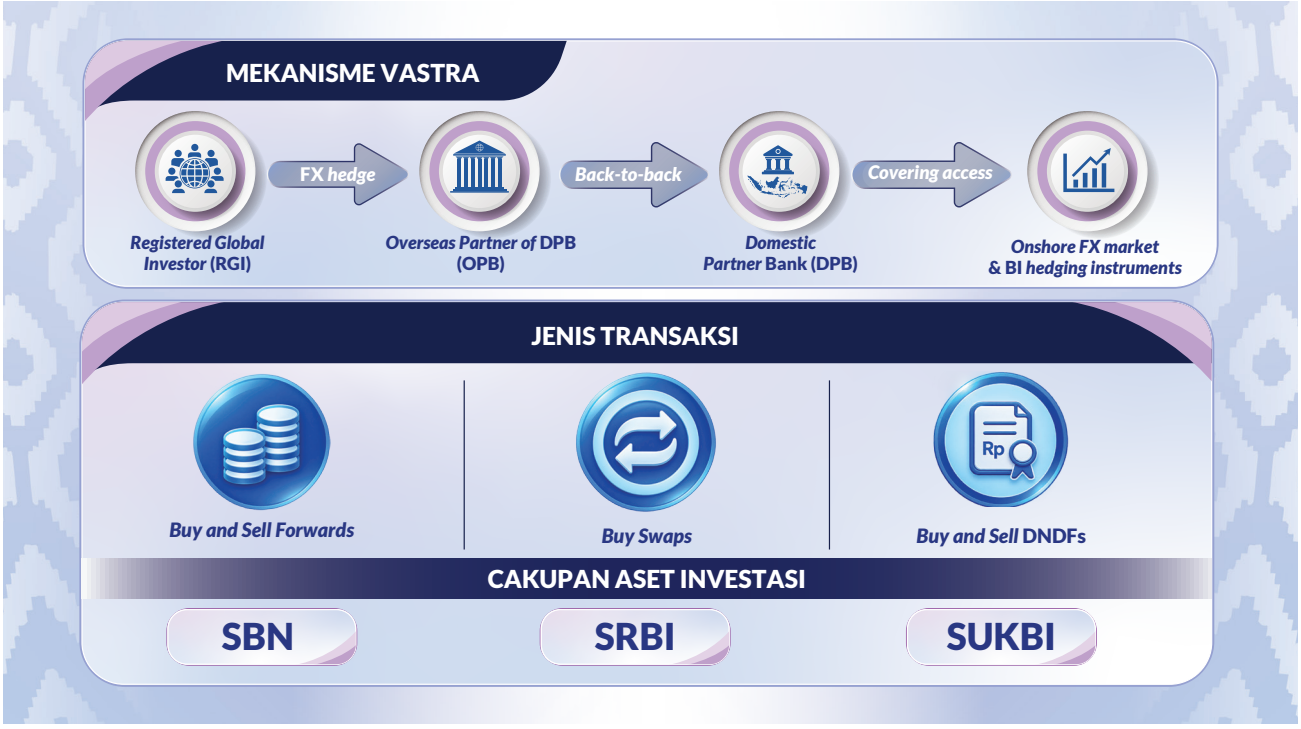

Sumber: Bank Indonesia

Indonesia melakukan penguatan ekosistem transaksi Renminbi–Rupiah melalui pengembangan Renminbi Clearing Bank (RMB CB) di Indonesia. Penguatan tersebut didukung penerbitan PADG Nomor 24 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PADG Nomor 17 Tahun 2025 mengenai Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Tiongkok Menggunakan Rupiah dan Renminbi melalui Bank. Ketentuan tersebut memperkuat peran Bank *Appointed Cross Currency Dealer* (ACCD) Indonesia yang direkomendasikan Bank Indonesia dan ditetapkan oleh People's Bank of China (PBOC) sebagai RMB CB untuk mendukung kegiatan kliring Renminbi dalam mendukung penyelesaian transaksi PUVA. Pengembangan RMB CB juga diarahkan untuk memperkuat penyediaan likuiditas Renminbi, meningkatkan efisiensi kliring dan penyelesaian transaksi, serta memperluas keterhubungan infrastruktur pasar keuangan Indonesia dengan Tiongkok. Melalui penguatan tersebut, penggunaan mata uang lokal, termasuk RMB diharapkan semakin meningkat dalam mendukung aktivitas perdagangan, investasi, dan transaksi keuangan bilateral, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap mata uang utama dan memperkuat ketahanan pasar valuta asing domestik. Bank ACCD di Indonesia yang telah direkomendasikan Bank Indonesia dan ditetapkan oleh PBOC di Indonesia dan juga berfungsi sebagai lembaga pendukung PUVA per tanggal 8 September 2026, yaitu Bank of China (HK) Jakarta.

Di sisi *pricing*, Bank Indonesia terus memperkuat kredibilitas dan transparansi harga di PUVA melalui reformasi suku bunga acuan serta pengembangan struktur harga yang semakin berbasis transaksi aktual. Reformasi mekanisme pembentukan harga diawali dengan penghentian publikasi *Jakarta Interbank Offered Rate* (JIBOR) secara permanen sejak 1 Januari 2026, yang kemudian digantikan oleh penggunaan *Indonesia Overnight Index Average* (INDONIA) sebagai suku bunga acuan utama yang mencerminkan kondisi likuiditas pasar berdasarkan transaksi aktual. Sejalan dengan reformasi suku bunga acuan (*benchmark reform*), Bank Indonesia terus mendorong pengembangan pemanfaatan INDONIA dan transaksi OIS untuk mendukung pembentukan struktur suku bunga yang bersifat *forward-looking*, antara lain melalui penerbitan BI-FRN dan fasilitasi *matchmaking* transaksi OIS. Upaya tersebut diperkuat melalui peluncuran publikasi transaksi pasar uang pada 8 Juni 2026 yang disusun berdasarkan harga dan volume transaksi aktual repo serta SRBI di pasar sekunder.

Di pasar valas, penguatan mekanisme pembentukan harga terus diarahkan pada peningkatan kredibilitas dan representativitas kurs acuan guna mendukung transparansi dan efisiensi transaksi. Bank Indonesia terus memperkuat peran *Jakarta Interbank Spot Dollar Rate* (JISDOR) sebagai kurs acuan USD/IDR yang berbasis transaksi aktual, serta kurs acuan non-USD/IDR yang telah mencakup 17 pasangan mata uang (*currency pair*) sejak 2025. Ketersediaan kurs acuan tersebut memberikan referensi harga yang kredibel bagi pelaku pasar, sekaligus mendukung efisiensi pembentukan harga dan pengelolaan risiko nilai tukar. Sejalan dengan itu, peningkatan likuiditas dan aktivitas transaksi valas, khususnya instrumen derivatif, terus didorong untuk memperkuat mekanisme pembentukan harga (*price discovery*) yang semakin efisien dan mencerminkan kondisi pasar.

Salah satu strategi Bank Indonesia untuk meningkatkan keaktifan dan konektivitas pelaku PUVA adalah melalui penguatan peran Dealer Utama PUVA untuk mendukung capaian pengembangan produk dan harga (*pricing*) PUVA, antara lain (i) optimalisasi peran sebagai *market maker* melalui peningkatan keaktifan dalam operasi moneter dan transaksi PUVA, termasuk penambahan kewajiban partisipasi dalam pelaksanaan *matchmaking* transaksi OIS; (ii) penguatan kapasitas transaksi melalui perluasan *counterparty line* repo dan penyediaan fasilitas DNDF khusus bagi Dealer Utama PUVA; serta (iii) pemberian fasilitas bagi Dealer Utama PUVA yang memenuhi persyaratan, berupa pengecualian atas larangan transaksi *Non-Deliverable Forward* (NDF) jual valuta asing terhadap Rupiah di pasar luar negeri untuk mendukung stabilitas nilai tukar dan pendalaman pasar. Berbagai langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat kapasitas dan konektivitas pelaku pasar, meningkatkan likuiditas transaksi, serta mendukung pembentukan harga yang semakin efisien dan kredibel.

Grafik 58. Peran Dealer Utama PUVA di Pasar Uang

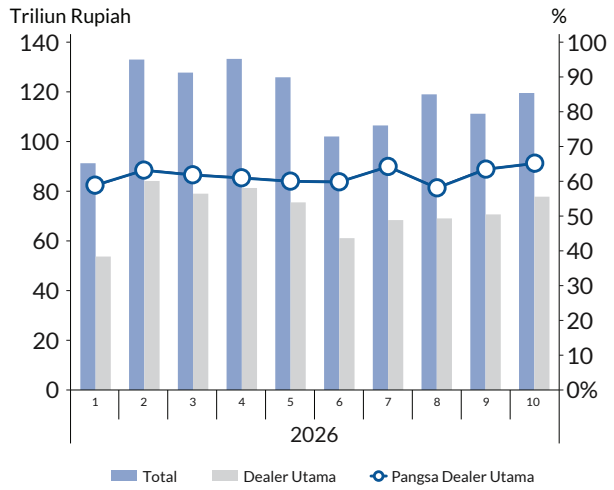

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 59. Peran Dealer Utama PUVA di Pasar Valas

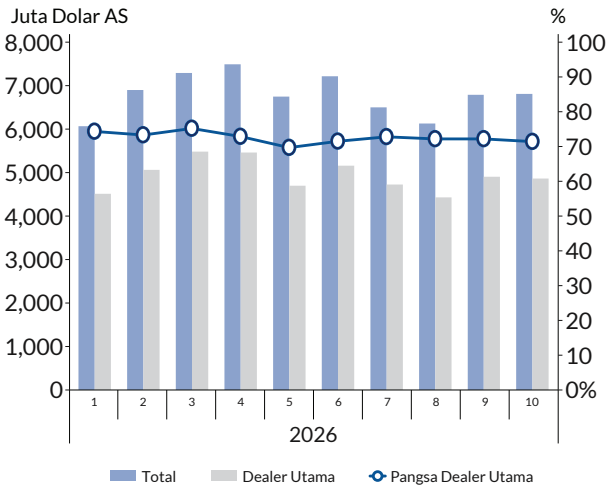

Sumber: Bank Indonesia

Sejalan dengan implementasi kebijakan tersebut, hingga November 2026, sebanyak 21 (dua puluh satu) bank telah berperan sebagai Dealer Utama PUVA dengan kontribusi pada rerata harian transaksi mencapai 62% di pasar uang (Grafik 58) dan 73% di pasar valas (Grafik 59).

Dari sisi kualitas pelaku (*participant*) PUVA, Bank Indonesia terus mendorong peningkatan kompetensi dan profesionalisme pelaku PUVA. Salah satu langkah penting pada 2026 adalah penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Tresuri Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 118 Tahun 2026 tanggal 11 Mei 2026, yang menggantikan SKKNI sebelumnya yang ditetapkan pada 2019. Pembaruan SKKNI tersebut merupakan tindak lanjut dari inisiatif Bank Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyelaraskan standar kompetensi dengan perkembangan instrumen, kompleksitas transaksi, dan kebutuhan industri keuangan. SKKNI yang diperbarui menjadi landasan bagi pengembangan kualifikasi, pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi kompetensi profesi tresuri yang lebih relevan dengan dinamika pasar.

Selain peningkatan kompetensi, Bank Indonesia juga terus mendorong penguatan integritas dan profesionalisme pelaku pasar. Hal ini ditempuh melalui penyusunan dan peluncuran *Market Code of Conduct* (MCoC) Edisi V pada April 2026, Kode Etik Derivatif Keuangan yang juga mencakup kode etik pasar Derivatif PUVA pada Agustus 2026, serta *Islamic Financial Market Code of Conduct* (ICoC) pada Oktober 2026. Berbagai inisiatif tersebut dilaksanakan melalui sinergi Bank Indonesia dengan Asosiasi Pasar Uang dan Pasar Valas Indonesia (APUVINDO), ACI Financial Markets Association (ACI FMA), *Indonesia Futures Association* (IFA), Indonesia Islamic Global Market Association (IIGMA), serta otoritas terkait. Sejalan dengan berbagai upaya penguatan kompetensi tersebut, kualitas pelaku PUVA terus menunjukkan perkembangan positif, tecermin dari tingkat kepemilikan sertifikat tresuri pada 2026 yang telah mencapai 97% dari total tresuri dealer.

Dari sisi infrastruktur PUVA, penguatan dan pengembangan dilakukan menyeluruh mencakup 3 (tiga) sisi yaitu *front-end*, *middle-end*, dan *back-end* dengan mengacu pada prinsip 3i. Pada sisi *front end*, penguatan sarana transaksi mendukung integrasi PUVA dengan operasi moneter *pro-market* untuk meningkatkan likuiditas pasar dan mendorong pembentukan harga yang efisien. Pada 2026, Bank Indonesia melakukan pengembangan Bank Indonesia – *Electronic Trading Platform* (BI – ETP) untuk mendukung penerbitan SVBI dan SUVBI, memfasilitasi repo SVBI dan SUVBI dalam valuta asing, dan penggunaan surat berharga yang diterbitkan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) sebagai *underlying* transaksi repo dalam operasi moneter. Penguatan sarana transaksi yang diselenggarakan industri diarahkan untuk meningkatkan

efisiensi transaksi melalui pengembangan aspek 3i. Bank Indonesia berperan memberikan rekomendasi bagi pengembangan di sisi sarana transaksi maupun implementasi konektivitas sarana transaksi. Pada tahun 2026, terdapat 2 (dua) inisiatif pengembangan interkoneksi di penyelenggara sarana transaksi dengan infrastruktur pascatransaksi yaitu (i) LSEG dengan *Central Counterparty* PUVA (CCP PUVA) untuk mendukung penerusan data transaksi DNDF ke sistem kliring, dan (ii) Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA) dan layanan Tri-Party Agent Repo (TPA Repo) untuk mendukung pengelolaan dan penyelesaian transaksi repo.

Grafik 60. Perkembangan Transaksi DNDF yang Dikliringkan di CCP PUVA

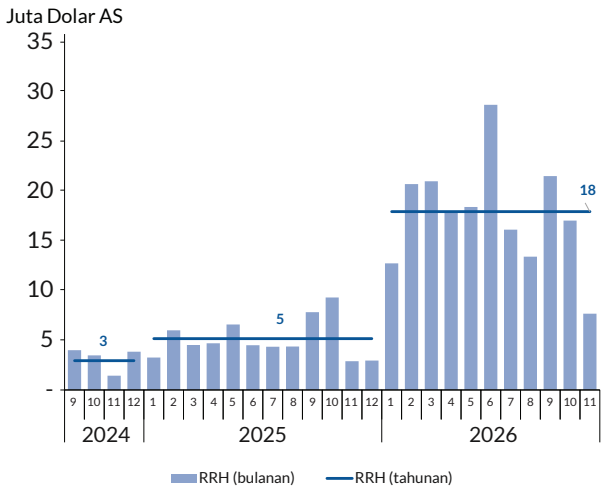

Sumber: Bank Indonesia

Pada sisi *middle-end*, Bank Indonesia memperkuat kapasitas dan pemanfaatan CCP PUVA untuk mendukung efisiensi transaksi dan mitigasi risiko pihak lawan (*counterparty risk*). Penguatan tersebut ditempuh melalui perluasan kepesertaan anggota kliring, dan penyempurnaan ketentuan operasional (*rule book*). Pada tahun 2026, jumlah anggota kliring CCP PUVA mencapai 13 bank, meningkat dari 8 bank pada awal operasional. Kliring transaksi DNDF melalui CCP mendukung pengelolaan risiko pihak lawan melalui novasi dan *multilateral netting*. Penguatan pemanfaatan CCP sejalan dengan penerapan persyaratan margin atas transaksi derivatif yang tidak dikliringkan melalui CCP (NCCD) sejak 1 September 2025. Hingga 20 November 2026, rerata harian nilai transaksi DNDF yang dikliringkan melalui CCP mencatatkan pertumbuhan sangat signifikan, yaitu dari sekitar 3 juta dolar AS di 2024, menjadi sekitar 5 juta dolar AS di 2025 hingga sekitar 18 juta dolar AS secara ytd di 2026 (Grafik 60). Bank Indonesia juga melanjutkan koordinasi dengan otoritas di Uni Eropa, Inggris, Jepang, dan Amerika Serikat terkait pengakuan atas layanan CCP PUVA. Selain itu, Bank Indonesia juga telah memberikan rekomendasi bagi interkoneksi antara sarana transaksi yang diselenggarakan oleh LSEG dengan CCP PUVA guna meningkatkan efisiensi transaksi DNDF. Pada transaksi repo, Bank Indonesia mendorong perluasan pemanfaatan layanan TPA Repo yang mulai diselenggarakan oleh CCP pada 29 September 2025. Layanan ini membantu pelaku pasar dalam pengelolaan agunan, administrasi penyelesaian transaksi, dan pelaporan repo. Guna mendorong kemudahan dalam transaksi repo, Bank Indonesia memberikan rekomendasi bagi interkoneksi antara sarana transaksi berupa Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia dengan TPA Repo. Per 20 November 2026, jumlah bank pengguna layanan TPA Repo mencapai 9 bank, meningkat dari 8 bank pada awal operasional.

Penguatan infrastruktur PUVA juga dilakukan pada Lembaga Kliring Derivatif PUVA yang difokuskan pada peningkatan ketahanan dan keandalan lembaga kliring melalui penguatan tata kelola dan manajemen risiko. Sepanjang 2026, Bank Indonesia melakukan (i) pendampingan pelaksanaan *self-assessment* pemenuhan *Principles for Financial Market Infrastructures* (PFMI) untuk mengidentifikasi area penguatan lembaga kliring berdasarkan standar internasional; dan (ii) kajian penguatan kerangka margin untuk memastikan kecukupan margin dalam memitigasi risiko transaksi Derivatif PUVA. Kedua langkah tersebut menjadi landasan penyempurnaan pengaturan dan peningkatan standar pengelolaan risiko lembaga kliring Derivatif PUVA.

Pada sisi *back end*, Bank Indonesia memperkuat Bank Indonesia – *Scripless Securities Settlement System* (BI-SSSS) untuk mendukung penatausahaan dan penyelesaian transaksi surat berharga, dengan dukungan BI-RTGS untuk penyelesaian

dana. Pada 28 September 2026, Bank Indonesia mengimplementasikan pengembangan sistem untuk mendukung penggunaan surat berharga yang diterbitkan PT SMI sebagai *underlying* transaksi repo dalam operasi moneter, dan repo SVBI dan SUVBI dalam valuta asing. Bank Indonesia juga melanjutkan penyiapan pengembangan BI-SSSS Generasi III untuk memodernisasi penatausahaan dan penyelesaian transaksi surat berharga. Pengembangan tersebut didukung oleh pembahasan dengan pelaku industri domestik antara lain APUVINDO, Perhimpunan Pedagang Surat Utang (HIMDASUN), Asosiasi Bank Kustodian Indonesia (ABKI), serta pendalaman opsi konektivitas lintas batas melalui diskusi dengan *International Central Securities Depository* (ICSD). Sejalan dengan penguatan keandalan infrastruktur, Bank Indonesia melanjutkan inisiatif pemenuhan PFMI sebagaimana rekomendasi dari *Financial Sector Assessment Program*.

Bank Indonesia juga memperkuat infrastruktur data PUVA untuk mendukung surveilans pasar, transparansi harga, dan perumusan kebijakan berbasis data. Pada 2026, Bank Indonesia menginisiasi pengembangan *Data Exchange Platform* (DEP) yang mencakup perolehan data transaksi PUVA antara lain DNDF, OIS, dan repo secara elektronik, serta penyiapan pelaporan daring oleh penyelenggara sarana transaksi. Bank Indonesia juga mengembangkan sistemisasi penghitungan data harga (*pricing*) PUVA dan perumusan pemanfaatan metadata PUVA agar data dari beragam sumber dapat diolah dan selanjutnya diakses pelaku pasar antara lain untuk pemantauan likuiditas maupun pembentukan harga di pasar. Penguatan infrastruktur data juga mencakup asesmen pengembangan *Trade Repository* untuk mendukung pengelolaan data transaksi. Sejalan dengan integrasi PUVA dan sistem pembayaran, Bank Indonesia menyiapkan pengintegrasian investor ID dengan *Payment* ID guna mendukung pemanfaatan analisis data PUVA dan sistem pembayaran secara terkonsolidasi.

Sejalan dengan amanat UU P2SK, sinergi antar-otoritas sektor keuangan diarahkan pada penyelesaian berbagai isu strategis guna mendukung akselerasi pendalaman pasar keuangan serta perluasan sumber pembiayaan perekonomian nasional. Beberapa isu strategis yang menjadi fokus sinergi pada 2026 antara lain harmonisasi pengaturan perpajakan di pasar uang, pengawasan bersama terkait pasar valas dalam merespons tekanan nilai tukar Rupiah, serta penguatan kerangka hukum pengalihan hak kepemilikan agunan (*transfer of title*). Di samping itu, sinergi dan penguatan juga senantiasa dilakukan dalam rangka harmonisasi pengaturan untuk mengatasi hambatan regulasi, memperkuat keterpaduan kebijakan antarotoritas, serta menciptakan ekosistem pasar keuangan yang semakin efisien dan berdaya saing. Lebih jauh, sinergi antarotoritas juga diarahkan untuk mendorong peningkatan basis investor ritel domestik melalui kegiatan Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (LIKE IT). Sepanjang 2026, kegiatan LIKE IT telah diselenggarakan 10 (sepuluh) kali di berbagai kota di Indonesia untuk mendorong pemerataan literasi. Peningkatan literasi keuangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong partisipasi masyarakat di pasar keuangan sebagai sumber pembiayaan perekonomian nasional.

Inklusi Ekonomi, Inklusi Keuangan, dan Keuangan Berkelanjutan serta Ekonomi Keuangan Syariah

Bank Indonesia terus memperluas dan memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mendorong akselerasi Inklusi Ekonomi, Inklusi Keuangan, dan Keuangan Berkelanjutan (IEKB) guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Pelaksanaan IEKB ditempuh melalui pengembangan ekosistem ekonomi inklusif yang terintegrasi dan berdaya saing, pembiayaan inklusif dan keuangan berkelanjutan yang optimal, dan literasi dan sinergi ekonomi keuangan inklusif dan berkelanjutan yang meluas. Secara lebih detail, pengembangan ekosistem berfokus pada program pengembangan UMKM yang mendorong pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja melalui peningkatan kapasitas, pendampingan, dan korporatisasi UMKM antara lain diwujudkan pada penyelenggaraan Championship Pejuang

Kopi Nusantara-Barista (Cangkir Barista) dan Inovasi Wastra Nusantara (Citra Nusa). Kegiatan Cangkir Barista dilaksanakan dengan tujuan untuk memperkuat kapabilitas SDM dan kewirausahaan pelaku usaha kopi agar mendukung peningkatan daya saing kopi Indonesia, penguatan *value chain* industri dan penciptaan lapangan pekerjaan. Sementara penyelenggaraan Citra Nusa bertujuan untuk mengembangkan kreativitas dan kemampuan wirausaha SDM di bidang wastra guna mendukung peningkatan nilai tambah ekonomi dan daya saing wastra Indonesia serta perluasan lapangan kerja. Prinsip dua kegiatan tersebut didasarkan pada (i) peningkatan keahlian yang mencakup *capacity building*, *knowledge sharing*, dan *bootcamp* sertifikasi; (ii) inovasi produk yang mencakup *capacity building* dan pembuatan prototipe produk; (iii) pengembangan kewirausahaan yang mencakup pendampingan penyusunan proposal bisnis, *knowledge sharing*; dan (iv) sinergi multisektor dengan *stakeholders* untuk perluasan *networking*. Dalam kaitannya mendukung ketahanan pangan, Bank Indonesia juga terus mengembangkan model bisnis komoditas pangan antara lain model bisnis pertanian berkelanjutan melalui implementasi biochar yang menyeimbangkan upaya peningkatan produktivitas, kelestarian lingkungan dan kesejahteraan petani. Dalam mendukung perluasan akses pasar, Bank Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan melaksanakan *Export Coaching Program* (ECP) tahun 2026 yang melibatkan 1.848 UMKM dengan total nilai komitmen dan transaksi sebesar 320 ribu dolar AS.

Bank Indonesia juga mendorong peningkatan akses pembiayaan dan literasi keuangan bagi UMKM. Dari sisi permintaan (*demand*) Bank Indonesia melakukan fasilitasi *business matching* dengan lembaga keuangan, penguatan infrastruktur pembiayaan inklusif melalui pemanfaatan SIAPIK (Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan) praktis yang mudah digunakan, perluasan BI-SAID (*Database* Profil UMKM Potensial Dibiayai) dan pengembangan kalkulator hijau versi 2 sebagai infrastruktur pendukung dalam penghitungan emisi karbon yang akurat, terstandar, dan terpercaya untuk memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan berkelanjutan di Indonesia. Berbagai upaya tersebut ditujukan untuk memperluas akses pembiayaan yang inklusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, termasuk UMKM, dengan semangat *no one left behind*. Dari aspek literasi, Bank Indonesia meluncurkan AKU Bisa Sejahtera 2026. Program ini merupakan integrasi kegiatan Edukasi dan Literasi Keuangan serta *Business Matching* Pembiayaan, bertujuan untuk mendorong peningkatan literasi keuangan sekaligus memfasilitasi akses keuangan kepada UMKM. Bank Indonesia juga telah menyusun modul edukasi keuangan digital (*Digital Financial Services*) tingkat dasar dan menengah yang terstandardisasi berbasis *core competencies*, ditujukan untuk 7 (tujuh) kelompok sasaran prioritas pelajar/mahasiswa/santri/pemuda, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), UMKM, Perempuan, Masyarakat 3T, penduduk usia lanjut dan berkebutuhan khusus, dan pekerja migran. Modul ini dapat digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk kegiatan edukasi dan pendampingan yang berkesinambungan di seluruh daerah.

Bank Indonesia memperkuat sinergi dengan berbagai kementerian, lembaga, dan mitra strategis di tingkat nasional dan daerah untuk mengakselerasi ekonomi-keuangan inklusif dan berkelanjutan. Melalui peran aktif seluruh Kantor Perwakilan di daerah dan luar negeri, Bank Indonesia melaksanakan berbagai inisiatif kerja sama, antara lain pelaksanaan *business matching* pembiayaan dan ekspor, kegiatan *export coaching program*, pelatihan kewirausahaan, dan peningkatan akseptasi digital. Salah satu bentuk konkret kerja sama tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan *flagship* program Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2026 yang diperkuat dengan 5 (lima) kebaruan yaitu *impactful program*, *enhancement collaboration*, *value chain ecosystem*, *youth innovation* dan *sustainable* (Gambar 6). Penyelenggaraan KKI 2026 melibatkan 27 Kementerian/Lembaga, 34 asosiasi dan mitra industri serta akademisi. Kegiatan ini diikuti lebih dari 1.860 UMKM dan menarik lebih dari 290 ribu pengunjung baik daring maupun luring, serta berhasil mencatat peningkatan omzet 29,6% atau Rp224,7 miliar, peningkatan *business matching* pembiayaan dan ekspor UMKM sebesar Rp839,8 miliar. Keberhasilan KKI 2026 menunjukkan

Gambar 6. Pencapaian KKI 2026



Sumber: Bank Indonesia

efektivitas sinergi bersama *stakeholders* untuk membangun ekosistem UMKM yang tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan. Sebagai langkah mewujudkan *Net Zero Emission* dan *Zero Waste to Landfill*, pada penyelenggaraan KKI 2026 juga dilakukan *offsetting carbon emission.*

Bank Indonesia juga terus mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional yang mandiri dan inklusif. Pengembangan tersebut ditempuh melalui 3 (tiga) pilar strategi, yaitu: (i) pengembangan ekosistem Rantai Nilai Halal yang terintegrasi dan berdaya saing; (ii) optimalisasi pembiayaan syariah; dan (iii) penguatan Literasi Eksyar dan Inklusi Eksyar. Tiga strategi utama tersebut kemudian diturunkan menjadi 6 inisiatif strategis (6 rukun) akselerasi eksyar nasional yaitu (i) GERBANG SANTRI (Gerakan Pengembangan Pesantren dan Rantai Nilai Halal); (ii) JAWARA Ekspor (Jaringan Wirausaha Syariah Mendorong Ekspor); (iii) GEMA HALAL (Gerakan Berjamaah Akselerasi Halal); (iv) SAPA SYARIAH (Sinergi Perdagangan dan Pembiayaan Syariah); (v) KANAL ZISWAF (Kolaborasi Nasional Pengembangan ZISWAF); serta (vi) LENTERA EMAS (Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah menuju Indonesia Emas). Selanjutnya keenam inisiatif tersebut, difokuskan untuk mendukung ketiga strategi utama di atas. Pertama, penguatan ekosistem Rantai Nilai Halal, dengan inisiatif strategis GERBANG SANTRI, JAWARA Ekspor dan GEMA HALAL. Kedua, penguatan pembiayaan syariah, dengan inisiatif strategis SAPA SYARIAH dan KANAL ZISWAF. Ketiga, penguatan Literasi dan Inklusi Eksyar, melalui inisiatif strategis LENTERA EMAS.

Seluruh inisiatif pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan diarahkan untuk berkontribusi pada target Program Prioritas (PP) Ekonomi Syariah dalam RPJMN 2025–2029, RPJPN 2025–2045, Asta Cita menuju Indonesia Emas. Sepanjang 2026, penguatan ekosistem rantai nilai halal dilakukan melalui program pemberdayaan usaha pesantren yang diimplementasikan pada lebih dari 1.000 unit usaha pesantren di 34 provinsi; program peningkatan daya saing produk halal Indonesia melalui pendampingan kepada lebih dari 1.000 pelaku usaha syariah berupa kurasi, *capacity building*, dan perluasan akses pasar; program transformasi

kewirausahaan melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah yang mencakup pelatihan dan sertifikasi dalam rangka kemandirian pesantren sekaligus mendukung penciptaan lapangan kerja; program akselerasi sertifikasi halal melalui pelatihan SDM halal bekerja sama dengan berbagai mitra; serta penguatan ekosistem untuk bahan baku halal dalam negeri.

Dalam rangka penguatan inklusi ekonomi dan keuangan syariah, implementasi kebijakan difokuskan antara lain melalui dua inisiatif, yaitu SAPA SYARIAH dan KANAL ZISWAF. Kedua inisiatif tersebut diarahkan untuk memperluas akses pembiayaan dan perdagangan syariah, memperkuat keterhubungan sektor riil dengan sektor keuangan, serta mengoptimalkan peran keuangan sosial syariah dalam mendukung pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. SAPA SYARIAH diarahkan untuk memperkuat ekosistem pembiayaan syariah yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan melalui tiga strategi utama, yaitu (i) penguatan kebijakan, regulasi, dan inovasi; (ii) fasilitasi akses pembiayaan dan perdagangan; serta (iii) penguatan kelembagaan dan kerja sama. Implementasi inisiatif ini didukung oleh inovasi instrumen keuangan syariah, termasuk pengembangan *Sharia Restricted Investment Account* (SRIA), digitalisasi pembiayaan, serta pendalaman PUVA Syariah melalui strategi 3P+1I (*Product*, *Pricing*, *Participant*, *and Infrastructure*). Penguatan tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi dengan otoritas, K/L, industri jasa keuangan syariah, Pemerintah Daerah, serta pelaku usaha dan mitra strategis.

Pada 2026, implementasi SAPA SYARIAH diwujudkan antara lain melalui transformasi Bulan Pembiayaan Syariah (BPS). Kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi nasional untuk memperluas akses pembiayaan dan perdagangan syariah, sekaligus mendukung percepatan intermediasi melalui sinergi dengan program PINISI. Transformasi BPS ditandai dengan lima kebaruan strategis, yaitu penyempurnaan proses bisnis, perluasan instrumen dan sasaran peserta, kolaborasi dengan program nasional, perluasan dan penguatan sinergi, serta optimalisasi digitalisasi. Pelaksanaan BPS diperkuat melalui tiga pilar, yaitu *Sharia Business Literacy* untuk meningkatkan literasi dan kesiapan usaha, *Sharia Business Linkage* untuk mempertemukan kebutuhan pembiayaan dengan lembaga keuangan dan investor, serta *Sharia Business Showcase* untuk memperluas promosi, jejaring usaha, dan akses pasar. Penguatan BPS 2026 dilaksanakan melalui sinergi dengan 18 K/L serta industri keuangan syariah dan mitra strategis, dengan cakupan fasilitasi yang semakin luas, tidak hanya bagi UMKM, tetapi juga korporasi dan *startup* halal. Perluasan tersebut antara lain diwujudkan melalui penyelenggaraan Forum Strategis Pembiayaan Syariah untuk Ekspansi Korporasi (Forstra Korporasi), yang mempertemukan 34 korporasi dengan 17 bank syariah untuk menjajaki peluang pembiayaan ekspansi usaha. Di sisi lain, pengembangan ekosistem pendanaan *startup* halal diperkuat melalui peluncuran inisiatif *Indonesia Halal Innovation and Venture Ecosystem* (I-HIVE) pada Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2026. Sementara itu, sinergi perdagangan diarahkan pada fasilitasi akses pasar sektor unggulan *Halal Value Chain* (HVC) melalui penguatan jejaring dan *business matching* antara pelaku usaha, pembeli, agregator, dan lembaga pembiayaan. Rangkaian program tersebut mendukung prioritas pembangunan nasional, khususnya penguatan kewirausahaan dan industri, penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan ekonomi melalui perluasan akses pembiayaan produktif.

Berbagai strategi ini mendorong perkembangan positif. Hingga periode pelaporan, BPS 2026 mencatatkan total capaian *business deals* sebesar Rp10,5 triliun, yang terdiri atas komitmen pembiayaan sebesar Rp122,27 miliar, realisasi pembiayaan sebesar Rp2,6 triliun, serta transaksi dan kerja sama ekosistem keuangan syariah sebesar Rp7,90 triliun. Penguatan ekosistem keuangan syariah turut didukung oleh komitmen kerja sama transaksi dalam PUVA Syariah, antara lain SiPA Valas dan Rupiah, Lindung Nilai Syariah, serta SRIA, dengan nilai *business deals* sebesar Rp6,05 triliun yang telah tercakup dalam total capaian BPS. Capaian tersebut menunjukkan semakin luasnya peran BPS sebagai wadah kolaborasi yang mengintegrasikan pembiayaan UMKM, korporasi, investasi, inovasi instrumen keuangan syariah, serta pengembangan sektor riil

dan perdagangan. Penguatan inovasi pembiayaan sosial syariah dan digitalisasi dilakukan melalui asesmen dan kajian dampak pembentukan Lembaga Pembiayaan Pembangunan Berbasis Wakaf (LP2BW), serta kajian pengembangan model pemberdayaan masyarakat subsisten berbasis *Islamic blended finance* yang mengintegrasikan keuangan sosial syariah, pendampingan usaha, dan akses pembiayaan komersial secara bertahap. Di sisi digitalisasi, Bank Indonesia melanjutkan pengembangan Pusat Terintegrasi Data Zakat, Wakaf, Infak, dan Sedekah (PINTER ZAWAIS), termasuk perluasan kolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN untuk mendukung integrasi data tanah wakaf. Berbagai upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan sosial syariah, memperluas akses pembiayaan produktif, dan mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Penguatan inklusi ekonomi dan keuangan syariah juga ditempuh melalui inisiatif KANAL ZISWAF. Inisiatif ini diarahkan untuk mengoptimalkan peran keuangan sosial syariah dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Implementasinya mencakup penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan zakat dan wakaf, pengembangan inovasi pembiayaan sosial yang berkelanjutan, serta perluasan literasi dan digitalisasi melalui kolaborasi antarpemangku kepentingan. Pada sektor zakat, Bank Indonesia memperkuat kapasitas dan tata kelola kelembagaan melalui fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi 50 amil serta kolaborasi dengan BAZNAS dalam penyelenggaraan *Indonesia Zakat Leaders Summit* (IZLS) sebagai forum penguatan kepemimpinan dan jejaring kerja sama keuangan sosial syariah berskala internasional. Sinergi tersebut dilengkapi dengan pengembangan Indeks Implementasi *Zakat Core Principles* (IIZCP) 2.0 dan peluncuran platform digital pembelajaran *Zakat Core Principles* (ZCP) untuk mendukung peningkatan profesionalisme, akuntabilitas, dan penerapan standar tata kelola zakat. Berbagai upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas pengelolaan zakat, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta mendorong kontribusi Indonesia dalam pengembangan tata kelola zakat di tingkat global. Pada sektor wakaf, penguatan kapasitas kelembagaan dilakukan melalui fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi 341 nazhir dan *piloting* Sekolah Wakaf Berkah Indonesia (SWBI) bersama Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor, dengan sasaran 90 nazhir pesantren. Pengembangan wakaf produktif diperkuat melalui penyelenggaraan *The 2nd Global Conference on Waqf Development* (GLOW) 2026 bersama Badan Wakaf Indonesia (BWI), serta *Waqf Investor Forum* dan fasilitasi *business matching* untuk mempertemukan proyek wakaf produktif dengan calon investor dan mitra pembiayaan. Perluasan literasi dan partisipasi masyarakat dalam berwakaf juga dilakukan melalui Gerakan Sadar Wakaf, antara lain WAKAFEIN dan Gerakan Wakaf Pegawai Bank Indonesia.

Bank Indonesia juga memperluas literasi, partisipasi masyarakat, dan inovasi pemberdayaan ekonomi lain. Hal ini dilakukan melalui berbagai *talkshow*, forum, serta penyelenggaraan Zawa Run/Walk dalam rangkaian Festival Ekonomi Syariah (FESyar), serta Zawanomics Award sebagai kompetisi program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat dan wakaf. Berbagai kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat sekaligus mendorong pengembangan serta replikasi praktik pemberdayaan ekonomi yang inovatif dan berkelanjutan. Untuk penguatan literasi dan inklusi eksyar, Bank Indonesia melakukan survei literasi dan inklusi eksyar, standardisasi konten literasi eksyar dan peningkatan kualitas SDM eksyar, serta penguatan kolaborasi dan penguatan digitalisasi termasuk dalam rangkaian kegiatan FESyar di tiga wilayah, dan ISEF 2026 di Jakarta.

Sinergi Bank Indonesia yang semakin solid juga dilakukan dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), K/L terkait, dan mitra strategis lainnya termasuk dengan lembaga internasional seperti Islamic Development Bank (IsDB), International Islamic Liquidity Management (IILM), dan Islamic Financial Services Board (IFSB). Sinergi ini kembali mampu mewujudkan kesuksesan penyelenggaraan rangkaian kegiatan ekonomi syariah

di Indonesia. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak untuk mencapai target RPJMN 2025-2029, yang mencakup peningkatan kontribusi PDB Syariah dan posisi Indonesia di laporan State of Global Islamic Economy (SGIE). Kemudian, dalam ISEF 2026 telah terselenggara 112 rangkaian kegiatan bekerja sama dengan 50 K/L, 36 mitra internasional, 44 media, 680 pelaku UMKM, industri keuangan, dan *startup*, serta sekitar 200 pondok pesantren, lembaga pendidikan, dan asosiasi/komunitas. Total penjualan selama 5 hari penyelenggaraan ISEF mencapai Rp20,27 miliar, sementara nilai *business matching* mencapai Rp3,21 triliun, dengan rincian Rp2,65 triliun untuk komitmen dan realisasi pembiayaan, serta Rp558,4 miliar untuk komitmen dan realisasi perdagangan (Gambar 7). Jika digabungkan dengan komitmen kerja sama ekosistem keuangan syariah dan capaian selama FESyar sebagai *road to* ISEF, maka jumlah keseluruhannya mencapai Rp11,27 triliun. Penyelenggaraan ISEF menjadi salah satu kegiatan yang menunjukkan *leadership* Indonesia di sektor ekonomi dan keuangan syariah yang ditunjukkan antara lain dengan dipertahankannya peringkat Indonesia sebagai top 4 *global* dalam State of Global Islamic Economy (SGIE) Report 2025/2026.

Kebijakan Internasional

Bank Indonesia terus memperkuat kerja sama internasional untuk mendukung penguatan stabilitas makroekonomi. Kerja sama Jaring Pengaman Keuangan Internasional (JPKI) terus diperkuat sebagai lapis pertahanan kedua setelah cadangan devisa dalam meredam gejolak finansial di tengah lingkungan ketidakpastian global yang tinggi. Bank Indonesia aktif memperkuat JPKI baik secara bilateral, regional, maupun multilateral. Secara bilateral, Bank Indonesia telah memiliki perjanjian JPKI dengan Bank Negara Malaysia (BNM), Bank of Japan (BOJ) (sebagai agen JMOF), Monetary Authority of Singapore (MAS), People's Bank of China (PBOC), dan Reserve Bank of Australia (RBA). Secara multilateral, Bank Indonesia telah memiliki perjanjian dengan International Monetary Fund (IMF) dan Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM) ASEAN+3. Berbagai kerja sama tersebut memastikan tersedianya bantalan finansial yang cukup dari internasional dalam kondisi diperlukan untuk meredam gejolak. Dalam kerangka kerja sama bilateral, pada 2026 Bank Indonesia dan Bank of

Gambar 7. Capaian Pelaksanaan Rangkaian Kegiatan ISEF ke-13 Tahun 2026



Sumber: Bank Indonesia

Korea (BOK) sepakat memperbarui perjanjian JPKI dalam bentuk *Bilateral Currency Swap Arrangement* (BCSA) untuk jangka waktu lima tahun dengan nilai 10,7 triliun won Korea atau Rp145 triliun. Di tataran regional, Bank Indonesia aktif mendorong reformasi, penajaman kerangka operasional, serta efektivitas fasilitas CMIM sebagai jaring pengaman keuangan di tingkat regional. Pada 2026, negara anggota ASEAN+3 menyepakati amendemen CMIM *Agreement* yang menandai perluasan fasilitas pembiayaan CMIM melalui penambahan CMIM Rapid Financing Facility (CMIM-RFF), dari sebelumnya CMIM Stability Facility (CMIM-SF) dan CMIM Precautionary Line (CMIM-PL). Fasilitas baru ini dirancang untuk menyediakan dukungan likuiditas jangka pendek secara cepat bagi negara anggota yang menghadapi kebutuhan likuiditas mendesak akibat guncangan eksternal, seperti bencana alam dan pandemi. CMIM-RFF juga memungkinkan penyediaan likuiditas dalam mata uang dolar AS, renminbi Tiongkok, dan yen Jepang.

Bank Indonesia terus memperkuat pemanfaatan transaksi dalam mata uang lokal melalui intensifikasi kerja sama dalam kerangka LCT. Di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global, LCT menjadi salah satu instrumen strategis untuk mendorong diversifikasi dan efisiensi transaksi antarnegara dalam mendukung kerja sama perdagangan dan investasi. Dalam rangka mendorong adopsi LCT, Bank Indonesia bersama Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Satuan Tugas Nasional (Satgasnas) LCT terus memperkuat sinergi, penyempurnaan kebijakan insentif, serta kegiatan sosialisasi yang *targeted*, terintegrasi, dan terencana baik di dalam maupun luar negeri. Sejak diinisiasi Bank Indonesia pada 2016, Indonesia telah memiliki kerja sama LCT dengan sepuluh negara yaitu Malaysia, Tailan, Jepang, Tiongkok, Singapura, Korea Selatan, India, Uni Emirat Arab, Hong Kong, dan Filipina. Kerja sama LCT saat ini sudah diimplementasikan Indonesia dengan tujuh negara yaitu Malaysia, Tailan, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, dan Singapura. Sampai dengan September 2026, nilai transaksi LCT dengan tujuh negara mitra tersebut telah mencapai ekuivalen 52,6 miliar dolar AS, lebih dari dua kali lipat transaksi keseluruhan pada 2025 sebesar ekuivalen 25,7 miliar dolar AS. Rerata pengguna LCT sepanjang Januari hingga September 2026 juga meningkat hingga mencapai 22.800 pengguna per bulan, tumbuh sebesar 134,56% dari realisasi pada 2025 yang mencapai 9.720 rerata pengguna per bulan. Sepanjang 2026, Bank Indonesia telah melakukan berbagai inisiatif untuk mengakselerasi implementasi LCT. Penguatan implementasi LCT dilakukan dengan Jepang melalui perluasan cakupan menjadi transaksi berjalan, transaksi modal, dan transaksi keuangan. Cakupan ini lebih luas dibandingkan dengan sebelumnya yang hanya terbatas pada perdagangan dan investasi langsung saja. Implementasi kerangka LCT dengan negara mitra baru juga telah dilakukan yaitu dengan Singapura. Pada 2026, telah dilaksanakan pula penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MOU) LCT tripartit antara Bank Indonesia, People's Bank of China (PBOC), dan Hong Kong Monetary Authority (HKMA). Kerja sama ini merupakan bagian dari perluasan kerja sama LCT Indonesia-Tiongkok yang telah ada sebelumnya. Kerja sama LCT juga diperluas ke Filipina yang sekaligus memperkuat kerja sama LCT yang sudah berjalan sebelumnya dengan Malaysia dan Tailan, melalui penandatanganan MOU antara Bank Indonesia, Bank Negara Malaysia (BNM), Bank of Thailand (BOT), dan Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP).

Bank Indonesia aktif mendorong kerja sama bilateral pada berbagai bidang tugas bank sentral. Kerja sama bilateral terstruktur (*Structured Bilateral Cooperation*/SBC) dengan mitra terus diperluas dan diperkuat untuk menaungi berbagai bentuk kerja sama yang akan dilakukan antarbank sentral. Area kerja sama mencakup bidang tugas bank sentral yaitu moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran serta kebijakan lainnya seperti keuangan syariah, keuangan berkelanjutan, inklusi dan literasi keuangan, serta Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, serta Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU-PPT-PPPSPM). Kerja sama bilateral ini mempertimbangkan kesamaan tujuan dan komplementaritas area kebijakan dan *expertise* sehingga dapat meningkatkan kapasitas Bank Indonesia, peluang kerja sama di bidang

keuangan, serta *institutional leadership* Bank Indonesia di kawasan. Pada 2026, Bank Indonesia memperkuat kerja sama bilateral dengan Bank Negara Malaysia (BNM) dan Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) pada berbagai bidang tugas bank sentral, yang dapat dilakukan dalam bentuk dialog kebijakan, kerja sama teknis, inovasi bersama, dan pengembangan kapasitas. Sejak diinisiasi pada 2015, Bank Indonesia telah menjalin kerja sama SBC dengan 17 bank sentral mitra, beberapa di antaranya merupakan negara anggota G20, OECD, ASEAN, dan BRICS, seperti Bank of Japan (BOJ), People's Bank of China (PBOC), Bundesbank, Banque de France (BDF), dan Monetary Authority of Singapore (MAS). Penguatan kerja sama bilateral juga mencakup bidang sistem pembayaran menggunakan QR *code* yang telah diimplementasikan bersama enam negara yaitu Tailan, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Konektivitas pembayaran antarnegara akan terus didorong untuk mewujudkan transaksi pembayaran lintas batas yang lebih cepat, murah, transparan, dan inklusif.

Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dalam mengelola persepsi positif perekonomian Indonesia serta promosi investasi dan perdagangan. Sinergi dilakukan melalui *engagement* dan komunikasi intensif dengan lembaga pemeringkat, investor global, serta berbagai *stakeholder* internasional. Bank Indonesia, sebagai sekretariat *Investor Relation Unit* (IRU) nasional secara aktif mengawal pengelolaan persepsi positif perekonomian Indonesia untuk memperkuat kepercayaan internasional terhadap fundamental ekonomi domestik. Upaya tersebut turut mendukung dipertahankannya *sovereign credit rating* Indonesia pada level *investment grade* oleh Moody's (Baa2), Standard & Poor's (BBB), dan Fitch Ratings (BBB). Di tengah tingginya ketidakpastian global, S&P mempertahankan *outlook* stabil, sementara Moody's dan Fitch mengafirmasi peringkat Indonesia dengan penyesuaian *outlook* menjadi negatif, yang terutama mencerminkan perhatian terhadap aspek kepastian dan konsistensi kebijakan, namun tetap disertai pengakuan atas kuatnya ketahanan ekonomi, kredibilitas kebijakan makroekonomi, prospek pertumbuhan yang solid, serta terjaganya stabilitas sistem keuangan Indonesia. Upaya menjaga persepsi *stakeholder* berperan penting dalam meningkatkan arus masuk modal asing pada instrumen portofolio dan investasi langsung. Fasilitasi promosi investasi dan perdagangan melalui *linkage* IRU-Regional IRU (RIRU)-Global IRU (GIRU) terus diperkuat dengan strategi *synergized*, *targeted*, dan *outcome oriented* untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Bank Indonesia turut berkontribusi aktif dalam mendukung proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD melalui penguatan sinergi dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga serta keterlibatan dalam proses *technical review* pada lima komite OECD. Keterlibatan tersebut mencakup bidang ekonomi dan pembangunan, pasar keuangan, investasi, statistik dan data, serta pelindungan konsumen, sesuai dengan tugas dan kewenangan Bank Indonesia. Partisipasi aktif tersebut mendukung kesiapan Indonesia dalam menindaklanjuti rekomendasi OECD dan menyelaraskan kebijakan dengan standar internasional, dengan tetap memerhatikan kepentingan nasional dan mandat Bank Indonesia.

Bank Indonesia berupaya memperkuat reputasi Indonesia di kancah internasional melalui peran aktif dalam berbagai forum kerja sama. Selama 2026, Bank Indonesia berperan sebagai *Chair/co-chair* pada ASEAN *Senior Level Committee* (SLC), the South-East Asian Central Banks (SEACEN), ASEAN Working Committee on Financial Inclusion (WC-FINC) *Sub-Committee Desired Outcome* 4, ASEAN SLC *Task Force on Sustainable Finance*, *Task Force on Supervisory Arrangement* (TFSA) di bawah ASEAN *Working Committee on* ASEAN Banking Integration Framework (WC-ABIF), Executives' Meeting of East Asia-Pacific Central Banks (EMEAP) *Working Group on Banking Supervision* (WGBS), *Board Risk Management Committee* (BRMC) International Islamic Liquidity Management Corporation (IILM), serta *20th Annual International Operational Risk Working Group* (IORWG) *Conference* 2026. Pada aspek keanggotaan (*membership*), Bank Indonesia berpartisipasi dalam

berbagai forum regional dan multilateral, antara lain dalam ASEAN *Working Committee*, BRICS *Working Group*, Network for Greening the Financial System (NGFS) *Workstream*, G20 *Study Group*, IMF, Bank for International Settlements (BIS), termasuk forum syariah dalam International Islamic Liquidity Management (IILM) dan Islamic Financial Services Board (IFSB). Peran kepemimpinan dan partisipasi aktif tersebut memperkuat posisi Bank Indonesia dalam pembentukan agenda dan arah kebijakan internasional, sekaligus memperjuangkan kepentingan nasional.

Sejumlah penghargaan internasional diterima Bank Indonesia selama 2026 sebagai kontribusi Bank Indonesia bagi Republik Indonesia. Bank Indonesia menerima penghargaan internasional melalui inovasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Antarnegara. Pengakuan global ini diperoleh pada ajang kompetisi global yang diselenggarakan oleh Digital Public Goods Alliance (DPGA) atas keberhasilan Indonesia bersama negara mitra dalam membangun konektivitas pembayaran digital lintas negara yang interoperabel, inklusif dan berdampak nyata bagi masyarakat. Bank Indonesia juga menerima *Best New Environmental Sustainability Project* dari IACA Currency Awards, dan *Global Financial Technology Innovation Award* kategori *Best Cyber Security and IT Risk Management Technology Initiative in Asia Pacific* dari Asian Banker. Pada aspek komunikasi, Bank Indonesia menerima enam penghargaan Gold dalam *Contact Center World Global Asia Pacific Top Ranking Performers Award* 2026 untuk kategori *Best Employee Wellness*, *Best Incentive Schemes*, *Best Customer Service*, *Best Employee Engagement*, *Best Self-Service Technology*, dan *Best Help Desk*, serta penghargaan Silver pada kategori *Best Use of Social Media*. Sementara itu pada aspek organisasi dan tata kelola, Bank Indonesia menerima *Asia Pacific Stevie Awards* untuk kategori *Innovation in Human Resources Management*, *Planning, and Practices*. Penghargaan ini merupakan pengakuan atas keunggulan dalam melakukan berbagai inisiatif yang berdampak sehingga meningkatkan reputasi Indonesia di internasional.

Kebijakan Kelembagaan Bank Indonesia

Pada 2026, Bank Indonesia memperkuat kebijakan kelembagaan guna mendukung efektivitas bauran kebijakan dalam merespons lingkungan strategis yang semakin dinamis. Penguatan dilakukan untuk merespons dinamika perekonomian global dan domestik, serta berbagai perubahan lingkungan strategis lainnya yang berpotensi memengaruhi kelembagaan Bank Indonesia. Perubahan tersebut antara lain mencakup penguatan mandat Bank Indonesia yang tertuang dalam UU P2SK, serta pesatnya perkembangan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan (*artificial intelligence*/AI), dan pergeseran demografi pegawai yang kini didominasi oleh generasi muda. Penguatan kebijakan kelembagaan Bank Indonesia 2026 difokuskan pada tiga agenda utama. *Pertama*, penguatan tata kelola, fungsi organisasi, perencanaan strategis dan pengelolaan anggaran. *Kedua*, inovasi digital melalui digitalisasi proses kerja yang berkualitas, stabil, aman, dan andal. *Ketiga*, penguatan sumber daya manusia (SDM) dan kepemimpinan Bank Indonesia yang profesional, dengan kompetensi tinggi, pengalaman kuat, dan berakhlak mulia, sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Penguatan tata kelola memastikan setiap kebijakan Bank Indonesia dirumuskan dan dilaksanakan secara konsisten, akuntabel dan transparan berdasarkan prinsip tata kelola Bank Indonesia. Penguatan tata kelola tersebut didukung oleh asesmen tata kelola secara terintegrasi yang mencakup aspek kecukupan ketentuan, keandalan manajemen risiko, dan kecukupan pengendalian intern, sehingga kualitas proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan senantiasa sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik dan profesional. Di sisi lain, sistem pengambilan keputusan di Bank Indonesia juga dirancang agar adaptif dan *streamlined*, serta memerhatikan mekanisme *check and balance* melalui tahapan inisiasi, verifikasi, rekomendasi, dan persetujuan. Penguatan tata kelola juga diarahkan untuk memastikan penyelesaian ketentuan sesuai mandat amendemen UU P2SK 2026, khususnya

pada tiga area pengaturan yang terkait dengan Bank Indonesia, yaitu area kelembagaan, area inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK), dan area lainnya di sektor keuangan. Penyempurnaan regulasi dilakukan untuk memperkuat aspek tata kelola kebijakan. Pada 2026, penyempurnaan ketentuan dilakukan khususnya terkait instrumen makroprudensial, pengelolaan cadangan devisa, kebijakan inklusi ekonomi dan keuangan berkelanjutan, kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, pelindungan konsumen, serta pelaporan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan Devisa Pembayaran Impor (DPI). Kerangka tata kelola yang semakin terintegrasi tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas kebijakan, kepastian hukum, pengelolaan risiko, dan akuntabilitas kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan mandat Bank Indonesia.

Fungsi organisasi diperkuat agar sejalan dengan penguatan mandat Bank Indonesia terkini. Penguatan fungsi organisasi di antaranya dilakukan untuk memperkuat peran dan fungsi Kantor Perwakilan Bank Indonesia, penguatan fungsi pengawasan dan *market conduct*, serta penguatan fungsi pengelolaan uang kartal seiring dengan modernisasi infrastruktur pendukung. Penguatan fungsi organisasi didukung oleh *business process re-engineering* berbasis digital untuk meningkatkan efektivitas proses kerja dengan dukungan teknologi berbasis AI, termasuk proses pengambilan keputusan berbasis data dan analisis yang *robust*, guna memperkuat perumusan dan penetapan bauran kebijakan Bank Indonesia agar lebih responsif terhadap dinamika lingkungan strategis dan efektif dalam mencapai tujuan Bank Indonesia.

Penguatan perencanaan strategis dilakukan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Pada 2026, Bank Indonesia memperkuat sistem perencanaan strategis untuk memastikan relevansi dan efektivitas strategi Bank Indonesia sebagai respons atas penguatan mandat dalam amendemen UU P2SK 2026, dinamika lingkungan strategis yang semakin kompleks, serta kebutuhan untuk memastikan implementasi kebijakan dan kelembagaan yang memberikan dampak nyata (Gambar 8). Penguatan tersebut dilakukan melalui penajaman substansi perencanaan strategis, baik jangka menengah

Gambar 8. Sistem Perencanaan Strategis Bank Indonesia



Sumber: Bank Indonesia

(lima tahun) maupun tahunan, dengan memperkuat keterkaitan antara visi, misi, sasaran strategis, program strategis, dan kebutuhan sumber daya pendukungnya. Perencanaan lima tahunan menjadi landasan bagi penyusunan perencanaan strategis tahunan yang selaras dengan perkembangan lingkungan strategis. Keseluruhan proses tersebut diperkuat melalui penyelarasan organisasi dan proses bisnis dengan prinsip Simplifikasi, Standardisasi, dan Sistemisasi (3S), sehingga perencanaan strategis tidak hanya menjadi instrumen penetapan arah, tetapi juga mampu mendorong pelaksanaan program yang lebih fokus, terintegrasi, adaptif, dan berorientasi pada efektivitas serta dampak kebijakan Bank Indonesia.

Dengan penguatan perencanaan strategis, pengelolaan sumber daya keuangan diarahkan agar semakin efektif dan efisien, terintegrasi, serta berorientasi pada hasil. Hal tersebut ditempuh melalui penguatan integrasi perencanaan strategis dan anggaran yang dilakukan untuk memastikan alokasi sumber daya keuangan mendukung prioritas strategi dan program kerja yang memberikan dampak optimal terhadap pencapaian tujuan Bank Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan penyempurnaan standar biaya dalam rangka penerapan standar yang wajar dalam pengelolaan anggaran operasional Bank Indonesia sebagaimana amanat UU P2SK. Akuntabilitas pengelolaan keuangan Bank Indonesia tecermin dari opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia tahun 2025, yang merupakan opini WTP ke-23 secara berturut-turut. Dengan pendekatan tersebut, penggunaan sumber daya keuangan tidak semata berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi semakin menekankan pada efektivitas dan efisiensi pencapaian sasaran, sehingga mampu mendukung kemampuan organisasi dalam merespons perubahan lingkungan strategis secara adaptif.

Tata kelola juga diperkuat untuk memastikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia dilaksanakan secara konsisten, akuntabel, transparan, dan profesional berlandaskan prinsip Independensi, Konsistensi, Koordinasi, Akuntabilitas, dan Transparansi (IKKAT). Penguatan tata kelola tersebut didukung oleh asesmen tata kelola secara terintegrasi yang mencakup aspek kecukupan ketentuan, keandalan manajemen risiko, dan kecukupan pengendalian intern, sehingga kualitas proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan senantiasa sejalan prinsip tata kelola yang baik dan profesional. Di sisi lain, sistem pengambilan keputusan di Bank Indonesia juga dirancang agar adaptif dan *streamlined*, serta memerhatikan mekanisme *check and balance* melalui tahapan inisiasi, verifikasi, rekomendasi, dan persetujuan. Penguatan tata kelola juga diarahkan untuk memastikan penyelesaian ketentuan sesuai mandat amendemen UU P2SK 2026, khususnya pada tiga klaster pengaturan yang terkait dengan Bank Indonesia, yaitu area kelembagaan, area inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK), dan area lainnya di sektor keuangan. Kerangka tata kelola yang semakin terintegrasi tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas kebijakan, kepastian hukum, pengelolaan risiko, dan akuntabilitas kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan mandat Bank Indonesia.

Inovasi digital Bank Indonesia diarahkan untuk menghasilkan proses kerja yang *streamlined*, kolaboratif, berkualitas, aman, dan andal. Inovasi tersebut ditempuh melalui tiga komponen utama, yaitu pengembangan aplikasi dan *digital business platform*, pengembangan pusat data dan AI, serta peningkatan kapabilitas teknologi dan pengamanan secara *end-to-end*. Pengembangan *digital business platform* menjadi fondasi utama modernisasi proses bisnis di area kebijakan dan kelembagaan.

Di area kebijakan, digitalisasi berfokus pada digitalisasi sistem yang diwujudkan melalui perluasan fitur BI-FAST yang semakin inklusif, serta eksplorasi inovasi Rupiah Digital dalam kerangka Proyek Garuda sebagai respons terhadap dinamika sistem keuangan digital global. Selain itu, Bank Indonesia memperkuat ekosistem pelaporan dan pengawasan Ketahanan dan Keamanan Siber (KKS) melalui sistem pelaporan terintegrasi untuk memastikan kepatuhan pelaporan oleh seluruh Penyelenggara Sistem Pembayaran.

Di area kelembagaan, digitalisasi difokuskan pada penguatan tata kelola dan efektivitas proses pengambilan keputusan melalui pengembangan platform *Digital Workplace* (DWP) sebagai media pendukung pelaksanaan RDG. Platform ini diimplementasikan secara bertahap untuk memperkuat integrasi informasi, mempercepat proses analisis, dan meningkatkan kualitas penyusunan kebijakan. Digitalisasi proses kerja juga diperkuat melalui kolaborasi proses kerja antarsatuan kerja/unit kerja sejalan dengan prinsip *one input, one process*, dan *multi-purpose*. Implementasi tersebut memperkuat integrasi informasi, mempercepat proses analisis, dan meningkatkan kualitas penyusunan dan perumusan kebijakan.

Inovasi digital juga didukung oleh pengembangan Pusat Data sebagai episentrum perubahan untuk mewujudkan institusi berbasis data (*data-driven institution*) dengan pemanfaatan AI dan *Machine Learning* (ML) secara optimal dan bertata kelola dalam pengambilan keputusan. Pengembangan ini mencakup dua besaran utama, yakni peran Pusat Data sebagai katalisator proses bisnis dan penguatan kapabilitas pusat data. Keduanya diwujudkan melalui pendekatan *end-to-end* mulai dari demokratisasi data dengan memanfaatkan metadata, otomasi aliran dan pengolahan data (*data factory*), eksperimentasi inovasi data, serta eksplorasi teknologi data, termasuk pengembangan model ML/AI (*data innovation*), dan pengembangan solusi teknologi *Omnidata Intelligence Platform*.

Bank Indonesia juga secara konsisten mendorong peningkatan kapabilitas infrastruktur teknologi dalam rangka memperkuat sistem informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas yang semakin kompleks. Upaya ini mencakup penguatan ketahanan dan keamanan siber melalui adopsi teknologi terkini, penerapan sertifikasi, serta optimalisasi monitoring terhadap infrastruktur yang dimiliki. Penerapan inovasi teknologi baru maupun peremajaan terhadap infrastruktur yang telah berjalan dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan kualitas, stabilitas, dan ketersediaan layanan sistem informasi tetap terjaga dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan organisasi. Di samping itu, Bank Indonesia juga memperkuat aspek tata kelola melalui penyusunan regulasi terkait keamanan sistem informasi dan ketahanan siber yang berlaku bagi seluruh penyelenggara sistem pembayaran, pelaku pasar uang, pasar valuta asing, maupun pihak lain yang diawasi oleh Bank Indonesia, sebagai langkah strategis untuk membangun ekosistem keuangan yang aman dan tangguh secara digital.

Di tengah tantangan yang semakin kompleks di era digital, Bank Indonesia terus memperkuat kapabilitas SDM dan kepemimpinan sebagai fondasi pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia agar semakin berkualitas, kredibel, dan responsif terhadap dinamika perekonomian. Pengelolaan SDM diarahkan untuk mewujudkan SDM yang berkinerja tinggi, serta menyiapkan pemimpin yang profesional sesuai dengan kebutuhan dan prioritas organisasi, dengan kompetensi tinggi, pengalaman kuat dan perilaku mulia. Hal ini dilakukan, salah satunya dengan pengembangan kapabilitas digital pegawai untuk mendukung digitalisasi proses kerja dan adaptasi terhadap perubahan teknologi. Penguatan kapabilitas digital pegawai ditekankan pada kapabilitas *data science*, *data analytics*, dan pemanfaatan AI dalam pelaksanaan tugas bank sentral. Selain itu, penguasaan pegawai terhadap aspek ekonomi dan keuangan hijau juga terus diperluas sebagai bagian dari penguatan peran strategis Bank Indonesia di era digital yang inklusif dan memerhatikan keberlanjutan.

Penguatan kapabilitas pegawai tersebut dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, termasuk yang dilakukan secara *in-house* di Bank Indonesia, didukung oleh infrastruktur pembelajaran digital. Pada 2026, Bank Indonesia mengembangkan kurikulum digital terintegrasi, didukung penyempurnaan *Learning Management System* (LMS) dan *Digital/Cyber Library*, serta pengembangan aplikasi *learning analytics*, antara lain melalui implementasi *virtual assistant* serta pengayaan modul *e-learning* dari internal Bank Indonesia maupun mitra kerja.

Bank Indonesia juga terus mendorong penguatan riset pendukung kebijakan melalui kolaborasi riset dengan otoritas pembuat kebijakan terkait, peneliti terkemuka, dan universitas. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi riset sebagai landasan perumusan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Bank Indonesia juga mengelola tiga jurnal ilmiah terindeks Scopus yang memperkuat peran Bank Indonesia sebagai *center of excellence* dalam diskursus kebanksentralan di tingkat global.

Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis dan peningkatan komposisi pegawai generasi Y dan Z, Bank Indonesia terus mendorong peran pegawai sebagai agen perubahan (*change agent*) organisasi. Oleh karena itu, Bank Indonesia memperkuat strategi pemenuhan dan pemeliharaan SDM, antara lain melalui penguatan *Employee Value Proposition* (EVP) 3.0. Sebagai salah satu prioritas kebijakan SDM, EVP 3.0 bertujuan meningkatkan keterikatan (*engagement)* pegawai Bank Indonesia, melalui tiga program, yaitu kesejahteraan pegawai, pemeliharaan kesehatan fisik dan mental, serta persiapan masa pensiun. Hal tersebut didukung dengan pengembangan lingkungan kerja modern (*modern office)*, yang mencakup suasana, hubungan, dan fasilitas kerja yang mendorong digitalisasi dan perilaku kerja digital pegawai.

IV. Sinergi Kebijakan Ekonomi: Transformasi untuk Lebih Kuat dan Berdaya Tahan

Prospek perekonomian domestik ke depan yang membaik memang perlu terus diperkuat, di tengah tantangan global yang masih kuat. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, lima tantangan global yang tidak berdiri sendiri dan dapat saling memperkuat perlu menjadi perhatian karena dapat menurunkan prospek negara berkembang, termasuk Indonesia. Ketidakpastian geopolitik yang tetap tinggi dan dapat berdampak pada harga energi serta suku bunga global yang bertahan tinggi perlu menjadi perhatian karena dapat menekan sektor eksternal. Tekanan dapat makin besar bila diikuti pertumbuhan ekonomi dunia yang tidak setinggi prakiraan dan gejolak pasar keuangan global akibat perkembangan AI yang tidak sesuai harapan. Akibatnya, transaksi berjalan dapat berkurang dan aliran modal tertahan yang kemudian dapat menekan nilai tukar Rupiah, meningkatkan tekanan inflasi dan menurunkan pertumbuhan ekonomi domestik. Risiko yang kompleks ini perlu direspons dengan tepat sehingga dapat tetap menjaga stabilitas dan momentum pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Sinergi kebijakan menjadi kunci untuk mendorong ekonomi Indonesia menjadi lebih kuat dan berdaya tahan. Sinergi kebijakan terus diperkuat dalam lima aspek, yakni sinergi menjaga stabilitas makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan, sinergi memperkuat ketahanan eksternal, sinergi mendorong pembiayaan, sinergi meningkatkan kapasitas dan produktivitas, serta sinergi mengembangkan ekonomi daerah yang inklusif. Sinergi kebijakan tersebut dijabarkan dalam strategi kebijakan terkait regulasi, kebijakan sektoral, dan perluasan pembiayaan guna memperkuat berbagai faktor produksi perekonomian terkait tenaga kerja dan kapital guna meningkatkan produktivitas perekonomian. Hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) menjadi salah satu bentuk untuk meningkatkan produktivitas perekonomian karena dapat memperkuat nilai tambah perekonomian. Secara keseluruhan, sinergi kebijakan yang dijabarkan melalui penguatan strategi kebijakan dan operasionalisasi kebijakan hilirisasi ditujukan untuk mendorong transformasi ekonomi agar ekonomi tumbuh lebih kuat dan berdaya tahan dalam jangka menengah panjang.

Sinergi Kebijakan untuk Ekonomi Lebih Kuat

Berbagai pengalaman empiris menunjukkan bahwa sinergi kebijakan merupakan kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan berdaya tahan. Sinergi ditempuh guna menjaga keselarasan arah pembangunan ekonomi sehingga berbagai kebijakan yang ditempuh menjadi lebih efisien dan tidak terjadi tumpang tindih kebijakan. Sinergi kebijakan bahkan akan saling memperkuat efektivitas antarkebijakan yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih

kuat dan semakin berdaya tahan dalam jangka menengah panjang. Lima sinergi kebijakan yang perlu terus diperkuat yakni sinergi menjaga stabilitas makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan, sinergi memperkuat ketahanan eksternal, sinergi mendorong pembiayaan, sinergi meningkatkan kapasitas dan produktivitas, serta sinergi mengembangkan ekonomi daerah yang inklusif, akan dielaborasi satu per satu.

Sinergi Menjaga Stabilitas Makroekonomi dan Sistem Keuangan

Sinergi untuk menjaga stabilitas sangat penting dilakukan karena merupakan prasyarat utama dalam mendukung kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Stabilitas penting dicapai karena dapat memberikan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Stabilitas tidak hanya berkaitan dengan stabilitas nilai Rupiah yakni inflasi dan nilai tukar, tetapi juga stabilitas sistem pembayaran dan stabilitas sistem keuangan. Upaya menjaga stabilitas menjadi semakin penting di tengah ketidakpastian ekonomi global yang tetap tinggi yang dapat memicu gangguan stabilitas dalam pasar keuangan dan perdagangan global yang pada gilirannya dapat memengaruhi stabilitas nilai tukar, inflasi dan sistem keuangan.

Bank Indonesia sesuai mandat terus berkomitmen menjaga stabilitas dengan tetap menyeimbangkan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi. *Pertama*, Bank Indonesia menetapkan kebijakan suku bunga secara *forward-looking* dan *pre-emptive* untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan Pemerintah dan menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. *Kedua*, Bank Indonesia memperkuat efektivitas kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah, melalui optimalisasi intervensi di pasar valas maupun kebijakan insentif bagi peningkatan aliran masuk investasi portofolio asing. Stabilisasi nilai tukar Rupiah juga didukung dengan pemberian insentif bagi peningkatan aliran masuk investasi portofolio asing yang akan terus dikalibrasi sesuai dengan dinamika di pasar valas. *Ketiga*, pengelolaan likuiditas moneter secara terukur melalui strategi operasi moneter *pro-market* untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan, meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter, serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valas, dengan tetap mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah. *Keempat*, menjaga kecukupan cadangan devisa untuk mendukung kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, didukung dengan optimalisasi pengelolaan cadangan devisa, penguatan kerja sama keuangan internasional, serta pengelolaan lalu lintas devisa sesuai kaidah internasional.

Sinergi kebijakan menjaga stabilitas juga ditempuh Bank Indonesia dengan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam menjaga stabilitas harga. Sinergi pengendalian inflasi, khususnya komponen *volatile food* (VF) dan *administered prices* (AP), dilakukan melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) baik di tingkat pusat maupun di berbagai daerah. Sinergi tersebut diwujudkan melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) yang diluncurkan secara nasional bersama Pemerintah Pusat dan Daerah pada 13 Mei 2026. Sinergi juga diarahkan untuk mengantisipasi risiko gangguan cuaca (El Niño) terhadap harga pangan. Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal Pemerintah untuk mencapai sasaran inflasi dan stabilitas makroekonomi secara keseluruhan.

Sinergi kebijakan fiskal Pemerintah dan kebijakan Bank Indonesia melalui kebijakan moneter dan makroprudensial juga diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara mendorong pertumbuhan dan menjaga stabilitas ekonomi. Sinergi dimulai dari perumusan asumsi makroekonomi APBN, asesmen dan respons kebijakan berkala, hingga perencanaan penerbitan SBN yang tetap menjaga stabilitas pasar keuangan. Dari Pemerintah, kebijakan fiskal Pemerintah juga diarahkan untuk mendukung stabilitas perekonomian. APBN berperan sebagai

instrumen menjaga stabilitas perekonomian melalui pengelolaan defisit dan pembiayaan yang pruden, pengendalian risiko fiskal, serta alokasi belanja yang terarah dan terukur. Kebijakan fiskal ekspansif ditempuh dengan tetap menjaga kredibilitas APBN. Defisit fiskal APBN 2027 ditetapkan sebesar Rp671,2 triliun atau 2,40% PDB, lebih rendah dari prakiraan defisit APBN 2026 sebesar 2,85% PDB. Penetapan defisit di bawah 3% PDB mencerminkan komitmen Pemerintah untuk menjaga disiplin fiskal, kesinambungan pembiayaan, serta kredibilitas kebijakan fiskal (Tabel 11). Penerimaan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,1 triliun, meningkat sekitar 7,1% dari *outlook* 2026, terutama bersumber dari penerimaan perpajakan. Sementara belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun, meningkat sekitar 4,2% terutama berasal dari belanja non-Kementerian/Lembaga dan Transfer ke Daerah. Belanja non-Kementerian/Lembaga meningkat menjadi Rp1.814 triliun sedangkan Transfer ke Daerah meningkat menjadi Rp735,0 triliun, antara lain untuk mendukung belanja pokok daerah dan pembangunan desa, termasuk peningkatan Dana Desa menjadi Rp77,0 triliun. Belanja Pemerintah juga diarahkan untuk menjaga daya beli dan produktivitas masyarakat, antara lain melalui perluasan PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah, program magang dan vokasi, serta perlindungan sosial. Pemerintah juga tetap mengalokasikan subsidi energi untuk menjaga daya beli dan stabilitas harga, dengan penyaluran yang lebih tepat sasaran. Pembiayaan defisit APBN tersebut diupayakan terutama dari penerbitan SBN dan pinjaman. Pengelolaan pembiayaan dilakukan secara pruden, terukur, dan inovatif, dengan rasio

Tabel 11. Pokok APBN 2026 dan 2027

Uraian (Triliun Rupiah)	2026	2027
A. PENDAPATAN NEGARA	**3.153,6**	**3.435,1**
I. Penerimaan Perpajakan	2.693,7	2.912,0
1. Penerimaan Pajak	2.357,7	2.593,4
2. Kepabeanan dan Cukai	336,0	318,6
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	459,2	522,5
III. Penerimaan Hibah	0,7	0,7
B. BELANJA NEGARA	**3.842,7**	**4.106,3**
I. Belanja Pemerintah Pusat	3.149,7	3.371,3
1. Belanja K/L	1.510,5	1.556,9
2. Belanja non-K/L	1.639,2	1.814,4
II. Transfer ke Daerah	693,0	735,0
C. KESEIMBANGAN PRIMER	**(89,7)**	**(20,9)**
D. SURPLUS / (DEFISIT)	**(689,1)**	**(671,2)**
% Defisit terhadap PDB	(2,68)	(2,40)
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	**689,1**	**671,2**

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

utang yang terkendali dan dijaga dalam batas aman. Secara keseluruhan, APBN 2027 mencerminkan keseimbangan dalam menjaga disiplin fiskal dengan dukungan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Sinergi kebijakan menjaga stabilitas sistem keuangan juga ditempuh melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang beranggotakan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Koordinasi dilakukan antara lain melalui rapat berkala KSSK setiap triwulan yang hasilnya dikomunikasikan kepada publik, koordinasi pengawasan makroprudensial oleh Bank Indonesia dan mikroprudensial oleh OJK, serta penguatan penjaminan simpanan dan resolusi bank oleh LPS. Kesiapan koordinasi terus diuji melalui simulasi untuk mendukung kecukupan pengaturan dan kesiapan operasional dalam pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. Sejalan dengan hal ini, keempat lembaga anggota KSSK berkomitmen menyelesaikan peraturan pelaksanaan UU P2SK sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2026 (Gambar 9).

Sinergi Memperkuat Ketahanan Eksternal

Sinergi kebijakan untuk meningkatkan ketahanan sektor eksternal yang dapat memperkuat Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) menjadi penting di tengah ketidakpastian ekonomi global yang tinggi. Ketidakpastian global dapat memengaruhi ekonomi domestik melalui jalur perdagangan dan jalur finansial, yang akhirnya berpengaruh terhadap komponen NPI. Ketidakpastian global dapat memengaruhi neraca transaksi berjalan (*current account*) akibat pertumbuhan ekonomi dunia yang belum kuat dan harga komoditas yang meningkat, termasuk harga energi. Sementara neraca transaksi modal dan finansial (*financial account*) juga dapat terpengaruh dari perubahan sentimen investor dan volatilitas di pasar keuangan global. Perubahan pada komponen ini kemudian dapat memengaruhi NPI yang pada gilirannya berdampak terhadap pergerakan nilai tukar Rupiah.

Sinergi kebijakan untuk memperkuat neraca transaksi berjalan diarahkan untuk meningkatkan daya saing ekspor barang dan jasa serta memperkuat kemandirian energi. Kebijakan untuk memperkuat daya saing ekspor ditempuh melalui berbagai

Gambar 9. Koordinasi Kebijakan KSSK Memelihara Stabilitas Sistem Keuangan



Sumber: Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), diolah

regulasi yang dapat meningkatkan efisiensi produk ekspor Indonesia. Penguatan efisiensi produk ekspor ditempuh melalui penguatan pada ekspor sektor manufaktur, termasuk hilirisasi, serta ekspor jasa. Selain itu, Pemerintah terus mendorong peningkatan pemanfaatan sumber energi domestik sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap barang impor, termasuk komoditas energi. Hal ini antara lain ditempuh melalui implementasi kebijakan biodiesel B50 serta pengembangan kebijakan bioetanol E10. Implementasi B50 sejak Juli 2026 meningkatkan campuran biodiesel berbasis sawit pada bahan bakar solar menjadi 50%. Sebelum B50 diterapkan, dari kebutuhan solar nasional sekitar 38–40 juta kiloliter per tahun, sekitar 3–4 juta kiloliter masih dipenuhi melalui impor. Implementasi B50 juga meningkatkan kebutuhan CPO dari sekitar 15,2 juta ton menjadi 16,3 juta ton, sehingga memperbesar penyerapan bahan baku domestik. Pemerintah juga telah menetapkan kebijakan pencampuran bioetanol sebesar 5% (E5) pada 2026-2027 dan meningkat menjadi 10% (E10) pada 2028 dengan implementasi yang direncanakan dipercepat. Kebijakan tersebut berpotensi menurunkan kebutuhan impor bahan bakar minyak sehingga mengurangi tekanan pada neraca perdagangan migas dan defisit transaksi berjalan (Tabel 12).

Sinergi kebijakan juga didukung kebijakan pengelolaan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA). Penerimaan DHE SDA hasil pengelolaan dan/atau pengolahan SDA perlu terus dioptimalkan untuk menjadi bagian dari sistem keuangan nasional untuk mendukung stabilitas dan kedaulatan ekonomi nasional. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 sebagai perubahan atas ketentuan DHE SDA, yang berlaku sejak 1 Juni 2026, guna meningkatkan retensi devisa di dalam negeri untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional serta memperkokoh stabilitas sistem keuangan nasional. Kebijakan tersebut mengatur kewajiban penempatan DHE SDA pada rekening khusus di bank BUMN, dengan besaran dan jangka waktu sesuai sektor, serta pembatasan konversi ke Rupiah, disertai insentif perpajakan dan fleksibilitas bagi eksportir tertentu, termasuk penempatan pada bank devisa non-BUMN yang memenuhi ketentuan.

Tabel 12. Neraca Perdagangan Indonesia (Miliar Dolar AS)

Uraian (Miliar Dolar AS)	2025*					2026		
	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Total	Tw.I	Tw.II	Tw.III
Ekspor (fob)	**66,52**	**68,70**	**74,32**	**72,95**	**282,51**	**66,85**	**73,97**	**80,42**
Nonmigas	62,95	65,34	71,40	70,03	269,72	63,60	70,99	77,69
Migas	3,57	3,36	2,93	2,93	12,79	3,25	2,98	2,73
Impor (cif)	**55,53**	**60,10**	**60,38**	**65,36**	**241,36**	**61,30**	**75,94**	**73,39**
Nonmigas	47,05	52,71	52,53	56,33	208,63	52,97	62,27	62,82
Migas	8,48	7,39	7,85	9,02	32,74	8,33	13,67	10,56
Neraca Perdagangan	**10,99**	**8,60**	**13,95**	**7,60**	**41,14**	**5,55**	**-1,97**	**7,03**
Nonmigas	15,90	12,63	18,87	13,69	61,09	10,63	8,72	14,86
Migas	-4,91	-4,02	-4,92	-6,10	-19,95	-5,08	-10,69	-7,83

Sumber: BPS

Pemerintah juga memperkuat tata kelola ekspor SDA strategis. Hal ini dilakukan melalui BUMN Ekspor untuk memonitor data dan informasi kegiatan ekspor SDA Strategis sebagaimana PP Nomor 24 Tahun 2026. OJK turut mendukung melalui pengawasan rekening penampungan (*escrow account*) DHE SDA dan kesiapan industri perbankan. Bank Indonesia turut mendukung ketentuan pelaksanaan dan pengawasan DHE SDA, melalui penambahan instrumen penempatan berupa SBN valas yang diterbitkan Pemerintah, serta pengelolaan data dan pelaporannya. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan Bank Indonesia, rata-rata tingkat kepatuhan pemasukan DHE untuk SDA Pertambangan Migas, Pertambangan Nonmigas, dan Nonpertambangan masing-masing pada kisaran 99%, 98%, dan 98%. Sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dengan Pemerintah dan lembaga terkait mendukung pemasukan DHE SDA dan terjaganya pasokan valas dalam negeri.

Sinergi untuk memperkuat neraca modal dan finansial diarahkan untuk meningkatkan daya tarik aset domestik sehingga aliran masuk modal asing dapat meningkat secara berkelanjutan. Bank Indonesia telah memperkuat kebijakan moneter melalui upaya menjaga tingkat imbal hasil yang tetap menarik, mengurangi biaya *hedging* yang mencakup transaksi *underlying* pinjaman luar negeri bank dan *Foreign Direct Investment* (FDI), meningkatkan fleksibilitas transaksi, mendorong pendalaman likuiditas pasar valas, serta menyediakan instrumen pengelolaan risiko yang menyeluruh bagi investor nonresiden. Instrumen lindung nilai menurunkan biaya pengelolaan risiko nilai tukar bagi investor dan meningkatkan daya tarik investasi portofolio, pinjaman luar negeri perbankan dan FDI. Besaran pengurangan premi ditingkatkan yang sebelumnya sebesar 25% untuk tenor 6 bulan dan 30% untuk tenor 12 bulan menjadi kisaran minimal 30% hingga maksimal 45%. Insentif juga diberikan pada *swap* lindung nilai untuk tenor 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan masing-masing sebesar 15%, 20%, dan 25%. Bank Indonesia juga mengimplementasikan DNDF Lindung Nilai dalam skema VASTRA mulai November 2026. Dari sisi operasional pasar, kerangka VASTRA diperkuat melalui relaksasi periode transaksi *back-to-back* dari T+0 menjadi T+1 untuk mendukung aliran modal masuk dan stabilitas nilai tukar, disertai penguatan peran Dealer Utama PUVA untuk memperbaiki distribusi likuiditas. Kebijakan insentif direspons positif pelaku pasar, khususnya investor nonresiden, sebagaimana tecermin pada peningkatan aliran modal masuk nasabah nonresiden ke aset domestik (Grafik 61).

Grafik 61. Aliran Modal ke Aset Domestik dan Transaksi *Hedging* Nonresiden

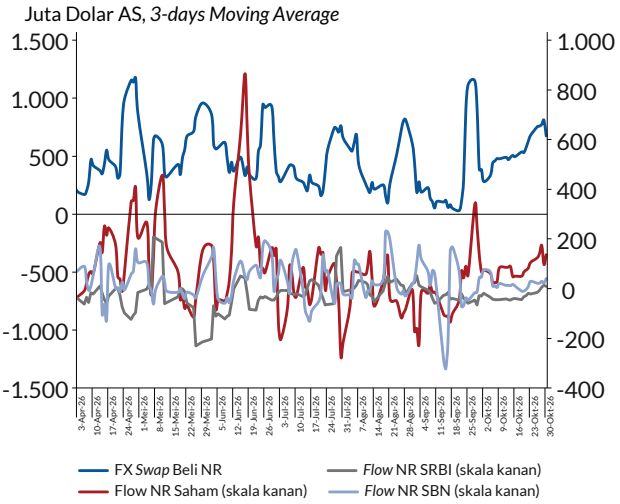

Keterangan: Data s.d. 16 Oktober 2026
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Sinergi Mendorong Pembiayaan Perekonomian

Sinergi mendorong pembiayaan ekonomi merupakan prasyarat penting dalam menopang upaya meningkatkan kapasitas dan produktivitas perekonomian. Kebutuhan modal dan investasi untuk mendorong pertumbuhan lebih kuat dan berdaya tahan sangat besar dan tidak mungkin hanya dipenuhi melalui APBN sehingga memerlukan strategi pembiayaan nasional yang bertumpu pada pendalaman sumber pembiayaan domestik dan pembiayaan jangka menengah panjang. Total prakiraan kebutuhan investasi selama periode 2026-2032 mencapai Rp71,06 ribu triliun, meningkat dari Rp7,79 ribu triliun pada 2026 menjadi Rp13,28 ribu triliun pada 2032 (Grafik 62). Dari keseluruhan kebutuhan pembiayaan tersebut, kontribusi pembiayaan perbankan dan pembiayaan luar negeri masing-masing diprakirakan sekitar 11,6% dan 11,1%. Sementara itu, pembiayaan investasi pemerintah dengan mempertimbangkan batas defisit APBN yang tidak melebihi 3% PDB diprakirakan berkontribusi

Grafik 62. Perkiraan Total Investasi dan Sumber Pembiayaan 2026-2032

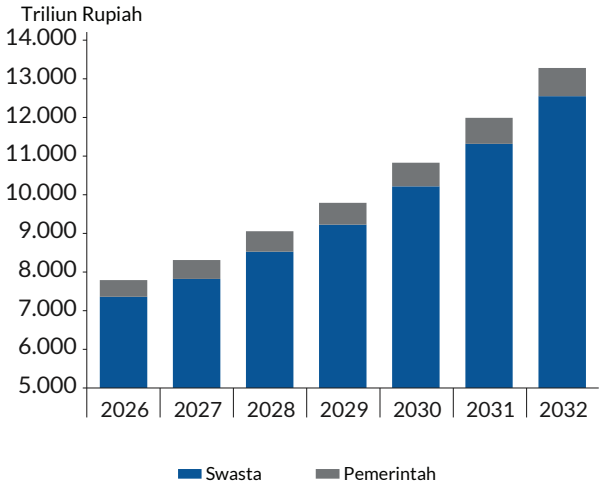

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 63. Perkiraan Komposisi Sumber Pembiayaan Investasi 2026-2032

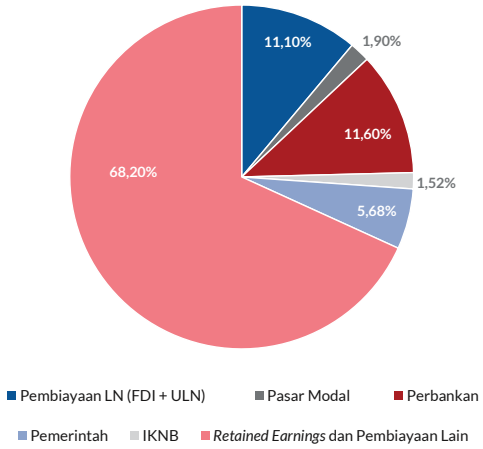

Sumber: Bank Indonesia

5,68%. Peran pasar modal dan IKNB masih relatif rendah masing-masing diprakirakan sebesar Rp1,35 ribu triliun atau sekitar 1,9% dan Rp1,08 ribu triliun atau sekitar 1,5%. Selebihnya, dana sendiri dan pembiayaan lainnya akan dominan sebagai sumber pembiayaan terbesar perekonomian, termasuk di dalamnya Danantara (Grafik 63). Ke depan, struktur pembiayaan perekonomian mengalami pergeseran secara bertahap hingga 2032, ditandai dengan menurunnya sumber dana sendiri dan meningkatnya sumber pembiayaan dari perbankan, pasar modal, IKNB, dan pembiayaan luar negeri. Perubahan komposisi pembiayaan menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan investasi yang terus meningkat memerlukan penguatan kapasitas intermediasi lembaga keuangan serta pendalaman pasar keuangan domestik.

Sinergi memperkuat pembiayaan ke depan diarahkan untuk memperkuat kapasitas intermediasi dan daya saing perbankan, serta mendorong sumber pembiayaan swasta. Fokus sinergi berkaitan dengan empat aspek yaitu struktur pembiayaan proyek yang optimal, sumber pembiayaan yang tepat, pembiayaan untuk kebutuhan likuiditas dan lindung nilai, serta penguatan edukasi dan literasi keuangan. Kelayakan proyek investasi akan menentukan struktur pembiayaan yang optimal. Semakin menguntungkan suatu proyek investasi, struktur pembiayaan dapat berasal baik dari swasta seperti kredit/pembiayaan dari perbankan, penerbitan obligasi atau surat berharga lain di pasar modal dalam negeri, maupun pinjaman dari investor luar negeri. Sebagian proyek memberikan keuntungan secara komersial sehingga kebutuhan investasi swasta dapat sebagian besar dipenuhi dari swasta baik modal sendiri, kredit perbankan, maupun pinjaman dan penanaman modal asing. Namun sebagian proyek lain masih memerlukan pembiayaan sebagian dan insentif fiskal dari Pemerintah untuk memperkuat kelayakan komersialnya. Insentif fiskal dan/atau kebijakan lain dari Pemerintah dimaksud termasuk tarif pajak, subsidi bunga, dan kepastian kebijakan Pemerintah, khususnya dalam masa tunggu (*grace period*) sejak tahap konstruksi sampai dengan tahap awal operasi. Sinergi mendorong perluasan sumber pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan investasi ke depan perlu diperkuat bersama Pemerintah, Danantara, KSSK, dan Bank Indonesia.

Sinergi Meningkatkan Kapasitas dan Produktivitas Perekonomian

Sinergi untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas perekonomian penting dilakukan guna mendukung stabilitas dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kapasitas perekonomian ini perlu dilakukan guna mengatasi kendala dan batasan dari sisi permintaan dan penawaran perekonomian. Dari sisi permintaan, Thirlwall (1979) menunjukkan ekspansi ekonomi

menghadapi batasan neraca pembayaran ketika peningkatan kebutuhan impor tidak diimbangi kemampuan menghasilkan devisa ekspor. Dari sisi penawaran, kerangka konseptual yang dikembangkan oleh Solow (1956) menjelaskan bahwa akumulasi modal menghadapi *diminishing returns*, sehingga pertumbuhan jangka panjang memerlukan kemajuan teknologi dan peningkatan produktivitas. Dalam kaitan ini, Kaldor (1966) menempatkan manufaktur sebagai mesin pertumbuhan yang dapat melonggarkan kedua batasan tersebut melalui penguatan kapasitas ekspor, peningkatan produktivitas, serta pendalaman keterkaitan produksi domestik.

Pengalaman empiris berbagai negara menunjukkan peningkatan kapasitas untuk nilai tambah ekonomi melalui penguatan dorongan pada industri pengolahan merupakan kunci mendorong ekonomi tumbuh tinggi. Negara yang berhasil mencapai status berpendapatan tinggi, seperti Korea Selatan, memperlihatkan pentingnya transformasi menuju manufaktur berteknologi menengah dan tinggi, disertai peningkatan kompleksitas produk dan kapabilitas produksi. Bukti empiris lintas negara juga menunjukkan hubungan positif antara pangsa industri berteknologi menengah dan tinggi dengan pendapatan per kapita (Grafik 64).

Grafik 64. Nilai Tambah Manufaktur Padat Teknologi dan GNI Per Kapita

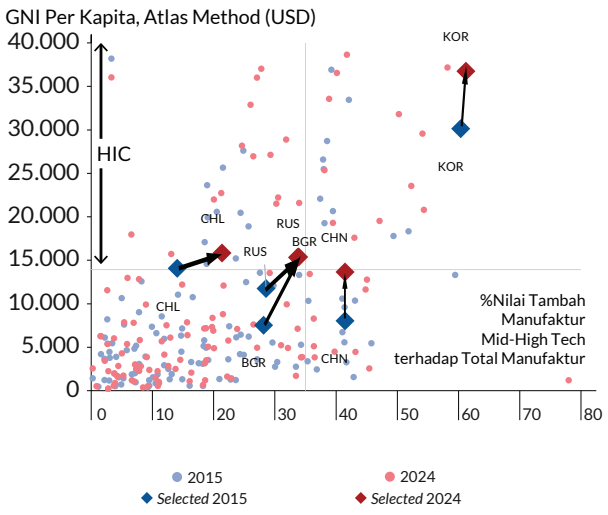

Sumber: UNIDO, World Bank, diolah

Penguatan sektor manufaktur menjadi strategi untuk meningkatkan kapasitas ekonomi dan mendukung transformasi ekonomi untuk tumbuh lebih kuat. Dalam kerangka pikir Solow, peningkatan kapasitas perekonomian ditempuh melalui pengembangan sektor prioritas yang inklusif, didukung kebijakan makroekonomi dan pembiayaan yang kredibel untuk memperkuat kapital, tenaga kerja, dan produktivitas. Industrialisasi menjadi yang paling strategis karena mempercepat transformasi struktural melalui transfer teknologi, absorpsi *hard skill* tingkat lanjut, dan peningkatan nilai tambah berdaya ungkit tinggi. Sektor manufaktur memiliki *increasing returns to scale*, efek pengganda (*multiplier effect*), dan keterkaitan kuat dengan sektor lain. Kaldor's First Law menyatakan semakin tinggi pertumbuhan output manufaktur, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi. Peran manufaktur tidak hanya ditentukan oleh kontribusinya terhadap PDB, tetapi juga utamanya oleh kemampuannya menciptakan rantai nilai domestik yang luas, meningkatkan permintaan input dan jasa pendukung, serta menaikkan produktivitas perekonomian secara keseluruhan. Dengan gambaran ini, maka penguatan sektor manufaktur menjadi strategi penting untuk mengubah struktur produksi ke aktivitas yang lebih produktif dan bernilai tambah tinggi.

Sinergi Mengembangkan Ekonomi Daerah yang Inklusif

Sinergi mendorong kapasitas dan produktivitas perekonomian perlu dibarengi dengan strategi untuk mendorong pemerataan agar ekonomi menjadi inklusif. Hal ini perlu dilakukan karena industrialisasi dapat memunculkan dilema ketimpangan. Manfaat pertumbuhan lebih dahulu dinikmati oleh pemilik modal, pekerja terampil, dan masyarakat yang memiliki akses terhadap pusat pertumbuhan, sedangkan sebagian tenaga kerja masih bertahan pada sektor berproduktivitas rendah.

Gambar 10. Kurva Kuznets

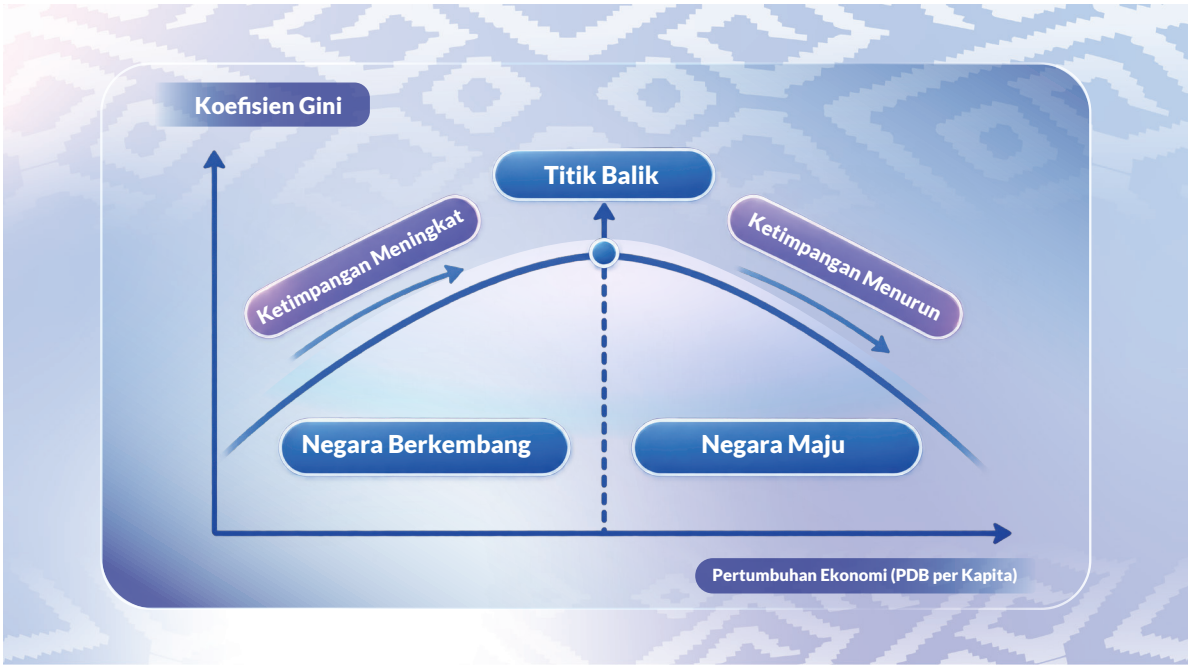

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Strategi yang dapat ditempuh ialah dengan mengembangkan strategi pembangunan yang menciptakan Kuznets' *tunnel* atau "menembus" Kurva Kuznets. Pendekatan *multi-pronged strategy* diperkenalkan oleh Stiglitz (2018), dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui optimalisasi semua sektor yang merupakan keunggulan komparatif suatu negara. Pendekatan ini tetap menjadikan sektor manufaktur sebagai sektor utama, tetapi juga memanfaatkan keunggulan komparatif dari sektor lain, misalnya pertanian atau SDA (Gambar 10). Sebagai contoh di sektor pertanian, dilakukan modernisasi dan transformasi pertanian baik di sisi *on-farm* (hulu) maupun *off-farm* (hilir). Strategi lain adalah melakukan *skill-upgrading* untuk mendukung sektor jasa menjadi lebih produktif dan lebih inklusif.

Penjabaran atas pendekatan *multi-pronged strategy* dapat dilakukan dengan memanfaatkan keragaman spasial ekonomi Indonesia. Diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi dapat dioptimalkan guna mengurangi ketergantungan pada komoditas, khususnya di wilayah luar Jawa, dan meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan. Sektor industri yang diperkuat sesuai dengan keunggulan masing-masing daerah akan mendorong penciptaan lapangan kerja berkualitas sebagai hasil dari pertumbuhan industri baru dan peningkatan produktivitas yang lebih baik. Ketimpangan dapat menurun karena strategi ini tidak hanya bergantung pada sektor industri, namun juga mendorong sektor lain dalam proses produksi dan distribusi. Penentuan sektor dapat berbeda antardaerah mengacu pada sektor yang memiliki keterkaitan ekonomi dengan sektor lain yang cukup tinggi. Dengan demikian, upaya mendorong sektor tertentu tersebut akan turut menarik sektor-sektor ekonomi yang menjadi pemasok kebutuhan bahan baku (*backward linkage*) maupun yang menjadi pengguna (*forward linkage*). Pendekatan *multi-pronged strategy* juga dapat ditempuh karena dapat memanfaatkan bonus demografi Indonesia (Grafik 65). Pemanfaatan peluang tersebut perlu terus diakselerasi untuk mendorong penurunan tingkat pengangguran terbuka.

Grafik 65. Bonus Demografi Indonesia

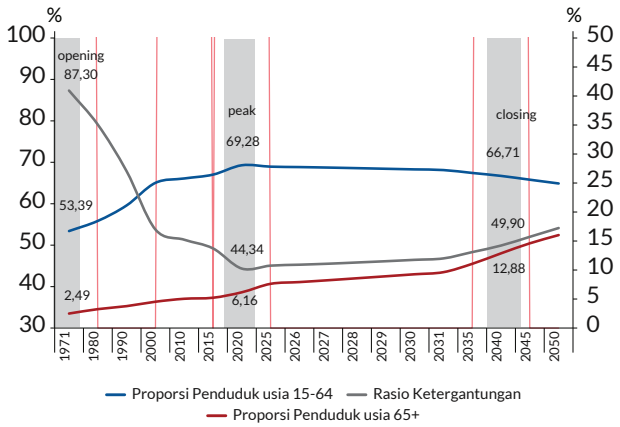

Sumber: Historis menggunakan SP/SUPAS; 2025 adalah observasi terkini SUPAS 2025; 2026–2050 memakai asumsi medium.

Pembangunan ekonomi inklusif dapat semakin diperkuat melalui pelibatan UMKM daerah secara *end-to-end* sebagai bagian dari ekosistem produksi nasional yang berdaya saing. Hal ini dapat ditempuh karena pengembangan sektor utama daerah yang berbasis UMKM akan memperkuat struktur ekonomi secara lebih inklusif. Pengembangan UMKM merupakan opsi efektif karena mampu menyerap tenaga kerja secara luas, mendorong inovasi lokal, dan memperkuat daya tahan ekonomi. Pemberdayaan dengan pola kemitraan rantai pasok diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing, mendorong akses pembiayaan, serta sinergi meningkatkan literasi keuangan. Pemberdayaan usaha guna meningkatkan daya saing dilakukan secara *end-to-end* dari hulu ke hilir, memperluas akses pasar dan memperkuat dukungan infrastruktur, serta digitalisasi (Gambar 11). Strategi ini memerlukan dukungan pembiayaan, baik melalui pembiayaan perbankan maupun lembaga nonbank serta inovasi produk dan model bisnis pembiayaan untuk skala UMKM.

Bank Indonesia akan terus memperkuat dukungan nyata pengembangan ekonomi daerah yang produktif, berdaya tahan, dan inklusif. Melalui Kantor Perwakilan, Bank Indonesia menjadi mitra strategis Pemerintah Daerah dalam pengembangan sektor prioritas, fasilitasi investasi, pendampingan UMKM, dan koordinasi melalui potensi penguatan TP2ED. Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) diperkuat melalui klaster pangan dan kerja sama antardaerah, termasuk dukungan penyediaan

Gambar 11. UMKM sebagai Bagian dari Ekosistem Produksi Nasional

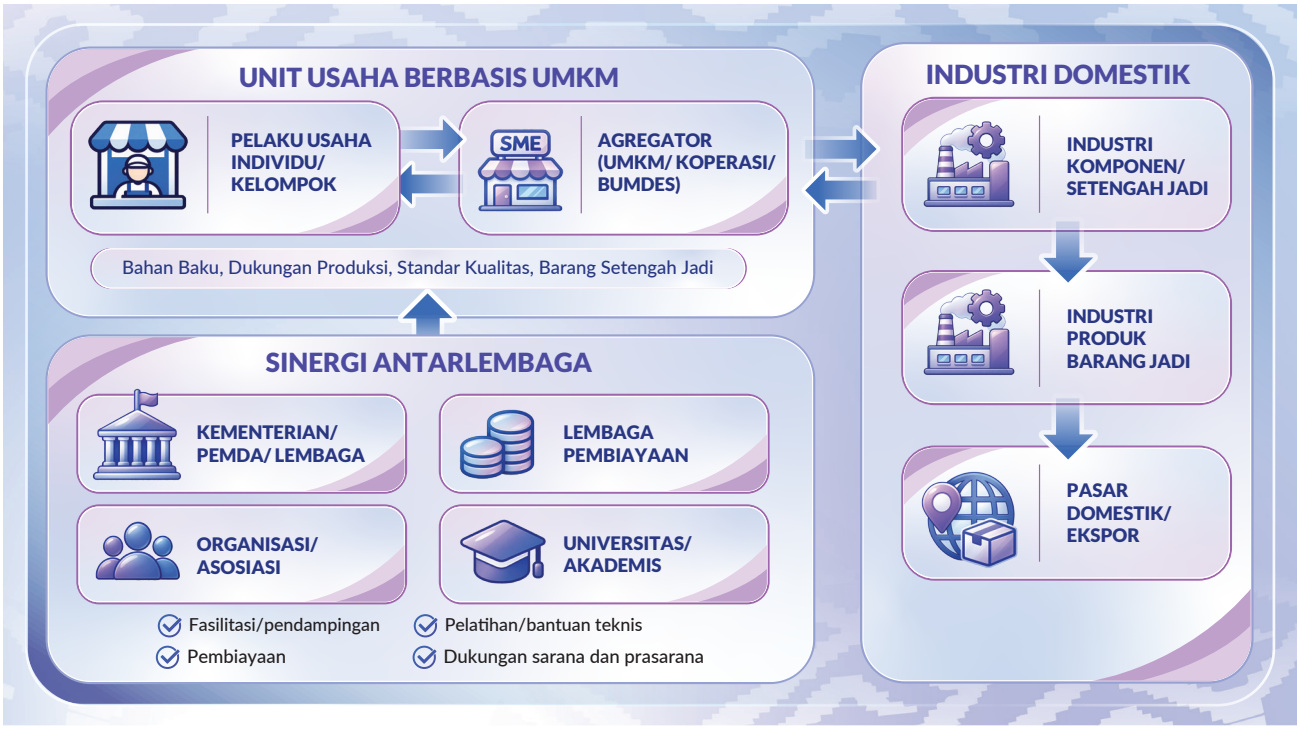

Sumber: Bank Indonesia

sarana produktif (PI-KEKDA), untuk mendukung swasembada pangan serta stabilitas harga. Pengembangan UMKM mencakup hilirisasi pangan, produk potensi ekspor, pariwisata berkualitas, dan ekonomi kreatif, dengan perluasan akses pasar melalui RIRU, *business matching*, serta Karya Kreatif Indonesia. Pemberdayaan kelompok subsisten, khususnya perempuan dan keluarga prasejahtera, disinergikan melalui penguatan kapasitas usaha serta literasi keuangan. Pengembangan rantai nilai halal, pembiayaan syariah, dan literasi turut memperluas partisipasi UMKM dalam ekosistem pangan serta pariwisata halal. Dari sisi pembiayaan, KLM inklusif dan berkelanjutan melengkapi program Pemerintah dalam memperluas pembiayaan produktif. Elektronifikasi bantuan sosial dan transaksi Pemerintah Daerah, perluasan QRIS serta Kartu Kredit Indonesia, dan literasi digital ditempuh guna mendukung efisiensi, inklusi keuangan, dan akses ekonomi. Kapasitas SDM daerah diperkuat melalui bantuan pendidikan kebanksentralan berupa beasiswa, dukungan riset, dan pembinaan GenBI sebagai penggerak literasi serta pemberdayaan masyarakat.

Strategi untuk Mendorong Pertumbuhan Lebih Tinggi

Sinergi kebijakan perlu dijabarkan dalam tiga pilar strategi kebijakan guna memperkuat kontribusi faktor produksi tenaga kerja dan kapital dalam meningkatkan produktivitas perekonomian. Tiga strategi kebijakan tersebut berkaitan dengan strategi penguatan regulasi, strategi penajaman kebijakan sektoral dan strategi perluasan pembiayaan. Ketiga pilar diarahkan untuk memperkuat kondisi struktural iklim usaha dan efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi, peningkatan kapasitas produksi, serta perluasan ketersediaan sumber pembiayaan guna mempercepat peningkatan kapasitas dan produktivitas perekonomian dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dalam jangka menengah.

Strategi Penguatan Regulasi

Strategi penguatan regulasi diarahkan untuk memperbaiki iklim usaha, meningkatkan produktivitas dan memperkuat kapital dan tenaga kerja dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Peningkatan produktivitas ditempuh melalui penguatan regulasi yang mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, akselerasi digitalisasi, adopsi teknologi, inovasi, serta efisiensi pasar. Salah satu upaya ini ditempuh melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Satgas ini berperan memperkuat koordinasi lintas Kementerian/Lembaga, mempercepat pelaksanaan program prioritas, serta mengatasi berbagai hambatan strategis (*debottlenecking*) guna meningkatkan kepastian berusaha dan memperbaiki iklim investasi. Pemerintah juga telah menerbitkan regulasi yang ditujukan untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur guna mendorong peningkatan produktivitas. Regulasi tersebut antara lain Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2026 tentang Penugasan Khusus dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur, yang memberikan penugasan khusus kepada Kementerian Pekerjaan Umum untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk mengurangi kemiskinan, serta memperkuat kemandirian pangan, energi, dan air.

Peningkatan produktivitas juga didukung oleh Rancangan Perpres mengenai Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional 2026–2029. Hal ini ditempuh untuk membangun kerangka pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan artifisial secara terintegrasi, termasuk melalui penguatan inovasi, kapabilitas teknologi dan riset, serta mitigasi risiko. Selain itu, Keppres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional serta Perpres Nomor 21 Tahun 2026 juga diarahkan untuk

mempercepat investasi hilirisasi dan pembangunan infrastruktur. Berbagai regulasi tersebut diarahkan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi, meningkatkan pemanfaatan teknologi dan digitalisasi, mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan (*research and development*), serta memperbaiki efisiensi distribusi dan akses layanan ekonomi.

Penguatan kapital ditempuh melalui penguatan regulasi untuk perbaikan iklim investasi, peningkatan investasi domestik dan asing, penguatan sumber pembiayaan, dan percepatan realisasi investasi, khususnya pada sektor padat modal. Kebijakan ini antara lain didukung oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang memberikan kepastian waktu pelayanan perizinan melalui penerapan *service level agreement* (SLA), Perpres Nomor 28 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Investasi Pembangunan dalam rangka Percepatan Pertumbuhan Ekonomi, serta penguatan sektor keuangan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Keseluruhan kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pembentukan modal, mempercepat realisasi investasi, menurunkan *incremental capital output ratio* (ICOR), serta meningkatkan efisiensi penggunaan kapital dalam mendorong kapasitas produksi nasional.

Peningkatan tenaga kerja diarahkan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja, serta memperluas kesempatan kerja formal yang produktif. Penguatan regulasi dalam aspek ini antara lain ditempuh melalui Inpres Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan, SMA Unggul Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran, yang mendorong peningkatan akses dan kualitas pendidikan serta penguatan kapasitas sumber daya manusia sejak pendidikan dasar hingga menengah. Selanjutnya, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Program Magang Nasional (MagangHub) diarahkan untuk meningkatkan keterampilan dan pengalaman kerja lulusan pendidikan tinggi melalui program pemagangan di dunia usaha. Penguatan tersebut juga dilengkapi dengan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang diarahkan untuk memperkuat kepastian dan pelindungan pekerja, termasuk pekerja dalam hubungan kerja nonkonvensional dan pekerja platform digital, serta meningkatkan kualitas hubungan industrial. Rangkaian kebijakan ini diharapkan dapat memperbaiki kesesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri, meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, serta memperbesar penyerapan tenaga kerja formal. Dengan demikian, penguatan kualitas sumber daya manusia menjadi bagian integral dari upaya meningkatkan efisiensi penggunaan faktor produksi sekaligus memperbesar potensi pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.

Strategi Penajaman Kebijakan Sektoral

Penguatan kebijakan sektoral diarahkan untuk mengakselerasi pengembangan sektor yang dapat memberikan nilai tambah tinggi, utamanya sektor industri manufaktur. Pencapaian visi Indonesia Emas 2045 membutuhkan pertumbuhan ekonomi minimal 6% dan pertumbuhan manufaktur di atas 7% per tahun dalam jangka menengah. Dengan pertumbuhan manufaktur saat ini yang masih sekitar 5%, terdapat *Kaldorian deficit* yang perlu diatasi melalui percepatan reindustrialisasi, antara lain dengan mengoptimalkan hilirisasi SDA. Dalam konteks ini, pengembangan hilirisasi SDA ditempatkan sebagai strategi utama reindustrialisasi untuk memperkuat peran industri manufaktur sebagai *engine of growth*, sekaligus meningkatkan nilai tambah domestik dan kontribusi sektor eksternal terhadap pertumbuhan ekonomi. Strategi ini bertumpu pada penetapan komoditas prioritas, peningkatan kapasitas produksi dan pendalaman rantai nilai pasok dalam negeri, penguatan pembiayaan hilirisasi, serta peningkatan efisiensi alokasi sumber daya. Dengan kondisi ini, hilirisasi SDA tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pengolahan komoditas di dalam negeri, tetapi juga mendorong pendalaman struktur industri melalui pengembangan industri antara dan industri hilir, peningkatan kandungan teknologi, serta perluasan akses pasar ekspor.



Strategi penguatan kinerja sektor industri manufaktur akan berkaitan dengan upaya mendorong efektivitas pengembangan hilirisasi SDA. Hilirisasi SDA menjadi strategi utama kebijakan sektoral yang memerlukan dukungan strategi yang terintegrasi mencakup penyediaan investasi strategis, infrastruktur, serta peningkatan kualitas SDM. Dalam kaitan ini, optimalisasi Proyek Strategis Nasional (PSN) diarahkan untuk mempercepat investasi pembangunan infrastruktur fisik dan konektivitas, terutama yang mendukung pengembangan kawasan industri, pusat-pusat produksi, serta kelancaran rantai pasok dan distribusi. Sementara itu, Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) melengkapi upaya tersebut melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga pengembangan industri dapat memperkuat keterkaitan dengan pelaku usaha domestik, termasuk UMKM, sekaligus memperluas kesempatan dan penyerapan tenaga kerja. Pendirian Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) juga diharapkan memperkuat tata kelola perdagangan ekspor komoditas strategis guna meningkatkan posisi tawar Indonesia di pasar global, meningkatkan nilai tambah ekspor, serta mendukung ketersediaan bahan baku bagi industri hilir domestik. Optimalisasi ketiga instrumen kebijakan tersebut diharapkan dapat mempercepat pendalaman struktur industri, memperkuat keterkaitan antarsektor dan rantai nilai domestik, serta meningkatkan kapasitas produksi nasional. Pada akhirnya, penguatan kebijakan sektoral akan mendorong terbentuknya struktur ekonomi yang lebih produktif dan berdaya saing, dengan kontribusi ekspor produk bernilai tambah tinggi dan penyerapan tenaga kerja yang semakin besar.

Strategi Perluasan Pembiayaan

Strategi perluasan pembiayaan diperlukan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan. Dalam kaitan ini, kebijakan makroprudensial Bank Indonesia yang akomodatif ditempuh dengan tiga langkah: *Pertama*, mendorong intermediasi yang optimal melalui (i) penguatan efektivitas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM); dan (ii) mendorong inovasi pasar keuangan untuk memperluas sumber pendanaan perbankan selain DPK, antara lain melalui sekuritisasi untuk mendorong pembiayaan inklusif, syariah, dan berkelanjutan. *Kedua*, penguatan ketahanan perbankan dan kesiapsiagaan dalam mencegah dan memitigasi tekanan sektor keuangan melalui penguatan pelaksanaan surveilans terintegrasi dan Protokol Manajemen Krisis Terintegrasi (PMKT) yang tersinergi secara nasional. *Ketiga*, memperkuat kebijakan untuk memperluas akses keuangan yang inklusif, pembiayaan berkelanjutan, dan syariah guna menopang sektor riil, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sinergi bersama pemangku kepentingan untuk mengakselerasi intermediasi terus diperkuat. PINISI sebagai platform komunikasi, koordinasi, dan sinergi untuk mendorong penyaluran kredit/pembiayaan kepada sektor prioritas serta proyek strategis, khususnya sisi permintaan, akan terus dikembangkan melalui penguatan *alignment program* antara perbankan, korporasi, UMKM, dan asosiasi, guna memperluas akses pembiayaan dan mendukung pengembangan ekosistem rantai pasok (*corporate matching*). Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, program PINISI diarahkan untuk mendorong pembiayaan jangka panjang pada sektor ekonomi yang produktif melalui proyek strategis nasional dan daerah, mengatasi berbagai hambatan (*debottlenecking*) pembiayaan, dan fasilitasi proyek-proyek potensial dengan sumber pembiayaan (*project matching*). Ke depan, PINISI diarahkan untuk menghasilkan dampak yang lebih terukur melalui percepatan realisasi proyek yang siap dibiayai, penguatan sinergi antarprogram, perluasan *corporate matching* berbasis rantai pasok, penyempurnaan sektor prioritas pembiayaan, peningkatan intensitas forum likuiditas, perluasan kemitraan strategis, dan dukungan terhadap proyek strategis nasional baru. Melalui berbagai upaya tersebut, PINISI diharapkan dapat semakin memperkuat keterhubungan antara kebutuhan dan sumber pembiayaan, mendorong realisasi investasi dan peningkatan kapasitas produksi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan penciptaan lapangan kerja.

Sinergi pendalaman pasar keuangan juga penting untuk mendukung pembiayaan perekonomian nasional, baik untuk peningkatan likuiditas, suku bunga yang kompetitif, maupun instrumen lindung nilai atas suku bunga dan nilai tukar. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia akan terus mengimplementasikan *Blueprint* Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valas (BPPU) 2025-2030 baik pengembangan produk, *pricing*, pelaku, maupun infrastruktur. Sinergi pengembangan pasar keuangan dalam KSSK dan dengan K/L, otoritas, dan pelaku terus dilakukan untuk inovasi instrumen pembiayaan ekonomi dan lindung nilai, seperti instrumen Surat Utang, *swap* suku bunga dan nilai tukar, dan optimalisasi transaksi mata uang lokal (LCT). Jenis pembiayaan dapat berbentuk penanaman modal, kredit, maupun penerbitan obligasi dan surat-surat berharga lainnya. Bank Indonesia akan mengakselerasi pengembangan Surat Berharga Komersial (SBK) guna memperluas alternatif pembiayaan jangka pendek berbasis pasar bagi perbankan dan korporasi, sekaligus menyediakan pilihan instrumen investasi yang lebih beragam bagi investor. Pengembangan tersebut ditempuh melalui penguatan ekosistem SBK dari sisi penawaran dan permintaan, termasuk mendorong peningkatan penerbitan secara berkelanjutan, perluasan basis investor institusi, serta penguatan aktivitas pasar sekunder guna mendukung likuiditas dan pembentukan harga yang lebih efisien.

Berbagai kebijakan lain juga ditempuh untuk meningkatkan pembiayaan PMA dan PMDN. Investasi swasta PMA dan PMDN pada 2027 ditargetkan lebih tinggi dibandingkan dengan target realisasi 2026 untuk mendorong peningkatan kapasitas dan produktivitas perekonomian. Pemerintah menargetkan capaian realisasi investasi PMA dan PMDN pada 2027 sebesar Rp2.322 triliun, atau naik 13,8% dari 2026. Dalam rangka mendukung pencapaian target tersebut, mekanisme perizinan investasi terus diperkuat. Sistem perizinan dari 18 Kementerian/Lembaga sudah terintegrasi dengan Sistem OSS (*Online Single Submission)*. Sejalan dengan hal tersebut, 575 RDTR kabupaten/kota juga telah terhubung dengan sistem OSS. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menjalankan program Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) untuk mempercepat realisasi proyek. Melalui implementasi KLIK, investor yang melakukan investasi di 62 kawasan industri dapat mulai melakukan pembangunan investasi, paralel dengan penyelesaian proses perizinan. Koordinasi pusat dan daerah juga diperkuat untuk memfasilitasi realisasi proyek hilirisasi, Proyek Strategis Nasional, dan program prioritas pemerintah. Penyusunan regulasi turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko juga terus diselesaikan.

Penguatan Kebijakan Hilirisasi SDA

Kebijakan hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) menjadi strategi kunci untuk memperkuat mesin pertumbuhan yang lebih kuat dan berdaya tahan. Hilirisasi SDA meningkatkan nilai tambah dan diversifikasi produksi, memperkuat *forward* dan *backward linkages*, mendorong difusi dan adopsi teknologi, dan menggeser basis nilai tambah dari sektor ekstraktif ke aktivitas pengolahan. Hilirisasi juga memperkuat substitusi impor barang antara dan memperbaiki kontribusi ekspor bersih. Hal ini penting karena ekspor produk pengolahan masih bergantung pada input dan mesin impor untuk otomotif, elektronik, logam dasar, kimia, dan tekstil. Selain itu, hilirisasi menstimulasi pembangunan infrastruktur industri di wilayah penghasil SDA dan memperkuat stabilitas pendapatan karena produk hilir bernilai tambah lebih tinggi, lebih inelastis terhadap fluktuasi pasar, dan lebih resilien terhadap volatilitas pasar komoditas.

Berbagai kebijakan penguatan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam telah ditempuh Pemerintah. Pemerintah menargetkan investasi hilirisasi hingga 2040 sebesar 159 miliar dolar AS atau sekitar Rp2.680 triliun pada 28 komoditas mineral, batu bara, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan migas. Penetapan prioritas hilirisasi penting karena pengembangan komoditas tidak dapat dilakukan secara serentak dan seragam. Besarnya kebutuhan investasi dan kapasitas industri yang masih berkembang menuntut tahapan implementasi yang jelas.

Gambar 12. Tahapan Pemilihan Komoditas dan Produk Prioritas

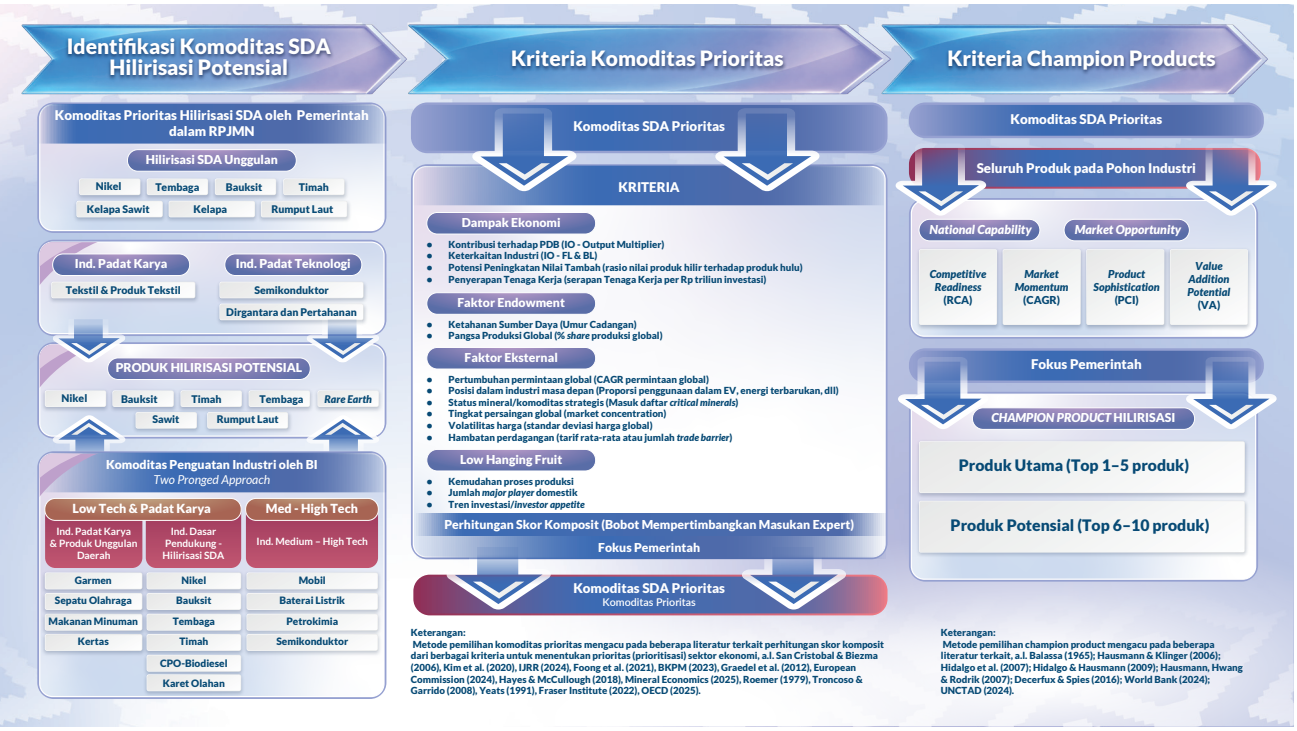

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Berbagai studi menunjukkan bahwa prioritisasi kebijakan membantu mengarahkan sumber daya secara efisien dan meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan pembangunan. Hasil kajian Bank Indonesia mengidentifikasi sembilan komoditas potensial hilirisasi, dengan nikel dan bauksit sebagai komoditas prioritas serta baterai kendaraan listrik, *stainless steel slab*, aluminium *ingot*, dan aluminium *slab/billet* sebagai sejumlah produk prioritas. Estimasi pengembangan produk prioritas pada periode 2026–2029 menunjukkan tambahan neraca perdagangan sekitar 0,16% PDB, disertai tambahan pertumbuhan PDB rata-rata 0,20 poin persentase per tahun, pertumbuhan industri manufaktur 0,59 poin persentase per tahun, dan tambahan penyerapan sekitar 422 ribu tenaga kerja (Gambar 12).

Penguatan hilirisasi sumber daya alam (SDA) dirumuskan dalam lima pilar utama yang dibangun atas kerangka kebijakan industri (*industrial policy*) yang komprehensif. Lima pilar utama tersebut, yaitu (i) regulasi dan kebijakan, (ii) insentif, (iii) sumber daya manusia, (iv) teknologi, dan (v) pembiayaan (Gambar 13). Kelima pilar tersebut berfungsi sebagai *industrial enablers* yang saling melengkapi untuk mendukung transformasi industri pengolahan dan hilirisasi. Pilar regulasi dan kebijakan berfokus pada penciptaan kepastian hukum melalui keselarasan strategi hilirisasi, harmonisasi regulasi dan perizinan, tata kelola bahan baku serta ekspor, pengadaan strategis dan kebijakan *local content*, hingga penyediaan utilitas, kawasan industri, dan energi yang kompetitif. Pilar insentif mencakup dukungan fiskal maupun nonfiskal untuk mendorong investasi, adopsi teknologi dan kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D), penguatan perdagangan dan permintaan domestik, pengembangan kawasan industri/KEK, serta peningkatan kualitas ketenagakerjaan. Pilar sumber daya manusia diarahkan pada kolaborasi *triple helix*, pengembangan pendidikan vokasi dan pelatihan, serta kebijakan ketenagakerjaan asing yang adaptif. Pilar teknologi menekankan pembangunan ekosistem riset dan inovasi, *industrial innovation hub*, serta mekanisme transfer teknologi. Sementara itu, pilar pembiayaan berfokus pada penguatan ekosistem pembiayaan, optimalisasi *sovereign wealth fund* (SWF), serta pendalaman pasar keuangan guna memastikan ketersediaan pembiayaan jangka panjang bagi investasi hilirisasi.

Gambar 13. Lima Pilar Penguatan Hilirisasi SDA



Sumber: Bank Indonesia

Dalam pelaksanaannya, pengembangan hilirisasi dan industri padat modal perlu beriringan dengan industri padat karya, melalui integrasi rantai pasok domestik yang dilakukan secara utuh. Manufaktur diharapkan tidak hanya menjadi ujung tombak pendorong pertumbuhan ekonomi tinggi, namun juga lapangan kerja formal dan berkualitas, terutama melalui pengembangan industri padat karya. Industri pemasok domestik, termasuk UMKM, masih menghadapi keterbatasan kapasitas produksi, kemampuan inovasi, serta pemenuhan spesifikasi dan standar mutu. Kendala tersebut menghambat integrasi rantai nilai domestik (*local value chain*/LVC), sehingga sebagian kebutuhan input ditopang impor.

Ke depan, penguatan keterkaitan industri padat modal-padat karya perlu diperkuat melalui lima saluran yang saling melengkapi (Gambar 14). *Pertama*, integrasi rantai pasok dua arah, yakni penyediaan input industri dasar bagi industri padat karya, serta pasokan komponen dan kebutuhan operasional industri besar oleh industri padat karya. *Kedua*, difusi teknologi dan keterampilan melalui pendampingan mutu, digitalisasi, dan pelatihan pekerja. *Ketiga*, pemanfaatan bersama infrastruktur, fasilitas produksi, dan pengujian. *Keempat*, kemitraan pembiayaan berbasis pesanan dan tagihan untuk menopang modal kerja serta investasi pemasok. *Kelima*, pengembangan pasar melalui promosi bersama dan perluasan jejaring pembeli. Implementasinya perlu didukung pemetaan kebutuhan industri, pengembangan pemasok secara berkelanjutan, serta kontrak kemitraan yang terukur agar peningkatan produktivitas dan nilai tambah memperluas penciptaan pekerjaan berkualitas.

Konsep penguatan hilirisasi SDA dapat juga bersifat inklusif karena mengikutsertakan pengembangan industri prioritas daerah sesuai keunggulan wilayah dan keterlibatan UMKM. Berbagai proyek hilirisasi serta investasi Danantara, PKPN, dan PSN yang tersebar di berbagai wilayah, membuka peluang pengembangan sumber pertumbuhan daerah. Persebaran investasi tersebut perlu direspons melalui peninjauan dan rekonfigurasi sektor prioritas daerah sesuai perubahan struktur produksi, kebutuhan industri, dan peluang pasar. Penetapan prioritas berlandaskan kemampuan meningkatkan nilai tambah

Gambar 14. Integrasi Industri Padat Modal dan Padat Karya

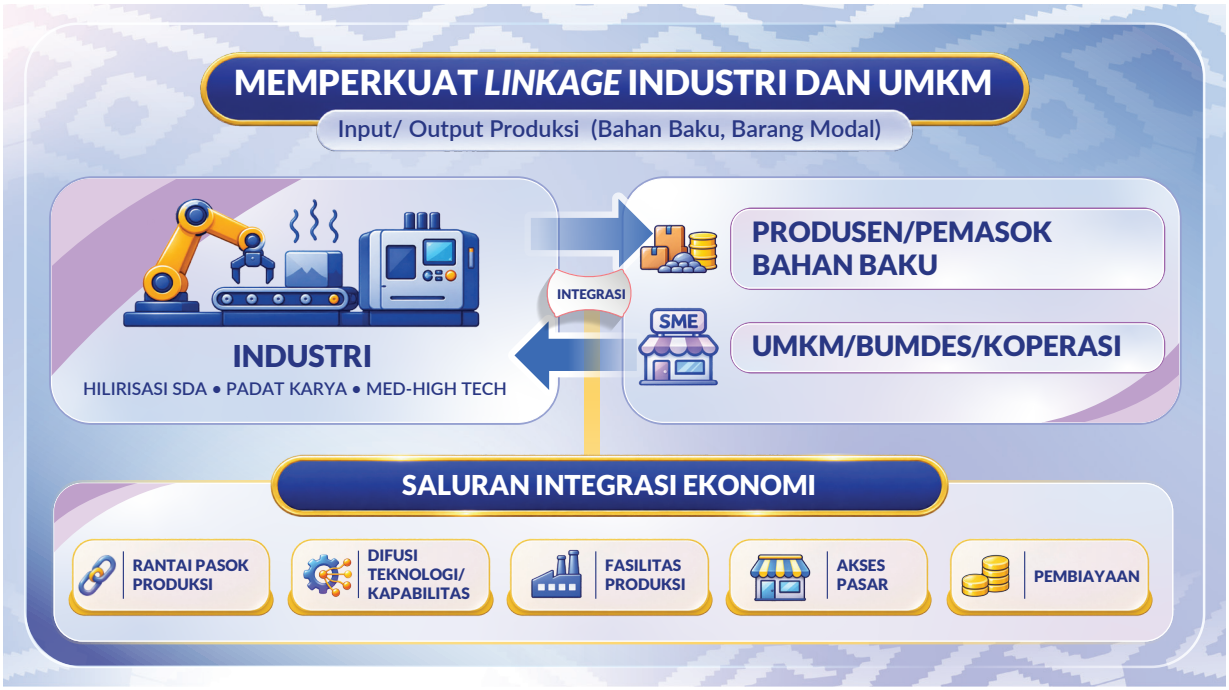

Sumber: Bank Indonesia

ekonomi daerah (*impactful*), menyerap tenaga kerja dan output UMKM (*inclusive*), serta memperkuat keterkaitan rantai nilai hilirisasi dan antarwilayah (*integrated*). Strategi pengembangan disesuaikan dengan keunggulan wilayah, antara lain elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, serta pengolahan pangan berbasis perkebunan dan perikanan (Gambar 15).

Gambar 15. Peta Sebaran Sub-Lapangan Usaha Industri Pengolahan Berdasarkan Wilayah



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Perekonomian Jangka Menengah Menguat

Secara keseluruhan, penguatan kelima area sinergi bauran kebijakan ekonomi nasional yang didukung berbagai strategi kebijakan menjadi modal pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan berdaya tahan. Sinergi bauran kebijakan transformasi ekonomi nasional berpijak pada tiga pilar kebijakan, yakni penguatan regulasi untuk memperbaiki iklim usaha, kebijakan sektoral untuk memperkuat sektor eksternal dan penyerapan tenaga kerja, serta perluasan pembiayaan untuk mendukung pengembangan kapasitas perekonomian. Penguatan regulasi diarahkan untuk meningkatkan efisiensi produktivitas, modal, dan sumber daya manusia. Kebijakan sektoral difokuskan pada peningkatan nilai tambah dan orientasi ekspor melalui PKPN, PSN, dan DSI, serta didukung hilirisasi, pembangunan infrastruktur, konektivitas, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, dan peningkatan kualitas SDM. Sementara itu, pembiayaan diperkuat melalui pendalaman sumber pembiayaan domestik dan pengembangan pembiayaan jangka panjang.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah diprakirakan semakin menguat didukung penguatan strategi kebijakan, termasuk memperkuat kebijakan hilirisasi SDA yang ditempuh secara bersinergi oleh berbagai pemangku kepentingan. Besaran dampak terhadap pertumbuhan ekonomi bergantung pada kecepatan, ketepatan, dan efektivitas pelaksanaan kebijakan serta realisasi investasi. Semakin kuat implementasi kebijakan domestik untuk meningkatkan permintaan sekaligus kapasitas produksi dan semakin tinggi intensitas kebijakan struktural maka akan semakin kuat dan berdaya tahan pertumbuhan ekonomi yang diraih. Produktivitas atau *Total Factor Productivity* (TFP) diprakirakan akan terus menguat dengan didukung peningkatan efisiensi. Peningkatan efisiensi diprakirakan akan mendorong peningkatan kapasitas produksi melalui pengembangan sektor padat modal dan penguatan sektor padat karya. Peningkatan kapasitas produksi tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi.

V. Arah Bauran Kebijakan Bank Indonesia Tahun 2027: Menjaga Stabilitas, Mendukung Pertumbuhan

Bauran kebijakan Bank Indonesia pada 2027 akan terus diarahkan untuk memperkuat stabilitas dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berdaya tahan. Arah bauran kebijakan tersebut ditempuh mempertimbangkan ketidakpastian global yang masih tinggi di tengah upaya untuk terus memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, kebijakan moneter pada 2027 akan tetap difokuskan untuk menjaga stabilitas, khususnya stabilitas nilai tukar Rupiah agar sesuai dengan kondisi fundamental dan pencapaian sasaran inflasi 2,5±1%. Kebijakan makroprudensial akan terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan kredit dan pembiayaan perbankan menuju tingkat optimal, dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Sementara itu, kebijakan sistem pembayaran akan terus dioptimalkan untuk memperkuat digitalisasi sistem pembayaran sesuai *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 guna meningkatkan transaksi dan velositas ekonomi-keuangan digital, serta memperkuat struktur industri sistem pembayaran yang sehat dan efisien dan meningkatkan keandalan, keamanan, dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran. Bauran kebijakan tersebut ditopang kebijakan pendukung melalui akselerasi pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valas (PUVA) sesuai *Blueprint* Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (BPPU) 2030, kebijakan ekonomi-keuangan inklusif, hijau, dan syariah (Gambar 16), yang disertai dukungan kebijakan internasional dan kebijakan ekonomi dan keuangan daerah.

Bauran kebijakan Bank Indonesia pada 2027 tersebut merupakan pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Gambar 16. Arah Bauran Kebijakan Bank Indonesia 2027



Sumber: Bank Indonesia

(UU P2SK). Sesuai UU P2SK, tujuan Bank Indonesia adalah mencapai stabilitas nilai Rupiah, memelihara stabilitas Sistem Pembayaran, dan turut menjaga stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tujuan Bank Indonesia tersebut dicapai dengan melaksanakan tiga tugas, yaitu: (i) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan; (ii) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; serta (iii) menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial.

Arah Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter Bank Indonesia pada 2027 akan terus diarahkan untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai fundamental dan pencapaian inflasi sesuai sasarannya, di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Ketidakpastian global tersebut terutama bersumber dari berlanjutnya ketegangan geopolitik, khususnya konflik di Timur Tengah yang meluas ke kawasan lain sehingga dapat menyebabkan gangguan pada rantai pasok energi dan perdagangan dunia berlangsung lebih lama serta meningkatkan tekanan inflasi global, berlanjutnya fragmentasi ekonomi dan perdagangan dunia, serta masih tingginya inflasi dan suku bunga negara maju, khususnya AS, dalam waktu yang lebih lama (*higher for longer*). Dengan kondisi tersebut, volatilitas pasar keuangan global diprakirakan akan tetap tinggi sehingga menurunkan preferensi investor global terhadap aset keuangan negara berkembang.

Dampak tingginya gejolak global tersebut dapat merambat ke perekonomian domestik melalui 3 (tiga) jalur, yakni jalur harga komoditas, jalur perdagangan dan produksi, serta jalur pasar keuangan. *Imported inflation* dapat meningkat sejalan dengan kenaikan harga komoditas dunia. Harga komoditas dapat memberikan tekanan yang makin besar bila terjadi gangguan pasokan akibat gangguan arus perdagangan dunia. Aliran masuk modal asing ke negara-negara berkembang semakin terbatas sejalan ketidakpastian pasar keuangan global. Secara keseluruhan, kondisi ini dapat memberikan tekanan kepada stabilitas nilai tukar dan mengganggu prospek pencapaian sasaran inflasi 2,5±1%.

Berbagai risiko global tersebut mengharuskan Bank Indonesia untuk terus memperkuat respons kebijakan moneter guna memitigasi dampak rambatan gejolak global terhadap ketahanan eksternal, stabilitas nilai tukar Rupiah, dan pencapaian sasaran inflasi. Dalam kaitan ini, kebijakan moneter pada 2027 akan terus ditempuh secara konsisten, *forward-looking*, *pre-emptive*, dan terukur, dengan mengoptimalkan berbagai instrumen kebijakan sesuai dinamika perekonomian global dan domestik, untuk memperkuat stabilitas dan efektivitas transmisi kebijakan moneter dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan.

Kebijakan moneter pada 2027 diarahkan untuk menjaga stabilitas yang ditempuh melalui empat instrumen pokok. *Pertama*, kebijakan suku bunga Bank Indonesia akan terus diarahkan secara *forward-looking* dan *pre-emptive* untuk mencapai sasaran inflasi 2,5±1% pada 2027, serta menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. Konsisten dengan fokus kebijakan tersebut, Bank Indonesia pada 2026 telah menaikkan suku bunga kebijakan BI-Rate secara kumulatif sebesar 100 bps dari 4,75% menjadi 5,75% pada Mei–Juni 2026, dan mempertahankannya hingga Oktober 2026. BI-Rate kembali dinaikkan pada November 2026 menjadi 6,00% untuk memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah dari dampak meningkatnya gejolak pasar keuangan global, sekaligus sebagai langkah *pre-emptive* untuk menjaga inflasi pada 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran sebesar 2,5±1%. Ke depan, dengan prakiraan inflasi 2027 yang tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1% di tengah masih tingginya ketidakpastian global dan tekanan terhadap nilai tukar Rupiah, kebijakan suku bunga BI-Rate akan terus ditetapkan secara *forward-looking*, *pre-emptive*, dan terukur berdasarkan asesmen terhadap perkembangan data dan kondisi perekonomian.

***Kedua*, kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas nilai tukar dari tingginya gejolak global sehingga mendukung pencapaian sasaran inflasi.** Kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah tetap diperkuat guna memitigasi dampak rambatan gejolak global terhadap perekonomian domestik. Stabilitas nilai tukar Rupiah penting untuk menjaga inflasi, khususnya dari risiko *imported inflation*, menjangkar ekspektasi dan menjaga *confidence*, memberikan kepastian usaha dan memitigasi risiko nilai tukar terhadap neraca perbankan dan korporasi. Dalam kaitan ini, kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah yang telah diperkuat sepanjang 2026 akan terus dilanjutkan pada 2027 melalui optimalisasi strategi intervensi di pasar valuta asing secara terukur dan fleksibel (*smart intervention*), baik melalui transaksi NDF di pasar luar negeri maupun transaksi *spot* dan *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF) di pasar domestik. Strategi intervensi tersebut akan terus dioptimalkan untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dengan tetap memberikan ruang pergerakan sesuai mekanisme pasar dan fundamental perekonomian, yang konsisten dengan pencapaian sasaran inflasi. Kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah juga diperkuat dengan optimalisasi instrumen insentif lindung nilai transaksi *swap* dan DNDF, untuk meningkatkan daya tarik investasi aset keuangan domestik bagi peningkatan aliran masuk investasi portofolio asing, serta diversifikasi transaksi valas termasuk melalui *Local Currency Transaction* (LCT) sekaligus mendorong pendalaman PUVA. Kebijakan insentif dimaksud akan terus dikalibrasi sesuai dengan dinamika di pasar valuta asing. Langkah-langkah tersebut didukung penguatan strategi operasi moneter *pro-market*, transaksi SBN di pasar sekunder secara terukur, serta akselerasi pendalaman PUVA, termasuk perluasan LCT, guna memperkuat efektivitas stabilisasi nilai tukar Rupiah dan ketahanan eksternal perekonomian Indonesia.

***Ketiga*, strategi operasi moneter *pro-market* terus diperkuat untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter, menjaga kecukupan likuiditas Rupiah, serta sekaligus mendorong pendalaman PUVA.** Pengelolaan likuiditas melalui program moneter diarahkan untuk menjaga keseimbangan likuiditas di pasar uang dan perbankan sesuai kebutuhan perekonomian. Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan strategi operasi moneter *pro-market* untuk semakin memperkuat efektivitas transmisi suku bunga BI-Rate ke sektor keuangan, stabilitas

pasar dan sistem keuangan secara keseluruhan. Penguatan strategi operasi moneter *pro-market* antara lain dilakukan dengan optimalisasi transaksi repo, DNDF, dan *Overnight Index Swap* (OIS) dengan melibatkan bank-bank yang memanfaatkan *Central Counterparty* (CCP) guna memperkuat mitigasi risiko transaksi dan meningkatkan efisiensi pasar, perluasan instrumen Operasi Moneter Valas berupa *Swap* Lindung Nilai Konvensional dan DNDF Lindung Nilai Konvensional untuk mata uang KRW, THB, AED dan SGD, serta transaksi *Cross Currency Repo* (CCR) dengan Bank Indonesia, yang memungkinkan perbankan memperoleh dana Rupiah dengan agunan surat berharga berdenominasi valuta asing berupa Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI). Langkah-langkah tersebut ditujukan untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter, mempercepat pendalaman pasar keuangan dan memperkuat dukungan likuiditas Rupiah. Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan struktur suku bunga dan volume instrumen operasi moneter, baik untuk ekspansi maupun absorpsi likuiditas, termasuk transaksi SBN di pasar sekunder secara terukur, dengan tetap memperkuat sinergi kebijakan fiskal Pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

***Keempat*, kecukupan cadangan devisa akan terus dijaga untuk mendukung kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, dan diperkuat dengan pengelolaan lalu lintas devisa sesuai kaidah internasional.** Kecukupan cadangan devisa akan terus ditingkatkan, baik dari surplus neraca pembayaran, operasi moneter valas, maupun melalui optimalisasi pengelolaannya. Dalam kaitan ini, optimalisasi pengelolaan cadangan devisa terus diperkuat melalui penerapan *Strategic Asset Allocation* (SAA) untuk mencapai hasil investasi yang optimal serta memenuhi kebutuhan likuiditas untuk pembayaran utang luar negeri Pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah. Di samping penempatan cadangan devisa pada aset keuangan berkualitas tinggi dengan risiko nilai tukar rendah, Bank Indonesia juga akan terus mengoptimalkan perluasan instrumen penempatan valas Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA), guna mendukung implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025. Kerja sama bilateral dengan sejumlah bank sentral, termasuk dengan Malaysia, India, dan Tiongkok, dijalin untuk pemanfaatan kerja sama *swap* dan pembelian SBN secara bilateral dalam pengelolaan cadangan devisa. Demikian pula kerja sama internasional juga dipererat, baik secara multilateral dengan Bank for International Settlements (BIS) untuk pengelolaan devisa, kerja sama *swap* secara bilateral dengan sejumlah bank sentral termasuk AS, Jepang, Tiongkok, dan ASEAN, maupun kerja sama secara regional dengan ASEAN+3 (Jepang, Korea Selatan) dalam kerangka Chiang Mai Initiative Multilateralism (CMIM) untuk penguatan *Regional Financial Arrangement* (RFA) di Asia. Sebagai tindak lanjut UU P2SK, Bank Indonesia juga telah menerbitkan PBI tentang pengaturan pengelolaan lalu lintas devisa untuk memperkuat ketahanan eksternal ekonomi Indonesia yang konsisten dengan sistem devisa bebas dan kaidah internasional sesuai panduan yang diterbitkan IMF. Pengaturan dimaksud mencakup pengelolaan lalu lintas devisa baik kondisi normal, kondisi tekanan, maupun dalam kondisi krisis, serta mekanisme koordinasinya antara Bank Indonesia, Pemerintah, dan KSSK untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Koordinasi kebijakan moneter Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal Pemerintah juga terus dipererat untuk memperkuat ketahanan eksternal dari gejolak global, pengendalian inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Koordinasi kebijakan dalam menjaga ketahanan eksternal dari dampak global dilakukan dengan menyelaraskan operasi moneter Bank Indonesia untuk stabilisasi nilai tukar Rupiah dan likuiditas dengan penerbitan SBN oleh Pemerintah di pasar domestik dan global, mulai dari rencana tahunan hingga pelaksanaannya dari waktu ke waktu. Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi, khususnya komponen *volatile food* (VF) dan *administered prices* (AP), bersama Pemerintah Pusat dan Daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP

Gambar 17. Arah Kebijakan Moneter Bank Indonesia Tahun 2027



Sumber: Bank Indonesia

dan TPID), serta melalui pelaksanaan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) yang lebih *targeted* dan *forward-looking* dengan mengoptimalkan peran 46 Kantor Perwakilan Bank Indonesia di daerah. Selain itu, Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah (KEKDA) terus diperkuat melalui optimalisasi peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia sebagai *strategic advisor* bagi Pemerintah Daerah, dengan fokus pada penguatan *advisory* kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, akselerasi investasi strategis di sektor riil, pengembangan UMKM, serta perluasan digitalisasi sistem pembayaran (Gambar 17).

Arah Kebijakan Makroprudensial

Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan makroprudensial longgar pada tahun 2027 untuk mengoptimalkan kredit/pembiayaan perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, inklusif dan berkelanjutan, dengan tetap turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Arah kebijakan makroprudensial longgar ini ditempuh Bank Indonesia didasarkan pada tiga pertimbangan pokok. Pertama, siklus keuangan Indonesia pada tahun 2027 dan 2028 yang masih di bawah kapasitas pembiayaan optimal dan diprakirakan mencapai potensi optimalnya pada tahun 2029 (Grafik 66). Hal ini sejalan dengan siklus ekonomi yang masih di bawah kapasitas output nasional terutama karena belum kuatnya permintaan konsumsi dan investasi sektor swasta di tengah ketidakpastian perekonomian global. Perkembangan ini memberi ruang bagi penguatan intermediasi perbankan untuk mendorong pembiayaan sektor produktif dan memperluas inklusi keuangan. Kebijakan makroprudensial longgar juga akan mendukung pemenuhan kebutuhan pembiayaan Program Prioritas Nasional dalam Asta Cita Pemerintah, termasuk hilirisasi SDA, penguatan industri manufaktur, ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur dan perumahan, serta pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif, guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Kedua, tantangan likuiditas dan pendanaan perbankan sebagaimana terindikasi dari penurunan rasio alat likuid terhadap DPK perbankan (Grafik 67) yang

Grafik 66. Siklus Keuangan Indonesia

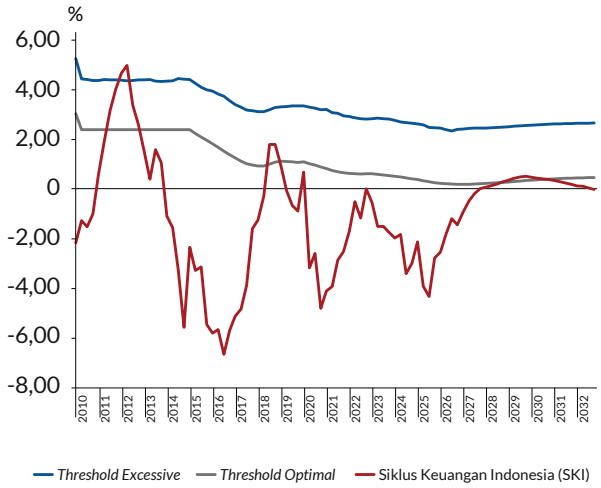

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 67. Perkembangan Rasio Alat Likuid/DPK Perbankan

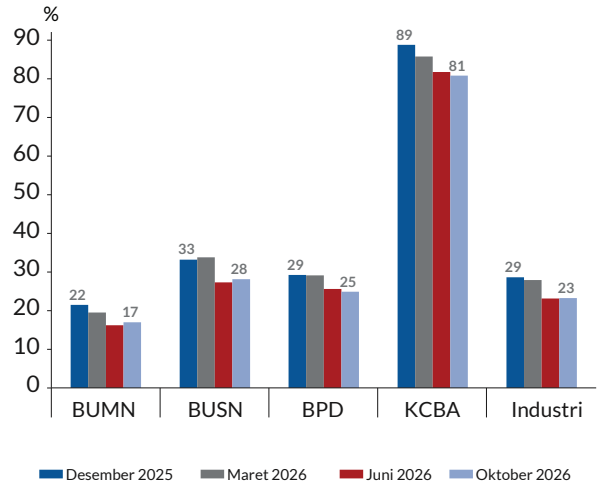

Sumber: Bank Indonesia

dipengaruhi oleh dinamika siklikal aliran modal asing dan dampak likuiditas operasi keuangan Pemerintah, serta perbedaan kinerja penyaluran kredit dan kapasitas penghimpunan dana antarkelompok bank yang menyebabkan distribusi likuiditas perbankan yang belum merata. Kondisi ini memerlukan penguatan kapasitas dan pemerataan distribusi likuiditas perbankan guna mendukung optimalisasi penyaluran kredit dan memperkuat efektivitas transmisi kebijakan. Ketiga, kebijakan makroprudensial longgar juga konsisten dengan kondisi stabilitas sistem keuangan yang tetap sehat, tecermin dari tingginya rasio kecukupan modal, likuiditas yang secara keseluruhan masih tetap terjaga, dan rendahnya kredit bermasalah. Namun, meningkatnya kompleksitas risiko sistemik seiring dengan dinamika global dan domestik, serta akselerasi digitalisasi sektor keuangan perlu terus dicermati karena dapat berdampak terhadap stabilitas sistem keuangan ke depan. Perkembangan ini menuntut penguatan ketahanan terhadap risiko dengan spektrum yang semakin luas, tidak hanya risiko keuangan, tetapi juga risiko operasional, siber, dan *fraud*, serta risiko yang timbul dari perkembangan kecerdasan artifisial (AI). Untuk itu, diperlukan penguatan ketahanan dan mitigasi risiko sistem keuangan secara antisipatif melalui sinergi kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), koordinasi keamanan sistem informasi dan ketahanan siber bersama OJK dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), pencegahan dan penanganan permasalahan bank bersama OJK dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta koordinasi KSSK untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mengoptimalkan pembiayaan perekonomian nasional sejalan dengan amanat UU P2SK.

Instrumen kebijakan makroprudensial tetap akan longgar untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan yang diprakirakan pada rentang 9-13% pada 2027 dengan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga. Arah kebijakan makroprudensial pada 2027 didasarkan pada keseimbangan tiga sasaran, yaitu mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan yang optimal, sistem keuangan yang stabil, serta keuangan inklusif dan hijau (Gambar 18). Optimalitas ketiga sasaran ini penting untuk menjaga tetap kondusifnya keterkaitan makro-finansial (*macro-financial linkages*), termasuk kapasitas penawaran kredit oleh perbankan, permintaan kredit dari sektor prioritas, kecukupan likuiditas, serta mitigasi risiko SSK.

Kebijakan makroprudensial akomodatif ditempuh dengan tiga langkah utama. Pertama, penguatan intermediasi perbankan dilakukan melalui optimalisasi kebijakan KLM dan pengembangan

Gambar 18. Arah Kebijakan Makroprudensial Tahun 2027



Sumber: Bank Indonesia

inovasi keuangan untuk memperluas sumber pendanaan perbankan. Penguatan KLM *financing channel* akan terus diarahkan untuk mendorong penyaluran kredit/pembiayaan kepada sektor-sektor prioritas yang memiliki daya ungkit pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, dengan mempertimbangkan dinamika siklus keuangan Indonesia serta kapasitas intermediasi perbankan. Sementara itu, efektivitas KLM Pendalaman Pasar Uang (PPU) akan dievaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan kondisi dan distribusi likuiditas antarbank serta perkembangan pendalaman pasar uang, agar insentif yang diberikan semakin efektif dan sesuai kebutuhan dalam memperkuat intermediasi dan memperbaiki distribusi likuiditas. Di samping itu, Bank Indonesia terus mendorong inovasi pasar keuangan melalui penguatan ekosistem sekuritisasi guna memperkuat sumber pendanaan bank selain DPK. Sekuritisasi diharapkan dapat memperkuat diversifikasi pendanaan, mengoptimalkan pengelolaan neraca dan *asset-liability management* perbankan, serta memperluas basis investor dan pendalaman pasar keuangan. Pengembangan ekosistem tersebut memerlukan sinergi antarotoritas dan pelaku pasar, didukung oleh standardisasi aset dasar, transparansi informasi, mekanisme penilaian risiko dan harga yang kredibel, serta pelindungan investor. Dengan demikian, inovasi pembiayaan akan memperluas kapasitas intermediasi secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan mitigasi atas risiko yang berpotensi timbul.

Kedua, penguatan ketahanan sistem keuangan dilakukan melalui peningkatan kesiapsiagaan dan efektivitas pelaksanaan Protokol Manajemen Krisis Terintegrasi (PMKT) dengan mempertimbangkan keterkaitan antara guncangan di area kebijakan dan area kelembagaan. Kompleksitas risiko yang semakin tinggi menuntut pendekatan pencegahan dan penanganan sumber risiko sistem keuangan yang bersifat antisipatif dan *forward-looking*. Cakupan risiko yang diawasi juga meluas, tidak hanya memperhatikan risiko keuangan secara parsial, namun juga mempertimbangkan (i) *interlinkage* atau potensi dampak rambatan risiko dari satu sektor ke sektor lainnya, serta (ii) jenis risiko baru seperti risiko operasional, siber, *fraud*, hingga disrupsi teknologi baru seperti AI yang dapat menimbulkan guncangan terhadap SSK. Di samping itu, percepatan

penyebaran informasi melalui media sosial berpotensi memengaruhi ekspektasi dan perilaku pelaku pasar, sehingga memperbesar risiko rambatan tekanan dan mempersulit penanganan krisis apabila tidak diantisipasi secara cepat dan memadai. Oleh karena itu, Bank Indonesia memperkuat PMKT dan surveilans terintegrasi dalam rangka pemantauan terhadap risiko secara dini (*early detection*), menilai keterkaitan risiko lintas area kebijakan (moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran) dan kelembagaan (tata kelola, keuangan, dan operasional), serta kesiapan respons melalui koordinasi dan sinergi bersama otoritas terkait. Penguatan tersebut dilakukan melalui koordinasi dan sinergi kebijakan yang erat antara BI, Pemerintah, OJK, dan LPS dalam kerangka KSSK. Hal ini turut diperkuat dengan komunikasi kebijakan yang terarah, konsisten, dan kredibel kepada publik maupun pelaku industri guna menjaga kepercayaan, memperkuat efektivitas respons kebijakan, serta mencegah eskalasi tekanan yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Ketiga, penguatan kebijakan makroprudensial untuk mendukung inklusi ekonomi dan keuangan berkelanjutan, serta keuangan syariah, terus diarahkan agar mendukung pertumbuhan yang berkualitas dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Upaya ini dilakukan melalui penguatan kebijakan RPIM untuk memperluas modalitas penyaluran kredit/pembiayaan UMKM, memperkuat insentif likuiditas KLM terhadap penyaluran kredit/pembiayaan inklusif dan berkelanjutan, serta memperkuat strategi dan implementasi kebijakan inklusi ekonomi, inklusi keuangan, dan keuangan berkelanjutan. Sejalan dengan ini, pengembangan pembiayaan berkelanjutan diarahkan untuk memperluas dukungan terhadap kegiatan ekonomi yang memperhatikan aspek lingkungan dan ketahanan terhadap risiko iklim, sedangkan penguatan keuangan syariah didorong melalui perluasan ekosistem pembiayaan dan peningkatan keterhubungan dengan ekosistem *halal value chain*. Pelaksanaan kebijakan ini perlu didukung oleh sinergi dengan Pemerintah, OJK, industri keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengatasi kendala akses, tata kelola dan manajemen risiko, serta memastikan kesiapan pelaku usaha dalam memanfaatkan pembiayaan secara produktif dan berkelanjutan. Hal ini dibutuhkan agar peningkatan inklusi dapat berjalan secara optimal, berkualitas, dan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Dalam jangka panjang, berbagai upaya perlu terus dioptimalkan guna memperkuat kondisi struktural yang memengaruhi kapasitas intermediasi perbankan dan pertumbuhan kredit/pembiayaan secara berkelanjutan. Dalam kaitan tersebut, terdapat sejumlah tantangan struktural pada sektor keuangan Indonesia yang perlu menjadi perhatian. *Pertama*, keterbatasan diversifikasi sumber pendanaan bank yang saat ini masih terkonsentrasi pada DPK, di tengah melemahnya angka *multiplier* kredit terhadap DPK. Kondisi ini dalam jangka pendek termaterialisasi dalam bentuk *funding gap* yang berpotensi menimbulkan tekanan likuiditas, sedangkan pada jangka panjang berpotensi menghambat intermediasi akibat keterbatasan sumber pendanaan. *Kedua*, rasio kredit terhadap PDB Indonesia yang relatif rendah, termasuk dibandingkan dengan negara-negara *peers* (Grafik 68), mencerminkan masih terbatasnya kedalaman intermediasi keuangan serta masih tersedianya ruang pembiayaan perbankan dalam mendukung aktivitas perekonomian. Berbagai tantangan struktural tersebut menunjukkan bahwa penguatan intermediasi perbankan tidak cukup hanya ditempuh melalui peningkatan likuiditas dan intermediasi jangka pendek,

Grafik 68. Rasio Kredit Perbankan terhadap PDB

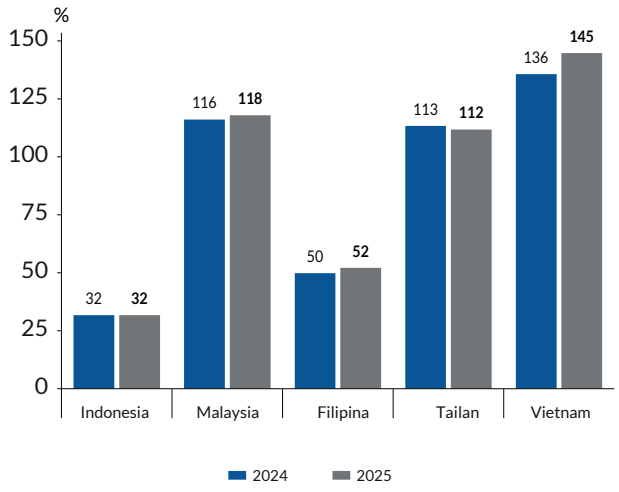

Keterangan: Khusus Vietnam menggunakan data *outstanding* kredit secara lebih luas, termasuk dari lembaga pemberi kredit selain bank dan kantor cabang bank asing.
Sumber: World Bank

tetapi juga memerlukan strategi jangka panjang untuk memperkuat struktur dan mendiversifikasi sumber pendanaan perbankan, mendorong permintaan kredit/pembiayaan guna mendukung produktivitas dan kapasitas dunia usaha, serta memperluas akses pembiayaan untuk mendorong pendalaman sektor keuangan yang berkelanjutan.

Bank Indonesia memandang diperlukannya pelaksanaan strategi transformasi struktural industri perbankan untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan yang lebih tinggi secara berkelanjutan. Transformasi struktural akan dilakukan melalui 3 (tiga) haluan utama, yaitu (i) pengembangan *universal banking*; (ii) percepatan konsolidasi perbankan; dan (iii) transformasi digital sektor keuangan. Ketiga arah transformasi tersebut saling melengkapi dalam memperkuat kapasitas perbankan untuk menghimpun dana, mengalokasikan pembiayaan secara lebih efisien, memperluas akses terhadap layanan keuangan, serta meningkatkan daya saing industri perbankan. Dalam jangka menengah-panjang, transformasi struktural diharapkan dapat memperkuat fondasi intermediasi keuangan nasional sehingga pertumbuhan kredit/pembiayaan tidak hanya didorong oleh pelonggaran kebijakan, tetapi juga oleh peningkatan efisiensi, kapasitas, dan kemampuan industri perbankan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan perekonomian.

Pengembangan ekosistem *universal banking* berpotensi memperkuat diversifikasi sumber pendanaan perbankan, memperluas modalitas pembiayaan, dan memperkuat kapasitas layanan keuangan yang dapat disediakan perbankan. Model *universal banking* membuka peluang integrasi layanan perbankan komersial, pasar modal, pengelolaan aset, dan tresuri (Gambar 19). Penguatan sinergi perbankan dengan pasar keuangan perlu diarahkan untuk memperluas alternatif pendanaan non-DPK, termasuk melalui penerbitan surat berharga, sekuritisasi aset, dan peningkatan akses terhadap sumber pendanaan luar negeri. Pengembangan *universal banking* sejalan dengan *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Perbankan Indonesia (RP3I) 2026-2030 OJK khususnya pada Prioritas Strategis 3 yaitu pendalaman pasar keuangan dan penguatan intermediasi. Upaya ini memerlukan penguatan koordinasi Bank Indonesia dengan OJK, dan otoritas terkait untuk mendukung pendalaman pasar keuangan, pengembangan instrumen pendanaan, serta perluasan akses investor domestik dan global.

Gambar 19. Konsepsi Cakupan Usaha *Universal Banking*

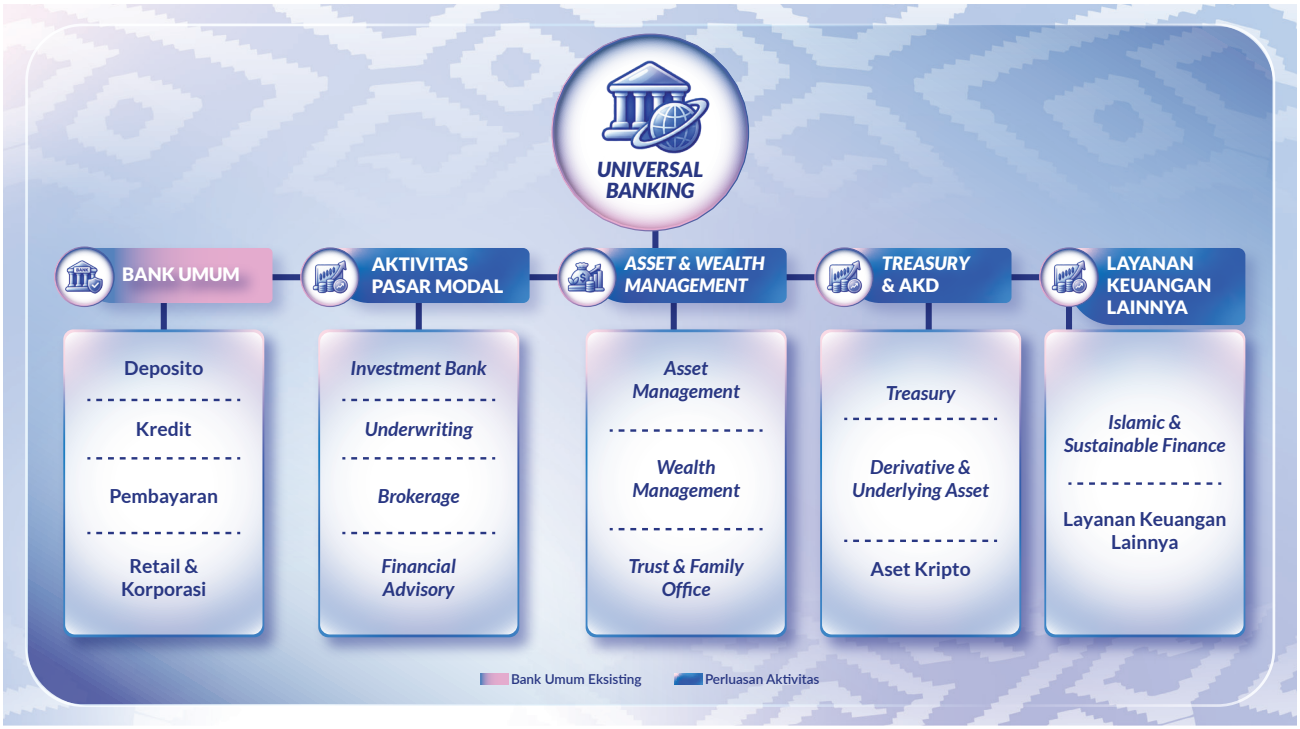

Sumber: Bank Indonesia.

Di sisi lain, meningkatnya kompleksitas kegiatan dan keterkaitan antarentitas dalam konglomerasi keuangan perlu diimbangi dengan penguatan pengawasan terintegrasi, pemantauan eksposur intragrup, serta pengelolaan risiko modal, likuiditas, dan penularan tekanan secara konsolidasi guna menjaga stabilitas sistem keuangan.

Percepatan konsolidasi perbankan secara selektif dan terarah juga diperlukan untuk memperkuat kapasitas permodalan dan struktur industri perbankan, meningkatkan efisiensi dan daya saing, serta mengoptimalkan skala ekonomi usaha perbankan. Konsolidasi yang efektif berpotensi memperkuat permodalan, mengoptimalkan investasi teknologi dan infrastruktur, serta meningkatkan kemampuan bank dalam membiayai proyek produktif berskala besar. Untuk itu, penguatan implementasi RP3I 2026–2030 Prioritas Strategis 1 perlu didukung melalui koordinasi antarotoritas dalam mendorong konsolidasi berbasis kelayakan ekonomi, kesiapan kelembagaan, dan disertai penguatan tata kelola serta manajemen risiko. Upaya tersebut perlu dilakukan dengan memperhatikan potensi peningkatan konsentrasi pasar, kompleksitas usaha, dan risiko sistemik agar konsolidasi dapat mendorong terbentuknya struktur industri yang lebih efisien, tangguh, dan berdaya saing, sekaligus memperluas kapasitas intermediasi tanpa mengurangi persaingan yang sehat dan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Koordinasi dengan OJK akan terus diperkuat untuk mendukung konsistensi kebijakan konsolidasi, pengawasan konglomerasi keuangan, dan penguatan tata kelola serta manajemen risiko perbankan sesuai dengan kewenangan masing-masing otoritas.

Transformasi digital sektor keuangan berpotensi memperluas akses layanan keuangan baik pada sektor formal maupun informal, meningkatkan basis sumber pendanaan dan efisiensi operasional, serta memperkuat daya saing perbankan dalam jangka panjang. Pemanfaatan teknologi dan pengembangan ekosistem digital, termasuk integrasi dengan platform digital melalui *embedded finance*, memungkinkan bank memperluas jangkauan layanan dan basis nasabah, meningkatkan kualitas serta loyalitas nasabah, dan mengembangkan model bisnis yang lebih efisien dan terintegrasi. Namun, manfaat digitalisasi antarbank berpotensi tidak merata. Bank berskala besar umumnya memiliki keunggulan dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam strategi dan proses bisnis, didukung oleh kapasitas investasi dan skala ekonomi yang lebih besar, sebaliknya bank berskala kecil menghadapi tantangan lebih besar dalam mengoptimalkan peluang digitalisasi dan memperkuat resiliensi terhadap risiko digital. Digitalisasi juga dapat meningkatkan mobilitas dana nasabah, ketergantungan pada penyedia layanan teknologi, serta risiko operasional dan siber yang memperbesar potensi rambatan gangguan antarlembaga. Oleh karena itu, penguatan digitalisasi perlu diimbangi dengan penguatan surveilans dan asesmen terhadap intensitas digitalisasi, kematangan ekosistem, dan keterkaitan antara sektor (antara lain IKNB, *fintech*, dan platform digital dengan sektor keuangan), guna memastikan keunggulan yang diperoleh dari digitalisasi tetap selaras dengan upaya menjaga stabilitas sistem keuangan.

Arah Kebijakan Sistem Pembayaran

Arah kebijakan sistem pembayaran pada 2027 akan difokuskan pada upaya menyeimbangkan akselerasi perluasan ekosistem digital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan penguatan manajemen risiko untuk menjaga stabilitas sistem pembayaran (Gambar 20). Kedua strategi kebijakan sistem pembayaran tersebut akan ditempuh melalui implementasi peta jalan BSPI 2030. BSPI 2030 dibangun untuk mewujudkan sistem pembayaran Indonesia sekaligus menjadi jangkar integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional sehingga menjamin fungsi bank sentral dalam proses peredaran uang, kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan. Visi BSPI 2030 akan dicapai melalui 5 (lima) inisiatif, yaitu Infrastruktur, Industri, Inovasi, Internasional, dan Rupiah Digital (4I-RD). Penguatan sinergi dengan Pemerintah, industri sistem pembayaran, dan *stakeholder* terkait lainnya menjadi krusial dalam implementasi BSPI 2030 dan pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan digital sekaligus upaya untuk menyeimbangkan

Gambar 20. Arah Kebijakan Sistem Pembayaran 2027



Sumber: Bank Indonesia

pertumbuhan (*growth*) dan manajemen risiko (*stability*). Kebijakan BSPI 2030 ini juga sejalan dengan Prioritas Nasional 2 pada RPJMN 2025–2029, yang menempatkan pengembangan ekonomi digital sebagai bagian dari prioritas pembangunan nasional untuk memperkuat kemandirian dan daya saing bangsa, mendukung transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045, sekaligus menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.[7]

Akselerasi perluasan ekosistem digital 2027 diarahkan untuk mendukung aktivitas sektor riil dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui peningkatan efisiensi transaksi, perluasan akses pembayaran digital, serta penguatan produktivitas perekonomian. Sasaran kebijakan sistem pembayaran adalah untuk meningkatkan transaksi pembayaran digital yakni dari 63,83 miliar transaksi dengan nilai Rp94.567,45 triliun pada 2026 menjadi 81,85 miliar transaksi (28,24% yoy) dengan nilai Rp111.967,16 triliun (18,40% yoy) pada 2027. Transaksi QRIS diprakirakan naik dari 25,10 miliar transaksi pada 2026 menjadi 27 miliar transaksi (7,55% yoy) dengan 80 juta pengguna dan 55 juta *merchant* pada 2027. Layanan BI-FAST naik dari 5,94 miliar transaksi pada 2026 menjadi 7,62 miliar transaksi (28,24%) pada 2027, sementara transaksi BI-RTGS naik dari 10,92 juta transaksi dengan nilai Rp225.757,61 triliun pada 2026 menjadi 11,11 juta transaksi (1,77% yoy) dengan nilai Rp255.055,88 triliun (12,98% yoy) pada 2027.

Akselerasi perluasan ekosistem digital akan ditempuh melalui berbagai upaya di sisi penawaran *(supply)* dan permintaan *(demand)* (Gambar 21)**.** Dari sisi penawaran, kebijakan diarahkan melalui pengembangan inovasi fitur dan layanan pembayaran, penguatan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), dan perluasan kerja sama, serta sisi *demand* melalui upaya edukasi dan literasi. Perluasan akseptasi pembayaran digital akan dilakukan melalui pengembangan inovasi fitur dan layanan pembayaran, termasuk QRIS, baik pindai maupun *tap*, serta Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen Pemerintah dan ritel. Upaya pengembangan inovasi fitur dan layanan turut diarahkan untuk mendorong produktivitas ekonomi, termasuk dalam meningkatkan efisiensi transaksi pelaku usaha dan

7 Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden yang dimuat dalam RPJMN Tahun 2025-2029.

Gambar 21. Strategi Kebijakan Perluasan Ekosistem Digital



Sumber: Bank Indonesia

mendukung perluasan akses terhadap pembiayaan produktif. Penguatan PJP juga akan dilakukan melalui berbagai upaya pemberdayaan PJP untuk dapat meningkatkan kapabilitasnya serta melalui pemberian insentif, termasuk perluasan PJP *Next Mover* yang memiliki kapasitas pembiayaan dalam pengembangan akseptasi KKI ritel. Sementara itu, perluasan akseptasi KKI Pemerintah akan dilakukan melalui penguatan kapabilitas Bank Pembangunan Daerah (BPD), serta perluasan kerja sama dengan Pemerintah dan *marketplace*, termasuk integrasi fitur *online payment*, untuk memperluas *use case* yang telah diimplementasikan.

Pengembangan inovasi fitur dan layanan pembayaran juga akan dilakukan pada transaksi antarnegara untuk mendukung integrasi ekonomi digital regional. Kebijakan ditempuh melalui perluasan koridor QRIS Antarnegara serta pengembangan interkoneksi BI-FAST dengan sistem pembayaran instan domestik di negara mitra melalui Proyek Nexus. Kerja sama QRIS Antarnegara akan diteruskan ke Timor Leste, Uzbekistan, Kazakhstan, Vietnam, dan transaksi *inbound* untuk negara Jepang pada 2027. Sementara itu, pengembangan Proyek Nexus akan difokuskan pada penguatan kesiapan teknis untuk interkoneksi *New* BI-FAST dengan berbagai sistem pembayaran instan negara lain. Penguatan konektivitas tersebut diarahkan untuk mewujudkan transaksi lintas negara yang lebih cepat, murah, mudah, dan aman, sehingga mendukung perdagangan, pariwisata, dan aktivitas ekonomi antarnegara.

Upaya akselerasi perluasan ekosistem digital juga akan dilengkapi dengan penguatan edukasi dan literasi digital pada nasabah pengguna layanan pembayaran dan masyarakat di sisi permintaan. Penguatan edukasi dan literasi akan dilakukan melalui berbagai kegiatan yang akan diteruskan pada 2027 yaitu Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI), Pekan QRIS Nasional, Indonesia Travel Pack, QRIS Jelajah Indonesia (QJI), serta berbagai upaya edukasi dan literasi pelindungan konsumen. Sinergi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah serta industri juga akan diperkuat untuk mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah, bantuan sosial, dan transportasi. Upaya tersebut dilakukan melalui program Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) untuk mendorong inovasi digital

pada pendapatan dan belanja daerah, serta penguatan ekosistem pembayaran digital, termasuk untuk mendukung kelancaran penyaluran bansos.

Perluasan ekosistem digital juga akan dilakukan melalui upaya meningkatkan inovasi dan pengembangan talenta digital. Bank Indonesia akan melanjutkan inisiatif Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI), termasuk Hackathon dan DIGDAYA. Melalui *horizon scanning*, data pendukung, dan konsiderasi *problem owner* yang jelas, PIDI akan mengusung empat tema inovasi pada 2027. Empat tema tersebut adalah manajemen risiko dan *cybersecurity*, inklusi keuangan, ekonomi kreatif, dan digitalisasi keuangan daerah. Penguatan kolaborasi dengan Pemda juga akan dilakukan sebagai *offtaker* inovasi PIDI sekaligus mendukung program TP2DD yang dapat diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah.

Kebijakan penguatan manajemen risiko akan dilakukan untuk mengimbangi pertumbuhan transaksi digital dan meningkatnya kompleksitas risiko. Upaya ini akan dilakukan melalui penguatan industri sistem pembayaran, modernisasi infrastruktur sistem pembayaran, serta pengembangan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran (IDSP) untuk mewujudkan stabilitas sistem pembayaran dan meningkatkan kepercayaan masyarakat (Gambar 22).

Penguatan struktur industri sistem pembayaran akan dilakukan melalui implementasi pengaturan industri sistem pembayaran, termasuk pengawasan, pelindungan konsumen, dan pengembangan kompetensi industri. Implementasi pengaturan industri sistem pembayaran pascapenerbitan PBI Nomor 10 Tahun 2025 akan fokus pada implementasi kriteria Transaksi, Interkoneksi, Kompetensi, Manajemen Risiko, dan Infrastruktur Teknologi Informasi (TIKMI) pada Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PSP) Non-Utama, termasuk Lembaga Selain Bank (LSB). Selain itu, akan dilakukan pula pengaturan Penyelenggara Penunjang sebagai pihak ketiga yang mendukung layanan sistem pembayaran dan merupakan elemen penting dalam menjamin keamanan di industri sistem pembayaran. Implementasi TIKMI pada PSP juga akan disertai dengan penguatan pengawasan berbasis risiko, sinergi pengawasan, dan penguatan pelindungan konsumen melalui penguatan *framework* dan regulasi pelindungan konsumen serta efektivitas penanganan

Gambar 22. Strategi Kebijakan Penguatan Keamanan Sistem Pembayaran



Sumber: Bank Indonesia

pengaduan. Dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi industri, *revisit* ketentuan mengenai Standardisasi Kompetensi SP akan dilakukan untuk meninjau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang nantinya akan menjadi acuan dalam penerapan pelatihan SP dan sertifikasi SP. Penguatan integritas sistem pembayaran juga akan dilakukan melalui sinergi dengan PPATK, OJK, Kementerian/Lembaga terkait, dan industri dalam penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT PPPSPM).

Penguatan infrastruktur sistem pembayaran ritel dan *wholesale* akan dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan layanan sistem pembayaran di masa mendatang dan meningkatkan resiliensi sistem. Penguatan infrastruktur sistem pembayaran ritel akan dilakukan melalui sinergi pengembangan New BI-FAST dan industri untuk memperkuat kapasitas, skalabilitas, dan interoperabilitas infrastruktur pembayaran ritel. Sinergi Bank Indonesia dengan industri akan diarahkan pada penguatan standardisasi layanan dan teknologi, peningkatan kapabilitas dalam manajemen risiko termasuk penguatan *fraud detection system*, serta perluasan akses layanan *fast payment* bagi pelaku industri keuangan. Upaya tersebut dilakukan untuk mendorong ekosistem pembayaran ritel yang semakin inklusif, efisien, aman, dan berdaya tahan guna mendukung stabilitas sistem pembayaran nasional. Modernisasi BI-RTGS Generasi III sebagai infrastruktur sistem pembayaran *wholesale* akan difokuskan pada perluasan fitur, layanan, serta interkoneksi yang lebih fleksibel dan terintegrasi sehingga mendukung transaksi domestik dan *cross-border*, serta searah dengan kebijakan bank sentral ke depan.

Pengembangan IDSP menjadi langkah strategis Bank Indonesia dalam memperkuat integrasi data, meningkatkan integritas transaksi sistem pembayaran, serta pemanfaatan data sistem pembayaran dalam mendukung manajemen risiko dan inklusi keuangan. IDSP dibangun untuk memperkuat ketahanan sistem pembayaran, termasuk dari serangan siber, melalui penguatan manajemen risiko penyelenggaraan sistem pembayaran, baik bagi Bank Indonesia maupun PSP.[8] IDSP memungkinkan integrasi database *fraudster* yang saat ini masih terpisah di masing-masing PSP sehingga risiko *fraud* dan siber dapat lebih termitigasi dan konsumen lebih terlindungi. IDSP dikembangkan secara bertahap dengan tahap pertama berupa implementasi Payment ID dan pertukaran database *fraudster* antar-PSP sesuai mekanisme yang diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mulai November 2026. Pada tahap berikutnya, IDSP akan dilengkapi dengan implementasi platform pertukaran data (BI Payment Info) dan memperkuat mitigasi risiko *fraud* (BI Payment Clear). Optimalisasi IDSP akan didorong melalui sinergi kerja sama dengan Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) OJK dalam penguatan pencegahan dan penanganan *fraud*. Selain itu, pemanfaatan data IDSP juga diarahkan untuk mendukung perluasan inklusi keuangan dan program Pemerintah antara lain melalui pengembangan *use case credit scoring*, Bantuan Sosial (Bansos) digital, dan kepemilikan rekening untuk warga berumur 17 tahun.

Eksperimentasi Rupiah Digital akan dilanjutkan untuk memperkuat kedaulatan Rupiah di era digital. Melalui Proyek Garuda, Bank Indonesia akan melanjutkan eksperimentasi *wholesale* Rupiah Digital pada *securities ledger*, disertai dengan sinergi dengan OJK khususnya mengenai aktivitas Aset Keuangan Digital sebagaimana diatur dalam Pasal 213 UU Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Implementasi kebijakan sistem pembayaran untuk mengakselerasi digitalisasi sekaligus memperkuat manajemen risiko membutuhkan sinergi yang semakin erat antara Bank Indonesia, Pemerintah, otoritas terkait, industri, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan. Sinergi tersebut diarahkan untuk memperluas akseptasi pembayaran digital, memperkuat infrastruktur dan inovasi, mengembangkan talenta digital, serta meningkatkan keamanan dan ketahanan ekosistem pembayaran.

8 IDSP mencakup tiga layanan yaitu layanan Payment ID sebagai identifier unik pengguna jasa pembayaran, layanan Payment Clear untuk mengukur integritas transaksi berbasis Payment ID, serta layanan Payment Info untuk mendukung pertukaran data sistem pembayaran.

Kolaborasi juga akan terus diperluas dengan bank sentral dan otoritas negara mitra untuk memperkuat konektivitas pembayaran lintas negara. Melalui sinergi yang berkelanjutan, implementasi BSPI 2030 diharapkan mampu memperluas manfaat digitalisasi sekaligus menjaga stabilitas sistem pembayaran nasional.

Keseimbangan antara perluasan ekosistem digital dan penguatan manajemen risiko akan menjadi landasan kebijakan sistem pembayaran yang inklusif, integratif, *impactful*, dan sinergis. Kebijakan sistem pembayaran yang inklusif diwujudkan melalui perluasan akseptasi QRIS dan kebijakan MDR yang terjangkau untuk memperluas pemanfaatan pembayaran digital oleh UMKM. Kebijakan sistem pembayaran yang integratif diperkuat melalui standardisasi dan interoperabilitas sistem pembayaran, termasuk KKI segmen ritel dan pemanfaatan IDSP untuk mendukung integrasi data dalam rangka pencegahan *fraud*. Dampak kebijakan sistem pembayaran yang *impactful* akan dioptimalkan melalui efisiensi biaya transaksi dan investasi infrastruktur sistem pembayaran, termasuk pemanfaatan IDSP sebagai infrastruktur publik digital yang dapat dimanfaatkan bersama oleh industri. Seluruh upaya tersebut dilandasi sinergi Bank Indonesia dengan otoritas, Kementerian/Lembaga, dan industri sistem pembayaran. Dengan demikian, transformasi sistem pembayaran diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan, dengan tetap menjaga stabilitas sistem pembayaran.

Kebijakan Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing

Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA) bersinergi dengan Operasi Moneter (OM) *pro-market* memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter, mendukung terjaganya stabilitas sistem keuangan, dan mendorong tersedianya sumber pembiayaan perekonomian yang berkelanjutan. Melalui implementasi BPPU 2030 sejak 2024, Bank Indonesia secara bertahap membangun ekosistem pasar yang lebih likuid, efisien, dan resilien melalui pengembangan, pengaturan, dan pengawasan produk, pembentukan harga, pelaku pasar, serta infrastruktur (3P+I), yang disinergikan dengan strategi OM *pro-market*. Kedalaman instrumen dan kredibilitas harga memperluas pilihan pengelolaan likuiditas maupun lindung nilai, sementara pelaku yang aktif dan infrastruktur yang andal memperlancar transaksi. Dengan demikian, PUVA yang semakin maju diharapkan memperkuat efektivitas transmisi kebijakan suku bunga dan nilai tukar serta mendukung pengelolaan portofolio perbankan dan investor, serta meningkatkan kapasitas pasar keuangan dalam menunjang pembiayaan fiskal dan kegiatan dunia usaha.

Ke depan, implementasi BPPU 2030 akan terus diakselerasi dengan fokus pada peningkatan volume dan likuiditas transaksi, pembentukan struktur harga yang efisien dan kredibel, serta penguatan konektivitas pasar. Pada aspek produk, pengembangan transaksi repo dan transaksi pasar valas diarahkan untuk mencapai sasaran rerata harian masing-masing sebesar Rp81 triliun dan 18 miliar dolar AS pada 2030. Upaya tersebut didukung melalui perluasan instrumen yang dapat digunakan dalam transaksi repo, standardisasi transaksi, serta pendalaman pasar derivatif suku bunga dan nilai tukar. Pada aspek pembentukan harga (*pricing*), pengembangan *Money Market Curve* yang sejalan dengan kebijakan moneter Bank Indonesia dan *FX Forward Curve* untuk berbagai tenor terus diperkuat sebagai referensi harga yang efisien dan kredibel. Seluruh upaya tersebut ditopang oleh peningkatan keaktifan dan interkoneksi antarpelaku pasar serta penguatan infrastruktur pasar keuangan termasuk infrastruktur data yang memenuhi prinsip interkoneksi, interoperabilitas, dan integrasi (3i).

Pada 2027, kebijakan percepatan pendalaman PUVA diarahkan untuk mempercepat terbentuknya pasar yang lebih dalam, likuid, dan efisien sebagai bagian dari dukungan Bank Indonesia terhadap stabilitas sekaligus pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan implementasi BPPU 2030, arah

Gambar 23. Arah Kebijakan Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valas Tahun 2027

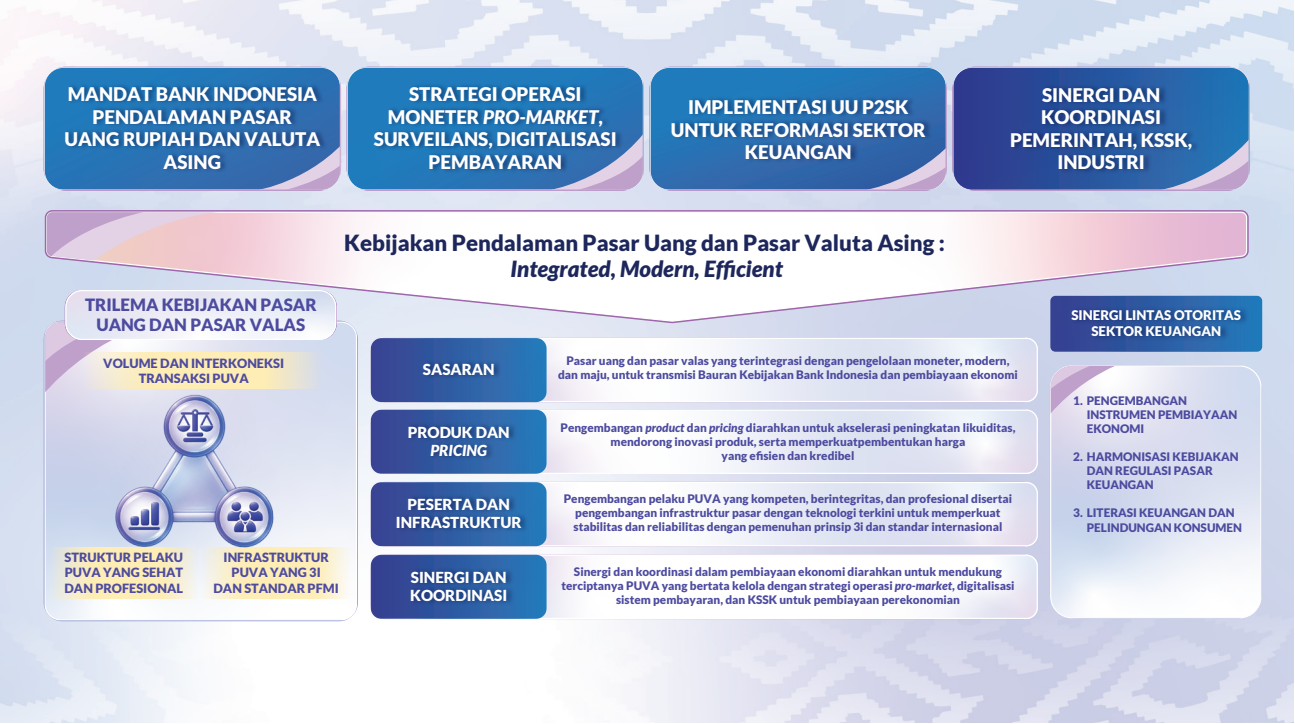

Sumber: Bank Indonesia

kebijakan pendalaman PUVA difokuskan pada 3 (tiga) pilar utama yang saling memperkuat. *Pertama*, pengembangan produk dan pembentukan harga (*pricing*) melalui perluasan instrumen dan peningkatan likuiditas pasar. *Kedua*, penguatan pelaku pasar dan infrastruktur melalui peningkatan peran Dealer Utama PUVA, penguatan kompetensi dan profesionalisme pelaku pasar, serta pengembangan infrastruktur transaksi dan pascatransaksi yang 3i. *Ketiga*, penguatan sinergi dan koordinasi antara Bank Indonesia, otoritas terkait, dan pelaku pasar dalam harmonisasi kebijakan, pengaturan, dan pengawasan guna menciptakan ekosistem PUVA yang semakin efisien, berdaya saing, dan mampu mendukung pembiayaan perekonomian secara berkelanjutan (Gambar 23).

Pada pilar pertama, pengembangan *product* dan *pricing* diarahkan untuk akselerasi peningkatan likuiditas, mendorong inovasi produk, serta memperkuat pembentukan harga yang efisien dan kredibel. Di pasar uang, pengembangan produk akan difokuskan pada peningkatan volume transaksi dan likuiditas antara lain pada transaksi repo melalui inisiatif perluasan *underlying* repo BI menggunakan obligasi korporasi dan sukuk korporasi serta penerbitan BI-FRN sebagai *floating rate instrument* untuk mendukung pembentukan pasar OIS (Gambar 26). Upaya tersebut selaras dengan pengembangan *pricing* yang efisien dan kredibel dengan referensi suku bunga INDONIA serta pembentukan *term-structure* suku bunga dari 2 minggu hingga 12 bulan. Di pasar valas, pengembangan produk akan difokuskan pada peningkatan volume transaksi untuk likuiditas DNDF dan FX *Swap* didukung dengan upaya perluasan kontrak standar penerapan margin. Pengembangan produk dan *pricing* di PUVA akan diselaraskan dengan strategi operasi moneter *pro-market* untuk peningkatan likuiditas instrumen *floating* berbasis INDONIA untuk mendukung pembentukan *Money Market Curve*. Sementara itu, penguatan *pricing* di pasar valas akan dilakukan melalui reformulasi JISDOR untuk meningkatkan kelengkapan, akurasi, dan *robustness* harga acuan di pasar valas. Optimalisasi kurs acuan non-USD akan terus didorong untuk mendukung pendalaman pasar mata uang lokal. Peningkatan likuiditas repo dan DNDF di PUVA juga akan didorong melalui pengembangan infrastruktur antara lain ETP, MO, dan CCP serta penguatan peran Dealer Utama

sebagai *market maker* pada pasar uang dan pasar valuta asing, diversifikasi fitur dan standardisasi produk, serta perluasan basis pelaku berkoordinasi dengan otoritas dan APUVINDO. Dari sisi pasar Derivatif PUVA, pengembangan produk diarahkan pada diversifikasi instrumen lindung nilai melalui pengembangan produk *futures*. Pengembangan instrumen tersebut bertujuan untuk meningkatkan transparansi *pricing* dan kredibilitas pasar Derivatif PUVA karena transaksi *futures* dilakukan di bursa Derivatif PUVA secara multilateral. Pengembangan *futures* diarahkan untuk memperkuat *price discovery* sebagai indikator ekspektasi pasar terhadap pergerakan nilai tukar dan suku bunga.

Pengembangan produk dan pembentukan harga juga diarahkan untuk memperluas keragaman dan diversifikasi instrumen, meningkatkan likuiditas pasar, serta memperkuat mekanisme pembentukan harga yang efisien dan kredibel. Pada 2027, arah kebijakan tersebut difokuskan pada pengembangan alternatif pembiayaan dan investasi jangka pendek, perluasan akses terhadap instrumen lindung nilai, serta penguatan ekosistem transaksi valuta asing lintas negara. Di pasar uang, Bank Indonesia akan mengakselerasi pengembangan Surat Berharga Komersial (SBK) guna memperluas alternatif pembiayaan jangka pendek berbasis pasar bagi perbankan dan korporasi, sekaligus menyediakan pilihan instrumen investasi yang lebih beragam bagi investor. Pengembangan tersebut ditempuh melalui penguatan ekosistem SBK dari sisi penawaran dan permintaan, termasuk mendorong peningkatan penerbitan secara berkelanjutan, perluasan basis investor institusi, serta penguatan aktivitas pasar sekunder guna mendukung likuiditas dan pembentukan harga yang lebih efisien. Sementara itu, di pasar valuta asing, Bank Indonesia akan memperkuat implementasi skema Transaksi Pasar Valuta Asing untuk Lindung Nilai melalui Bank Mitra (VASTRA) guna memperluas akses investor global terhadap instrumen lindung nilai tukar di pasar domestik, termasuk juga kepada instrumen ekuitas (saham). Penguatan skema tersebut diharapkan dapat meningkatkan fleksibilitas pengelolaan risiko nilai tukar, memperkuat daya tarik investasi pada aset keuangan domestik, serta mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah. Selain itu, pengembangan Renminbi *Clearing Bank* akan diarahkan untuk memperkuat

Gambar 24. Arah Pengembangan *Product & Pricing* dalam BPPU 2030



Sumber: Bank Indonesia

ekosistem transaksi Renminbi-Rupiah melalui peningkatan ketersediaan likuiditas Renminbi serta efisiensi proses kliring dan penyelesaian transaksi, sehingga dapat mendorong perluasan pemanfaatan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan dan investasi Indonesia–Tiongkok melalui kerangka LCT. Melengkapi pengembangan tersebut, Bank Indonesia juga akan melakukan kajian pengembangan instrumen *futures* di bursa berjangka berbasis nilai tukar dan suku bunga. Kajian difokuskan pada asesmen kebutuhan pasar, desain produk, serta kesiapan ekosistem pasar untuk mendukung pengembangan instrumen lindung nilai dan penguatan mekanisme *price discovery* di pasar Derivatif PUVA (Gambar 24).

Seluruh inisiatif tersebut akan melengkapi kesinambungan pengembangan instrumen repo, pengembangan instrumen SBK dan efek beragun aset, penguatan instrumen OIS, DNDF, dan FX *Swap*, serta penguatan pembentukan struktur harga berbasis transaksi pasar untuk mewujudkan PUVA yang semakin likuid, efisien, dan berdaya saing.

Pada pilar kedua, penguatan pelaku pasar dan infrastruktur diarahkan untuk meningkatkan keaktifan dan konektivitas pelaku PUVA yang didukung oleh infrastruktur pasar keuangan yang 3i. Pada aspek pelaku pasar, Bank Indonesia akan terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui implementasi SKKNI dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) di bidang tresuri, disertai penguatan penyelenggaraan sertifikasi profesi tresuri guna memastikan kompetensi pelaku pasar yang selaras dengan kebutuhan industri dan perkembangan praktik terbaik internasional. Sejalan dengan itu, optimalisasi peran Dealer Utama PUVA terus dilakukan untuk meningkatkan keaktifan dan konektivitas transaksi antarpelaku pasar, termasuk dalam mendukung implementasi skema Transaksi VASTRA. Penguatan pelaku pasar juga ditempuh melalui peningkatan peran *Self-Regulatory Organization* (SRO) PUVA dalam mendukung pengembangan pasar, peningkatan profesionalisme pelaku, serta penguatan tata kelola dan penerapan kode etik pasar yang sejalan dengan praktik terbaik internasional (Gambar 25).

Gambar 25. Arah Pengembangan Pelaku PUVA

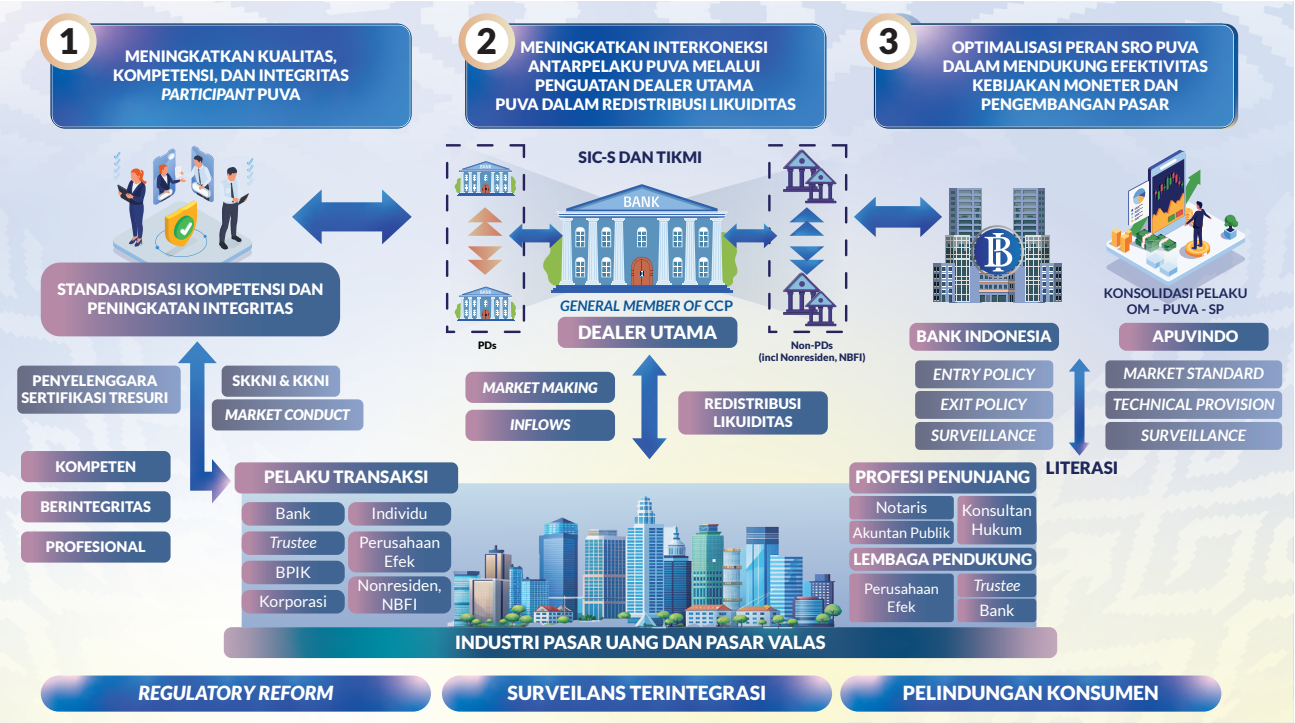

Sumber: Bank Indonesia

Gambar 26. Arah Pengembangan Infrastruktur Pasar Keuangan



Sumber: Bank Indonesia

Penguatan infrastruktur PUVA mencakup 3 (tiga) sisi terdiri dari *front-end*, *middle-end*, dan *back-end*. Pada sisi *front-end* dilakukan melalui penguatan *trading venue* yang mencakup sarana transaksi yang diselenggarakan oleh Bank khususnya untuk mendukung strategi OM *pro-market* dan mendorong peningkatan transaksi repo, DNDF, dan OIS. Kemudian, pada sisi *middle-end* dilakukan penguatan dan pengembangan CCP PUVA antara lain (i) inisiasi perolehan *recognized* CCP; (ii) interkoneksi CCP dengan sarana transaksi lain; dan (iii) pengembangan CCP Repo. Terakhir, sisi *back-end* mencakup strategi penguatan pada SSS/CSD melalui pengembangan BI-SSSS untuk mendukung OM *pro-market*, pengembangan BI-SSSS Generasi III serta integrasi dengan *payment system* melalui pengembangan BI-RTGS yang telah dirumuskan dalam BSPI 2030. Pengembangan infrastruktur PUVA juga akan menerapkan standar *messaging* internasional, seperti ISO 20022, pada (i) BI-RTGS Generasi III; (ii) BI-SSSS Generasi III; (iii) *Trade Repository*; dan (iv) CCP untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan dalam transaksi, sekaligus mempersiapkan untuk proses digitalisasi PUVA ke depan. Penguatan infrastruktur PUVA juga akan diintegrasikan dengan infrastruktur data SP PUVA mencakup pengembangan (i) BI-Payment Clear; (ii) BI-Payment Info; (iii) pengembangan infrastruktur *data capturing* dan *data analytics* sampai dengan pemanfaatannya untuk berbagai *use case*; (iv) integrasi Payment ID dengan Investor ID; serta (v) *trade repository*. Berbagai inisiatif tersebut bertujuan untuk mewujudkan infrastruktur pasar yang saling terinterkoneksi, serta memiliki interoperabilitas dan terintegrasi untuk mewujudkan PUVA yang modern dan maju dengan volume dan likuiditas yang besar, segmen pelaku yang variatif, pasar yang stabil dan efisien (Gambar 26).

Untuk pilar ketiga, penguatan sinergi dan koordinasi kebijakan diarahkan untuk mendukung pendalaman PUVA yang selaras dengan upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pembiayaan perekonomian secara berkelanjutan. Di internal Bank Indonesia, sinergi antara strategi operasi moneter *pro-market*, kebijakan pendalaman PUVA, surveilans pasar, dan kebijakan makroprudensial terus diperkuat untuk mendukung peningkatan likuiditas pasar, pembentukan harga yang efisien,

Gambar 27. Arah Penguatan Sinergi Pendalaman PUVA

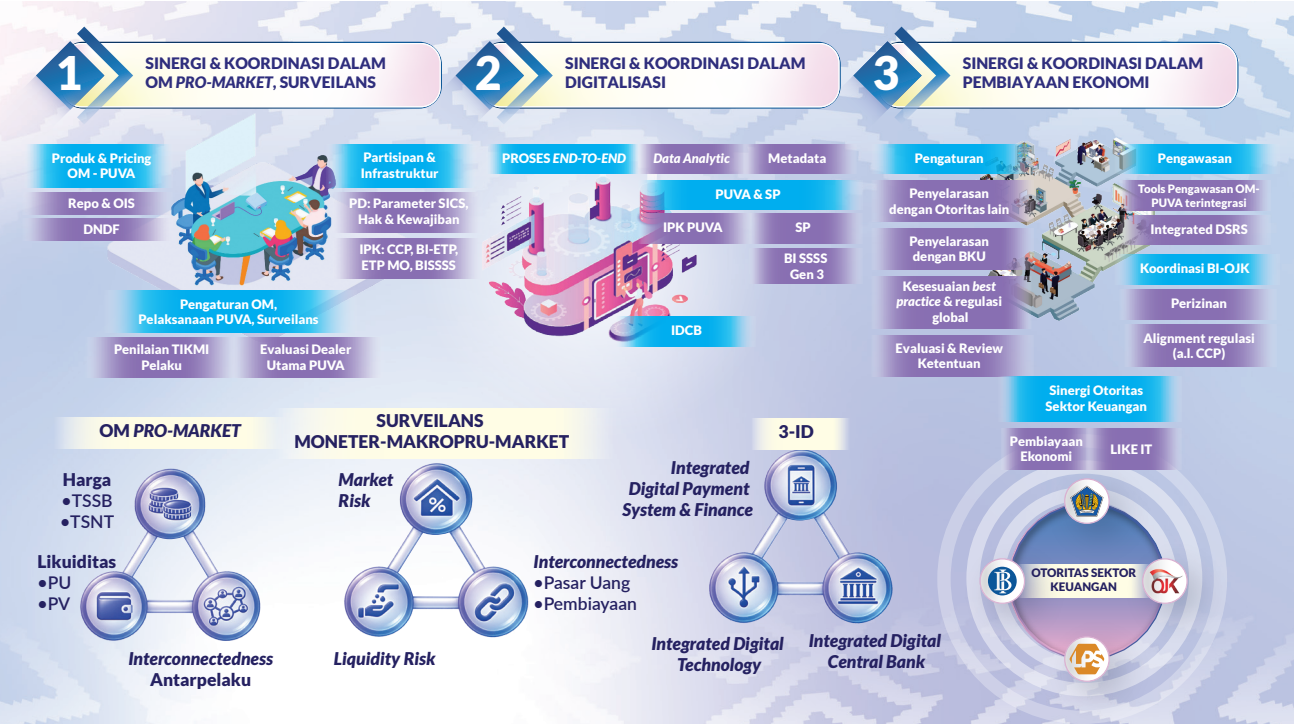

Sumber: Bank Indonesia

serta penguatan ketahanan pasar keuangan. Pada tingkat lintas otoritas, Bank Indonesia akan terus meningkatkan koordinasi dengan OJK dalam harmonisasi pengaturan dan pengawasan sesuai kewenangan masing-masing, serta memperkuat sinergi dengan Kementerian Keuangan, OJK, dan LPS dalam pengembangan sektor keuangan secara terintegrasi. Sinergi tersebut diarahkan untuk memperkuat keterkaitan antara pendalaman PUVA, pengembangan pasar surat berharga, serta penguatan intermediasi keuangan guna mendukung pembiayaan pembangunan dan perekonomian nasional. Sejalan dengan itu, koordinasi pengembangan keuangan berkelanjutan melalui Komite Keuangan Berkelanjutan (KKB) terus didorong untuk mendukung mobilisasi pembiayaan ekonomi hijau dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs). Melalui penguatan sinergi lintas kebijakan dan otoritas, pengembangan PUVA diharapkan dapat semakin memperkuat stabilitas pasar keuangan sekaligus memperluas kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (Gambar 27).

Kebijakan Inklusi Ekonomi, Inklusi Keuangan, dan Keuangan Berkelanjutan serta Ekonomi Keuangan Syariah

Bank Indonesia terus memperkuat upaya mendorong Inklusi Ekonomi, Inklusi Keuangan, dan Keuangan Berkelanjutan (IEKB) dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penguatan tersebut akan difokuskan pada pengembangan ekosistem ekonomi inklusif dan berkelanjutan yang terintegrasi dan berdaya saing. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia menitikberatkan pengembangan ekosistem dimaksud pada optimalisasi pembiayaan, literasi, dan sinergi di bidang ekonomi dan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan daya saing UMKM dilakukan dengan memperkuat kapasitas, korporatisasi dan meningkatkan akses pembiayaan UMKM. Upaya tersebut ditempuh dengan penguatan model bisnis komoditas potensial, pengembangan kewirausahaan orang muda dan perempuan, perluasan akses pasar ekspor nontradisional dan promosi perdagangan pada berbagai kegiatan

berskala internasional. Semua kegiatan tersebut dilaksanakan secara *end-to-end* dengan sasaran utama UMKM ketahanan pangan, UMKM berorientasi ekspor, UMKM pendukung pariwisata, kelompok subsisten, serta UMKM penghasil komoditas unggulan daerah. Pengembangan UMKM berkelanjutan juga dilakukan melalui penguatan model bisnis, strategi perluasan serta sinergi dengan Kementerian/Lembaga untuk pengembangan pertanian berkelanjutan, desa wisata berkelanjutan, dan ekonomi sirkuler. Model bisnis dan strategi berkelanjutan telah disusun dan akan direplikasi terdiri dari BESTARI (Bersinergi untuk Petani Lestari) untuk membantu meningkatkan produktivitas dan penghasilan petani melalui penerapan model bisnis pertanian cerdas iklim berbasis *biochar*, DEWI SRI (Desa Wisata Berkelanjutan) untuk mengoptimalkan potensi wisata daerah secara berkelanjutan, dan UMKM Sirkular untuk model bisnis pengolahan limbah yang terdiri dari model bisnis pengolahan limbah plastik menjadi cendera mata, model bisnis pemanfaatan limbah makanan untuk budi daya *Black Soldier Fly* yang menghasilkan pakan unggas dan ikan, model bisnis pengolahan limbah daun nanas menjadi kain, serta model bisnis pengolahan minyak jelantah menjadi lilin dan sabun cuci.

Bank Indonesia juga mendorong perluasan akses pembiayaan UMKM melalui penguatan sinergi dengan program Pemerintah dan *stakeholders* terkait. Bank Indonesia melakukan penguatan proses *business matching* pembiayaan melalui sinergi di tingkat pusat dengan berbagai Kementerian/ Lembaga, Lembaga Keuangan, maupun sinergi di tingkat daerah dengan berbagai *stakeholders* lainnya melalui kantor-kantor perwakilan Bank Indonesia di dalam negeri (KPwDN). Upaya ini tidak hanya berfokus pada pembiayaan konvensional, tetapi juga diarahkan pada perluasan akses pembiayaan hijau. Upaya perluasan akses pembiayaan ini didukung oleh platform unggulan yang dikembangkan oleh Bank Indonesia. Sinergi dengan *stakeholders* juga diperkuat untuk mendukung peningkatan literasi keuangan dengan prioritas pada kelompok tertentu seperti petani dan pekerja migran (PMI). Sinergi antarlembaga semakin diperkuat bersama Kementerian/Lembaga, serta terus berkontribusi aktif pada KKB. Bank Indonesia akan terus secara aktif memperkuat posisi Indonesia dalam berbagai forum kerja sama internasional.

Bank Indonesia terus memperkuat perannya dalam mengakselerasi pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah secara menyeluruh sebagai bagian dari upaya menjadikan ekonomi syariah sebagai sumber pertumbuhan baru yang inklusif dan berkelanjutan. Arah kebijakan tersebut ditempuh melalui penguatan sinergi sektor riil dan keuangan syariah, perluasan literasi dan inklusi, serta optimalisasi keuangan sosial syariah, sejalan dengan tahapan implementasi *Blueprint* Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia 2030. Fokus pengembangan ekosistem *Halal Value Chain* (*HVC*) akan tetap diutamakan pada sektor unggulan, yaitu makanan halal (*halal food*), fesyen (*modest fashion*), dan pariwisata ramah muslim (PRM). Penguatan ekosistem HVC dalam jangka pendek (2027) dilakukan melalui pengembangan *piloting* model bisnis kemandirian ekonomi syariah termasuk pesantren, *piloting halal trading house*, penguatan *halal center*, dan agregator. Adapun untuk jangka menengah (2028–2031) penguatan ekosistem HVC akan dilakukan melalui pengembangan sektor strategis yang berperan penting dalam penguatan ekosistem eksyar di Indonesia, a.l. sektor farmasi dan bahan baku pendukungnya. Upaya ini diharapkan mampu mendorong kemandirian ekonomi umat sekaligus memperluas jangkauan dan daya saing produk halal nasional. Pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah juga akan diperkuat dari sisi keuangan syariah komersial.

Dari sisi keuangan syariah komersial, kebijakan pada 2027 ditempuh melalui inisiatif SAPA SYARIAH. Kebijakan ini diarahkan pada pengembangan model bisnis pembiayaan yang mendukung sektor unggulan ekonomi syariah dan *Values-Based Economy*, penguatan sinergi kebijakan dengan otoritas terkait, serta perluasan fasilitasi akses pembiayaan dan perdagangan melalui Bulan Pembiayaan Syariah (BPS). Upaya tersebut didukung oleh penguatan kebijakan makroprudensial dan pendalaman PUVA

Syariah, termasuk pengembangan infrastruktur dan instrumen pasar keuangan syariah. Dalam jangka menengah (2028–2030), kebijakan difokuskan pada penguatan inovasi pembiayaan, perluasan kolaborasi pembiayaan dan perdagangan syariah, serta pendalaman pasar keuangan untuk mendukung peningkatan intermediasi dan pembiayaan sektor produktif. Dari sisi keuangan sosial syariah, penguatan inisiatif KANAL ZISWAF pada 2027 diprioritaskan pada peningkatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan zakat dan wakaf, pengembangan wakaf produktif, serta perluasan pemanfaatan keuangan sosial syariah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Arah kebijakan tersebut antara lain didukung melalui pengembangan dan uji coba model pemberdayaan masyarakat subsisten berbasis *Islamic blended finance*. Sejalan dengan itu, penguatan integrasi dan pemanfaatan data ZISWAF melalui PINTER ZAWAIS terus didorong untuk mendukung tata kelola dan efektivitas program. Dalam jangka menengah (2028–2030), kebijakan diarahkan pada perluasan model pemberdayaan yang efektif, optimalisasi wakaf produktif, serta penguatan sinergi keuangan sosial dan komersial syariah untuk meningkatkan inklusi dan kesejahteraan masyarakat.

Perluasan literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah pada 2027 diarahkan pada penguatan implementasi Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (SNLIEKSI) yang telah diluncurkan KNEKS pada 2024 dengan Bank Indonesia sebagai salah satu kolaborator. Implementasinya didukung melalui penguatan sinergi program edukasi dan kampanye nasional, pemanfaatan kanal digital, serta survei literasi dan inklusi eksyar untuk mengukur capaian dan meningkatkan efektivitas kebijakan. Dalam jangka menengah (2028–2030), pengembangan difokuskan pada perluasan jangkauan program, penguatan kolaborasi lintas pemangku kepentingan, dan pemanfaatan digitalisasi dan *big data analytics* untuk mendorong peningkatan literasi dan inklusi secara berkelanjutan. Di tingkat global, Bank Indonesia terus memperkuat peran aktif dan kerja sama internasional dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, antara lain melalui kontribusi dalam pengembangan standar keuangan syariah bersama Islamic Financial Services Board (IFSB) dan penguatan pengelolaan likuiditas keuangan syariah bersama International Islamic Liquidity Management (IILM), serta perluasan kolaborasi internasional di bidang keuangan sosial syariah. Sinergi tersebut diarahkan untuk memperkuat kontribusi Indonesia dalam pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah global yang inklusif dan berkelanjutan.

Kebijakan Internasional

Bank Indonesia terus bersinergi dan berkoordinasi erat dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk semakin memperkuat posisi Indonesia di kawasan maupun global. Kerja sama internasional menjadi *enabler* strategis Bank Indonesia untuk memperkuat stabilitas eksternal, mengamankan kepentingan Indonesia di tingkat global, serta mendorong investasi dan perdagangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pada tahun 2027, kebijakan internasional Bank Indonesia akan dilakukan melalui 3 (tiga) fokus utama. *Pertama*, perluasan dan penguatan kerja sama bilateral dengan mitra utama Indonesia. *Kedua*, penajaman posisi/*stance* Bank Indonesia/Republik Indonesia dan partisipasi aktif pada forum kerja sama internasional. *Ketiga*, penguatan sinergi dan komunikasi proaktif lintas otoritas untuk memperkuat kepercayaan investor asing dan lembaga pemeringkat terhadap perekonomian Indonesia, serta memperluas jangkauan promosi investasi dan perdagangan. Kerja sama internasional Bank Indonesia tersebut akan didukung oleh peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia di luar negeri.

Pertama, perluasan dan penguatan kerja sama bilateral dengan mitra utama Indonesia. Penguatan kerja sama bilateral melalui intensifikasi kerja sama LCT dengan negara mitra terus dioptimalkan untuk memperluas penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. Kerja sama *cross-border payment* juga terus diperluas melalui penjajakan mitra baru, termasuk pengembangan *regional payment connectivity* dalam rangka memperluas

interkoneksi pembayaran lintas negara. Sementara ekstensifikasi serta intensifikasi kerja sama keuangan internasional seperti *swap bilateral* dalam mata uang lokal akan terus dilakukan guna mendukung stabilitas dan meningkatkan kerja sama ekonomi antarnegara. Perluasan dan penguatan kerja sama secara bilateral pada area kebanksentralan dilakukan melalui *Structured Bilateral Cooperation* (SBC) dan kerja sama sektoral. Program kerja sama konkret antara lain difokuskan pada implementasi LCT dengan India, Hong Kong, dan Filipina. Di bidang kerja sama keuangan internasional, Bank Indonesia akan memperkuat kerja sama antara lain dengan Bank of Japan (BoJ), Monetary Authority of Singapore (MAS), Bank of Korea (BoK), dan Reserve Bank of Australia (RBA).

Kedua, penajaman posisi/*stance* Indonesia dan partisipasi aktif pada forum kerja sama internasional untuk memperjuangkan kepentingan nasional dalam agenda-agenda ekonomi, moneter, dan keuangan internasional. Bank Indonesia mengoptimalkan keanggotaan pada kerja sama terutama ASEAN Financial Integration, ASEAN Payments Connectivity (APC), ASEAN+3, dan EMEAP. Bank Indonesia juga terus berperan aktif dalam berbagai forum kerja sama internasional baik di G20, IMF, Financial Stability Board (FSB), BIS, dan BRICS, maupun dalam forum internasional syariah the Organisation of Islamic Cooperation (OIC), IFSB, dan IILM. Sejalan dengan meningkatnya peran Indonesia di tingkat regional dan global, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan momentum kepemimpinan sebagai *Chair* EMEAP *Governors Meeting* untuk memperkuat kontribusi Indonesia dalam pembahasan isu-isu strategis kawasan. Dalam hal ini, Bank Indonesia akan mengusulkan diskusi ketahanan eksternal dan upaya menjaga ketahanan sistem pembayaran di tengah perkembangan AI yang berpotensi meningkatkan risiko serangan siber sebagai agenda EMEAP *Governors Meeting*. Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan keanggotaan Indonesia pada BRICS untuk memperluas kerja sama ekonomi dan keuangan internasional, serta berperan aktif dalam mendukung proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD bersama kementerian dan lembaga terkait dalam kerangka Tim Nasional Aksesi OECD.

Ketiga, penguatan sinergi dan komunikasi proaktif lintas otoritas untuk memperkuat kepercayaan investor asing dan lembaga pemeringkat terhadap perekonomian Indonesia, serta memperluas jangkauan promosi investasi dan perdagangan. Bank Indonesia terus memperkuat pengelolaan persepsi positif investor dan lembaga pemeringkat terhadap perekonomian nasional melalui peningkatan *investor outreach* dan sinergi pengelolaan *sovereign credit rating*. Penguatan kepercayaan investor dan lembaga pemeringkat tersebut akan ditempuh dengan mempertajam komunikasi berdasarkan profil investor, isu strategis, dan kebutuhan informasi pasar. Promosi perdagangan dan investasi juga diperluas ke pasar-pasar nontradisional melalui penguatan sinergi dengan Kementerian/Lembaga, perwakilan RI di luar negeri, serta pemanfaatan *market intelligence* untuk mengidentifikasi peluang ekonomi yang potensial bagi Indonesia. Promosi investasi dan perdagangan bersama Kementerian/Lembaga diperkuat melalui perubahan strategi dari *supply-driven* menjadi *demand-driven*. Untuk itu, sinergi lintas otoritas terus diperkuat dan dilakukan secara terkoordinasi melalui *Investor Relation Unit* (IRU) Bank Indonesia di tingkat nasional, *Regional* IRU di daerah, dan *Global* IRU di luar negeri.

Kebijakan Kelembagaan Bank Indonesia

Melanjutkan penguatan yang telah dilakukan pada 2026, Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan kelembagaan dengan senantiasa mengutamakan prinsip tata kelola yang baik dan profesional. Penguatan tersebut terutama diarahkan untuk mengimplementasikan penguatan mandat Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Bank Indonesia yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Amendemen UU P2SK tahun 2026, guna membangun bank sentral yang kredibel, profesional, bertata kelola kuat, dan transparan. Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan kelembagaan ke depan difokuskan pada tiga area utama. *Pertama*, penguatan tata kelola,

organisasi, manajemen strategis, dan pengelolaan keuangan untuk memastikan implementasi arah strategis Bank Indonesia secara terintegrasi dan menghasilkan dampak nyata. *Kedua*, penguatan inovasi digital melalui akselerasi digitalisasi proses bisnis untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dan kelembagaan. *Ketiga*, penguatan kapabilitas SDM dan kepemimpinan.

***Pertama*, penguatan tata kelola, organisasi, manajemen strategis, dan pengelolaan sumber daya keuangan dilakukan untuk memastikan arah strategis Bank Indonesia 2027–2031 (Gambar 28) dapat diimplementasikan secara terintegrasi dan efektif dalam mendukung pencapaian tujuan dan pelaksanaan mandat Bank Indonesia**. Penguatan manajemen strategis dilakukan dengan penyempurnaan visi, misi, dan sasaran strategis Bank Indonesia sejalan dengan penguatan mandat Bank Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Bank Indonesia yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Amendemen UU P2SK tahun 2026. Arah strategis tersebut dijabarkan ke dalam penyempurnaan indikator kinerja yang semakin berorientasi pada dampak dan selaras dengan tugas dan mandat Bank Indonesia. Penyempurnaan tersebut didukung dengan penguatan penyelarasan antara manajemen strategis dan pengelolaan sumber daya guna memastikan keterkaitan arah strategis, program kerja, capaian kinerja, dan alokasi sumber daya memberikan dampak yang semakin nyata bagi masyarakat dan perekonomian. Pengelolaan sumber daya keuangan diarahkan untuk mendukung program kerja secara optimal melalui penguatan efektivitas dan efisiensi dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas dan kepatuhan.

Untuk mendukung implementasi arah strategis tersebut, tata kelola dan fungsi organisasi dilakukan secara *strategy-driven*, dengan memastikan keselarasan antara arah strategis, struktur organisasi, penyempurnaan regulasi, dan kebutuhan sumber daya. Penguatan ini dilakukan secara adaptif terhadap perkembangan lingkungan strategis dan penguatan mandat Bank Indonesia. Penguatan fungsi organisasi antara lain diarahkan untuk terus meningkatkan peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Bank Indonesia dengan orientasi

Gambar 28. Arah Strategis Bank Indonesia



Sumber: Bank Indonesia

pada *impact* bagi masyarakat luas. Selain itu, penguatan fungsi organisasi juga dilakukan sebagai kelanjutan atas penguatan strategi edukasi dan pemberdayaan masyarakat dan lingkungan (EPML), serta modernisasi Pengelolaan Uang Rupiah (PUR). Penguatan ini dilakukan dengan memastikan kejelasan peran, kapasitas fungsi, dan efektivitas proses bisnis untuk meningkatkan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Keseluruhan penguatan tersebut dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip simplifikasi, standardisasi, dan sistemisasi (3S), serta kesinambungan antara organisasi dan proses bisnis. Dengan dukungan kelembagaan yang semakin *agile*, penguatan internal tersebut dapat dikonversi menjadi pelaksanaan tugas dan kebijakan yang semakin efektif, dan pada akhirnya memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat dan perekonomian.

***Kedua*, Bank Indonesia akan terus memperkuat inovasi digital melalui digitalisasi proses bisnis, agar pelaksanaan kebijakan dan kelembagaan semakin efektif dan terintegrasi**. Pada area kebijakan, pengembangan dan modernisasi aplikasi digital diarahkan untuk memperkuat proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan melalui pemanfaatan data granular, AI, dan teknologi digital lainnya. Penguatan tersebut antara lain dilakukan melalui pengembangan *supervisory technology* (Suptech) dan aplikasi pendukung pelaksanaan kebijakan, seperti OM. Selain itu, Bank Indonesia melanjutkan digitalisasi pada area sistem pembayaran serta PUVA. Langkah ini ditempuh agar perumusan dan pelaksanaan kebijakan, termasuk pengawasan, dapat dilakukan secara *timely* dan responsif. Pemanfaatan AI juga terus dikembangkan, antara lain untuk mendukung sistem peringatan dini (*early warning system)* dalam surveilans stabilitas sistem keuangan. Pemanfaatan tersebut mengacu pada prinsip VITAL (*Visualizing the outcomes*, *Theory understood*, *Algorithm fitted*, *dan Learn the meaning*), sehingga hasil analisis AI dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan.

Pada area kelembagaan, digitalisasi diarahkan untuk memperkuat efektivitas proses bisnis dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Efektivitas proses bisnis diperkuat melalui integrasi proses pengambilan keputusan dan *business process re-engineering* secara *end-to-end*. Sementara itu, peningkatan kualitas layanan publik dilakukan antara lain melalui pengembangan aplikasi berbasis *cloud* untuk mendukung UMKM, penguatan Portal Data Bank Indonesia, serta layanan penukaran uang Rupiah yang semakin terintegrasi dan mudah diakses masyarakat. Keseluruhan inovasi digital tersebut juga didukung oleh penguatan ketahanan siber, talenta digital, dan tata kelola dengan mengedepankan prinsip *impactful*, *inclusive*, dan *integrated*, sehingga inovasi dapat berlangsung secara aman, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat maupun organisasi.

***Ketiga*, sejalan dengan semakin kompleksnya tantangan dan tuntutan pelaksanaan mandat Bank Indonesia, penguatan SDM diarahkan untuk memastikan tersedianya SDM yang mampu mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia yang kredibel, berkualitas, dan andal.** Pengembangan SDM akan difokuskan pada penguatan kepemimpinan yang visioner, kompetensi teknis dan substantif, serta kapabilitas baru yang relevan dengan kebutuhan pelaksanaan tugas, antara lain di bidang pengawasan dan inovasi digital, termasuk pemanfaatan AI. Penguatan SDM juga dilakukan melalui peningkatan *Employee Value Proposition* (EVP) untuk meningkatkan *engagement* pegawai, sekaligus mendukung kemampuan Bank Indonesia dalam menarik, mengembangkan, dan mempertahankan talenta terbaik. Sejalan dengan itu, budaya kerja terus diperkuat untuk membangun lingkungan kerja yang mendukung kolaborasi, integritas, pembelajaran dan inovasi. Pengembangan kapabilitas SDM juga dioptimalkan melalui penugasan dan eksposur pada lembaga eksternal untuk memperkaya pengalaman, perspektif, dan *network* pegawai. Keseluruhan penguatan tersebut diarahkan untuk membangun SDM dan kepemimpinan yang adaptif, berintegritas, berakhlak mulia dan berkapabilitas tinggi, sehingga mandat Bank Indonesia dapat dilaksanakan secara efektif, yang pada akhirnya menghasilkan kebijakan dan layanan yang semakin berkualitas dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

VI. Melangkah ke Depan dengan Optimisme dan Kewaspadaan: Sinergi Menuju Indonesia yang Lebih Kuat dan Berdaya Tahan

Sinergi yang berlandaskan semangat persatuan dan kerja keras akan membawa optimisme menuju Indonesia yang lebih kuat dan berdaya tahan. Dengan sinergi yang kuat, kami optimis stabilitas perekonomian ke depan akan terjaga di tengah ketidakpastian global yang tetap tinggi. Melalui sinergi kebijakan ekonomi nasional, kami meyakini daya tahan perekonomian nasional akan semakin kuat dan mendukung ekonomi tumbuh lebih tinggi ke depan. Kami di Bank Indonesia berkomitmen menjalankan tugas sebagaimana amanat Undang-Undang, dengan terus memperkuat sinergi. Bauran Kebijakan Bank Indonesia diperkuat, sehingga menjadi lebih berdampak dan inklusif. Sinergi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dan KSSK akan terus ditingkatkan. Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi yang telah berjalan baik dengan DPR RI khususnya Komisi XI, perbankan, dunia usaha, akademisi, media, dan berbagai pihak. Ke depan, bersama kita terus perkuat sinergi untuk melangkah maju dengan optimisme dan tetap meningkatkan kewaspadaan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberkahi negara, bangsa, dan kita semua.

Sekian, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Jakarta, 27 November 2026

Destry Damayanti
Gubernur Bank Indonesia


BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA